QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2017 - 2022



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2019

BUPATI ACEH BESAR

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2017 – 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelengggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Besar, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2017 – 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan.
9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20(dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten adalah Rencana Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
15. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk Periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rencangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRK.
22. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

23. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
24. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
25. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
26. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya penbangunan daerah secara utuh.
27. Isu-isu strategis adalah kondisi suatu hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
28. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaaan yang diingikan pada akhir periode perencanaan.
29. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
30. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
31. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
32. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
33. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
34. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
35. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

36. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
37. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
38. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kenerja suatu program atau kegiatan.
39. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
40. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
41. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
42. Hasil (outcame) adalah segala suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
43. Musyawarah Perencanan Pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
44. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah;
45. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi /pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
46. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pengembangan daerah untuk Periode 20 (dua Puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

BAB II

RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2017 - 2022

Pasal 2

(1) RPJM Kabupaten Tahun 2017 - 2022 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:

a. visi dan misi Bupati terpilih; dan

b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) RPJM Kabupaten Tahun 2017 - 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2017 - 2022

Pasal 3

(1) Sistematika penyusunan RPJM Kabupaten Tahun 2017 - 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

BAB I	:	Pendahuluan;
BAB II	:	Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III	:	Gambaran Keuangan Daerah;
BAB IV	:	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis;
BAB V	:	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
BAB VI	:	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
BAB VII	:	Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah;
BAB VII	:	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
BAB IX	:	Penutup.

(2) RPJM Kabupaten Tahun 2017 - 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 4

RPJM Kabupaten Tahun 2017 - 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUSI

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kabupaten.

(2) Pengendalian dan Evalusi pelaksanaan RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJM KABUPATEN

Pasal 6

(1) Perubahan RPJM Kabupaten hanya dapat dilakukan apabila :

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau

d. Merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

(2) Perubahan RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun.

(3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJM Kabupaten, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJM Kabupaten tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Bupati terpilih berikutnya.

(3) RPJM Kabupaten dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Agustus 2019 M
29 Dzulhijjah 1440 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Agustus 2019 M
29 Dzulhijjah 1440 H

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ABDULLAH

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH : (2/65/2019)

LAMPIRAN

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2017 – 2022

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN ACEH BESAR

TAHUN 2017-2022

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Dengan menyampaikan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan menempuh berbagai tahapan telah berhasil menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 - 2022.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 - 2022, mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang secara substansial telah memenuhi proses dan tahapan serta ruang lingkup sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan dimaksud.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 Ayat (2), Bappeda Aceh Besar yang ditugaskan untuk menyusun dokumen ini telah melalui tahapan Musrenbang RPJMD sampai dengan Forum Konsultasi Publik.

Selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam pasal 13 ayat (2) RPJMD Kabupaten Aceh Besar ditetapkan dengan peraturan daerah atau nama lain sebagai Qanun untuk Provinsi Aceh.

Dengan telah tersusunnya RPJMD Kabupaten Aceh Besar ini diharapkan akan menjadi pedoman bagi setiap kepala daerah yang memiliki masa tugas dalam jangka 5 tahun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh bantuan yang telah diberikan sampai tersusunnya RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2022. Semoga RPJMD ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan dalam memajukan Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar.

Akhirnya, sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, dokumen ini lebih lanjut dapat diproses dari Rancangan Qanun menjadi Qanun RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BUPATI ACEH BESAR

Ir. MAWARDI ALI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GRAFIK ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-4
1.4 Maksud dan Tujuan I-5
1.5 Sistematika Penulisan I-5

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Lokasi dan Wilayah II-1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah II-7
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana II-10
2.1.4 Demografi II-12
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-15
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-15
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II-20
2.3 Aspek Pelayanan Umum II-25
2.3.1 Urusan Keistimewaan Aceh II-25
2.3.2 Urusan Wajib II-28
2.3.3 Urusan Pilihan II-41
2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-48
2.4.1 Kemampuan Ekonomi II-48
2.4.2 Fasilitas Infrastruktur Darat dan Udara II-51
2.4.3 Penggunaan Lahan II-52

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-2
3.1.2 Neraca Daerah III-7
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-9
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III-10
3.2.1 Analisis Pembiayaan III-11
3.3 Kerangka Pendanaan III-13
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja III-14
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan III-17

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan IV-1
4.2 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022.. IV-10

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1
5.1 Visi V-1
5.2 Misi V-1
5.3 Tujuan dan Sasaran V-3

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-1
8.1 Indikator Kinerja VIII-1
8.2 Indikator Kinerja Daerah VIII-1

BAB IX PENUTUP IX-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah I-5
Gambar 2.1 Peta Administrasi kabupaten Aceh Besar II-1
Gambar 8.1 Alur Penetapan Indikator Kinerja Daerah VIII-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Aceh Besar	II-2
Tabel 2.2	Kondisi Kelerengan Di Kabupaten Aceh Besar	II-3
Tabel 2.3	Keadaan Curah Hujan Rata-rata (mm) dan Hari Hujan Rata-rata Dirinci Menurut Bulan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013-2016	II-4
Tabel 2.4	Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai di Kabupaten Aceh Besar	II-6
Tabel 2.5	Wilayah Potensi Bencana dalam Kabupaten Aceh Besar	II-11
Tabel 2.6	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Besar Menurut Kecamatan Tahun 2012-2016	II-12
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Aceh Besar Menurut Kecamatan Tahun 2013-2016.....	II-13
Tabel 2.8	Persentase Kepadatan Penduduk Berdasarkan Luas Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016	II-14
Tabel 2.9	Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2012-2016	II-16
Tabel 2.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Besar (PDRB ADHK) 2012-2016 (Persen)	II-17
Tabel 2.11	Peranan PDRB Kabupaten Aceh Besar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Persen)	II-18
Tabel 2.12	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh BesarTahun 2012-2016.....	II-19
Tabel 2.13	Indeks Pembangunan Manusia	II-19
Tabel 2.14	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Aceh BesarTahun 2012-2016	II-20
Tabel 2.15	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh BesarTahun 2012-2016	II-20
Tabel 2.16	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten Aceh BesarTahun 2012-2016	II-21
Tabel 2.17	Kasus Penyakit Menular Di Kabupaten Aceh BesarTahun 2012-2016	II-23
Tabel 2.18	Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2016	II-24
Tabel 2.19	Permasalahan Sosial Menurut Jenis Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2016	II-25
Tabel 2.20	Jumlah Pondok Pesantren Modern/Terpadu Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2016	II-26
Tabel 2.21	Jumlah Mesjid yang mendapatkan bantuan Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2016	II-28
Tabel 2.22	Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2016	II-28
Tabel 2.23	Jumlah Sekolah Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2016	II-29
Tabel 2.24	Jumlah Guru dan Murid Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2016.....	II-29
Tabel 2.25	APM dan APK Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2016	II-30
Tabel 2.26	Jumlah Sarana Kesehatan Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2016.....	II-30
Tabel 2.27	Jumlah Tenaga Dokter Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2016.....	II-31
Tabel 2.28	Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2016	II-31

Tabel 2.29	Perkembangan Kondisi Jalan Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2016	II-32
Tabel 2.30	Kondisi Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2016	II-32
Tabel 2.31	Panjang dan Jumlah Jembatan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 -2016	II-33
Tabel 2.32	Indikator Perumahan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 - 2016	II-32
Tabel 2.33	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 - 2016	II-34
Tabel 2.34	Terminal Penumpang Umum di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016	II-35
Tabel 2.35	Jumlah Angkutan Umum di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 - 2016	II-35
Tabel 2.36	Pelabuhan Penyeberangan Umum di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 - 2016	II-36
Tabel 2.37	Timbunan Sampah per Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016	II-36
Tabel 2.38	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP Standar Nasional di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 - 2016	II-37
Tabel 2.39	Jumlah Penduduk yang telah memiliki Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2016	II-38
Tabel 2.40	Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Aceh Besar 2013-2016	II-39
Tabel 2.41	Jumlah Organisasi Sospol, Yayasan, Ormas dan LSM Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 - 2016	II-39
Tabel 2.42	Luas Lahan Baku Sawah (Ha) Di Kabupaten Aceh Besar 2012 - 2016	II-41
Tabel 2.43	Komoditi Unggulan Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 - 2016	II-43
Tabel 2.44	Populasi Ternak di Kabupaten Aceh Besar 2012 - 2016	II-44
Tabel 2.45	Produksi Daging di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 - 2016	II-44
Tabel 2.46	Produksi Hasil Peternakan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016..	II-44
Tabel 2.47	Luas Area Budidaya Perikanan di Kabupaten Aceh Besar 2012 - 2016	II-45
Tabel 2.48	Produksi Perikanan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 - 2016	II-45
Tabel 2.49	Unit Usaha dan Tenaga Kerja Industri Kecil di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015	II-47
Tabel 2.50	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 – 2016	II-48
Tabel 2.51	Pengeluaran per Kapita Sebulan Non Pangan Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 - 2016	II-48
Tabel 2.52	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Besar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2012 - 2016	II-49
Tabel 2.53	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Besar Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahub 2012 - 2016	II-50
Tabel 2.54	Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Aceh Tahun 2012 - 2016	II-50
Tabel 2.55	Jumlah Pesawat dan Arus Penumpang Penerbangan Domestik dan Internasional Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016	II-51
Tabel 2.56	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016	II-52
Tabel 2.57	Luas Kawasan Lindung dan Budidaya Kabupaten Aceh Besar	II-53
Tabel 3.1	Pertumbuhan Rata-Rata Realisasi Pendapatan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 - 2016	III-4

Tabel 3.2	Proporsi Belanja Aparatur Kabupaten Aceh Besar Tahub 2012 – 2016	III-6
Tabel 3.3	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2016	III-8
Tabel 3.4	Balance Sheet Ratio Tahun 2012 – 2017 Pemerintah Aceh	III-9
Tabel 3.5	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 - 2016	III-10
Tabel 3.6	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016	III-10
Tabel 3.7	Realisasi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016	III-12
Tabel 3.8	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 - 2016	III-12
Tabel 3.9	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Dalam Rupiah) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 – 2022	III-16
Tabel 3.10	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah (Dalam Rupiah) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 – 2022	III-19
Tabel 3.11	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah (Dalam Rupiah) Kabupaten Aceh Besar 2018 - 2022	III-21
Tabel 5.1	Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar ...	V-6
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Strategi Kabupaten Aceh Besar Tahub 2017 - 2022	VI-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 - 2022	VI-7
Tabel 6.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2022 Berdasarkan Misi Pembangunan	VI-9
Tabel 6.4	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 - 2022	VI-10
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2022	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 - 2022	VII-3
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2022	VIII-3

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2016 ..... II-15
Grafik 2.2 Pendapatan Dosmetik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2016 ..... II-16
Grafik 2.3 Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2016 ..... II-22
Grafik 2.4 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2016 ..... II-22
Grafik 2.5 Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Kabupaten Aceh Besar II-42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan arah dan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumberdaya daerah yang tersedia. Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar periode 2017-2022 yang dilantik pada tanggal 10 Juli 2017 dan berakhirnya masa pelaksanaan Peraturan Daerah (Qanun) Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2017, maka sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), harus disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Besar guna menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2017-2022.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, penyusunan RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Besar Priode 2005-2025 sebagai dokumen perencanaan induk berdimensi waktu 20 tahunan. Kedudukan RPJMD dalam tahun rencana RPJPD merupakan rencana pembangunan tahap III yang merupakan tahapan finalisasi pembangunan ekonomi sesuai arahan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Aceh Besar 2005-2025 dengan memanfaatkan seluruh aspek pembangunan daerah melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang untuk membentuk struktur perekonomian yang kuat dan kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yang disinkronisasikan dengan RPJM Nasional dan RPJP Nasional. Selain itu, substansi RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 juga dihasilkan dari hasil analisis gambaran umum daerah, perkembangan ekonomi makro dan sosial ekonomi, kondisi keuangan daerah, serta proses pengamatan isu-isu aktual daerah yang mengemuka dalam lima tahun terakhir ini.

RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 dilaksanakan melalui penetapan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022. Disamping menjabarkan lebih lanjut Visi dan Misi Bupati Aceh Besar Masa Bakti 2017-2022, juga berfungsi sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama dalam mempedomani rencana program dan kegiatan lima tahunan daerah yang diimplementasi. RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 juga dilakukan penyesuaian rencana terhadap amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagai sebuah dokumen publik, maka salah satu tahapan proses penyusunan rancangan awal RPJMD ini juga dimusyawarahkan secara partisipatif dengan melibatkan unsur pelaku pembangunan *(stakeholders)* di Kabupaten Aceh Besar. Musyawarah tersebut dilakukan melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD).

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 dijadikan landasan bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Lebih

lanjut, Pasal (4) juga menegaskan bahwa Rancangan Renstra SKPD dijadikan dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menyusun Rancangan RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022.

Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 18 ayat (2), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun Rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan Hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah baik RPJPD, RPJMD, maupun RKPD berpedoman pada peraturan dimaksud. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Qanun) paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar untuk periode 2017-2022 disusun dan diimplementasi dengan bersandar pada paradigma pembangunan berikut :

a. Fokus: Pembangunan diarahkan terpusat (fokus) kepada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat, diimplementasi secara sungguh-sungguh dan terarah serta penuh komitmen dan pada jalur atau arah yang benar *(on the right track).*
b. Sinergis: adanya keterkaitan antar sektor yang saling melengkapi, tidak tumpang tindih dan dengan melalui pendekatan lintas fungsi *(cross functional approach).*
c. Partisipasi Masyarakat: pembangunan dilakukan dengan mengedepankan peran masyarakat secara nyata (partisipatif) dimana masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan pemerintah berperan sebagai fasilitator dan akselerator pembangunan.
d. Mensejahterakan Rakyat: hasil pembangunan yang akan dicapai bermanfaat dan untuk kesejahteraan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RPJMD Kabupaten Aceh Besar Periode 2017-2022 disusun berlandaskan sejumlah peraturan dan perundang-undangan (rujukan), antara lain:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

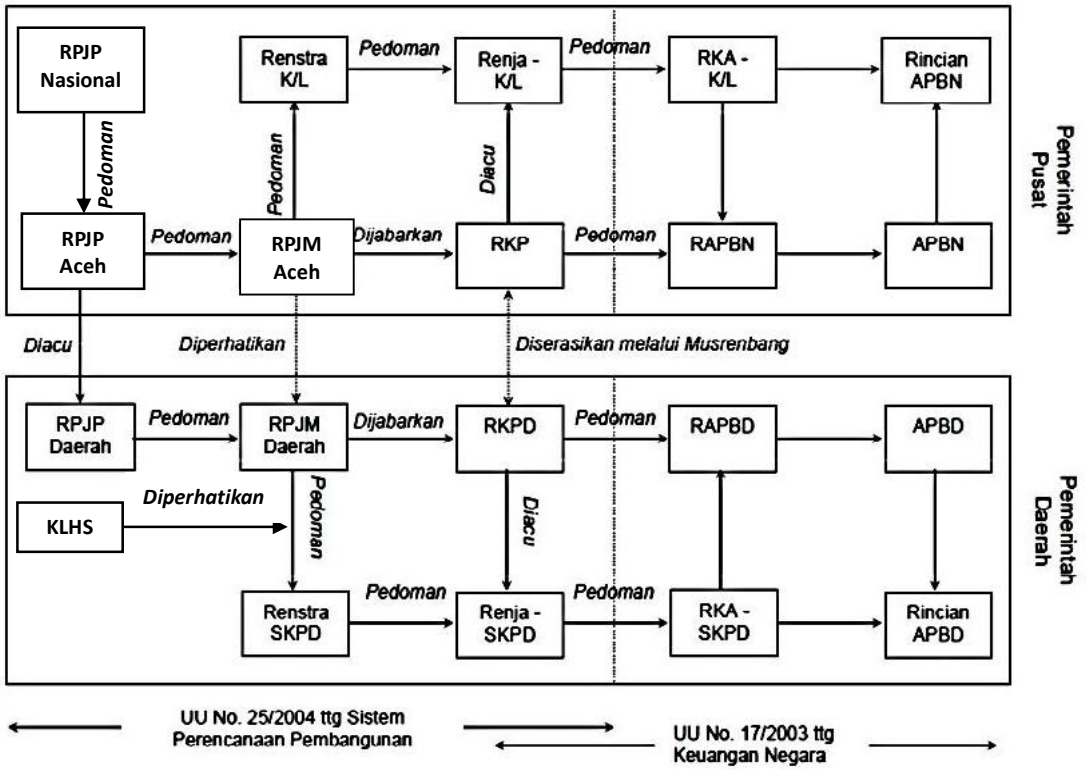
f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
o. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh;
p. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
q. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 4);
r. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4);
s. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005 – 2025; dan
t. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017 – 2022.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 merupakan dokumen yang berkait dan berhubungan dengan dokumen-dokumen lainnya. Kedudukan dan hubungan ini terlahir karena proses penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 ini mengacu dan memperhatikan serangkaian dokumen lainnya, baik dalam skala lokal, regional maupun nasional. Beberapa dokumen perencanaan pembangunan yang dijadikan acuan antara lain :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Besar berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro yang berjangka dua puluh tahun dan memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah;
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi Aceh sebagai pedoman dalam mencermati Visi, Misi, dan Gambaran Umum Kondisi Nasional dan Daerah Aceh, baik kondisi kekinian dan kondisi ideal, maupun dinamika lingkungan internal dan eksternal, termasuk arah kebijakan dan strategi serta indikasi rencana program lima tahunan dan sumber pembiayaannya (APBN, Luar Negeri, dan sumber lainnya);
c. RPJMD Kabupaten Aceh Besar terintegrasi dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai bentuk pertimbangan untuk merumuskan isu-isu strategis dan menetapkan program-program pembangunan daerah melalui arah kebijakan, rencana, dan program (KRP) yang termuat di dalam KLHS tersebut;
d. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional pada setiap unit kerja daerah. Dokumen Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program menurut kewenangan dan atau fungsi pemerintahan.

Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah



1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan komprehensif selama lima tahun yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra SKPD dan RKPD.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 adalah untuk :

a. Menetapkan strategi, arah dan kebijakan umum pembangunan daerah;
b. Merumuskan program pembangunan daerah selama lima tahun untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD;
c. Sebagai payung hukum program dan indikasi kegiatan; dan
d. Sebagai indikator proses pengawasan dan evaluasi kinerja.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Kabupaten Aceh Besar Priode 2017-2022.

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menguraikan mengenai Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, serta Aspek Daya Saing Daerah.

BAB III : Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini berisi tentang Kinerja Keuangan periode 2012-2017, Kebijakan Pengelolaan Keuangan periode 2017-2022, serta Kerangka Pendanaan.

BAB IV : Permasalahan dan Isu-isu Srategis Daerah

Bab ini berisi permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Agama, Ketertinggalan, Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Tingkat Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat, Penataan Ruang, Pengelolaan Sumberdaya dan Pelestarian Lingkungan, serta Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022.

BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menguraikan mengenai strategi yang dipilih dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 yang dilengkapi dengan program pembangunan daerah.

BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini berisi tentang Indikator Kinerja yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX : Penutup

Bab ini berisikan penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Analisis gambaran umum kondisi daerah menunjukkan sejauh mana tingkat keberhasilan pembangunan Kabupaten Aceh Besar selama periode 2017-2022. Dengan gambaran ini dapat diformulasi kebijakan pembangunan daerah untuk mengoptimalkan capaian keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan (Periode 2017-2022).

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Aceh Besar terletak pada garis 5°3'1,2" - 5°45'9,007" Lintang Utara dan 95°55'43,6" - 94°59'50,13" Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Aceh Besar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

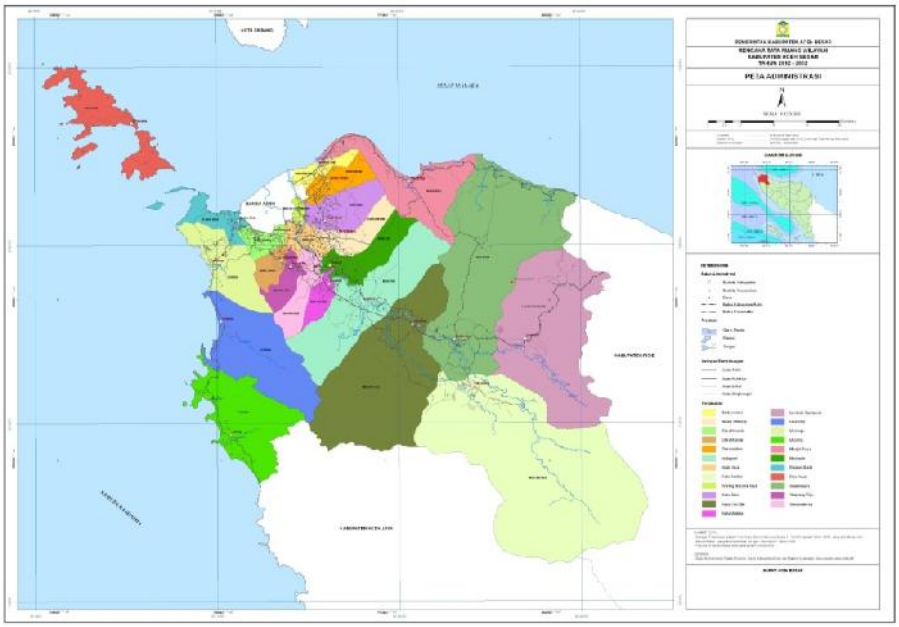
Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka, dan Kota Banda Aceh;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Pidie; dan

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Hindia.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Aceh Besar



Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032

Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.903,50 km^2. Sebagian besar merupakan wilayah daratan, dan hanya sebagian kecil berupa kepulauan. Berdasarkan posisi letak, sekitar 10% wilayah gampong merupakan daerah pesisir.

Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim, dan 604 Gampong/Desa. Wilayah kecamatan yang paling luas adalah Seulimeum yang meliputi 404,35 km^2 atau lebih dari 13,93 persen dari luas wilayah Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan dengan wilayah paling kecil adalah Krueng Barona Jaya, luasnya 6,96 Km^2 atau hanya 0,24 persen dari luas Kabupaten Aceh Besar.

Jarak antara pusat-pusat kecamatan dengan pusat kabupaten sangat bervariasi. Kecamatan Lhoong merupakan daerah yang paling jauh berjarak 106 Km dengan pusat Ibukota Kabupaten (Kota Jantho).

Kabupaten Aceh Besar juga memiliki areal berupa Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan lindung memiliki luas 103.822,02 Ha, terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya 69.624,17 Ha, kawasan perlindungan setempat pantai 2.392,36 Ha, kawasan perlindungan sempadan sungai 4.768 Ha, kawasan sekitar waduk 27,64 Ha, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya 25.507,41 Ha. Hutan Lindung merupakan areal terluas, yaitu mencapai 69.624,17 Ha. yang tersebar di beberapa kecamatan. Disusul Taman Wisata Alam (TWA) pinus Aceh yang berlokasi di Kecamatan Kota Jantho seluas 2.556,02 Ha dan TWA Kuta Malaka seluas 1.544,08 Ha serta Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan seluas 6.122,85 Ha. Sedangkan Kawasan Budidaya yang merupakan Hutan Produksi Tetap seluas 67.998,71 Ha, Hutan Produksi Konversi seluas 4.368,52 Ha dan Areal Penggunaan Lainnya (APL) seluas 1.866,95 Ha.

Dari keseluruhan luas lahan yang ada, sekitar 136.519,80 Ha merupakan kawasan rawan bencana berupa kawasan rawan erosi, banjir, tanah longsor, gunung berapi, dan rawan tsunami yang dijelaskan lebih rinci pada tabel 2.5 tentang wilayah potensi bencana. Profil Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan
di Kabupaten Aceh Besar

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km^2)	Persentase (%)
1.	Lhoong	Lhoong	149,03	5,13
2.	Lhoknga	Lhoknga	87,95	3,03
3.	Leupung	Leupung	169,15	5,83
4.	Indrapuri	Indrapuri	197,04	6,79
5.	Kuta Cot Glie	Lampakuk	332,25	11,44
6.	Seulimeum	Seulimeum	404,35	13,93
7.	Kota Jantho	Kota Jantho	593,00	20,42
8.	Lembah Seulawah	Lamtamot	319,60	11,01
9.	Mesjid Raya	Krueng Raya	129,93	4,47
10.	Darussalam	Lambaro Angan	38,43	1,32
11.	Baitussalam	Lambada Lhok	20,84	0,72
12.	Kuta Baro	Peukan Ateuk	61,07	2,10
13.	Montasik	Montasik	59,73	2,06
14.	Ingin Jaya	Lambaro	24,34	0,84
15.	Krueng Barona Jaya	Cot Iri	6,96	0,24
16.	Sukamakmur	Sibreh	43,45	1,50
17.	Kuta Malaka	Samahani	22,82	0,79

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km^2)	Persentase (%)
18.	Simpang Tiga	Krueng Mak	27,59	0,95
19.	Darul Imarah	Lampeuneurut	24,35	0,84
20.	Darul Kamal	Peukan Biluy	23,04	0,79
21.	Peukan Bada	Peukan Bada	36,25	1,25
22.	Pulo Aceh	Lampuyang	90,56	3,12
23.	Blang Bintang	Cot Meuraja	41,76	1,44
Jumlah			**2.903,49**	**100,00**

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032

2. Topografi

Topografi Kabupaten Aceh Besar relatif beragam, yakni dataran rendah (<2%), berombak (2-8 %), bergelombang (9-15 %), berbukit-bukit (16-40 %), dan bergunung (>41 %), dan sebagiannya wilayah kepulauan. Daerah dataran umumnya terdapat di wilayah Pesisir Timur dan Utara serta Pesisir Barat. Keadaan lereng sangat bervariasi, dari bentuk dataran sampai curam. Kabupaten Aceh Besar memiliki klasifikasi kelerengan yang terbagi atas kelas kelerengan yaitu : < 2%, 2-8%, 9-15%, 16-25%, 26-40%, 41-60% dan >60%. Berdasarkan gambaran klasifikasi kelerengan tersebut, tampak didominasi oleh lahan berkelerengan <60% dengan luasan yang mencapai 118.888,57 Ha atau sebesar 40,81% dari total luas wilayah kabupaten yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Kondisi Kelerengan
di Kabupaten Aceh Besar

No	Klasifikasi Kelerengan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	< 2%	30.103,15	10,37
2	2 – 8%	3.957,47	1,36
3	9 – 15%	13.362,51	4,60
4	16 – 25%	17.485,60	6,02
5	26 – 40%	4.205,89	1,45
6	41 – 60%	102.715,45	35,38
7	> 60%	118.520,72	40,82
Jumlah		290.350,79	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032

3. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Aceh Besar beriklim tropis karena letaknya dekat dengan garis khatulistiwa dan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau pada bulan April sampai dengan September. Suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C - 28°C. Keadaan curah hujan di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.3
Keadaan Curah Hujan Rata-rata (mm) dan Hari Hujan Rata-rata
Dirinci Menurut Bulan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013-2016

No.	Bulan	Keadaan Hujan 2013		Keadaan Hujan 2014		Keadaan Hujan 2015		Keadaan Hujan 2016	
		Curah Hujan (milimeter)	Hari Hujan	Curah Hujan (milimeter)	Hari Hujan	Curah Hujan (milimeter)	Hari Hujan	Curah Hujan (milimeter)	Hari Hujan
1.	Januari	283,3	16	142,5	8	81,6	13	325,5	15
2.	Pebruari	136,1	15	87,6	5	20,2	5	160	11
3.	Maret	89,7	8	7,0	4	124,0	8	92,8	6
4.	April	106,2	12	112,0	11	354,9	18	51,0	8
5.	Mei	131,1	13	78,0	11	47,9	6	241	19
6.	Juni	167,2	13	69,3	10	43,5	5	66,0	14
7.	Juli	83,8	9	33,1	10	84,0	19	74,8	10
8.	Agustus	40,4	11	133,5	10	56,1	10	357,7	18
9.	September	164,6	7	141,1	15	184,5	16	66,1	20
10.	Oktober	56,6	11	466,5	21	220,9	16	359,5	18
11.	November	149,8	16	510,7	17	24,6	22	487,4	23
12.	Desember	214,8	20	483,1	20	141,4	12	227,2	21

Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 – 2017

4. Geologi

Indonesia terletak diantara pertemuan 4 lempeng bumi besar, yaitu: Lempeng Hindia dan Australia, Lempeng Eurasia, serta Lempeng Pacific. Lempeng Hindia dan Australia bergerak ke utara menumbuk Lempeng Eurasia dengan kecepatan 50 – 70 mm/ tahun. Lempeng Eurasia bergerak sangat lambat ke arah tenggara dengan kecepatan sekitar 0,4 cm/tahun. Zona tumbukan dua lempeng ini adalah di sepanjang palung laut Sumatra – Jawa – Bali – Lombok. Lempeng Pasific bergerak dengan kecepatan 120 mm/ tahun kearah barat-barat daya menabrak tepian utara dari Pulau Papua New Guinea – Irian Jaya, dan terus ke arah barat sampai ke daerah tepian timur Sulawesi.

Pulau Sumatera merupakan bagian tepi barat daya-selatan dari lempeng benua Eurasia yang berinteraksi dengan lempeng Samudera Hindia-Australia. Gerakan lempeng tersebut telah menghasilkan bentuk-bentuk gabungan penunjaman (subduction) dan sesar mendatar dekstral.

Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif Sesar Semangko yang memanjang dari Banda Aceh hingga Lampung. Patahan ini bergesar sekitar 11 cm per tahun dan merupakan daerah rawan gempa dan longsor. Berdasarkan struktur geologi Sumatera, daerah bagian barat mulai dari daerah sekitar Teluk Semangka (Lampung) sepanjang Pegunungan Bukit Barisan ke arah Barat Laut dan Utara sampai ke Aceh, merupakan daerah labil atau rawan gempa dan di duga dapat menimbulkan gempa-gempa tektonik yang cukup membahayakan. Pada jalur tersebut dijumpai banyak patahan-patahan. Salah satu diantaranya yang dapat dilihat di kabupaten Aceh Besar adalah patahan turun (slenk) lembah Krueng Aceh, yang secara fisik (struktural), menandakan bahwa wilayah ini mungkin belum sepenuhnya stabil, sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi gempa. Struktur geologi ini berkelanjutan ke dasar laut dan di ujung yang lain terlihat sampai ke Kota Jantho.

Penunjaman yang terjadi di bawah Pulau Sumatera juga mengakibatkan terbentuknya jalur busur magma yaitu Pegunungan Bukit Barisan. Penunjaman yang terbentuk secara berkala telah dilepaskan melalui sesar transform yang sejajar dengan tepian lempeng dan terpusat di sepanjang Sistem Sesar Sumatera yang membentang sepanjang Sumatera. Sistem Sesar Sumatera (Sumatera Fault System) yang berarah Barat Laut-Tenggara, membentang mulai dari Pulau Weh di Aceh sampai Teluk Semangko di Lampung. Sistem Sesar Sumatera ini paling sedikit tersusun oleh 8 segmen sesar berarah orientasi Barat Laut-Tenggara dengan pergerakan yang menganan (dextral). Patahan Lokop - Kutacane, Patahan Blangkejeren - Mamas, Patahan Kla - Alas, Patahan Reunget - Blangkeujeren, Patahan Anu - Batee, Patahan Samalanga - Sipopoh, Patahan Banda Aceh - Anu, Patahan Lamteuba – Baro.

Berdasarkan struktur geologi, bahan induk tanah di wilayah kabupaten Aceh Besar cukup bervariasi, mulai dari yang bersifat masam sampai basa. Bahan induk tersebut terdiri dari bahan endapan, batuan sedimen, batu kapur, batu vulkanis (gunung api), bahan metamorf (malihan) dan batuan beku dalam (intrusi). Menurut umurnya, batuan-batuan tersebut terbentuk pada zaman Pra-tersier, Tersier dan zaman Kuarter..

5. Hidrologi

Kondisi hidrologi air permukaan dan air tanah di Kabupaten Aceh Besar mempunyai peranan yang cukup penting dalam mendukung pengembangan wilayah. Hidrologi ini terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Air Permukaan

Potensi sumber daya air di wilayah Kabupaten Aceh Besar relatif cukup memadai dikarenakan terdapat sejumlah aliran sungai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai di Kabupaten Aceh Besar dibagi 2 (dua) yaitu :

a) Wilayah Sungai Aceh-Meureudu yang merupakan wilayah sungai strategis nasional, dengan luas total 274.858,70 ha dan terdiri dari DAS Krueng Raya, DAS Krueng Lambok, DAS Krueng Imasin, DAS Krueng Lampanah, DAS Krueng Areu, DAS Krueng Leungah, DAS Krueng Babeue, DAS Krueng Laweueng, DAS Krueng Batee, DAS Krueng Seuleunggoh, DAS Krueng Aceh, DAS Krueng Baro, DAS Krueng Lamih, DAS Krueng Pincung, DAS Krueng Geupe, DAS Krueng Reundrah, DAS Krueng Sibayang, DAS Krueng Same, DAS Krueng Teunom, dan DAS Krueng Sotoy;

b) Wilayah Sungai Teunom-Lambeuso yang merupakan wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan total luas 15.492,07 Ha, dan terdiri dari DAS Teunom, DAS Geunteut, DAS Tunong, DAS Lambeuso, dan DAS Bentaro.

Potensi sumber daya air berdasarkan wilayah sungai yang ada di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai
di Kabupaten Aceh Besar

No	Wilayah Sungai / DAS	Luas (Ha)
Wilayah Sungai Aceh - Meureudu		**274.858,70**
1	DAS Krueng Aceh	172.328,07
2	DAS Krueng Batee	4.216,31
3	DAS Krueng Laweung	2.007,38
4	DAS Krueng Babeue	5.051,20
5	DAS Krueng Areu	11.576,86
6	DAS Krueng Leungah	4.898,18
7	DAS Krueng Raya	10.090,18
8	DAS Krueng Lampanah	3.521,77
9	DAS Krueng Lambok	3.821,35
10	DAS Krueng Seuleunggoh	17,60
11	DAS Krueng Teunom	461,61
12	DAS Krueng Baro	3.287,60
13	DAS Krueng Lamih	2.808,23
14	DAS Krueng Pincung	11.058,98
15	DAS Krueng Geupe	18.106,04
16	DAS Krueng Reundrah	3.076,87
18	DAS Krueng Sibayang	9.777,14
19	DAS Krueng Same	2.735,16
20	DAS Krueng Sotoy	2.782,08
Wilayah Sungai Teunom - Lambeuso		15.492,07
1	DAS Krueng Teunom	4.573,69
2	DAS Krueng Geunteut	2.173,87
3	DAS Krueng Tunong	422,64
4	DAS Krueng Lambeuso	1.027,11
5	DAS Krueng Bentaro	7.294,27

Sumber : RTRWK Aceh Besar, 2012 – 2032

Krueng Aceh memisahkan kompleks volkan dan teras marin dengan kompleks pegunungan/perbukitan kapur yang mengalir ke arah barat sampai ke daerah sekitar Banda Aceh yang berupa dataran, teras marin, dataran aluvial dan dataran marin.

Disamping sungai, terdapat pula waduk dan embung yang merupakan fasilitas pendukung bangunan pengelolaan sumber daya air. Waduk yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar adalah Waduk Keliling seluas 259,95 Ha yang berada di Gampong Bak Sukon di Kecamatan Kuta Cotglie dan Waduk Seulimeum yang berada di Gampong Alue Gintung di Kecamatan Seulimeum.

2) Air Bawah Tanah

Air bawah tanah merupakan sumber daya alam yang terbarukan (renewal natural resources), dan memainkan peranan penting di dalam penyediaan pasokan kebutuhan air bagi berbagai keperluan. Mengingat peranan air bawah tanah yang semakin vital, maka pemanfaatan air bawah tanah harus juga memperhatikan keseimbangan dan pelestarian sumber daya itu sendiri. Dalam UU Sumber Daya Air daerah aliran air tanah disebut Cekungan Air Tanah (CAT) atau groundwater basin. Definisi CAT adalah suatu wilayah

yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Dengan mengacu kepada Atlas Cekungan Air Tanah Indonesia yang diterbitkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2009, pada halaman lembar Aceh, dapat diidentifikasikan ada 1 (satu) Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Aceh Besar dengan luasan mencapai sekitar 125.200 Ha, yaitu jumlah Imbuhan Air Tanah bebas sebesar 375 juta m^3/tahun dan jumlah AirTertekan sebesar 72 juta m^3/tahun.

Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud di atas meliputi :

1. Kecamatan Peukan Bada seluas 309 Ha;
2. Kecamatan Darul Imarah seluas 1.228 Ha;
3. Kecamatan Ingin Jaya seluas 2.442 Ha;
4. Kecamatan Krueng Barona Jaya seluas 698,50 Ha;
5. Kecamatan Darul Kamal seluas 223,70 Ha;
6. Kecamatan Simpang Tiga seluas 402,80 Ha;
7. Kecamatan Sukamakmur seluas 1.333 Ha;
8. Kecamatan Kuta Malaka seluas 561,65 Ha;
9. Kecamatan Indrapuri seluas 12.330 Ha;
10. Kecamatan Montasik seluas 5.993 Ha;
11. Kecamatan Blang Bintang seluas 4.189 Ha;
12. Kecamatan Kuta Baro seluas 6.128 Ha;
13. Kecamatan Darussalam seluas 3.856 Ha;
14. Kecamatan Baitussalam seluas 2.005 Ha;
15. Kecamatan Mesjid Raya seluas 12.820 Ha;
16. Kecamatan Seulimeum seluas 38.790 Ha;
17. Kecamatan Lembah Seulawah seluas 14.110 Ha;
18. Kecamatan Kuta Cotglie seluas 12.020 Ha; dan
19. Kecamatan Kota Jantho seluas 5.725 Ha.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kabupaten Aceh Besar sepenuhnya mengacu pada RTRW Nasional, RTRW Pulau Sumatera, RTRW Provinsi Aceh, dan RTRW Kabupaten Aceh Besar. Pola pemanfaatan ruang di kabupaten ini mencakup pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya. Sebagian besar wilayah di sebelah selatan sepanjang perbatasan Kabupaten Aceh Jaya dan sebelah timur perbatasan Kabupaten Pidie menjadi kawasan lindung karena memiliki hutan yang cukup lebat, topografi dan elevasi yang curam serta didukung curah hujan yang tinggi.

Beberapa wilayah juga berpotensi dikembangkan menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP), dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), antara lain KSN KIA, KSP Ulu Masen, dan KSP Gunung Seulawah serta KSK Agrowisata Saree. Kemudian pada tahun 2016 Kecamatan Pulo Aceh dan Kecamatan Lhoong telah ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Negara.

a. Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkhi memiliki hubungan fungsional. Pola struktur ruang terbagi menjadi sistim pusat kegiatan dan jaringan prasarana wilayah. Sistim Pusat Kegiatan terdiri atas Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp).

Sistim jaringan prasarana wilayah kabupaten terdiri atas sistim jaringan prasarana utama dan sistim jaringan prasarana lainnya.

b. Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Sistim pusat kegiatan yang membentuk pola struktur ruang di Kabupaten Aceh Besar selain berdasarkan analisa kondisi eksisting (kekinian) perkotaan juga mengacu pada struktur ruang yang lebih makro, yakni pola struktur wilayah Provinsi Aceh. Pola struktur ruang yang dibentuk berdasarkan sistem pusat kegiatan dan pusat pelayanan di Kabupaten Aceh Besar adalah:

1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan di Kota Jantho, yang fungsinya melayani pusat-pusat pelayanan lainnya, khususnya untuk pelayanan Pemerintahan. Hingga tahun 2017 Kota Jantho sebagai pusat Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, masih dihadapkan beberapa masalah. Hal ini disebabkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat karena posisi PKL yang terlalu jauh dengan sistim pelayanan dan permukiman masyarakat. Meskipun banyak upaya telah dilakukan, seperti pemberian sejumlah kewenangan tertentu kepada pemerintahan kecamatan, tetapi dirasakan masih belum efektif. Dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan serta memperpendek rentang kendali *(span of control),* telah diwacanakan untuk memekarkan dan memindahkan ibu kota kabupaten.

Mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022, yaitu “Terwujudnya Aceh Besar yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat dalam Syariat Islam”, maka wacana dan inisiatif memindahkan ibukota kabupaten semata-mata ditujukan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus untuk mengefektifkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan memperpendek rentang kendali dalam pelayanan dan koordinasi pembangunan. Hal ini dinilai lebih urgen dibanding wacana pemekaran wilayah kabupaten.

2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

PPK adalah pusat pelayanan yang berfungsi dalam pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta transportasi, dengan skala pelayanan beberapa kecamatan. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di wilayah Kabupaten Aceh Besar ditetapkan di :

a) PPK Lhoknga di Kecamatan Lhoknga;
b) PPK Lambaro Angan di Kecamatan Darussalam;
c) PPK Lampuyang di Kecamatan Pulo Aceh;

d) PPK Indrapuri di Kecamatan Indrapuri;
e) PPK Seulimeum di Kecamatan Seulimeum;
f) PPK Lambaro di Kecamatan Ingin Jaya; dan
g) PPK Sibreh di Kecamatan Suka Makmur.

3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

PPL adalah pusat pelayanan yang berfungsi dalam pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta transportasi, dengan skala pelayanan tingkat kecamatan. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di wilayah Kabupaten Aceh Besar ditetapkan di :

a) PPL Lamtamot di Kecamatan Lembah Seulawah;
b) PPL Krueng Raya di Kecamatan Mesjid Raya;
c) PPL Blang Bintang di Kecamatan Blang Bintang;
d) PPL Lampeuneurut di Kecamatan Darul Imarah;
e) PPL Lhoong di Kecamatan Lhoong;
f) PPL Peukan Bada di Kecamatan Peukan Bada;
g) PPL Peukan Biluy di Kecamatan Darul Kamal;
h) PPL Cot Iri di Kecamatan Krueng Barona Jaya;
i) PPL Peukan Lam Ateuk di Kecamatan Kuta Baro;
j) PPL Kajhu di Kecamatan Baitussalam;
k) PPL Leupung di Kecamatan Leupung;
l) PPL Lampakuk di Kecamatan Kuta Cot Glie;
m) PPL Montasik di Kecamatan Montasik;
n) PPL Sibreh di Kecamatan Sukamakmur; dan
o) PPL Krung Mak di Kecamatan Simpang Tiga.

Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan sebagai perwujudan struktur ruang, meliputi :

a) Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Indrapuri, PPL Lhoong, PPL Lampakuk dan PPL Lamtamot;

b) Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan, dilakukan dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Seulimeum, PPL Krueng Raya, dan PPL Lamtamot;

c) Mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan, dilakukan di PPK Lhoknga, PPK Seulimeum, PPK Lampuyang, PPL Krueng Raya, PPL Kajhu, PPL Lhoong, dan PPL Leupung;

d) Mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu, dilakukan di PPK Lhoknga, PPK Indrapuri, PPK Seulimeum, PPL Krueng Raya, PPL Lhoong, dan PPL Lampakuk;

e) Mengembangkan PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan, dilakukan di PKLp Samahani, PPK

Indrapuri, PPK Seulimeum, PPL Lampeuneurut, PPL Blang Bintang, PPL Lampakuk, PPL Lamtamot, PPL Montasik, dan PPL Sibreh;

f) Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Indrapuri, dan PPL Lamtamot;

g) Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan dan pameran, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Indrapuri, PPK Seulimeum, PPL Krueng Raya, PPL Peukan Bada, PPL Leupung, PPL Lampakuk, PPL Lamtamot, dan PPL Sibreh;

h) Mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Lambaro Angan, PPK Seulimeum, PPK Lambaro dan PPK Indrapuri, PPL Krueng Raya, PPL Lampeuneurut, PPL Blang Bintang, PPL Peukan Lam Ateuk, PPL Peukan Biluy, PPL Cot Iri, PPL Lhoong, PPL Lampakuk, PPL Montasik, PPL Krung Mak, dan PPL Sibreh;

i) Mengendalikan perkembangan PKL, PKLp, PPK, dan PPL di kawasan rawan bencana, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Lhoknga, PPK Lambaro, PPK Darussalam, PPK Indrapuri, PPK Seulimeum, PPK Lampuyang, PPL Krueng Raya, PPL Lampeuneurut dan PPL Blang Bintang;

j) Mengembangkan PKL, PKLp, PPK, dan PPL berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir dan pegunungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Lhoknga, PPK Lambaro Angan, PPK Lambaro, PPK Indrapuri, PPK Lampuyang dan PPK Seulimeum, PPL Peukan Bada, PPL Darul Imarah, PPL Blang Bintang, PPL Peukan Biluy, PPL Mesjid Raya, PPL Kajhu, PPL Cot Iri, PPL Peukan Lam Ateuk, PPL Leupung, PPL Lampakuk, PPL Lamtamot, PPL Montasik, PPL Sibreh, dan PPL Krung Mak.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

a. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di wilayah Kabupaten Aceh Besar sebagian besar berupa bencana geologi, yaitu gempa bumi, tanah longsor, dan banjir serta tsunami. Wilayah bahaya bencana alam dimaksudkan adalah sebagai berikut :

a) Wilayah bencana tanah longsor seluas 16.509 Ha berupa fisiografi pegunungan dengan lereng 25-40% sampai dengan > 40% dan mempunyai sifat fisik batuan mudah lepas. Kawasan ini meliputi wilayah Kecamatan Kuta Cot Glie bagian selatan, Kota Jantho, dan Kuta Malaka.

b) Wilayah bencana erosi tanah di wilayah pegunungan terjal dengan vegetasi jarang dan batu di permukaan seluas 27.109,8 Ha. Wilayah ini menyebar di Kecamatan Seulimeum, Mesjid Raya, dan Lembah Seulawah.

c) Wilayah bencana banjir di samping DAS Krueng Aceh bagian hilir seluas 11.434,7 Ha, meliputi Kecamatan Ingin Jaya, Montasik, Darul Imarah, dan Kuta Malaka.

d) Wilayah bencana gunung berapi berupa bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi aktif seperti lahar panas, material batu, lahar dingin, abu dan sebagainya. Gunung berapi aktif dimaksudkan adalah Gunung Seulawah. Wilayah dalam kategori bahaya I, II, dan III letusan Gunung Berapi Seulawah seluas 65.044 Ha, meliputi Kecamatan Seulimeum, Mesjid Raya dan Lembah Seulawah.

e) Wilayah bahaya tsunami meliputi kawasan pesisir radius 5 km dari garis pantai dengan ketinggian dibawah 50 meter dari permukaan laut (seluas 16.422 Ha). Wilayah dengan mempunyai ancaman bahaya tsunami cukup luas adalah Kecamatan Peukan Bada, Baitusalam, Mesjid Raya, Lhoknga, Pulo Aceh, Lhoong, dan Leupung.

Kawasan rawan bencana tersebar dan menyatu pada kawasan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Total luas wilayah yang termasuk rawan bencana sebesar 133.791,8 Ha atau 45% dari luas wilayah Kabupaten. Beberapa kawasan di wilayah Aceh Besar memiliki keterbatasan untuk dikembangkan akibat wilayahnya tinggi ancaman erosi, abrasi, dan daerah genangan.

Tabel 2.5
Wilayah Potensi Bencana dalam Kabupaten Aceh Besar

No	Kecamatan	Potensi Jenis Bencana
1	Lembah Seulawah	Gempa bumi, gunung berapi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan kecelakaan lain.
2	Seulimeum	Gempa, gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran dan kecelakaan lain.
3	Kota Jantho	Gempa bumi, tanah lonsor, kebakaran, kekeringan, dan kecelakaan lain.
4	Kuta Cot Glie	Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, dan kecelakaan lain.
5	Indrapuri	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan kecelakaan lain.
6	Sukamakmur	Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, kebakaran dan kecelakaan lain.
7	Montasik	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan kecelakaan lain.
8	Ingin Jaya	Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, kebakaran, dan kecelakaan lain.
9	Kuta Baro	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, dan kecelakaan lain.
10	Darussalam	Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, arus tsunami kebakaran dan kecelakaan lain.
11	Kuta Malaka	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan kecelakaan lain.
12	Simpang Tiga	Gempa Bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, kebakaran dan kecelakaan lain.
13	Darul Kamal	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan kecelakaan lain.

No	Kecamatan	Potensi Jenis Bencana
14	Darul Imarah	Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, arus tsunami, kebakaran dan kecelakaan lain.
15	Baitussalam	Gempa bumi, banjir genangan, tanah longsor, hama tanaman, pasang purnama, gelombang tsunami, kebakaran, kekeringan, dan kecelakaan lain.
16	Pulo Aceh	Gempa bumi, pasang purnama, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran dan kecelakaan lain.
17	Peukan Bada	Gempa bumi, banjir genangan, pasang purnama, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran, dan kecelakaan lain.
18	Lhoknga	Gempa bumi, banjir genangan, pasang purnama, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran, dan kecelakaan lain.
19	Leupung	Gempa bumi, pasang purnama, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran, dan kecelakaan lain.
20	Lhoong	Gempa bumi, banjir, pasang purnama, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran, dan kecelakaan lain.
21	Blang Bintang	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, hama tanaman, dan kecelakaan lain.

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032

2.1.4 Demografi

Hingga tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar meningkat menjadi 400.913 jiwa. Penduduk kabupaten ini pernah berkurang secara drastis akibat tragedi bencana tsunami tanggal 26 Desember 2004 lalu. Pada tahun 2005, penduduk Aceh Besar tinggal 263.403 jiwa, dari sebanyak 301.746 jiwa (kondisi tahun 2004). Perkembangan penduduk di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2012 sampai 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Besar
Menurut Kecamatan Tahun 2012 - 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					
		Luas (Km2)	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Lhoong	149,02	9.592	9.904	9.933	10.139	10.354
2.	Lhoknga	87,94	15.659	16.168	16.216	16.552	16.904
3.	Leupung	169,15	2.703	2.791	2.800	2.858	2.919
4.	Indrapuri	197,03	21.020	21.703	21.768	22.218	22.689
5.	Kuta Cot Glie	332,25	13.040	13.463	13.503	13.783	14.075
6.	Seulimeum	404,35	22.806	23.546	23.616	24.106	24.618
7.	Kota Jantho	593,00	8.923	9.212	9.239	9.431	9.631
8.	Lembah Seulawah	319,60	11.346	11.714	11.748	11.992	12.246
9.	Mesjid Raya	129,93	22.033	22.749	22.817	23.290	23.785
10.	Darusalam	38,43	23.950	24.729	24.803	25.316	25.853
11.	Baitussalam	20,84	17.491	18.058	18.110	18.486	18.878

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					
		Luas (Km2)	2012	2013	2014	2015	2016
12.	Kuta Baro	61,07	24.823	25.630	25.708	26.239	26.796
13.	Montasik	59,73	18.695	19.303	19.361	19.762	20.181
14.	Ingin Jaya	24,33	29.628	30.591	30.683	31.318	31.986
15.	Kr. Barona Jaya	6,96	14.931	15.416	15.462	15.782	16.116
16.	Sukamakmur	43,45	14.634	15.109	15.154	15.468	15.796
17.	Kuta Malaka	22,81	6.222	6.424	6.443	6.576	6.716
18.	Simpang Tiga	27,59	5.609	5.791	5.808	5.928	6.053
19.	Darul Imarah	24,34	49.264	50.865	51.017	52.073	53.177
20.	Darul Kamal	23,04	7.145	7.377	7.399	7.553	7.713
21.	Peukan Bada	36,25	16.483	17.018	17.068	17.422	17.792
22.	Pulo Aceh	90,55	3.999	4.129	4.140	4.225	4.315
23.	Blang Bintang	41,75	11.416	11.787	11.822	12.067	12.323
Jumlah		**2.903,50**	**371.412**	**383.477**	**384.618**	**392.584**	**400.913**

Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2013 – 2017

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Aceh Besar
Menurut Kecamatan Tahun 2013 - 2016

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan (%)			
		2013	2014	2015	2016
1.	Lhoong	3,15	3,43	5,40	7,36
2.	Lhoknga	3,15	3,43	5,40	7,37
3.	Leupung	3,15	3,46	5,42	7,40
4.	Indrapuri	3,15	3,44	5,39	7,36
5.	Kuta Cot Glie	3,14	3,43	5,39	7,35
6.	Seulimeum	3,14	3,43	5,39	7,36
7.	Kota Jantho	3,14	3,42	5,39	7,35
8.	Lembah Seulawah	3,14	3,42	5,39	7,35
9.	Mesjid Raya	3,15	3,44	5,40	7,37
10.	Darusalam	3,15	3,44	5,40	7,36
11.	Baitussalam	3,14	3,42	5,38	7,35
12.	Kuta Baro	3,15	3,44	5,40	7,36
13.	Montasik	3,15	3,44	5,40	7,36
14.	Ingin Jaya	3,15	3,44	5,40	7,37
15.	Krueng Barona Jaya	3,15	3,43	5,39	7,35
16.	Sukamakmur	3,14	3,43	5,39	7,36
17.	Kuta Malaka	3,14	3,43	5,38	7,36
18.	Simpang Tiga	3,14	3,43	5,38	7,34
19.	Darul Imarah	3,15	3,44	5,39	7,36
20.	Darul Kamal	3,14	3,43	5,40	7,36
21.	Peukan Bada	3,14	3,43	5,39	7,36
22.	Pulo Aceh	3,15	3,41	5,35	7,32
23.	Blang Bintang	3,15	3,43	5,39	7,36
Laju Pertumbuhan (%)		**3,15**	**3,43**	**5,39**	**7,36**

Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2017 (diolah)

Tabel 2.6 menggambarkan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Darul Imarah, yaitu 53.177 jiwa pada tahun 2016. Kecamatan Leupung memiliki jumlah penduduk terkecil, yaitu 2.919 jiwa pada tahun 2016. Pertumbuhan penduduk rata-rata tahun 2013 - 2016 sebesar 4,83 persen. Ini sejalan dengan tingkat kelahiran baru dan perpindahan penduduk kedalam wilayah Kabupaten Aceh Besar yang terjadi sepanjang

tahun 2013 - 2016. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Besar ini masih berada pada katagori normal. Sedangkan Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut ini :

Tabel 2.8
Persentase Kepadatan Penduduk Berdasarkan Luas Wilayah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)	Jumlah Rumah Tangga	Prosentase Jiwa/RT
1.	Lhoong	149,02	10.354	69	3.021	3
2.	Lhoknga	87,94	16.904	192	4.012	4
3.	Leupung	169,15	2.919	17	845	3
4.	Indrapuri	197,03	22.689	115	5.197	4
5.	Kuta Cot Glie	332,25	14.075	42	3.382	4
6.	Seulimeum	404,35	24.618	61	5.603	4
7.	Kota Jantho	593,00	9.631	16	2.181	4
8.	Lembah Seulawah	319,60	12.246	38	3.145	4
9.	Mesjid Raya	129,93	23.785	183	5.969	4
10.	Darusalam	38,43	25.853	673	5.807	4
11.	Baitussalam	20,84	18.878	906	5.386	4
12.	Kuta Baro	61,07	26.796	439	5.973	4
13.	Montasik	59,73	20.181	338	4.229	5
14.	Ingin Jaya	24,33	31.986	1.315	6.533	5
15.	Kr. Barona Jaya	6,96	16.116	2.316	3.614	4
16.	Sukamakmur	43,45	15.796	364	3.355	5
17.	Kuta Malaka	22,81	6.716	294	1.428	5
18.	Simpang Tiga	27,59	6.053	219	1.389	4
19.	Darul Imarah	24,34	53.177	2.185	11.619	5
20.	Darul Kamal	23,04	7.713	335	1.784	4
21.	Peukan Bada	36,25	17.792	491	4.566	4
22.	Pulo Aceh	90,55	4.315	48	1.267	3
23.	Blang Bintang	41,75	12.323	295	2.481	5
	Jumlah	**2.903,50**	**400.913**	**138**	**92.786**	**4**

Sumber: Profil Pembangunan Aceh Bear, 2017

Kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2016 terletak di Kecamatan Krueng Barona Jaya yang mencapai 2.316 jiwa/Km^2. Hal ini disebabkan oleh luas wilayahnya yang relatif kecil, sementara jumlah penduduknya banyak. Sedangkan kepadatan penduduk terendah terletak di Kecamatan Kota Jantho yang mencapai 16 jiwa/Km^2. Secara umum rata-rata tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Besar tidak terlalu tinggi yang mencapai 138 jiwa per Km^2.

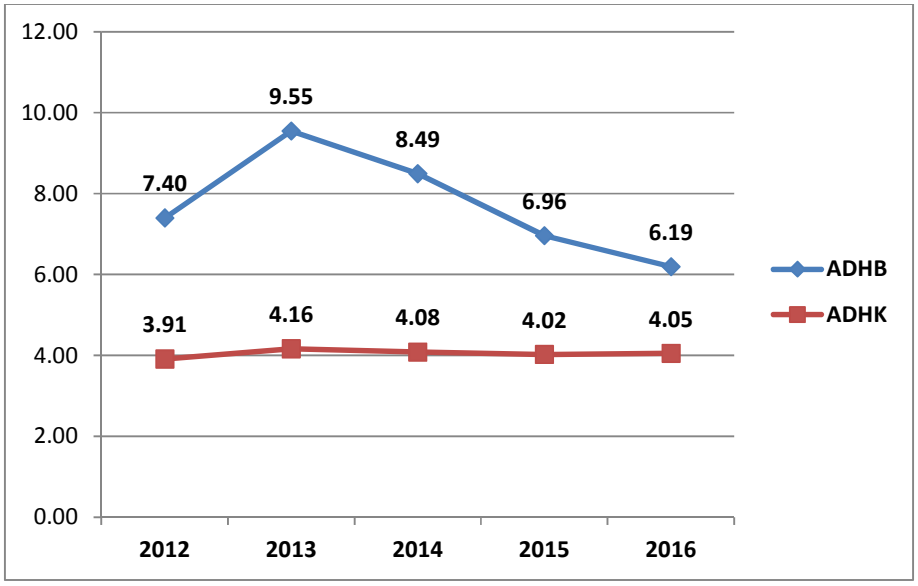
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Besar yang dihitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mulai tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan PDRB Pada tahun 2012 sebesar 7,40 persen dan meningkat hingga 9,55 persen pada tahun 2013 serta menurun pada tahun 2014 mencapai 8,84 persen dan pada tahun 2015 mencapai 6,75. Pertumbuhan PDRB kembali menurun pada tahun 2016 sebesar 5,83 persen. Sedangkan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2012 sebesar 3,70 persen dan menurun pada tahun 2013 menjadi 2,59 persen serta meningkat kembali pada tahun 2014 sebesar 3,91 persen dan tahun 2015 sebesar 4,16 persen. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2016 meningkat menjadi 4,11 persen. Perkembangan PDRB Kabupaten Aceh Besar dihitung ADHB dan ADHK dapat dilihat pada Grafik 2.1 berikut :

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016



Sumber: Tinjauan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha, 2013 - 2017

b) Laju Inflasi

Gambaran laju inflasi di Aceh Besar diproksi dengan angka laju inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh. Data yang ada menunjukkan bahwa angka inflasi di Aceh Besar/Banda Aceh masih lebih rendah dibanding angka inflasi di Lhokseumawe, atau Aceh secara menyeluruh, dan angka inflasi Nasional. Lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2012 - 2016

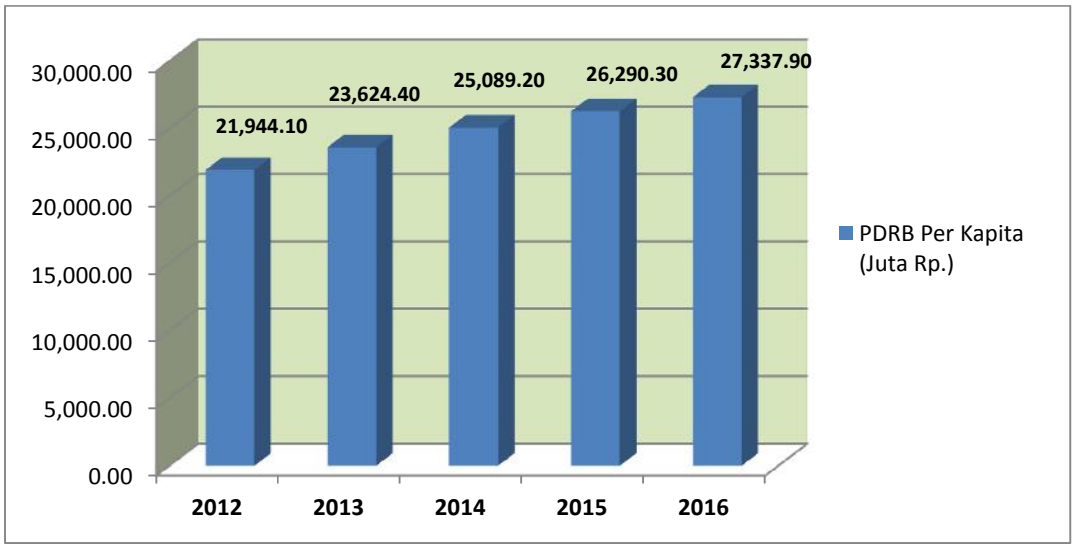
Tahun	Laju Inflasi (%)			
	Banda Aceh	Kota Lokseumawe	Provinsi Aceh	Nasional
2012	0,06	0,39	0,22	4,30
2013	6,39	8,27	7,31	8,38
2014	7,83	8,53	8,09	8,36
2015	1,27	2,44	1,53	3,35
2016	0,71	2,25	3,95	3,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2017

c) PDRB Per Kapita

Pada tahun 2016 pendapatan regional per kapita penduduk Aceh Besar berdasarkan data statistik tercatat sebesar 27.337,90 juta rupiah, kondisi ini meningkat dibanding tahun 2015 yang tercatat sebesar 26.290,30 juta rupiah dan 25.089,20 juta rupiah pada tahun 2014. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Aceh Besar dapat dirincikan pada grafik berikut.

Grafik 2.2
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016



Sumber: Tinjauan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha, 2013 – 2017

d) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2016 Perekonomian di Kabupaten Aceh Besar mengalami sedikit peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Aceh Besar tahun 2016 mencapai 4,05 persen, sedangkan tahun 2015 sebesar 4,02 persen. Pada tahun 2016 Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha transportasi dan perdagangan sebesar 8,31 persen, yang diikuti oleh lapangan usaha

pengadaan listrik dan gas sebesar 7,69 persen dan lapangan usaha real estate sebesar 7,03 persen.

Lapangan usaha yang mengalami perlambatan tingkat pertumbuhan ekonomi terletak pada sektor informasi dan komunikasi yang tercatat sebesar 2,62 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar -7,37 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Besar
(PDRB ADHK) 2012 - 2016 (Persen)

	Sektor/Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,63	4,50	4,81	5,69	5,15
B	Pertambangan dan Penggalian	2,41	3,16	1,37	-4,21	-7,37
C	Industri Pengolahan	5,93	5,60	4,96	4,21	4,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,20	4,07	6,43	5,20	7,69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,67	3,25	5,48	5,35	5,48
F	Konstruksi	3,67	4,53	4,64	5,38	4,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,48	4,53	4,66	4,76	4,46
H	Transportasi dan Pergudangan	3,25	3,24	2,55	3,47	8,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,84	3,98	4,01	3,32	5,54
J	Informasi dan Komunikasi	4,06	3,52	3,42	3,69	2,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,24	8,77	9,74	2,77	3,11
L	Real Estate	3,99	4,01	5,01	6,59	7,03
M	Jasa Perusahaan	4,02	4,02	4,10	3,22	3,40
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,97	4,01	4,26	6,41	4,24
O	Jasa Pendidikan	3,40	3,67	4,15	3,04	3,10
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,62	4,70	5,01	4,31	4,61
Q	Jasa Lainnya	3,94	3,99	4,10	2,96	5,88
	PDRB	**3,91**	**4,16**	**4,08**	**4,02**	**4,05**

Sumber: Tinjauan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha, 2013 – 2017

e) Struktur Perekonomian Daerah

Struktur lapangan usaha menunjukkan susunan komposisi atau susunan lapangan usaha. Dengan mengetahui struktur perekonomian maka kita dapat menilai lapangan usaha apa yang menjadi dominan, salah satunya kita bisa melihat lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Struktur ekonomi lainnya yang terlihat menduduki posisi kedua dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Aceh Besar pada tahun 2015 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, kemudian lapangan usaha ransportasi dan pergudangan, lapangan usaha Konstruksi dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Sementara peranan lapangan usaha lainnya berkisar 5 persen ke bawah.

Tabel 2.11
Peranan PDRB Kabupaten Aceh Besar Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2012 - 2016 (Persen)

	Sektor/Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	21,38	21,49	22,04	23,04	23,95
B	Pertambangan dan Penggalian	9,10	8,99	8,64	7,61	6,70
C	Industri Pengolahan	2,27	2,30	2,32	2,35	2,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	13,88	13,48	13,47	13,55	13,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,34	17,24	17,37	17,39	17,47
H	Transportasi dan Pergudangan	13,33	14,18	13,98	13,88	13,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,34	1,34	1,35	1,36	1,42
J	Informasi dan Komunikasi	5,02	4,88	4,65	4,53	4,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,21	1,27	1,35	1,31	1,31
L	Real Estate	5,10	5,01	5,02	5,10	5,27
M	Jasa Perusahaan	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,30	5,21	5,22	5,34	5,40
0	Jasa Pendidikan	1,42	1,38	1,38	1,37	1,38
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,73	1,68	1,67	1,65	1,66
Q	Jasa Lainnya	1,14	1,11	1,10	1,07	1,07
	PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Tinjauan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha, 2013 – 2017

f) Persentase Penduduk Miskin

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten yang masih menduduki peringkat ke Sembilan terendah kemiskinan di Provinsi Aceh pada tahun 2016. Pada tahun 2012 angka kemiskinan sebesar 17,50 persen dan terjadi penurunan pada tahun 2013 menjadi 16,88 persen dan pada tahun 2014 angka kemiskinan menjadi 16,13 persen serta pada tahun 2015 angka kemiskinan menjadi 15,93 persen, yang kemudian turun menjadi 15,55 persen pada tahun 2016.

Penurunan angka kemiskinan ini juga dibarengi dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 65.000 jiwa pada tahun 2012 menjadi 63.900 jiwa pada tahun 2013 dan 62.370 jiwa pada tahun 2014 menjadi 62.270 pada tahun 2015. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sedikit meningkat tercatat sebesar 62.342 jiwa

Permasalahan demografi yang di alami pemerintah Kabupaten Aceh Besar selama ini adalah terkait dengan kepadatan penduduk yang semakin tinggi dan tidak merata. Permasalahan lainnya yaitu tingkat urbanisasi yang semakin bertambah seiring dengan fungsi yang di emban oleh Kabupaten Aceh Besar, dan komposisi penduduk yang semakin menua (*aging population*).

Tabel 2.12
Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016

Tahun	Penduduk Miskin Aceh Besar (Jiwa)	Persentase Kemiskinan Aceh Besar (%)	Persentase Kemiskinan Aceh (%)	Persentase Kemiskinan Nasional (%)
2012	65.000	17,50	19,46	11,66
2013	63.900	16,88	17,60	11,47
2014	62.370	16,13	18,05	10,96
2015	62.270	15,93	17,08	11,13
2016	62.342	15,55	16,73	10,70

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, 2013 - 2017

g) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Dalam metode baru IPM, tiga komponen utama dalam pengukuran capaian pembangunan manusia sesuai dengan rekomendasi UNDP adalah dimensi umur dan kesehatan (Angka Harapan Hidup), dimensi pengetahuan (Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), dan dimensi standar hidup layak (Pengeluaran Per Kapita). Dengan menggunakan rata-rata geometrik, ketiga dimensi membentuk IPM dengan keseimbangan peningkatan di masing-masing dimensi.

Pembangunan manusia di Kabupaten Aceh Besar terus mengalami perbaikan, terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Kabupaten Aceh Besar yang dilihat semakin membaik dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pergerakan perubahan IPM dari tahun ke tahun juga dinilai sebagai indikasi yang menggambarkan perubahan pembangunan manusia di suatu wilayah.

Tabel 2.13
Indeks Pembangunan Manusia

	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Indeks Pembangunan Manusia	70,10	70,61	71,06	71,70	71,75
2.	Angka Harapan Hidup (AHH)	69,41	69,44	69,46	69,47	69,49
3.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,91	14,21	14,35	14,47	14,48
4.	Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	8.344	8.497	8.622	8.775	8.788

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2013 - 2017

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Pendidikan

a) Angka Melek Huruf

Angka melek huruf di Kabupaten Aceh Besar selama tahun 2012 - 2016 relatif mengalami peningkatan dari 95,59 persen pada tahun 2012 menjadi 98,15 persen pada tahun 2015, dan terjadi penurunan pada tahun 2016 yang tercatat sebesar 98,05 persen.

Tabel 2.14
Perkembangan Angka Melek Huruf
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 - 2016

	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (Jiwa)	251.940	268.179	269.558	257.837	281.000
2.	Angka Melek Huruf (%)	95,59	96,68	98,76	98,15	98,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Besar, 2013 - 2017

b) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan kualitas pendidikan. Indikator ini menunjukkan tingkat keberhasilan baik dalam kelulusan maupun yang saat mengulang. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Aceh Besar terindikasi cukup baik dan berada diatas rata-rata nasional serta rata-rata provinsi di Aceh. Hal tersebut dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel 2.15
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 - 2016

	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rata- Rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Besar (Tahun)	9,45	9,46	9,61	9,91	9,92
2.	Rata- Rata Lama Sekolah Provinsi Aceh (Tahun)	8,36	8,44	8,71	8,77	8,76
3.	Rata- Rata Lama Sekolah Nasional (Tahun)	7,59	7,61	7,73	7,84	7,95

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2013 - 2017

c) Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka Pendidikan yang ditamatkan untuk tingkat SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi pada tahun 2016 masing-masing adalah 6,56 persen, 25,10 persen, 18,35 persen, 37,91 persen dan 12,08 persen. Hasil ini mengindikasikan adanya peningkatan mutu anak usia sekolah untuk terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Rincian pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 - 2016

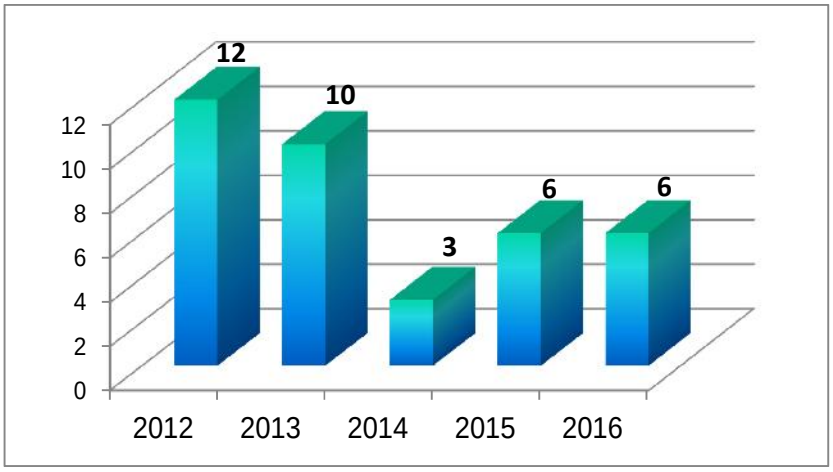
Tingkat Pendidikan	Persentase				
	2012	2013	2014	2015	2016
Tidak / Belum Tamat Sekolah Dasar (SD)	16,15	16,66	14,19	14,19	6,56
Sekolah Dasar (SD)	21,73	20,39	20,13	20,13	25,10
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	19,43	21,19	21,17	21,17	18,35
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	32,13	33,50	34,43	34,43	37,91
Perguruan Tinggi	10,56	8,27	10,09	10,09	12,08

Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2013 - 2017

2.2.2.2 Kesehatan

a. Kesehatan Ibu dan Anak

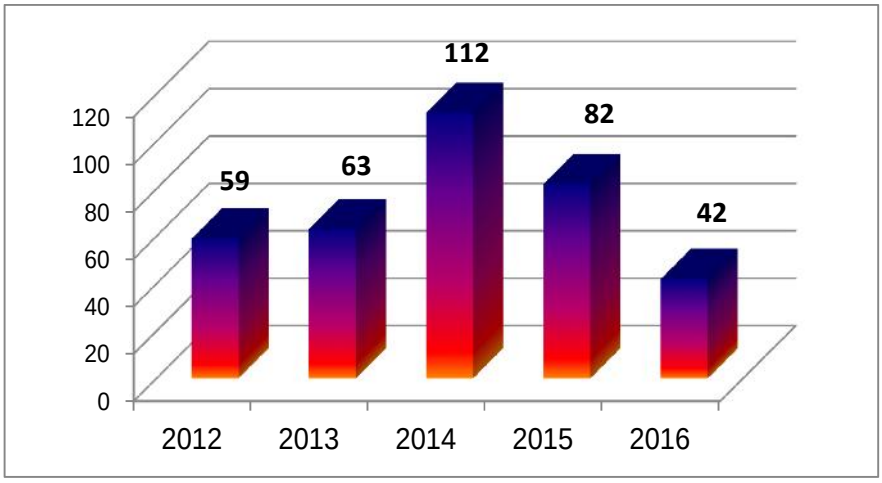
Grafik 2.3
Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2012 - 2016



Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2013 - 2017

Angka kematian ibu cenderung menurun dari tahun 2012 – 2014, tetapi pada tahun 2015 dan 2016 meningkat kembali 6 kasus kematian ibu. Hal ini menegaskan upaya pelayanan kesehatan ibu untuk menurunkan angka kematian masih harus dioptimalkan. Adapun penyebab kematian ibu antara lain pendarahan, eklamsia, infeksi, dan lain-lain.

Grafik 2.4
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2012 - 2016



Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2013 - 2017

Sementara itu, angka kematian bayi seperti tergambar dalam grafik berikut relatif meningkat pada tahun 2014 sebesar 112 kasus dan kembali menurun menjadi 42 kasus pada tahun 2016. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian khusus untuk pengurangan angka kematian bayi untuk tahun mendatang.

Agar upaya meningkatkan kelangsungan hidup ibu dan anak semakin membaik, maka program peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak pada 5 tahun mendatang harus dijadikan prioritas mengingat masih banyaknya target yang belum mencapai SPM (Standar Pelayanan Minimal). Penurunan angka kematian bayi juga merupakan salah satu indikator MDG's (*Millenium Development Goal's*) yang harus dicapai pada setiap tahunnya. Penyebab terbanyak kematian bayi selama lima tahun lalu adalah sebab lain setelah asfiksia dan BBLR. Hal ini serupa dengan kasus kematian pada ibu.

b. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

(a) TBC/BTA

Penemuan kasus penderita Tuberkulosis di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2012 – 2014 terjadi peningkatan akibat belum optimalnya penanggulangan penyakit tersebut. Namun pada tahun 2015 – 2016 terjadi penurunan jumlah kasus yang tercatat sebesar 295 kasus (2015) dan 238 kasus (2016).

(b) DBD

Kasus Demam Berdarah (DBD) di Kabupoaten Aceh Besar selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 cenderung dinamis. Kasus DBD tercatat naik-turun setiap tahunnya sehingga optimalisasi pelayanan penanggulangan kasus tersebut terus ditingkatkan.

(c) Acute Flacid Paralysis (AFP)

AFP merupakan kelumpuhan secara fokal yang memiliki gejala sifatnya layuh yang terjadi secara mendadak dan bukan disebabkan oleh paksaan. Jumlah kasus AFP di Kabupaten Aceh Besar cenderung tidak terlalu signifikan dan dapat ditangani dengan baik oleh pusat layanan kesehatan.

Tabel 2.17
Kasus Penyakit Menular
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016

Tahun	TBC/BTA	DBD	AFP
2012	210	365	0
2013	263	156	5
2014	318	260	4

Tahun	TBC/BTA	DBD	AFP
2015	295	78	3
2016	238	128	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar, 2013 - 2017

2.2.2.3 Masalah Sosial

Permasalahan kesejahteraan sosial lainnya di Kabupaten Aceh Besar semakin beragam dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini terjadi akibat berbagai krisis sosial, seperti menipisnya nilai budaya dan agama, adanya disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk faktor sosial dan bencana alam. Kesemua ini bermuara pada munculnya permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penyandang masalah sosial.

Kabupaten Aceh Besar memiliki tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 mencapai 6,81% dan mengalami penurunan pada tahun 2016 yang mencapai 6,59%. Menurunnya tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Besar disebabkan adanya beberapa aktifitas usaha pertambangan, usaha industri kecil dan menengah, jasa-jasa serta adanya usaha mandiri yang meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tabel 2.18
Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 - 2016

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Bekerja (Jiwa)	Pengangguran (Jiwa)	Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Pengangguran Terbuka (%)
2012	371.412	133.310	20.189	59,70	13,15
2013	383.477	132.351	20.038	57,87	13,15
2014	384.618	142.966	16.823	59,09	10,53
2015	392.584	243.009	26.735	61,90	6,81
2016	400.913	283.068	11.632	62,32	6,59

Sumber: Barenbang Kemenaker RI, 2013 – 2017

Penanganan masalah sosial di Kabupaten Aceh Besar telah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yang terfokus dan mencapai hasil yang cukup signifikan. Beberapa capaian indikator jumlah penyandang masalah sosial setiap tahunnya masih menjadi

kendala dikarenakan keterbatasan anggaran dan rendahnya kemauan penyandang sosial itu sendiri untuk berubah. Rincian permasalahan sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Permasalahan Sosial Menurut Jenis
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016

Tahun	Anak Terlantar	Lansia	Korban Narkoba	Penyandang Cacat	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Masyarakat yang Tinggal Di Daerah Rawan Banjir
2012	174	1.319	18	1.682	6.289	-
2013	360	6.061	22	1.039	6.543	-
2014	142	3.616	43	1.728	6.065	6.088
2015	142	3.616	43	1.467	6.065	6.088
2016	142	3.616	43	1.467	6.065	6.088

Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2013 - 2017

Jumlah anak terlantar pada tahun 2016 sebesar 142 orang, kondisi ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya sejak tahun 2014. Akan tetapi jumlah anak terlantar sudah menurun dari tahun 2013 yang mencapai 360 orang dan tahun 2012 sebesar 174 orang yang mengindikasikan bahwa anak terlantar paling banyak terdapat pada tahun 2013.

Akibat peredaran narkoba yang begitu intensif maka Jumlah korban narkoba mengalami peningkatan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebesar 43 orang. Adapun jumlah penyandang cacat dan wanita rawan sosial cenderung menurun pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Keistimewaan Aceh

2.3.1.1 Pelayanan Pendidikan Islami

Pendidikan Dayah menjadi pilihan alternatif bagi pendidikan anak-anak di Kabupaten Aceh Besar, mengingat sebagian masyarakat memandang pentingnya pendidikan berbasis agama. Hingga akhir tahun 2016, ada sekitar 15.172 santri yang ada di 133 pondok pesantren tradisional dan 8.908 santri yang ada di 32 pondok pesantren modern/Terpadu. Walaupun banyak diminati, namun perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren belum terfokus, terutama untuk pengembangan dan peningkatan mutu serta kualitas pondok pensatren.

Tabel 2.20
Jumlah Pondok Pesantren Modern/Terpadu
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016

No	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Lhoong	-	-	-	-	-
2.	Lhoknga	2	2	2	2	2
3.	Leupung	-	-	-	-	-
4.	Indrapuri	2	2	2	2	2
5.	Kuta Cot Glie	-	-	-	-	-
6.	Seulimeum	1	1	2	2	1
7.	Kota Jantho	1	1	1	1	2
8.	Lembah Seulawah	1	1	1	1	1
9.	Mesjid Raya	-	-	-	-	-
10.	Darusalam	2	2	2	2	2
11.	Baitussalam	1	1	1	1	2
12.	Kuta Baro	2	2	2	2	3
13.	Montasik	2	2	1	1	2
14.	Blang Bintang	1	1	-	-	1
15.	Ingin Jaya	2	2	2	2	3
16.	Kr. Barona Jaya	1	1	1	1	2
17.	Suka Makmur	2	2	3	3	4
18.	Kuta Malaka	3	3	3	3	3
19.	Simpang Tiga	-	-	-	-	-
20.	Darul Imarah	1	1	1	1	2
21.	Darul Kamal	-	-	-	-	-
22.	Peukan Bada	-	-	-	-	-
23.	Pulo Aceh	-	-	-	-	-
	Jumlah	**24**	**24**	**24**	**24**	**32**

Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2013 - 2017

Masalah yang masih dihadapi dalam pendidikan dayah antara lain prasarana, serta persoalan kualitas lulusan.

a. Kurikulum Pesantren

Sejauh ini belum ada kurikulum pendidikan pesantren yang baku/standar. Kurikulum pesantren masih ditentukan oleh keinginan dan otoritas mutlak dari Teungku Chik (Pimpinan pesantren). Ke depan, perlu ditetapkan atau dikembangkan kurikulum standar minimal yang harus dipedomani setiap pesantren. Model kurikulum yang akan dikembangkan dapat dimusyawarahkan secara komprehensif dengan melibatkan *stakeholders*. Pendidikan pesantren diharapkan menganut standar minimal, yaitu 60 persen kurikulum standar dan 40 persen lagi kurikulum muatan lokal.

b. Tenaga Pengajar Pesantren

Sampai tahun 2016 ada sekitar 1.526 Tenaga Pengajar (Tengku pesantren) yang tersebar di 32 pondok pesantren modern/Terpadu. Kemudian terdapat sekitar 3.450 Tenaga Pengajar (Tengku pesantren) di pondok pesantren tradisional

c. Manajemen Pesantren

Manajemen pengelolaan pesantren umumnya masih bersifat tradisional sehingga menyulitkannya berkembang. Hal ini juga berpengaruh terhadap tingkat akreditasi

lembaga pesantren. Ada beberapa faktor penyebab yang masih mewarnai pengelolaan pesantren selama ini, diantaranya:

- Belum ada kantor administrasi pengelolaan pesantren;
- Belum adanya pembagian tugas yang berimbang;
- Belum tersedianya peralatan kantor untuk menunjang sistem menajemen pesantren yang baik; dan
- Sebagian pengurus pesantren belum memahami dasar-dasar ilmu manajemen dan manajemen *skill*.

Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

- Menyediakan kantor pusat penyelenggara administrasi pesantren;
- Membuat struktur kepimpinan pesantren dan pembagian tugas secara rinci;
- Mengadakan peralatan kantor yang memadai;
- Memberi pelatihan-pelatihan tentang manajemen skill;
- Meningkatkan fungsi koordinasi dan pengawasan; dan
- Membuat alokasi dana untuk pembiayaan manajemen pesantren.

d. Kualitas Santri

Segala keterbatasan yang masih dihadapi berdampak signifikan terhadap kualitas santri. Untuk itu, diperlukan peningkatan kemampuan kompetensi atau kualitas, baik melalui penyempurnaan kurikulum, peningkatan kompetensi pengajar dengan berbagai pelatihan jangka pendek agar kualitas santri meningkat. Peningkatan kualitas santri ini akan berdampak positif terhadap minat dan kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke pesantren.

e. Sarana dan Prasarana

Pesantren di Kabupaten Aceh Besar umumnya tumbuh berkembang dengan bersahaja. Kondisinya sangat sederhana dengan performa lebih rendah dari lembaga pendidikan formal lainnya. Fasilitas utama dan penunjang yang tersedia sangat terbatas, seperti, kantor administrasi, ruang belajar, perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, mobile, dan fasilitas penunjang belajar mengajar. Keterbatasan ini berpengaruh terhadap proses belajar mengajar dan mutu pendidikan dayah. Ke depan, ketersediaan sarana dan prasarana dasar dayah yang memadai harus diupayakan dengan mengalokasikan dana yang cukup menurut skala prioritas.

2.3.1.2 Syariat Islam

Syariat Islam merupakan aturan hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk kemaslahatan ummat manusia, baik hubungannya terhadap Allah SWT maupun hubungan terhadap sesama manusia, alam dan kehidupan. Syari'at Islam meliputi semua tingkah laku manusia yang disandarkan pada wahyu Allah SWT (Al-Quran) dan sunnah Rasul-Nya (Al-Hadits). Pusat dari kegiatan keislaman terletak di mesjid dan TPA di seluruh Kabupaten Aceh Besar. Adapun jumlah mesjid yang mendapatkan bantuan dari pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21
Jumlah Mesjid yang mendapatkan bantuan
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016

Uraian (Unit)	2012	2013	2014	2015	2016
1. Mesjid	156	156	161	161	163
2. Meunasah	604	604	606	606	633
3. TPA (TPQ)	233	204	204	228	228

Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Besar, 2013 - 2017

Dalam menegakkan syariat islam pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah mengeluarkan beberapa peraturan daerah (qanun) guna mengurangi perilaku masyarakat terhadap pelanggaran syariat islam yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22
Jumlah Pelanggaran Syariat Islam
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 – 2015

Jenis Pelanggaran	2014	2015
1. Pelanggar Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Qanun Nomor 11 tahun 2002)	190	193
2. Pelanggar Khalwat/Mesum (Qanun Nomor 14 tahun 2003)	190	208
3. Pelanggaran Maisir (Judi) (Qanun Nomor 13 Tahun 2003)	11	29

Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Besar, 2015 - 2016

2.3.2 Urusan Wajib

Pelayanan urusan wajib meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, kebudayaan, pemuda olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan gampong, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika, serta perpustakaan.

2.3.2.1 Pelayanan Pendidikan Umum

Untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing maka Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terus mengupayakan peningkatan pelayanan di Bidang Pendidikan. Pada tahun 2016 Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Aceh Besar tersedia sebanyak 210 unit, dimana sebanyak 9 unit sekolah dikelola oleh pihak swasta dan sisanya berstatus negeri. Jumlah guru yang tersedia sebanyak 2.690 orang dan jumlah murid yang terdaftar sejumlah 30.011 orang, dengan kondisi ruang kelas

terdapat 90 kelas yang rusak berat, 1.046 kelas rusak ringan dan sisanya sebanyak 368 kelas dalam kondisi baik.

Berdasarkan data BPS Aceh Besar pada tahun 2016 juga tercatat jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 70 unit dengan jumlah guru sebanyak 1.327 orang dan jumlah murid sebanyak 11.004 orang. Kemudian untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tercatat jumlah sekolah sebanyak 50 unit dan 15 unit diantaranya merupakan sekolah swasta. Jumlah tenaga pendidik untuk tingkat SLTA sebanyak 1.307 orang dan murid yang terdaftar sebanyak 9.897 orang.

Tabel 2.23
Jumlah Sekolah di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2012 – 2016

Sekolah	2012		2013		2014		2015		2016	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Sekolah Dasar (SD)	198	7	201	7	201	7	201	9	201	9
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	47	17	47	17	47	17	49	21	49	21
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	25	14	24	15	28	12	35	15	35	15

Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2013 - 2017

Tabel 2.24
Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2012 – 2016

Tahun	Sekolah Dasar (SD)				Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)				Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)			
	Guru		Murid		Guru		Murid		Guru		Murid	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
2012	2.448	135	25.480	1.561	1.181	333	7.986	1.682	881	272	7.135	1.025
2013	2.485	135	26.660	1.539	1.127	328	7.914	1.835	825	290	6.527	1.218
2014	2.445	135	26.949	1.820	1.073	215	8.373	1.918	825	254	10.668	1.841
2015	2.794	135	29.300	2.113	1.394	215	10.698	2.094	1.351	254	9.527	1258
2016	2.624	182	27.162	2.421	1.143	248	8.598	2.382	1.160	192	7.965	1.489

Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2013 - 2017

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD dan SLTP tahun 2016 masing-masing adalah 97,62 persen, 80,95 persen, dan 69,50 persen. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SD, SLTP, SLTA tahun 2016 masing-masing tercatat sebesar 105,87 persen, 98,26 persen, dan 86,17 persen. Penurunan angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) tidak menyebabkan peningkatan angka putus sekolah, tetapi penurunan tersebut disebabkan oleh kecenderungan dari masyarakat untuk memilih sekolah yang lebih berkualitas yang standarnya lebih baik serta sudah memenuhi standar pendidikan nasional, adanya kecenderungan memilih boarding school dan sebahagian dari siswa sekolah tersebut berpindah ke dayah atau pendidikan non formal lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25
APM dan APK Di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2012 - 2016

Tingkat Pendidikan	2012		2013		2014		2015		2016	
	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK
Sekolah Dasar (SD)	95,60	111,53	98,74	116,02	98,70	113,85	98,76	118,57	97,62	105,87
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	82,24	104,82	80,06	91,03	84,78	93,76	87,95	97,76	80,95	98,26
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	57,96	73,16	62,74	70,55	74,96	88,76	71,15	84,44	69,50	86,17

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh Besar, 2013 – 2017

2.3.2.2 Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, selama periode 2012-2016 telah diupayakan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Hingga tahun 2016, Kabupaten Aceh Besar telah memiliki Puskesmas 28 unit, Pustu 69 unit, dan Polindes/Poskesdes 295 unit, serta Posyandu 657 unit. Rasio antara total jumlah penduduk dengan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang tersedia, seperti rasio Puskesmas, Pustu, dan Polindes/Poskesdes adalah 1 : 1.000 penduduk. Artinya, 1 sarana pelayanan kesehatan melayani 1.000 penduduk.

Tabel 2.26
Jumlah Sarana Kesehatan
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016

Uraian (Unit)	2012	2013	2014	2015	2016
1. Puskesmas	28	28	28	28	28
2. Puskesmas Pembantu	69	69	69	69	69
3. Poskesdes	319	332	240	332	295
4. Posyandu	655	650	655	655	657

Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2013 – 2017

Jumlah dokter yang ada di Kabupaten Aceh Besar sampai tahun 2016 adalah sebanyak 120 orang yang terdiri dari 10 orang Dokter Spesialis, 90 orang Dokter Umum dan 20 orang Dokter Gigi. Rincian tenaga dokter dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.27
Jumlah Tenaga Dokter
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016

Uraian (Orang)	2012	2013	2014	2015	2016
1. Dokter Spesialis	5	6	10	10	10
2. Dokter Umum	75	86	84	90	79
3. Dokter Gigi	22	21	14	20	12

Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2013 – 2017

Secara umum, tenaga kesehatan juga telah menempati seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Total jumlah tenaga kesehatan mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dengan persentase rata-rata sebesar 7,21 % per tahun. Rincian tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28
Jumlah Tenaga Kesehatan
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016

Uraian (Orang)	2012	2013	2014	2015	2016
1. Perawat dan Bidan	875	1.163	1.114	1.142	1.213
2. Farmasi	42	41	49	47	48
3. Tenaga Kesling	77	68	72	68	69
4. Tenaga Kesmas	154	122	168	130	139
5. Ahli Gizi	57	56	53	54	57
6. Tenaga Medis	38	86	90	90	90
7. Teknisi Medis	2	3	3	3	3
Total	**1.245**	**1.539**	**1.549**	**1.534**	**1.619**

Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2013 – 2017

2.3.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

a. Kebinamargaan

Ruas jalan Kabupaten Aceh Besar telah berkurang pada tahun 2016 yang tecatat sepanjang 1.255,7 Km. Ruas jalan ini terbagi ke dalam 629 ruas di seluruh Kabupaten Aceh Besar. Kondisi ini masih cukup baik dibanding sejak akhir tahun 2012, mengingat adanya pengurangan ruas jalan di Kabupaten Aceh Besar. Kondisi jalan rusak diakibatkan oleh beban transportasi yang berlebihan yang tidak sesuai dengan daya dukung jalan. Tercatat kondisi jalan yang baik rata-rata berjumlah 51,78% (658.21 km) tahun 2016 terletak di kecamatan Peukan Bada, Leupung, Ingin Jaya, Kuta Baro, Sukamakmur, Krueng Barona Jaya, Baitussalam. Kondisi jalan yang rusak sedang berjumlah 9.13% (114,69 km) yang tersebar di Kecamatan Indrapuri,

Ingin Jaya, Seulimeum, Simpang Tiga, Sukamakmur, Kota Jantho, Darul Imarah, Mesjid Raya, Lhoong, Lhoknga. Kondisi rusak ringan berjumlah 29,61% (371,86 km) yang tersebar di Kecamatan Sukamakmur, Kuta Cot Glie, Kuta Baro, Blang Bintang, Seulimeum, Darul Imarah, Montasik, Indrapuri, Ingin Jaya, Lhoong, Baitussalam, Simpang Tiga, Mesjid Raya, Darul kamal, Pulo Aceh, Kuta Malaka, Kota Jantho. Kondisi jalan yang rusak berat berjumlah 9,47% (118,94 km) yang tersebar di Kecamatan Montasik, Kuta Malaka, Peukan Bada, Lembah seulawah, Seulimeum, Pulo Aceh

Tabel 2.29
Perkembangan Kondisi Jalan
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016

Tahun	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Jalan (Km)			
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
2012	1.320	599,10	103,90	548,60	68,40
2013	1.320	629,55	102,50	504,55	83,40
2014	1.320	670,65	97,35	465,90	86,10
2015	1.320	670,69	97,42	465,96	85,93
2016	1.255,7	650,24	114,65	371,85	118,96

Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2013 - 2017

Ruas jalan provinsi sepanjang 134,86 Km yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar tercatat sepanjang 66,69 Km berada dalam kondisi baik dan 11,00 Km dalam kondisi sedang dan masih terdapat sepanjang 25,00 Km yang berkategori rusak dan 32,17 Km yang berkategori rusak berat. Ruas jalan nasional yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar tercatat sepanjang 207,62 Km yang berada dalam kondisi baik sekitar 177,62 Km, dalam kondisi sedang 5 Km, dalam kondisi rusak sekitar 5,90 dan dalam kondisi rusak berat sekitar 19,10. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30
Kondisi Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016

No.	Status Jalan	Panjang Total (Km)	Baik (Km)	Sedang (Km)	Rusak (Km)	Rusak Berat (Km)
1.	Jalan Nasional	207,62	177,62	5	5,90	19,10
2.	Jalan Provinsi	134,86	66,69	11	25	32,17
3.	Jalan Kabupaten	1.279,44	566,29	226,62	392,36	94,17

Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2017

Wilayah Kabupaten Aceh Besar memiliki jumlah jembatan sekitar 221 unit dengan total panjang sebesar 2,03 Km pada tahun 2016. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31
Panjang dan Jumlah Jembatan
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 - 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Panjang Jembatan (Km)	1,92	1,93	1,93	1,97	2,03
Jumlah Jembatan (Unit)	218	218	218	218	221

Sumber : Dinas PUPR Kab. Aceh Besar, 2013 – 2017

b. Keciptakaryaan

Sasaran dari bidang ini adalah pembangunan Perumahan, Air Bersih, Sanitasi, Air Limbah dan Kawasan Permukiman. Pelaksanaan pembangunan jaringan jalan lingkungan, saluran drainase, jaringan air bersih, serta sarana lainnya di kawasan permukiman yang memadai guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak, sehat, dan bersih. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyediaan kebutuhan air bersih di Aceh Besar adalah kondisi topografi dan luas wilayah, serta terbatasnya ketersediaan air baku yang memenuhi syarat kesehatan, sehingga memerlukan penanganan yang serius dan membutuhkan anggaran yang memadai. Adapun kondisi perumahan di wilayah Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.32
Indikator Perumahan
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 - 2016

Uraian (%)	2012	2013	2014	2015	2016
Rumah Tangga dengan Luas Lantai Per Kapita < 10 m^2	0,82	2,74	1,81	2,33	6,28
Rumah Tangga dengan Air Minum Ledeng/Isi Ulang/Air Kemasan	50,74	60,29	58,72	69,11	69,12
Rumah Tangga dengan Jamban Sendiri	80,68	72,74	69,93	70,09	82,01
Rumah Tangga dengan enis Kloset Leher Angsa	76,56	91,17	98,86	95,70	99,39

Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2017

c. Penataan Ruang

Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar telah disusun sesuai tahapan dan mekanisme yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dokumen RTRWK Aceh Besar Tahun 2012-2032 telah disetujui susbtansinya oleh Gubernur Aceh melalui Surat Nomor 650/37960 tanggal 15 Desember 2011. Rekomendasi Gubernur ini digunakan sebagai persyaratan untuk dibahas lebih lanjut dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). Substansi RTRWK Aceh Besar 2012-2032 telah dibahas dengan Tim BKPRN pada awal bulan September Tahun 2012. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2013 mengeluarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032.

RTRWK Aceh Besar yang diatur dalam Qanun tersebut diatas memuat substansi berupa tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

2.3.2.4 Bidang Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan instansi yang melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan Fungsi antara lain:

a) Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
b) Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; dan
c) Koordinasi dan pengendalian sinergisitas pembangunan lintas sektor dan lintas kewenangan.

Tabel 2.33
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 - 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dokumen Perencanaan Jangka Panjang	1	1	1	1	1
2.	Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	3	4	5	5	4
3.	Dokumen Perencanaan Tahunan	2	2	3	3	3
	Total	**6**	**7**	**9**	**9**	**8**

Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2017

Bappeda Kabupaten Aceh Besar memiliki beberapa dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 yang diantaranya berupa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM), Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), dan Strategi Penanganan Kemiskinan Daerah (SPKD).

2.3.2.5 Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi, dan Telematika

1) Perhubungan Darat

Telah dibangun Terminal Penumpang Umum Tipe-B di Saree sebagai fasilitas terminal yang memadai bagi kenderaan penumpang umum dari sumber dana APBD dan Dana Otsus. Secara fisik konstruksi bangunan utamanya serta fasilitas tambahan telah dapat direalisasikan dan beberapa pekerjaan sisa masih dilanjutkan agar memenuhi syarat sesuai standar yang diharapkan. Rincian Terminal Penumpang Umum dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34
Terminal Penumpang Umum
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian (Unit)	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Terminal Kelas A	-	-	-	-	-
2.	Terminal Kelas B	1	1	1	1	1
3.	Terminal Kelas C	-	-	-	1	1
	Total	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar, 2017

Di Kabupaten Aceh Besar juga telah tersedia gedung pengujian kendaraan bermotor dan fasilitas penunjangnya di Sibreh Kecamatan Suka Makmur. Awal tahun 2012 sudah mulai difungsikan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, sekaligus sebagai potensi objek baru PAD. Jumlah Angkutan Umum dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.35
Jumlah Angkutan Umum
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 – 2016

No.	Uraian (Unit)	2014	2015	2016
1.	Mobil Penumpang Umum	2262	40	40
2.	Mobil Bus	28	48	54
3.	Mobil Barang	1011	1976	2020
4.	Kereta Tempelan	-	2	4
	Total	**3301**	**2066**	**2118**

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar, 2017

Fasilitas perlengkapan jalan juga telah dibangun antara lain adalah tempat tenyeberangan pejalan kaki sebanyak 40 unit dan halte sebanyak 25 unit.

Sebagai tindak lanjut kerjasama Regional Banda Aceh-Sabang dan Jantho (Aceh Besar), melalui koordinasi dan sinergisitas pembangunan Banda Aceh dengan Aceh Besar, telah disepakati menyepakati pembangunan terminal mobil barang di Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Ini dilakukan sebagai antisipasi penertiban kesemrautan Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh. Kebijakan ini juga menguntungkan bagi Aceh Besar dan Banda Aceh dalam penerimaan PAD.

2) Perhubungan Laut

Untuk pembangunan daerah terpencil dan terisolir, terutama dalam kawasan Kecamatan Pulo Aceh, telah dibangun pelabuhan penyeberangan di Lamteng guna memperlancar arus barang dan penumpang antar pulau dengan daratan Aceh, sekaligus untuk membuka keterisolasian kawasan tersebut. Agar memudahkan akses angkutan penumpang dan atau barang, termasuk hasil laut di kawasan Lampuyang Pulo Aceh, telah dibangun dermaga tambatan boat atau perahu di Lampuyang.

Tabel 2.36
Pelabuhan Penyeberangan Umum
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian (Unit)	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pelabuhan Kapal Ferry	1	1	1	1	1
2.	Pelabuhan Kapal Perintis	1	1	1	2	2
3.	Dermaga	3	3	3	3	3
	Total	**5**	**5**	**5**	**6**	**6**

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar, 2017

Untuk memperlancar pelayanan angkutan laut antara Pulo Aceh dengan Banda Aceh dan antar pulau di Kecamatan Pulo Aceh telah disediakan 2 (dua) unit Boat berkapasitas 12 GT guna mendukung kelancaran tugas para guru dan tenaga medis yang bertugas di pulau tersebut dan 1 (satu) unit Kapal Ferry untuk pelayanan transportasi laut.

3) Media Informasi, Komunikasi Dan Telematika

Mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan guna memberikan kemudahan dalam akses informasi pembangunan, telah tersedia *Bandwidht* melalui jaringan internet. Pengelolaan situs website Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar dengan alamat www.acehbesarkab.go.id telah dilakukan untuk penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat.

2.3.2.6 Bidang Lingkungan Hidup

Tantangan yang masih dihadapi terkait dengan tugas pengendalian lingkungan hidup terutama luasnya daerah kerja dalam hubungannya dengan besarnya volume sampah yang belum sebanding dengan kertersediaan sumber daya sarana dan prasarana untuk penampungan/mobilisasi sampah masyarakat. Pada tahun 2016 timbulan sampah wilayah perkotaan tercatat sebesar 233,56 m^3/hari dan timbulan sampah wilayah pedesaan tercatat sebesar 594,08 yang mengindikasikan bahwa terdapat banyak volume sampah di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan. Berdasarkan hal tersebut maka masalah persampahan merupakan hal yang harus ditangani secara serius agar dapat meningkatkan pengendalian lingkungan hidup masyarakat.

Tabel 2.37
Timbulan Sampah per Kecamatan
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016

No	Kecamatan	Volume Timbulan Sampah			
		Wilayah Perkotaan		Wilayah Pedesaan	
		%	m^3/hari	%	m^3/hari
1.	Lhoong	6,47	1,36	89,84	19,71
2.	Lhoknga	7,35	2,43	92,65	30,68
3.	Leupung	-	-	100	6,68
4.	Indrapuri	-	-	100	44,49
5.	Kuta Cot Glie	-	-	100	27,90
6.	Seulimeum	12,67	6,23	87,33	42,92

No	Kecamatan	Volume Timbulan Sampah			
		Wilayah Perkotaan		Wilayah Pedesaan	
		%	m^3/hari	%	m^3/hari
7.	Kota Jantho	44,64	9,37	55,36	11,62
8.	Lembah Seulawah	-	-	100	25,96
9.	Mesjid Raya	9,32	4,59	90,68	44,66
10.	Darusalam	50	23,70	50	23,70
11.	Baitussalam	37,42	18,06	62,58	30,21
12.	Kuta Baro	6,20	3,18	93,80	48,10
13.	Montasik	-	-	100	40,65
14.	Blang Bintang	-	-	100	22,57
15.	Ingin Jaya	34,36	21,56	65,64	41,18
16.	Kr. Barona Jaya	85,56	28,51	14,44	4,81
17.	Suka Makmur	4,14	1,29	95,86	29,95
18.	Kuta Malaka	-	-	100	13,04
19.	Simpang Tiga	-	-	100	12,73
20.	Darul Imarah	77,19	91,04	22,81	26,91
21.	Darul Kamal	-	-	100	15,67
22.	Peukan Bada	52,97	22,24	47,03	19,74
23.	Pulo Aceh	-	-	100	10,22
Jumlah			**233,56**		**594,08**

Sumber : Badan Lingkungan Hidup dan Pemadam Kebakaran Kab. Aceh Besar, 2017

Selain itu, belum terkendalinya kegiatan *ilegal mining* terutama pengambilan material pasir sungai golongan C di sepanjang DAS Krueng Aceh, yang berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya air dan kerusakan tebing sungai yang berakibat rusaknya sejumlah kebun masyarakat dan terancamnya lingkungan pemukiman masyarakat yang mendiami sekitar DAS.

Disamping itu, masalah yang sangat mendasar adalah Kabupaten Aceh Besar belum memiliki tenaga ahli yang memiliki sertifikasi sebagai prasyarat melakukan kajian terhadap dampak lingkungan terhadap kegiatan pembangunan tertentu yang memerlukan analisis dampak terhadap perubahan lingkungan.

2.3.2.7 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Sebagai implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, urusan kependudukan dan catatan sipil dibentuk SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. SKPD ini melayani urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan prioritas antara lain: penyelesaian perpanjangan KTP Nasional, perekaman KTP elektronik, proses pencatatan sipil, penerbitan Kartu Keluarga (KK), dan pengurusan surat pindah datang penduduk.

Tabel 2.38
Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP Standar Nasional di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016

Tahun	Laki – laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total (Jiwa)
2012	136.105	132.070	268.175
2013	102.052	97.630	199.682
2014	97.911	100.266	198.177
2015	99.555	93.262	192.817

Tahun	Laki – laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total (Jiwa)
2016	104.543	97.481	202.024

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Aceh Besar, 2013 - 2017

Jumlah total penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Aceh Besar tahun 2016 tercatat sebesar 202.024 jiwa. Jumlah tersebut tercatat sekitar 50,39 % dari total jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Besar sebesar 400.913 jiwa. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah ketersediaan blanko KTP yang diberikan oleh Pusat. Kemudian, terjadinya migrasi penduduk dan penduduk usia wajib KTP yang tidak melapor juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk yang tidak memiliki KTP di Kabupaten Aceh Besar.

Jumlah Penduduk yang memiliki KK dan Akta Kelahiran terus meningkat sampai dengan tahun 2016 yang masing-masing tercatat sebesar 119.485 jiwa (KK) dan 104.535 (Akta Kelahiran). Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.39
Jumlah Penduduk yang telah memiliki Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2016

Tahun	KK	Akta Kelahiran (Jiwa)
2013	114.567	9.978
2014	105.443	12.419
2015	109.859	94.104
2016	119.485	104.353

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Aceh Besar, 2014 - 2017

Berdasarkan tabel 2.38 dapat dijelaskan bahwa pencatatan akta kelahiran sampai dengan tahun 2011 masih dilakukan secara manual. Kemudian mulai tahun 2012 pencatatan akta kelahiran sudah dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu, terjadi peningkatan yang sangat signifikan sehingga pada tahun 2016 Kabupaten Aceh Besar mendapatkan penghargaan ditingkat Nasional dalam hal pencapaian kepemilikan akta kelahiran.

Fluktuasi kepemilikan Kartu Keluarga (KK) terjadi akibat adanya perpindahan penduduk khususnya pada tahun 2014 terjadi migrasi di lingungan asrama TNI dan penduduk lainnya dibeberapa tempat. Selanjutnya, terjadi peningkatan jumlah kepemilikan Kartu Keluarga (KK) pada tahun berikutnya terjadi akibat masuknya pendatang baru, terjadinya pernikahan dan pemisahan KK dalam satu keluarga

2.3.2.8 Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Kebijakan urusan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ditujukan untuk meningkatkan apresiasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang seni dan budaya, peningkatan SDM, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga. Promosi wisata dapat ditingkatkan melalui pengembangan destinasi pariwisata beserta fasilitasnya. Rincian objek wisata Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.40
Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2013 – 2016

Tahun	Agrowisata	Wisata Bahari	Wisata Kuliner	Wisata Sejarah	Wisata Souvenir
2013	1	-	3	45	-
2014	1	26	21	76	17
2015	1	26	21	76	17
2016	1	26	21	76	17

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Besar, 2014 – 2017

Pengembangan seni dan budaya Aceh dapat ditingkatkan melalui partisipasi lembaga seni dan organisasi-organisasi di bidang kebudayaan, peningkatan peran serta masyarakat melalui pengiriman misi delegasi kebudayaan. Selain itu, peningkatan pelestarian sejarah dan nilai tradisional, peningkatan peran serta kepemudaan melalui pembinaan organisasi pemuda, peningkatan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan dan pemberian penghargaan bagi atlet yang memiliki potensi dan berprestasi, serta pembinaan dan perekrutan atlet melalui kompetisi olah raga antar sekolah.

Kerjasama dengan berbagai lembaga terus dijalin, seperti Majelis Adat Aceh (MAA), Dewan Kesenian Aceh (DKA), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

2.3.2.9 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Tantangan yang dihadapi ke depan adalah semakin kompleksnya masalah seiring dengan kian dinamisnya kehidupan politik dan kebangsaan, termasuk bahaya narkoba, terorisme, kurangnya kesadaran kebangsaan, dan lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar secara berkala selalu melakukan sosialisasi mengenai kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa, penyebarluasan informasi akan bahaya penyakit masyarakat dan ideologi terorisme, koordinasi forum-forum diskusi politik, dan menggalang kemitraan serta menjalin kerjasama dengan seluruh organisasi sosial politik, Yayasan dan Ormas serta LSM/NGO.

Adapun jumlah Partai Politik, Yayasan dan Ormas serta LSM/NGO yang ada di lingkup Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.41
Jumlah Organisasi Sospol, Yayasan, Ormas dan LSM
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016

Tahun	Partai Politik	Organisasi Masyarakat	Yayasan	Lembaga Swadaya Masyarakat
2012	15	16	23	20
2013	15	22	10	11
2014	15	7	13	10
2015	15	4	44	13
2016	17	5	193	13

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Besar, 2014 – 2017

2.3.2.10 Bidang Kearsipan dan Perpustakaan

Penyimpanan dokumen pemerintahan dan publik terus dioptimalkan penggunaannya baik melalui teknologi informasi maupun arsip perkantoran untuk tujuan administrasi dan pendataan. Untuk urusan kearsipan, pada tahun 2015 telah tersedia pengelola arsip sebanyak 28 orang dan SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 17 SKPD.

Adapun jumlah perpustakaan umum sebanyak 1 unit dan perpustakaan sekolah sebanyak 84 unit. Selain itu, jumlah gedung perpustakaan gampong juga telah tersedia sebanyak 99 unit tersebar di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Transparansi penggunaan dana APBK telah disebarkan melalui media poster yang dibagi ke semua gampong-gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Di masa yang akan datang diharapkan akan tersedia arsip atau dokumen daerah yang dapat diakses dan digunakan oleh berbagai komponen masyarakat.

2.3.3 Urusan Pilihan

2.3.3.1 Bidang Pertanian

a. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu Kabupaten penyedia bahan pangan di Provinsi Aceh, bahkan sebagai lumbung komoditi tanaman pangan dan hortikultura. Adapun rincian luas lahan baku sawah di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.42
Luas Lahan Baku Sawah (Ha)
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016

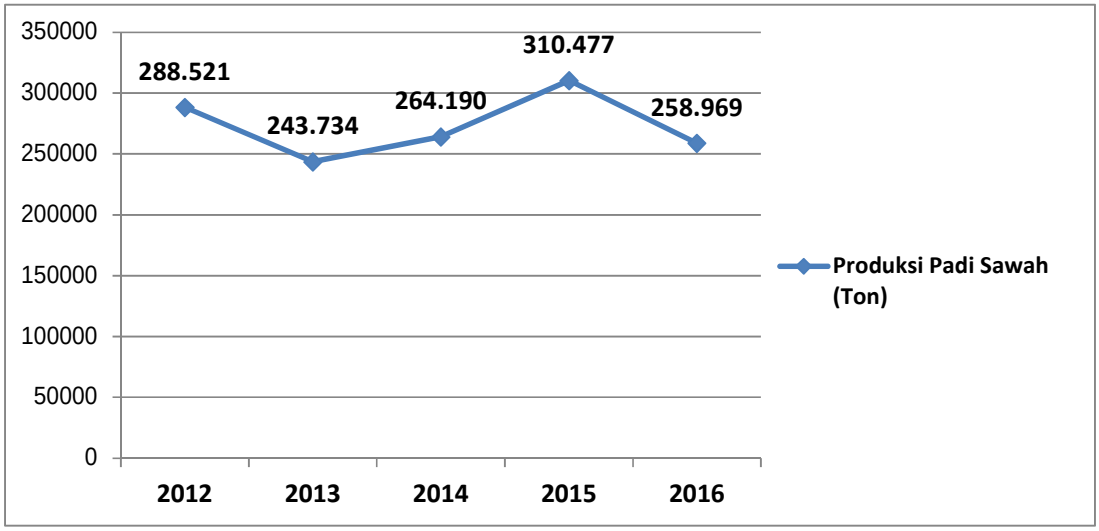
No	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Lhoong	1.350	1.258	1.366	1.122	1.122
2.	Lhoknga	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Leupung	858	550	570	570	570
4.	Indrapuri	2.780	2.945	2.945	3.075	3.087
5.	Kuta Cot Glie	2.915	2.915	2.915	2.915	2.960
6.	Seulimeum	3.911	3.503	3.648	3.648	3.828
7.	Kota Jantho	1.599	1.599	1.599	1.599	1.683
8.	Lembah Seulawah	885	770	907	907	907
9.	Mesjid Raya	47	59	89	89	89
10.	Darusalam	2.346	1.230	1.076	1.076	942
11.	Baitussalam	245	248	248	248	248
12.	Kuta Baro	2.108	2.108	2.158	2.158	2.158
13.	Montasik	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253
14.	Blang Bintang	1.818	1.818	1.843	1.843	1.843
15.	Ingin Jaya	2.429	2.336	1.854	1.854	1.809
16.	Kr. Barona Jaya	285	260	270	226	226
17.	Suka Makmur	1.645	1.647	1.647	1.647	1.647
18.	Kuta Malaka	644	642	642	642	642
19.	Simpang Tiga	1.321	1.351	1.376	1.376	1.376
20.	Darul Imarah	681	681	681	681	681
21.	Darul Kamal	630	630	630	630	630
22.	Peukan Bada	815	815	815	815	815
23.	Pulo Aceh	285	285	313	313	313
Jumlah		**33.850**	**31.903**	**31.845**	**31.687**	**31.829**

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, 2013 – 2017

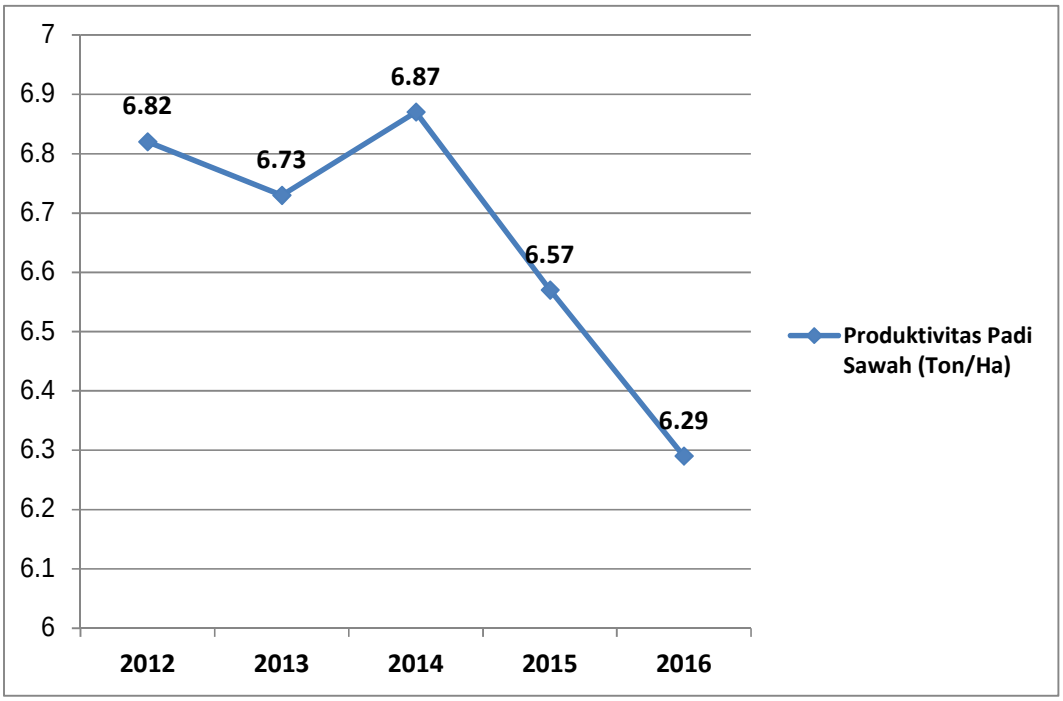
Luas lahan baku sawah di Kabupaten Aceh Besar terdiri dari sawah Irigasi Teknis (20.403 Ha), Irigasi Pedesaan (0 Ha), Irigasi ½ Tehnis (0 Ha), Pompanisasi (0 Ha), Tadah Hujan (11.517 Ha) dan Rawa (78 Ha). kondisi tersebut tercatat sampai dengan tahun 2016.

Luas lahan baku sawah di Kabupaten Aceh Besar cenderung mengalami penurunan sampai dengan tahun 2015 akibat dari alih fungsi lahan sawah menjadi fungsi-fungsi yang lain seperti: permukiman, industri dan jasa. Wilayah yang banyak mengalami alih fungsi lahan yaitu: Kec. Darul Imarah, Kec. Ingin Jaya, Kec. Kr. Barona Jaya, Kec. Darussalam, Kec. Peukan Bada, Kec. Blang Bintang, dan Kec. Daru Kamal. Namun pemerintah terus melakukan cetak sawah baru sehingga pada tahun 2016 luas lahan baku sawah sedikit mengalami peningkatan yang tercatat sebesar 31.829 Ha.

Grafik 2.5
Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2012 - 2016



Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2012 – 2017



Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2012 – 2017

Berdasarkan data BPS Aceh Besar, Produksi padi sawah pada tahun 2016 tercatat sebanyak 258.969 ton dengan luas panen sebesar 41.193 Ha dan produktivitasnya tercatat sebesar 6,29 Ton/Ha. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penurunan produksi dan produktivitas padi sawah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain: kemarau panjang, alih fungsi lahan pertanian dan menurunnya debit air irigasi akibat *illegal logging*.

Kabupaten Aceh Besar juga menghasilkan komoditas unggulan seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, cabe besar, tomat, bawang merah, kelapa, kemiri, kakao, kopi, pinang, mangga, langsat, durian, rambutan, pisang, dan semangka. Upaya peningkatan produksi dan produktivitas dilakukan melalui penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi, termasuk memberi bantuan sarana dan prasarana produksi serta pemberdayaan petani. Adapun komoditi unggulan pertanian lainnya di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.43
Komoditi Unggulan Pertanian dan Perkebunan
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
Pertanian:										
Jagung	468	2.322	419	2.105	1.224	6.212	1.318	6.616	706	4.224
Ubi Kayu	422	7.356	340	5.785	385	8.182	711	11.587	388	6.416
Ubi Jalar	150	213	115	1.548	113	2.091	308	6.142	76	1.518
Perkebunan:										
Kelapa	8.155	8.970,5	8.205	9.025,5	8.205	5.908	8.205	5.908	8.205	5.908
Kemiri	2.146	1.394,90	2.146	1.394,90	2.146	1.394,90	2.146	1.395	2.146	1.395
Kakao	428	428	428	426	458	320,9	457	320	457	320
Kopi	1.331	1.597,8	1.341	1.609,8	1.356	678,25	1.279	639	1.279	639
Pinang	971	1.554	971	1.554	975	1.560	974	1.558	974	1.558

Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2013 – 2017

Pengembangan tanaman unggulan perkebunan disesuaikan dengan kondisi dan potensi, termasuk mempertimbangkan prospek ekonomi dan keinginan masyarakat sebagai penerima manfaat. Selama kurun waktu 2012-2016, beberapa komoditas unggulan pertanian dan perkebunan telah dikembangkan seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kelapa, kemiri, kakao,kopi, pinang.

b. Peternakan

Pembangunan peternakan didukung oleh strategi pembinaan kawasan melalui 3 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTB), yaitu kawasan UPTB ternak Ruminansia besar di Data Gaseu Kecamatan Kota Jantho, UPTD ternak Ruminansia kecil di Gampong Panca Kecamatan Seulimeum, dan UPTD ternak unggas di Gampong Rabo Kecamatan Pulo Aceh.

Dalam rangka mengendalikan mutu daging telah dibangun sarana Rumah Potong Hewan (di Lambaro Kecamatan Ingin Jaya) dengan luas tanah 8.625 m^2 dengan fasilitas yang memadai. Di samping itu, usaha penertiban perdagangan jual beli hewan dilakukan dengan merevitalisasi pasar hewan di Sibreh Kecamatan Suka Makmur, pasar hewan Seulimeum, dan pasar hewan Krueng Barona Jaya. Semua ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi peningkatan penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak daerah ataupun retribusi.

Populasi ternak besar di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2016 antara lain populasi Sapi, Kerbau, dan Kuda tercatat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun populasi ternak kecil antara lain Kambing dan Domba mengalami penurunan pada tahun

2016. Kemudian, untuk populasi jenis ternak unggas seperti Ayam Ras, Ayam Buras, dan Itik terjadi peningkatan yang sangat signifikan mencapai lebih dari satu juta ekor ternak. Hal tersebut dapat dilihat pada rincian tabel berikut :

Tabel 2.44
Populasi Ternak di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2012 – 2016

Tahun	Sapi (Ekor)	Kerbau (Ekor)	Kuda (Ekor)	Kambing (Ekor)	Domba (Ekor)	Ayam Ras (Ekor)	Ayam Buras (Ekor)	Itik (Ekor)
2012	72.894	16.134	3	75.473	11.848	549.375	423.410	186.778
2013	79.000	21.128	3	110.270	27.562	392.331	405.774	195.166
2014	89.511	25.064	5	99.401	27.785	713.077	440.873	198.909
2015	99.639	30.133	3	113.279	26.725	1.378.163	471.377	207.158
2016	108.088	36.756	11	83.338	8.784	11.802.380	8.713.120	2.953.935

Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2013 – 2017

Jumlah produksi daging ternak besar pada tahun 2016 tercatat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan kondisi tersebut juga terjadi pada ternak kambing, namun ternak domba pada tahun 2016 tercatat mengalami penurunan jumlah produksi daging. Untuk produksi daging jenis unggas yang paling banyak meningkat pada tahun 2016 adalah daging ayam ras. Kondisi peningkatan tersebut juga diikuti oleh jenis unggas lainnya. Rincian produksi daging di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.45
Produksi Daging di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2012 - 2016

Tahun	Sapi (Kg)	Kerbau (Kg)	Kambing (Kg)	Domba (Kg)	Ayam Buras (Kg)	Ayam Ras Petelur (Kg)	Ayam Ras Pedaging (Kg)	Itik (Kg)
2012	37.188	513.861	455.144	304.525	783.766	15.205	234.548	181.856
2013	2.415.506	524.813	829.713	192.013	931.731	47.231	245.621	164.175
2014	1.675.473	665.463	496.656	116.862	117.186	14.133	32.286	77.285
2015	1.699.203	674.233	503.709	118.525	132.619	42.240	108.836	81.058
2016	1.762.166	773.792	521.040	51.761	156.825	970.943	2.276.375	1.896.414

Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2013 – 2017

Produksi kulit ternak di Kabupaten Aceh Besar terjadi fluktuasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang tercatat mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya, sedangkan produksi telur unggas pada tahun 2016 cenderung mengalami peningkatan kecuali pada unggas jenis ayam bursa yang tercatat mengalami sedikit penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada rincian tabel berikut :

Tabel 2.46
Produksi Hasil Peternakan di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2012 – 2016

	Kulit (Lembar)				Telur (Kg)		
Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Ayam Buras	Ayam Ras	Itik
2012	34.676	36.201	77.210	34.070	228.301	537.878	1.158.525

	Kulit (Lembar)				Telur (Kg)		
Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Ayam Buras	Ayam Ras	Itik
2013	11.455	5.992	12.703	3.175	172.545	579.361	774.081
2014	49.256	45.800	47.594	12.746	162.299	18.353	78.066
2015	49.780	45.172	48.152	12.410	197.978	409.631	646.333
2016	24.712	10.295	42.644	14.804	193.716	938.533	1.475.311

Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2013 – 2017

c. Kelautan dan Perikanan

Luas areal budidaya perikanan pada tahun 2016 di Kabupaten Aceh Besar tercatat sebesar 1.769,9 Ha. Angka tersebut terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Aceh Besar juga fokus pada budidaya perikanan laut dan darat (rincian dapat dilihat pada tabel berikut).

Tabel 2.47
Luas Areal Budidaya Perikanan
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016

Tahun	Tambak (Ha)	Kolam (Ha)	Sungai (Ha)	Waduk (Ha)	KJA (Ha)	Total (Ha)
2012	1.448,1	500,9	-	-	2,5	1951,5
2013	632	89,3	719,9	259,7	2,5	1.703,4
2014	549,6	95,1	719,9	259,8	2,5	1.626,9
2015	681,2	96,5	719,9	259,8	2,5	1.759,9
2016	691,2	96,5	719,9	259,8	2,5	1.769,9

Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2013 – 2017

Selain itu, prasarana perikanan yang tersedia di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2016 diantaranya TPI sebanyak 6 unit, PPI sebanyak 2 Unit, Dermaga sebanyak 10 unit, dan Balai Nelayan tercatat sebanyak 18 unit.

Seluruh pelayanan infrastruktur tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan produktifitas nelayan di Wilayah Kabupaten Aceh Besar. Adapun Jumlah produksi perikanan yang ada di Kabupaten pada tahun 2016 sebesar 17.396,1 ton, dimana produksi perikanan darat sebanyak 751,1 ton dan produksi perikanan laut sebanyak 16.645 ton. Kondisi ini menjelaskan bahwa produksi perikanan di Kabupaten Aceh Besar terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dan rincian produksi perikanan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48
Produksi Perikanan di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2012 – 2016

Tahun	Perikanan Darat (Ton)	Perikanan Laut (Ton)	Total (Ton)
2012	280,8	2.555	2.835,8
2013	389	5.733,8	6.122,8
2014	423,5	6.848,2	7.271,7
2015	482,3	15.879	16.361,3
2016	751,1	16.645	17.396,1

Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2013 – 2017

2.3.3.2 Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Bidang Energi

Penyediaan energi listrik bagi masyarakat merupakan kewenangan pemerintah melalui PT PLN. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar hanya memaksimalkan penyaluran listrik di daerah pelosok atau terpencil yang belum terjangkau oleh jaringan PT PLN. Jumlah pembangkit saat ini meliputi Ranting Jantho, daerah kerja Saree, Seurapong, Deudap Pulo Aceh, Krueng Raya, Leupung, Lhoong, Indrapuri, Ranting Keude Bieng, dan Ranting Lambaro. Pada tahun 2016 distribusi listrik telah menjangkau 603 gampong, atau 99,83 persen, dengan daya tersambung sebesar 85.122.925 VA dan total produksi listrik sebesar 152.664.927 KWH .

Saat ini pemenuhan kebutuhan energi listrik di Aceh Besar relatif terpenuhi. Secara umum terdapat empat klasifikasi pelayanan, yaitu pelayanan sosial, rumah tangga, bisnis/usaha, industri/hotel, dan publik (penerangan jalan).

Pemerataan layanan kebutuhan listrik perlu diusahakan semaksimal mungkin mengingat salah satu indikator berkembangnya suatu kota atau wilayah adalah terpenuhinya kebutuhan akan penerangan/listrik. Jenis pembangkit yang disediakan tiap kawasan tidak sama, disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

b. Bidang Sumber Daya Mineral

Sumber daya mineral Aceh Besar didominasi bahan galian golongan C, yang berada di samping Daerah Aliran Sungai (DAS) dan bahan batuan pegunungan (tebing). Bahan galian C umumnya digunakan sebagai bahan bangunan. Pengusahaannya sebagian besar dengan cara tradisional dan beberapa diantaranya dengan mekanisasi.

2.3.3.3 Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Sektor industri, pedagangan, koperasi, dan UKM di Kabupaten Aceh Besar pasca musibah tsunami secara kuantitas tumbuh sangat signifikan, terutama karena didukung pelaksanaan program rehab-rekons.

Pada sektor industri, terus dilakukan pembinaan dan pengembangan industri skala kecil, terutama industri kerajinan dan industri pengolahan pangan. Industri kerajinan yang merupakan usaha masyarakat antara lain industri kerajinan tenun songket, bordir, tas dan dompet, peci/kopiah, sulam benang mas, anyaman rotan, anyaman bili, keset kaki, dan pembersih lantai. Untuk industri pengolahan pangan dalam skala kecil antara lain industri pengolahan sirup pohon nira, dodol Aceh, gula U, dodol tape ubi, keripik ubi, kue bhoi, bubuk kopi, limun, kelapa gongseng, dan pengolahan ikan. Kelompok industri logam juga dengan kapasitas skala kecil antara lain industri pembuatan rencong Aceh, dan alat rumah tangga, parang/pisau, dan alat mesin pertanian. Sedangkan industri kimia dan bahan bangunan skala kecil dan terbatas antara lain industri pupuk magnesium dan batu bata. Rincian unit usaha dan tenaga kerja industri kecil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.49
Unit Usaha dan Tenaga Kerja Industri Kecil
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015

Uraian	Formal		Non Formal	
	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja
Industri Pangan	39	287	1.352	3.863
Industri Sandang	2	20	155	281
Industri Kimia dan Bahan Bangunan	16	144	385	2.413
Industri Logam dan Elektronika	7	505	229	675
Industri Kerajinan	4	665	209	756
Total	**68**	**1.621**	**2.330**	**7.988**

Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2016

2.3.3.4 Bidang Ketransmigrasian

Perkembangan ketransmigrasian relatif stagnan, terutama terkait dengan konflik yang berkepanjangan yang mengganggu lingkungan transmigrasi. Akibatnya, sebagian masyarakat yang berdiam di kawasan permukiman transmigrasi terpaksa harus meninggalkan lokasi permukiman ke daerah lain yang relatif terjamin keamanannya. Namun, seiring dengan membaiknya kondisi daerah, terutama pasca MoU Helsinki, sebagian transmigran telah ada yang kembali ke lokasi tempat tinggalnya semula.

Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya keterampilan warga transmigrasi (lokal) untuk mengolah potensi ekonomi yang ada di lokasi transmigrasi. Disamping itu, sarana dan prasarana pendukung (fasilitas umum) yang tersedia untuk warga transmigrasi belum memadai.

Di Kabupaten Aceh Besar terdapat 7 (tujuh) lokasi pemukiman transmigrasi yang memerlukan perhatian untuk dibina dan diberdayakan. Lokasi-lokasi tersebut antara lain di Empee Awee, Jalin/Sukatani, Leungah, Panca Kubu, Jantho Baru, UPT Teureubeh, dan Cucum.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Kemampuan Ekonomi

Analisis kinerja kemampuan ekonomi daerah dilihat antara dari indikator pengeluaran penduduk per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, total produktivitas daerah, dan nilai tukar petani (NTP).

a. Pengeluaran Penduduk per Kapita

Pengeluaran per Kapita penduduk Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2015 dan tahun 2016 lebih dominan pada kisaran antara Rp.500.000,- sampai dengan Rp.749.999,- yang mencapai lebih dari 30%. Kondisi ini dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang cenderung menurun mengingat harga kebutuhan pokok yang cenderung tinggi dan rata-rata garis pendapatan (kemiskinan) per perbulan sebesar Rp. 398.752,.

Tabel 2.50
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 - 2016

Golongan Pengeluaran (Rp)	2015 (%)	2016 (%)
< 150.000	-	-
150.000 – 199.999	0,07	-
200.000 – 299.999	3,88	2,53
300.000 – 499.999	29,43	23,48
500.000 – 749.999	34,48	36,32
750.000 – 999.999	15,20	14,91
1.000.000 – 1.499.999	11,02	17,61
1.500.000 +	5,91	5,15

Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2016 – 2017

b. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita

Konsumsi non pangan merupakan pengeluaran untuk memenuhi berbagai macam barang sandang, perumahan, bahan bakar, dan sebagainya yang dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga. Keanekaragamannya tergantung pada tingkat pendapatan rumah tangga yang mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita penduduk Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2015 dan tahun 2016 di dominasi oleh kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga yang mencapai lebih dari Rp.100.000,- perbulan. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.51
Pengeluaran per Kapita Sebulan Non Pangan
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 – 2016

No.	Kelompok Barang	2015 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	139.254	195.385
2.	Aneka Barang dan jasa	111.057	66.710
3.	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	27.014	32.758

No.	Kelompok Barang	2015 (Rp)	2016 (Rp)
4.	Barang-barang yang tahan lama	12.913	14.209
5.	Pajak dan asuransi	10.425	11.071
6.	Keperluan pesta dan upacara	8.388	3.345
	Total	**309.051**	**323.480**

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2016 – 2017

c. Total Produktivitas Daerah

Total produktivitas daerah diketahui melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Secara umum, produkivitas sektor pertanian masih mendominasi total produktivitas daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar penduduk di Kabupaten Aceh Besar memiliki lapangan usaha di sektor pertanian sehingga memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB Kabupaten Aceh Besar. Penyusunan PDRB dapat disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan yang secara rinci dapat dilihat pada tebel berikut.

Tabel 2.52
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Besar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2012–2016

	Sektor/Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.735.597,7	1.911.643,8	2.126.829,7	2.377.538,6	2.624.842,4
B	Pertambangan dan Penggalian	738.464,5	799.692,3	833.621,3	785.883,6	733.915,5
C	Industri Pengolahan	184.524,7	204.830,1	224.626,4	242.953,5	260.989,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.121,8	6.253,5	6.830,5	7.374,3	7.953,6
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.020,6	3.279,2	3.620,3	4.118,9	4.660,3
F	Konstruksi	1.126.978,1	1.198.655,1	1.299.569,5	1.398.276,8	1.482.924,3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.407.427,6	1.533.611,3	1.675.902,3	1.795.035,4	1.914.579,7
H	Transportasi dan Pergudangan	1.082.620,2	1.261.529,6	1.349.237,3	1.432.995,3	1.493.568,3
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	108.471,6	119.103,6	129.851,3	140.339,8	155.127,5
J	Informasi dan Komunikasi	407.426,6	433.637,2	449.045,2	468.027,9	480.756,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	98.341,0	112.761,7	131.119,4	135.576,7	143.600,6
L	Real Estate	414.056,1	445.766,2	484.765,1	526.245,8	577.298,5
M	Jasa Perusahaan	27.565,1	29.245,2	31.254,3	33.105,8	35.412,2
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	430.245,2	463.258,2	503.635,1	551.262,9	591.622,0
0	Jasa Pendidikan	115.125,2	122.965,2	133.141,2	141.764,1	151.326,0
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	140.254,6	149.726,2	160.264,2	170.241,1	182.262,3
Q	Jasa Lainnya	92.526,2	98.426,2	106.247,5	110.532,3	119.265,3
	PDRB	**8.118.766,9**	**8.894.384,3**	**9.649.744,3**	**10.321.133,0**	**10.960.104,3**

Sumber: Tinjauan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha, 2013 – 2017

Tabel 2.53
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Besar Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2012–2016

	Sektor/Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.572.572,8	1.643.338,0	1.722.460,5	1.820.403,4	1.914.078,6
B	Pertambangan dan Penggalian	774.921,9	799.371,1	810.302,5	776.217,4	719.006,6
C	Industri Pengolahan	166.495,0	175.815,4	184.530,9	192.299,4	200.345,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.455,6	6.718,0	7.150,2	7.522,2	8.100,4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.738,7	2.827,7	2.982,7	3.142,2	3.314,5
F	Konstruksi	1.070.267,6	1.118.786,7	1.170.645,7	1.233.674,2	1.292.185,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.313.706,3	1.373.228,2	1.437.160,6	1.505.629,6	1.572.710,7
H	Transportasi dan Pergudangan	929.688,4	959.769,0	984.269,4	1.018.382,7	1.103.040,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100.105,0	104.086,0	108.260,0	111.855,4	118.054,8
J	Informasi dan Komunikasi	369.636,0	382.641,0	395.734,0	410.325,2	421.062,6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	84.673,8	92.101,3	101.071,6	103.868,5	107.096,8
L	Real Estate	387.863,0	403.416,0	423.632,0	451.541,2	483.265,6
M	Jasa Perusahaan	26.496,0	27.561,0	28.692,0	29.615,2	30.621,6
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	405.963,0	422.236,0	440.232,0	468.461,2	488.326,5
0	Jasa Pendidikan	113.476,0	117.644,0	122.526,0	126.254,2	130.171,5
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	134,925.0	141,264.0	148,341.0	154,728.2	161,865.3
Q	Jasa Lainnya	89.112,0	92.664,0	96.467,0	99.324,2	105.163,3
	PDRB	**7,549,095.9**	**7,863,467.4**	**8,184,457.8**	**8,513,244.9**	**8,858,410.25**

Sumber: Tinjauan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha, 2013 – 2017

d. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Nilai Tukar Petani (NTP) dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.54
Perkembangan Nilai Tukar Petani
Provinsi Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Sub Sektor	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
1.	Tanaman Pangan	111,82	99,17	97,29	95,91	93,54
2.	Hortikultura	100,01	98,79	99,85	105,55	104,86
3.	Perkebunan Rakyat	110,81	95,86	97,38	90,33	91,73
4.	Peternakan	99,22	98,00	98,99	100,57	100,89
5.	Perikanan	99,95	100,60	100,66	97,66	97,86
	Rata-rata	**104,14**	**97,72**	**98,15**	**96,64**	**96,26**

Sumber : BPS Provinsi Aceh, 2013 – 2017

Nilai Tukar Petani (NTP) mengacu kepada NTP yang berlaku untuk Provinsi Aceh, karena hasil survey social ekonomi nasional (Susenas) hanya menghitung nilai tukar petani di tingkat Provinsi karena data inflasi hanya ada di tingkat Provinsi (dihitung berdasarkan lokasi cabang Bank Indonesia di semua daerah).

Secara umum Nilai Tukar Petani (NTP) cenderung menurun dimana rata-rata NTP pada tahun 2012 sebesar 104,14% kemudian menurun menjadi 96,26% pada tahun 2016 yang menunjukan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih kecil dari pada indeks harga yang dibayar petani. Hal ini disebabkan oleh harga barang produksi pertanian di tingkat petani rendah, sedangkan harga kebutuhan petani lebih tinggi baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk proses produksi pertanian. Rendahnya nilai produksi yang diterima oleh petani disebabkan oleh beberapa faktor baik makro maupun mikro antara lain: angka inflasi yang cenderung meningkat, sistem pemasaran produksi pertanian yang masih tradisional dimana kontrol pasar berada di tangan produsen dan bukan di tangan konsumen.

2.4.2 Fasilitas Infrastuktur Darat dan Udara

Lalu lintas penerbangan udara baik dalam maupun luar negeri di Bandara Sultan Iskandar Muda Kabupaten Aceh Besar tercatat terus meningkat hingga tahun 2016. Total jumlah pesawat yang datang dan berangkat pada tahun 2016 sebanyak 7.546 penerbangan domestik dan 1.615 penerbangan internasional dengan jumlah penumpang sebesar 804.993 orang untuk penerbangan domestik dan 163.045 orang untuk penerbangan internasional. Banyaknya wisatawan dan pelaku usaha yang datang ke Provinsi Aceh juga ikut mempengaruhi aktifitas penerbangan di Bandara Sultan Iskandar Muda. Rincian jumlah pesawat dan arus penumpang penerbangan domestik dan internasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.55
Jumlah Pesawat dan Arus Penumpang Penerbangan Domestik dan Internasional
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016

Tahun	Jenis Penerbangan	Pesawat (Unit)		Penumpang (Orang)	
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
2012	Domestik	2.582	2.577	315.458	307.815
	Internasional	498	502	48.321	46.735
2013	Domestik	3.367	3.373	328.294	345.324
	Internasional	556	543	50.305	48.183
2014	Domestik	2.212	2.285	295.413	311.174
	Internasional	553	564	53.966	55.530
2015	Domestik	2.359	2.366	301.002	312.453
	Internasional	658	655	67.702	66.930
2016	Domestik	3.780	3.766	388.935	416.058
	Internasional	804	811	81.250	81.795

Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2013 – 2017

Lintas darat berupa kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut yang biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang

diatas jalan raya. Kendaraan bermotor yang terdaftar di POLRES Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan pada tahun 2016 yang tercatat sebanyak 66.044 unit dengan jenis kendaraan terbanyak adalah sepeda motor yang berjumlah 53.175 unit.

Tabel 2.56
Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016

No	Jenis Kendaraan	2012 (Unit)	2013 (Unit)	2014 (Unit)	2015 (Unit)	2016 (Unit)
1.	Mobil Barang / Truk	617	1.011	672	410	853
2.	Mobil Penumpang	2.629	2.262	2.441	891	5.380
3.	Jeep	694	1.092	1.019	70	1.479
4.	Sedan	676	1.049	1.015	498	2.485
5.	Pick Up	1.909	1.073	1.002	308	2.365
6.	Sepeda Motor	44.705	41.883	40.633	9.625	53.175
7.	Becak Motor	12	14	21	13	13
8.	Becak Barang	-	-	3	3	3
9.	Mobil Bus	18	28	30	30	291
	Total	**51.260**	**48.412**	**46.836**	**11.848**	**66.044**

Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2013 – 2017

2.4.3 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terbagi atas beberapa bagian/fungsi yaitu daerah daratan yang berfungsi sebagai daerah pemukiman dan lahan perkebunan serta pertanian, dan daerah rawa/tambak terdapat di sepanjang pantai. Pasca tsunami terjadi pergeseran pemanfaatan sebagian lahan dari sebelumnya di daerah pantai, cenderung beralih mengarah menjauhi pantai. Hal ini terjadi akibat kerusakan kawasan di pesisir pantai dan terjadinya penurunan permukaan daratan serta trauma terhadap ancaman bencana. Lahan di bagian timur, tengah, dan barat cenderung dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan/tambak), pemukiman penduduk, serta perdagangan dan jasa.

Kawasan permukiman perkotaan dan pasar lebih terkonsentrasi pertumbuhannya di pusat Ibukota Kecamatan, yaitu di Sibreh, Lambaro Angan, Lambaro, Jantho, Keutapang, Samahani, Tungkop, Lhoong, Lhoknga, Leupung, Peukan Biluy, Peukan Ateuk, Indrapuri, Keumireu, Peukan Bada, Seuneulop, Lampakuk, Seulimeum, Lampuyang, Cot Goh, Saree, Lamtamot, dan Krueng Raya.

Luas pemukiman terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya pusat kegiatan ekonomi, seperti pertanian, perdagangan, dan jasa. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga memandang perlu menetapkan beberapa Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Salah satunya adalah kawasan strategis kabupaten untuk pembangunan kota baru dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan efektifitas pemerintahan. Luas pemanfaatan lahan di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.57
Luas Kawasan Lindung dan Budidaya
Kabupaten Aceh Besar

No	Jenis Kawasan	Sub Jenis	Luas (Ha)	Prosentase Terhadap Luas Wilayah Kabupaten (%)	Sebaran Lokasi	Keterangan
I.	**Kawasan Lindung**					
A	Kawasan hutan lindung	Hutan Lindung	69.624,17	24	Pulo Aceh, Lhoknga, Montasik, Peukan Bada,Darul Imarah, Darul Kamal, Simpang Tiga, Sukamakmur, Kuta Malaka, Indrapuri, Seulimuem, Kuta Cot Glie, Kota Jantho, Lhoong, Leupung	Sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 103/MenLHK-II/2015
		Sub jumlah	*69.624,17*	24		
B	Kawasan perlindungan setempat	Sempadan pantai	2.392,36	0,82	Sepanjang Pantai Kabupaten Aceh Besar (Pulo Aceh, Leupung, Mesjid Raya, Baitussalam, Lhoknga, Lhoong, Peukan Bada, Seulimeum)	Sesuai dengan RTRWK Aceh Besar
		Sempadan sungai	4.768,00	1,64	DAS Kr. Aceh, Kr.Jreu, Kr.Tengku, Kr. Angan, Kr. Payo, Kr. Bihue, Kr. Kala, Kr. Leungah, Lampanah, dan	Kawasan ini 35,37 % dari catchment area seluruh DAS yang ada yaitu seluas 3.178 ha

No	Jenis Kawasan	Sub Jenis	Luas (Ha)	Prosentase Terhadap Luas Wilayah Kabupaten (%)	Sebaran Lokasi	Keterangan
					seluruh mata air yang ada	
		Sempadan Waduk	27,64	0,009	Kuta Cot Glie	
		Ruang Terbuka Hijau	36,44	0,012	Tersebar di pusat-pusat kota dan pemukiman	
		Sub jumlah	*7.224,44*	2,49		
C	Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	Cagar alam/Taman Wisata Alam • Suaka Marga Satwa Pinus Jantho	15.281,37	5,26	• CA Hutan Pinus Jantho di Kota Jantho dan Lembah Seulawah	Sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 103/MenLHK-II/2015
		• TWA Pinus Aceh	2.556,02	0,88	• TWA Pinus Jantho	
		• TWA Kuta Malaka	1.544,08	0,53	• Kuta Malaka di Kec. Kuta Malaka	
		Taman hutan rakyat	6.122,85	2,11	Tahura Pocut Meurah Intan di Lembah Seulawah	Sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 103/MenLHK-II/2015
		Cagar budaya	3,09	0,001	Peninggalan kesultanan Aceh di Masjid Raya	Sesuai dengan RTRWK Aceh Besar
		Sub jumlah	*25.507,41*	*8,79*		
D	Kawasan rawan bencana	Kawasan rawan erosi	27.109,80		Kec. Seulimeum, Masjid Raya, Puncak lereng G. Seulawah dan	Sesuai dengan RTRWK Aceh Besar

No	Jenis Kawasan	Sub Jenis	Luas (Ha)	Prosentase Terhadap Luas Wilayah Kabupaten (%)	Sebaran Lokasi	Keterangan
					wilayah dengan kelerengan> 40%	
		Kawasan rawan banjir	11.435,00		Kec. Ingin Jaya, Montasik, Darul Imarah, dan Kuta Malaka	Sesuai dengan RTRWK Aceh Besar
		Kawasan rawan tanah longsor	16.509,00		Kec.Kuta Cot Glie, Kota Jantho, dan Kuta malaka	
		Kawasan rawan gunung berapi	65.044,00		Kec. Seulimeum, Masjid Raya, dan Lembah Seulawah	
		Kawasan bahaya tsunami	16.422,00		Kec. Peukan Bada, Baitusslam, masjid Raya, Lhoknga, Pulo Aceh, Lhoong, dan Leupung	
		Sub jumlah	*136.519,80*	*47,02*		
E	Kawasan lindung lainnya	Kebun plasma nutfah (KPN)	694,54		KPN Leupung	Sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 103/MenLHK-II/2015
		Kawasan pengungsian satwa	2,00		Pusat Latihan Gajah (PLG) di Lembah Seulawah	Berada dalam Taman Hutan Rakyat Pocut Meurah Intan
		Hutan dengan tujuan khusus	183,28		Kawasan hutan pendidikan STIK	Berada dalam kawasan hutan produksi
		Sub jumlah	*1.866,95*	0,64		

No	Jenis Kawasan	Sub Jenis	Luas (Ha)	Prosentase Terhadap Luas Wilayah Kabupaten (%)	Sebaran Lokasi	Keterangan
	LUAS KAWASAN LINDUNG		**103.822,02**	**35,76**		
II.	**KAWASAN BUDIDAYA**					
	Kawasan hutan	Hutan produksi terbatas	40,02		Kec. Lhoong	Sesuai dengan RTRWK Aceh Besar
		Hutan Produksi Tetap	67.998,71		Mesjid Raya, Darussalam, Kuta Baro, Blang Bintang, Montasik, Indrapuri, Kuta Cotglie, Seulimeum, Lembah Seulawah, Kota Jantho	Sesuai dengan RTRWK Aceh Besar
		Hutan Produksi Konversi	4.368,52		Seulimeum, Montasik, Lembah Seulawah, Kuta Baro, Kota Jantho, Indrapuri, Blang Bintang	Sesuai dengan RTRWK Aceh Besar
		Hutan Rakyat	1.128,70		Pulo Aceh, Peukan Bada, Lhoknga, Leupung, Lhoong, Mesjid Raya, Seulimeum, Lembah Seulawah	Sesuai dengan RTRWK Aceh Besar
	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pertanian Lahan Basah	23.054,48		Pulo Aceh, Peukan Bada, Lhoknga, Leupung, Lhoong, Darul Imarah, Darul Kamal, Simpang Tiga,	Sesuai dengan RTRWK Aceh Besar

No	Jenis Kawasan	Sub Jenis	Luas (Ha)	Prosentase Terhadap Luas Wilayah Kabupaten (%)	Sebaran Lokasi	Keterangan
		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	14.202,55		Mesjid Raya, Baitussalam, Darussalam, Kuta Baro, Kr.Br.Jaya, Ingin Jaya, Blang Bintang, Sukamakmur, Montasik, Kuta Malaka, Indrapuri, Kuta Cotglie, Seulimeum, Lembah Seulawah, Kota Jantho Kota Jantho, Lembah Seulawah, Seulimeum, Kuta Cotglie, Indrapuri, Montasik, Kuta Malaka, Sukamakmur, Blang Bintang, Leupung, Lhoknga, Peukan Bada, Simpang Tiga, Darul Kamal, Darul Imarah, Ingin Jaya, Kuta Baro, Darussalam, Kr.Br.Jaya, Lhoong, Mesjid Raya, Baitussalam, Pulo Aceh	Berada di dalam lahan basah

No	Jenis Kawasan	Sub Jenis	Luas (Ha)	Prosentase Terhadap Luas Wilayah Kabupaten (%)	Sebaran Lokasi	Keterangan
		Pertanian Lahan Kering	13.024,39		Pulo Aceh, Peukan Bada, Lhoknga, Darul Imarah, Leupung, Mesjid Raya, Darussalam, Darul Kamal, Simpang Tiga, Kuta Baro, Blang Bintang, Ingin Jaya, Sukamakmur, Montasik, Kuta Malaka, Kuta Cotglie, Indrapuri, Seulimeum, Lembah Seulawah, Kota Jantho	Sesuai dengan RTRWK Aceh Besar
		Hortikultura	2.050,48		Tersebar di semua kecamatan	Sesuai dengan RTRWK Aceh Besar
		Perkebunan	53.849,75		Tersebar disemua kecamatan	Sesuai dengan RTRWK Aceh Besar
		Peternakan	409,27		Tersebar disemua kecamatan	Sesuai dengan RTRWK Aceh Besar
	Kawasan Peruntukan Perikanan	Budidaya Air Tawar			Seulimeum, Kuta Cotglie, Lembah Seulawah, Pulo Aceh, Montasik, Kota Jantho, Baitussalam, Leupung, Lhoong, Indrapuri	Sesuai dengan RTRWK Aceh Besar

No	Jenis Kawasan	Sub Jenis	Luas (Ha)	Prosentase Terhadap Luas Wilayah Kabupaten (%)	Sebaran Lokasi	Keterangan
		Budidaya Tambak Air Payau	1.146,09		Peukan Bada, Seulimeum, Baitussalam, Mesjid Raya, Leupung, Lhoong	Sesuai dengan RTRWK Aceh Besar
	Kawasan Peruntukan Pertambangan	Kawasan Peruntukan Pertambangan	1.624,56		Tersebar di semua kecamatan	
	Kawasan Peruntukan Industri		109,62		Tersebar di semua kecamatan	Sesuai dengan RTRWK Aceh Besar
	Kawasan Peruntukan Pariwisata				Tersebar di semua kecamatan	Sesuai dengan RTRWK Aceh Besar
	Kawasan Permukiman	Permukiman Perkotaan	7.378,14		Peukan Bada, Darul Imarah, Darul Kamal, Ingin Jaya, Kr.Br.Jaya, Baitussalam, Darussalam, Kuta Baro, Blang Bintang, Sukamakmur, Indrapuri, Kota Jantho, Montasik, Kuta Malaka, Lhoknga, Seulimeum	Sesuai dengan RTRWK Aceh Besar
		Permukiman Perdesaan	4.987,44		Tersebar di seluruh kecamatan	Sesuai dengan RTRWK Aceh Besar
	Kawasan Peruntukan Lainnya	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	291,51		Tersebar diseluruh kecamatan	Lokasi : Polsek, Koramil, Polres, Airud, TNI AD, TNI AU, TNI AL.

No	Jenis Kawasan	Sub Jenis	Luas (Ha)	Prosentase Terhadap Luas Wilayah Kabupaten (%)	Sebaran Lokasi	Keterangan
		Kawasan Transmigrasi	2.978,35		Kota Jantho, Seulimeum, Kuta Cotglie,	Sesuai dengan RTRWK Aceh Besar
	LUAS KAWASAN BUDIDAYA		**186.528,71**	**64,24**		

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Besar, 2012-2032

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Kemampuan keuangan daerah akan memberikan daya dukung terhadap manajemen pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah diantaranya dapat diukur melalui kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam melakukan pengelolaan keuangan, seluruh daerah telah diberikan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar. Sebagaimana halnya dengan daerah lain, Kabupaten Aceh Besar juga memiliki kewenangan terhadap pengelolaan keuangan, dan ruang lingkup pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Besar diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi :

1. Hak untuk memungut pajak dan retribusi serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah, melaksanakan pembangunan dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Pengelolaan Pendapatan;
4. Pengelolaan Belanja; dan
5. Pengelolaan Pembiayaan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Besar perlu mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah. Oleh karenanya maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan Kabupaten Aceh Besar, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Penilaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat dari 2 (dua) segi yaitu kinerja pencapaian pendapatan dan kinerja belanja baik dari pelaksanaan program/kegiatan maupun non program/kegiatan yang telah dijabarkan dalam APBD Kabupaten Aceh Besar. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan pendekatan prestasi kerja dalam penyusunan APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja keuangan yang disajikan dalam BAB ini merupakan kinerja keuangan selama periode tahun 2012-2016 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (audited) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Besar yang telah di audit Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar merupakan instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan keuangan Kabupaten Aceh Besar yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan DPRK Aceh Besar serta ditetapkan dengan Qanun. Secara umum kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat dari perkembangan APBD dari tahun ke tahun. Analisis pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Besar pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan Kabupaten Aceh Besar dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Struktur anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Besar meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, bersumber dari :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah;
2) Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Dana Otonomi Khusus (Otsus) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Bantuan Keuangan. Selanjutnya, penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

3.1.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Aceh Besar periode 2012 – 2016 dapat diukur dari perkembangan anggaran pendapatan daerah, terutama PAD, dana perimbangan, dan dana lain-lain pendapatan yang sah.

Beberapa langkah yang telah ditempuh dalam meningkatkan pengelolaan PAD, antara lain :

1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah;
2) Upaya peningkatan penerimaan PAD dilakukan dengan kebijakan yang memperhatikan kepentingan dunia usaha dan masyarakat melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak/retribusi daerah;
3) Membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Jantho dalam rangka *law enforcement*;
4) Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD guna terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah;

5) Mendorong investasi melalui penyederhanaan proses perijinan;
6) Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja terkait;
7) Mengoptimalkan penagihan piutang pajak; dan
8) Mengefektifkan pelaksanaan Qanun-qanun tentang pajak dan retribusi yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pengelolaan Dana Perimbangan telah ditempuh melalui langkah-langkah berikut:

1) Meningkatkan koordinasi melalui pembaharuan data/informasi sehingga penetapan alokasi DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dapat terealisasi sesuai dengan tingkat pertumbuhan daerah;
2) Meningkatkan kerjasama dengan Kantor Pajak Pratama (KPP) Banda Aceh untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21; dan
3) Mendorong terlaksananya bimbingan teknis dan pelatihan perpajakan yang berkesinambungan kepada bendahara SKPD sebagai wajib Pungut Pajak Negara bekerjasama dengan Kanwil DJP Aceh dan KPP Pratama Banda Aceh.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam meningkatkan pengelolaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, antara lain adalah :

1) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan data yang akurat untuk keperluan penetapan alokasi penerimaan terkait dengan sumber pendapatan dari Bagi Hasil Pajak Provinsi sesuai dengan yang ditargetkan; dan
2) Menyampaikan program dan kegiatan strategis daerah kepada pemerintah pusat yang didanai dari sumber-sumber anggaran khusus, termasuk program percepatan pembangunan infrastruktur.

Penerimaan pendapatan Kabupaten Aceh Besar tampak mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu rata-rata sebesar 22,10 %. Pada tahun 2012, pendapatan masih Rp. 796,57 milyar, lalu bertambah menjadi Rp. 1.770,74 milyar pada tahun 2016.

Kenaikan penerimaan yang sangat signifikan terjadi pada pos penerimaan PAD, terutama lain-lain PAD yang sah. Penerimaan PAD meningkat rata-rata 25,35 %. Pos penerimaan lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan rata-rata hampir 74,74% per tahunnya. Sementara pos pajak daerah juga bertambah, yaitu rata-rata 17,15 % setiap tahunnya.

Penerimaan Dana Perimbangan secara umum juga meningkat selama periode 2012 – 2016, yaitu rata-rata 13,33 % per tahunnya. Untuk Dana Perimbangan, terlihat pos penerimaan dari DAU tumbuh rata-rata 0,07 % per tahunnya, sedangkan pos penerimaan dari sumber DAK meningkat signifikan selama periode yang sama dengan persentase rata-rata sebesar 56,47 % per tahunnya.

Untuk penerimaan dari sumber Lain-lain Pendapatan yang Sah juga terjadi peningkatan rata-rata 55,46% setiap tahunnya. Rincian gambaran pendapatan Kabupaten Aceh Besar dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Rata-Rata Realisasi Pendapatan Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pendapatan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	**PENDAPATAN**	**796,570,439,631.66**	**933,250,952,782.63**	**1,170,216,363,268.43**	**1,519,862,840,549.54**	**1,770,747,385,062.84**	**22.10**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**54,797,561,031.44**	**76,107,259,036.13**	**114,542,978,638.65**	**140,533,050,822.35**	**135,284,494,843.71**	**25.35**
1.1.1	Pajak Daerah	27,287,117,464.00	41,104,110,553.00	52,520,382,605.00	53,284,852,783.88	51,397,423,329.38	17.15
1.1.2	Retribusi Daerah	7,643,613,682.00	11,624,888,596.28	7,952,497,703.80	6,203,391,515.00	5,135,702,817.00	-9.46
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,932,977,703.39	2,481,482,703.34	2,121,335,481.97	2,770,298,936.00	2,764,081,348.50	9.35
1.1.4	Hasil Pengelolaan ZIS	11,659,039,074.72	11,883,420,605.60	14,814,679,684.67	15,897,241,142.38	17,488,527,991.62	10.67
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6,274,813,107.33	9,013,356,577.91	37,134,083,163.21	62,377,266,445.09	58,498,759,357.21	74.74
1.2	**Dana Perimbangan**	**641,009,138,818.42**	**729,735,965,895.00**	**779,747,538,993.00**	**859,950,978,542.00**	**1,057,384,175,963.00**	**13.33**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	27,916,750,939.42	25,189,948,854.00	18,104,608,247.00	16,634,938,343.00	19,076,240,537.00	-9.08
1.2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	11,449,714,879.00	10,716,349,041.00	10,697,934,746.00	5,644,425,199.00	2,498,187,834.00	-31.65
1.2.3	Dana Alokasi Umum	549,069,553,000.00	618,323,628,000.00	673,776,666,000.00	698,185,445,000.00	720,668,458,000.00	0.07
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	52,573,120,000.00	75,506,040,000.00	77,168,330,000.00	139,486,170,000.00	315,141,289,592.00	56.47
1.3	**Dana Khusus**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.3.1	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**100,763,739,781.80**	**127,407,727,851.50**	**275,925,845,636.78**	**519,378,811,185.19**	**578,078,714,256.13**	**55.46**
1.4.1	Pendapatan Hibah	4,755,842,500.00	5,464,259,591.22	905,631,200.00	22,749,021,370.00	0	68.49
1.4.2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	14,988,372,441.80	15,365,347,260.28	17,993,018,758.78	31,121,711,575.19	41,912,563,162.13	29.31
1.4.3	Dana Penyesuaian	0	86,578,121,000.00	106,820,408,000.00	317,593,588,000.00	390,675,462,800.00	65.25
1.4.4	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	22,114,658,840.00	20,000,000,000.00	150,206,787,678.00	147,914,490,240.00	145,490,688,294.00	60.15
1.4.5	Pendapatan Lainnya	58,904,866,000.00	-	-	-	-	
2	**BELANJA DAERAH**	**759,904,431,572.00**	**863,830,390,408.18**	**1,161,830,504,189.00**	**1,432,068,509,823.00**	**1,812,097,255,088.00**	**24.67**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**543,341,449,886.00**	**569,177,875,060.25**	**664,760,744,290.00**	**887,590,115,417.00**	**1,154,650,880,442.00**	**20.74**
2.1.1	Belanja Pegawai	478,997,638,765.00	507,296,600,918.25	589,373,821,565.00	621,771,279,085.00	649,712,093,276.00	7.92
2.1.2	Belanja Hibah	26,806,883,299.00	14,902,276,000.00	27,694,757,739.00	28,496,113,922.00	75,434,268,000.00	29.52
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	428,000,000.00	4,665,200,000.00	5,094,200,000.00	906,000,000.00	253,000,000.00	-12.32
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	4,736,649,000.00	4,878,700,000.00	-

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pendapatan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	36,476,602,122.00	41,465,616,122.00	42,385,623,986.00	231,602,043,810.00	423,430,869,966.00	84.58
2.1.6	Belanja Tak Terduga	632,325,700.00	848,182,020.00	212,341,000.00	78,029,600.00	941,949,200.00	10.48
2.2	**Belanja Langsung**	**216,562,981,686.00**	**294,652,515,347.93**	**497,069,759,899.00**	**544,478,394,406.00**	**657,446,374,646.00**	**31.99**
2.2.1	Belanja Pegawai	34,420,777,080.00	47,176,818,447.00	57,135,508,375.00	61,428,742,511.00	60,885,423,145.00	15.32
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108,647,649,935.00	147,556,222,016.93	231,612,131,700.00	219,393,727,559.00	197,843,310,759.00	16.16
2.2.3	Belanja Modal	73,494,554,671.00	99,919,474,884.00	208,322,119,824.00	263,655,924,336.00	398,717,640,742.00	52.62
3	**PEMBIAYAAN**	**28,060,426,428.39**	**64,729,172,924.05**	**134,149,735,298.50**	**142,546,094,377.93**	**226,330,644,654.47**	**68.52**
3.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**28,060,426,428.39**	**64,729,172,924.05**	**134,149,735,298.50**	**142,546,094,377.93**	**226,330,644,654.47**	**68.52**
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**-**	**-**	**4,000,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**0.00**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Besar, 2017

3.1.1.2. Kinerja Belanja Daerah

Komposisi belanja daerah selama lima tahun terakhir masih didominasi oleh belanja tidak langsung pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, terutama untuk membiayai belanja aparatur. Belanja aparatur daerah pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mencapai lebih dari 50 % dari total pengeluaran belanja daerah. Pada tahun 2015 dan 2016, persentase belanja aparatur mengalami penurunan menjadi kurang dari 50 %. Pada tahun tersebut sebagian besar pendapatan yang diterima dialokasikan untuk belanja langsung dan sisanya dialokasikan untuk belanja aparatur.

Tabel 3.2
Proporsi Belanja Aparatur Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2012 - 2016

No	Tahun Anggaran	Total Belanja Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1	2	3	4	5 = (3/4) x100%
		Rp	Rp	%
1.	2012	513,418,415,845.00	759,904,431,572.00	67.56
2.	2013	554,473,419,365.25	863,830,390,408.18	64.19
3.	2014	646,509,329,940.00	1,161,830,504,189.00	55.65
4.	2015	683,200,021,596.00	1,432,068,509,823.00	47.71
5.	2016	710,597,516,421.00	1,812,097,255,088.00	39.21

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Besar, 2017

3.1.1.3. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dan belum terpecahkan hingga saat ini dalam pengelolaan APBD Kabupaten Aceh Besar diantaranya adalah masih rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD. Penerimaan APBD masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah, baik DAU maupun DAK.

Tantangan yang masih ditemui dalam peningkatan penerimaan daerah pada masa yang akan datang antara lain:

1) Terbatasnya objek pajak dan retribusi daerah yang dapat dipungut sehingga berpengaruh terhadap peningkatan PAD; dan
2) Kendati memiliki potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan terutama potensi sumber daya alam, namun tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya karena adanya peraturan tentang pengendalian lingkungan hidup, sehingga potensi dimaksud tidak dapat diusahakan secara ekonomi sebagai sumber PAD.

3.1.2. Neraca Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang selama kurun waktu tertentu.

Pertumbuhan rata-rata jumlah aset Kabupaten Aceh Besar mencapai 11,32 %, yang berarti bahwa jumlah asetnya meningkat sebesar 11,32 % setiap tahunnya. Aset tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk pelakasanaan fungsi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pertumbuhan aset lancar yang menunjukan bahwa kondisi aset Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memuaskan, sehingga hasil pemeriksaan BPK masih ditetapkan dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Status WTP ini juga dipengaruhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang adalah memberikan informasi tentang utang pemerintah Kabupaten Aceh Besar kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Aceh Besar masih mempunyai kewajiban jangka pendek terkait dengan utang perhitungan kepada pihak ketiga.

Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tergambar dalam Tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	(%)
1.	**ASET**	**1,485,032,385,186.63**	**2,578,429,690,865.76**	**2,905,874,038,155.91**	**2,372,026,719,866.52**	**2,536,756,789,122.88**	**14.32**
1.1.	**ASET LANCAR**	**76,177,349,084.05**	**161,116,774,533.14**	**180,278,458,363.37**	**251,575,091,221.38**	**217,326,438,012.17**	**29.96**
1.1.1	Kas	64,730,944,827.05	134,190,798,669.50	142,535,594,377.93	226,334,260,394.47	180,004,533,221.31	**29.13**
1.2.2	Piutang Pajak	5,457,737,487.10	3,873,446,869.00	23,512,532,217.10	12,329,266,197.03	26,693,079,174.14	**48.71**
1.2.3	Beban Dibayar Dimuka	369,248,483.33	374,214,641.10	570,184,169.42	163,267,685.04	6,899,419.80	**-63.03**
1.2.4	Persediaan	5,619,418,286.57	22,678,314,353.54	13,660,147,598.92	12,748,296,944.84	10,621,926,196.92	**17.25**
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**102,652,850,003.58**	**100,657,858,391.52**	**102,578,493,822.54**	**106,836,493,301.51**	**116,976,353,046.51**	**3.32**
1.2.1	Jumlah Investasi Non Permanen	1,245,569,000.00	3,211,284,356.00	5,211,112,934.00	5,200,612,934.00	9,086,016,644.00	**64.34**
1.2.2	Jumlah Investasi Permanen	101,407,281,003.58	97,446,574,035.52	97,367,380,888.54	101,635,880,367.51	107,890,336,402.51	**1.56**
1.3	**ASET TETAP**	**1,297,569,049,389.00**	**2,310,915,804,241.00**	**2,599,991,452,101.00**	**1,929,430,843,302.53**	**2,009,399,766,492.20**	**11.55**
1.3.1	Tanah	206,248,925,875.00	351,993,554,575.00	395,698,005,043.00	396,436,027,525.00	366,414,783,332.00	**15.45**
1.3.2	Peralatan dan Mesin	160,872,768,326.00	199,182,916,342.00	221,726,950,166.00	237,136,479,670.32	260,834,247,129.68	**12.84**
1.3.3	Gedung dan Bangunan	375,888,248,641.00	608,630,403,596.79	736,572,218,437.79	767,118,200,164.93	815,808,793,966.07	**21.38**
1.3.4	Jalan, Jaringan dan instalasi	504,581,649,612.00	1,121,749,369,886.00	1,210,444,590,496.00	1,324,803,034,535.00	1,681,007,504,047.00	**35.10**
1.3.5	aset tetap lainnya	21,347,200,927.00	23,098,583,127.00	24,473,146,545.00	79,328,016,089.00	24,223,174,223.00	**3.21**
1.3.6	konstruksi dalam pengerjaan	28,630,256,008.00	6,260,976,714.21	11,076,541,413.21	16,887,620,060.00	51,770,081,681.00	**15.96**
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	(892,278,534,741.72)	(1,190,658,817,886.55)	**7.48**
1.4	**ASET LAINNYA**	**8,633,136,710.00**	**5,739,253,700.10**	**23,025,633,869.00**	**84,184,292,041.10**	**193,054,231,572.00**	**117.46**
1.4.1	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	**0.00**
1.4.2	Tuntutan Pembendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	1,212,996,205.10	1,146,076,166.00	778,259,496.10	600,000,000.00	**-20.91**
1.4.3	Kemitraan dengan Pihak kedua	-	-	-	-	-	
1.4.4	Aset tidak berwujud	630,302,000.00	1,658,936,000.00	2,224,593,000.00	2,424,570,850.00	764,013,825.00	**4.93**
1.4.5	Aset lain-lain	8,002,834,710.00	2,867,321,495.00	19,654,964,703.00	80,981,461,695.00	191,690,217,747.00	**121.23**
2	**KEWAJIBAN**	**4,510,339.00**	**(90,000,000.00)**	**-**	**398,041,801.67**	**38,264,935.67**	**70.67**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**4,510,339.00**	**(90,000,000.00)**	**-**	**398,041,801.67**	**38,264,935.67**	**70.67**
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	4,510,339.00	-	-	3,615,740.00	974,628.00	**-31.82**
2.1.2	Pendapatan di Terima Dimuka	-	(90,000,000.00)	-	34,666,666.67	12,666,666.67	
2.1.3	Utang Belanja	-	-	-	17,750,602.00	1,839,677.00	**-89.64**
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	342,008,793.00	22,783,964.00	**-93.34**
3	**EKUITAS DANA**	**1,485,027,874,847.63**	**2,578,519,690,865.76**	**2,905,874,038,155.91**	**2,371,628,678,064.85**	**2,536,718,524,187.21**	**14.32**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1,485,032,385,186.63**	**2,578,429,690,865.76**	**2,905,874,038,155.91**	**2,372,026,719,866.52**	**2,536,756,789,122.88**	**14.32**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Besar, 2017

Dalam rangka memperoleh gambaran tentang perkembangan finansial daerah, perlu dilakukan analisa atau interprestasi terhadap data finansial yang tercermin dalam laporan keuangan daerah. Terdapat dua bentuk umum rasio keuangan yang sering digunakan dalam menganalisis kondisi keuangan dan kinerja yaitu rasio likuiditas (*liquidity ratio*) dan rasio solvabilitas (*solvability ratio*). Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kewajiban (hutang) jangka pendek. Pemerintah daerah yang mempunyai kemampuan dalam membayar hutang jangka pendeknya disebut Pemerintah Daerah yang *liquid*. Tingkat likuiditas suatu daerah dapat diukur dengan beberapa cara diantaranya dengan menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek/hutang lancar (*Current Ratio*). Cara lainnya ialah dengan menunjukkan kemampuan Daerah membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan dibanding asset lain. Cara ini lebih dikenal dengan *Quick Ratio Analysis*. Sementara rasio solvabilitas yang disebut juga dengan rasio *leverage* digunakan untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh daerah dengan dana yang dipinjamkan dari pemerintah pusat/swasta/investor. Adapun rasio yang tergabung dalam rasio *leverage* adalah *total debt to equity ratio* (rasio hutang terhadap ekuitas) dan *total debt to total asset ratio* (rasio hutang terhadap total aktiva). Tabel 3.4 menggambarkan rasio lancar (*current rasio*) selama periode tahun 2012-2017. Pada tahun 2012, rasio lancer diatas angka 100 yang menunjukkan daerah mampu membayar kewajiban dalam jangka pendek. Hal ini menggambarkan bahwa aktiva lancar (aset lancar) jauh di atas jumlah hutang lancar, dengan kata lain kemampuan daerah dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya semakin tinggi. Tetapi pada tahun 2013, current ratio menunjukkan angka minus yang menunjukkan bahwa daerah belum mampu menutup kewajiban jangka pendeknya. Pada tahun selanjutnya kewajiban (hutang) daerah menunjukkan angka nol yang berarti bahwa tidak ada hutang yang perlu ditutupi, kemudian pada tahun 2015 dan 2016 kembali daerah mampu menutup kewajibannya dalam jangka pendek. Sementara untuk quick rasio juga menunjukkan di atas 1 atau 100 persen, yang berarti kemampuan aktiva lancar paling likuid mampu menutupi hutang lancar.

Sementara nilai total debt to total assets ratio dan debt to equity rasio dari periode tahun 2012-2017 menunjukkan peningkatan, namun masih dalam batas aman (solvable) dalam artian porsi hutang terhadap aktiva masih kecil. Hal ini bermakna Pemerintah Aceh sangat mempunyai kemampuan dalam memenuhi segala kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

Tabel 3.4.
Balance Sheet Ratio Tahun 2012-2017 Pemerintah Aceh

Balance sheet ratios		2012	2013	2014	2015	2016
Liquidity ratio	Current Ratio	168.89495	-17.9019	0	6.320318	56.79519
	Quick Ratio	156.43598	-15.3821	0	6.000043	54.0193
Solvability ratio	Dept of Asset Ratio	0.0003037	-0.00349	0	0.016781	0.001508
	Debt to Equity Ratio	0.0003037	-0.00349	0	0.016783	0.001508

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah lima tahun terakhir dalam periode 2012 – 2016 tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah mengalami dua kali perubahan, yaitu Permendagri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007. Di samping mengacu kepada peraturan dan perundangan, juga memuat pokok-pokok kebijakan pemerintah agar terciptanya sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, serta keterpaduan pelaksanaan program pembangunan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama periode tahun 2015 – 2016, belanja aparatur pemerintah daerah yang merupakan bagian dari belanja tidak langsung telah dikurangi dalam proporsi belanja daerah, yaitu rata rata dibawah 50 %. Berkurangnya porsi belanja aparatur ini disebabkan kebutuhan pembiayaan pengeluaran untuk belanja langsung yang sangat diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur daerah.

Belanja aparatur daerah sampai saat ini belum mampu dihemat dan bahkan memungkinkan cenderung meningkat sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan gaji dan tunjangan serta adanya penyesuaian kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala. Oleh karena itu, proporsi persentase belanja tidak langsung diusahakan agar tidak melebihi belanja langsung yang dapat menyebabkan besarnya ketergantungan penerimaan terhadap DAU dan DAK, sementara kontribusi PAD masih sangat terbatas.

Tabel 3.5
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 - 2016

No	Tahun Anggaran	Total Belanja Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1	2	3	4	5 = (3/4) x100%
		Rp	Rp	%
1.	2012	513,418,415,845.00	759,904,431,572.00	67.56
2.	2013	554,473,419,365.25	863,830,390,408.18	64.19
3.	2014	646,509,329,940.00	1,161,830,504,189.00	55.65
4.	2015	683,200,021,596.00	1,432,068,509,823.00	47.71
5.	2016	710,597,516,421.00	1,812,097,255,088.00	39.21
	Pertumbuhan Rata-rata			**54.86**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Besar, 2017

Belanja wajib dan mengikat merupakan pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar pada setiap tahun anggaran seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dan pimpinan DPRK, belanja bunga, termasuk belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa (alokasi dana gampong). Sedangkan belanja periodik prioritas utama merupakan pengeluaran yang harus dibayar secara periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka menjamin keberlangsungan pelayanan dasar prioritas pemerintah daerah, seperti

pelayanan pendidikan dan kesehatan, termasuk honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik *(good government),* diperlukan pegelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Salah satu permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tentang defisit yang terjadi pada anggaran pemerintah daerah sehingga pembiayaan defisit anggaran sangat memerlukan adanya sumber pembiayaan.

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan untuk menutup defisit mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (Piutang Daerah) dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Analisis Pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan dalam menentukan kebijakan pembiayaan dimasa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berdasarkan analisis yang dilakukan selama periode tahun 2012 – 2016, diketahui defisit terjadi pada tahun anggaran 2014 – 2016, hal ini disebabkan tidak seimbangnya antara jumlah belanja dengan jumlah pendapatan Kabupaten Aceh Besar. Meskipun *tren* pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Besar menunjukkan adanya peningkatan, namun pertumbuhan belanja Kabupaten Aceh Besar dan pengeluaran pembiayaan jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan. Adanya defisit anggaran pada tahun 2014 – 2016 menunjukkan pengelolaan APBD belum berjalan optimal, sehingga kedepan diharapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak, retribusi, ZIS dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Untuk menutup defisit anggaran diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Dari tabel 3.6 berikut dapat diketahui bahwa SiLPA tertinggi adalah pada tahun 2016 sebesar Rp. 226.330.644.654,47 dan SiLPA terendah pada tahun 2012 sebesar Rp. 28,031,926,428.39. Peningkatan SiLPA terjadi karena ada program dan kegiatan yang tidak terealisasi.

Tabel 3.6
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	796,570,439,632	933,250,952,783	1,170,207,564,920	1,519,862,840,550	1,770,747,385,063
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	759,904,431,572	863,830,390,408	1,148,589,478,968	1,432,068,509,823	1,812,097,255,088
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	0	0	4,000,000,000	5,000,000,000
	Defisit Riil	36,666,008,060	69,420,562,374	21,618,085,952	83,794,330,727	-46,349,870,025

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Besar, 2017(diolah)

Tabel 3.7
Realisasi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2016

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	SILPA Tahun Anggaran sebelumnya	28,031,926,428.39	64,726,636,258.05	134,149,735,298.50	179,980,774,629.31	226,330,644,654.47
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	0	325,121,125.00	24,172,965,700.00	71,000,000.00	89,900,000.00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	2,536,666.00	0	0	0
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Besar, 2017(diolah)

Tabel 3.8
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
		Rp	% dari Silpa	Rp	% dari Silpa	Rp	% dari Silpa	Rp	% dari Silpa	Rp	% dari Silpa
1.	Jumlah SILPA	28,031,926,428.39	100%	64,726,636,258.05	100%	134,149,735,299	100%	179,980,774,629.31	100%	226,330,644,654.47	100%
2.	Pelampauan Penerimaan PAD	2,882,893,291.44	10.28%	18,071,021,536.13	27.92%	20,032,337,816.65	14.93%	29,998,414,642.35	16.67%	8,055,423,329.38	3.56%
3.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-128,271,668.58	-0.46%	1,516,232,755.00	2.34%	2,972,582,289.00	2.22%	-14,202,262,426.81	-7.89%	-75,828,163,780.87	-33.50%
4.	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-8,132,506,358.20	-29.01%	-333,643,148.50	-0.52%	-12,472,429,635.22	-9.30%	-1,452,107,630.00	-0.81%	-2,000,000,000.00	-0.88%
5.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	71,200,819,223.00	254.00%	115,043,385,719.87	177.74%	129,013,103,907.50	96.17%	211,995,880,518.93	117.79%	232,494,396,866.47	102.72%
6.	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
5.	Kegiatan Lanjutan										

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Besar, 2017(diolah)

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung total kapasitas dan kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebelum melakukan analisis kerangka pendanaan terleabih dahulu harus memahami jenis objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD. Disamping itu diperlukan juga data-data perkembangan realisasi anggaran dan neraca daerah untuk lima tahun serta berbagai informasi pendukung dalam melakukan proyeksi APBD.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam mendesign dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya masing-masing. Untuk memberikan konstribusi yang lebih besar terhadap penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Secara umum kebijakan keuangan Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 3 (tiga) kebijakan yang meliputi: Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Kabupaten Aceh Besar. Kebijakan Pendapatan Kabupaten Aceh Besar diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Besar melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pungutan pajak, retribusi dan ZIS. Sementara kebijakan Belanja Kabupaten Aceh Besar diarahkan pada peningkatan kualitas belanja melalui alokasi belanja yang lebih besar pada program dan kegiatan dengan elastisitas positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta stabilitas harga barang.

Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari berbagai aspek yang meliputi aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Sedangkan kebijakan pembiayaan diarahkan pada penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) secara efektif dan efisien melalui penyertaan modal pemerintah dan peningkatan kapasitas investasi yang berdasarkan pada kinerja investasi.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan antar lain:

1) Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut;
2) Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah;
3) Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintah daerah;
4) Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan;

5) Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi merupakan perkiraan mengenai sesuatu yang belum terjadi. Perkiraan yang dilakukan pada umumnya berdasarkan data yang terdapat di masa lampau yang dianalisis dengan menggunakan merode – metode tertentu. Terdapat 2 (dua) model yang digunakan dalam perkiraan, yaitu model kualitatif dan model kuantitatif. Analisis model kualitatif dilakukan melalui Teknik *Judgment*, yaitu prakiraan berdasarkan pengalaman masa lalu dan pertimbangan berbagai faktor yang mempengaruhi pendapat dimasa mendatang. Selanjutnya, dilakukan analisis model kuantitatif melalui Teknik *Transformation Moving Average* (TMA), yaitu prakiraan dengan melihat kecendrungan (*trend*) dari data yang lalu. Kecenderungan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Aceh Besar selama 5 (lima) tahun priode 2012 - 2016 menunjukkan kenaikan, maka pendapatan di tahun mendatang diperkirakan akan naik dibandingkan tahun sebelumnya.

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Dalam Rupiah)
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Pertumbuhan	Tahun				
		(%)	2018	2019	2020	2021	2022
1	**PENDAPATAN**	**6.73**	**1,664,040,327,700**	**1,828,653,000,000**	**1,931,839,524,725**	**2,041,743,336,224**	**2,158,867,572,081**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**10.93**	**132,396,380,300**	**150,628,963,300**	**165,691,859,630**	**182,261,045,593**	**200,487,150,152**
1.1.1	Pajak Daerah	12.66	60,600,022,000	73,335,000,000	80,668,500,000	88,735,350,000	97,608,885,000
1.1.2	Retribusi Daerah	7.86	5,809,705,000	5,907,310,000	6,498,041,000	7,147,845,100	7,862,629,610
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.43	3,500,000,000	5,000,000,000	5,500,000,000	6,050,000,000	6,655,000,000
1.1.4	Hasil Pengelolaan ZIS	14.42	13,200,000,000	17,000,000,000	18,700,000,000	20,570,000,000	22,627,000,000
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.46	49,286,653,300	49,386,653,300	54,325,318,630	59,757,850,493	65,733,635,542
1.2	**Dana Perimbangan**	**5.11**	**977,082,148,400**	**1,045,749,822,500**	**1,092,571,984,125**	**1,141,571,293,946**	**1,192,851,690,577**
1.2.1	Transfer Umum	5.00	735,580,286,200	772,483,347,500	811,107,514,875	851,662,890,619	894,246,035,150
1.2.2	Transfer Khusus	5.45	241,501,862,200	273,266,475,000	281,464,469,250	289,908,403,328	298,605,655,427
1.4	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**8.39**	**554,561,799,000**	**632,274,214,200**	**673,575,680,970**	**717,910,996,685**	**765,528,731,351**
1.4.1	Pendapatan Hibah	7.41	31,669,800,000	31,669,800,000	34,836,780,000	38,320,458,000	42,152,503,800
1.4.2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	17.14	29,527,299,200	41,767,813,387	45,944,594,726	50,539,054,198	55,592,959,618
1.4.3	Dana Penyesuaian	5.27	413,364,699,800	438,519,093,000	460,445,047,650	483,467,300,033	507,640,665,034
1.4.4	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	18.95	80,000,000,000	120,317,507,813	132,349,258,594	145,584,184,454	160,142,602,899
2	**BELANJA DAERAH**	**4.77**	**1,875,072,975,822**	**1,967,665,592,992**	**2,026,839,524,725**	**2,136,743,336,224**	**2,253,867,572,081**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**3.41**	**1,179,238,348,618**	**1,250,421,724,381**	**1,284,387,709,445**	**1,314,121,461,706**	**1,344,848,524,609**
2.1.1	Belanja Pegawai	3.41	635,578,212,188	665,017,509,621	684,968,034,910	705,517,075,957	726,682,588,236
2.1.2	Belanja Hibah	1.40	25,576,124,923	23,361,500,000	24,529,575,000	25,756,053,750	27,043,856,438
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	7.85	15,650,000,000	15,907,400,000	17,498,140,000	19,247,954,000	21,172,749,400
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	12.29	6,634,874,000	7,924,231,000	8,716,654,100	9,588,319,510	10,547,151,461

No	Uraian	Pertumbuhan	Tahun				
		(%)	2018	2019	2020	2021	2022
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	3.26	478,720,997,560	523,211,083,760	533,675,305,435	539,012,058,490	544,402,179,074
2.1.6	Belanja Tak Terduga	-3.19	17,078,139,947	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000
2.2	**Belanja Langsung**	**7.06**	**695,834,627,204**	**717,243,868,611**	**742,451,815,280**	**822,621,874,517**	**909,019,047,472**
2.2.1	Belanja Pegawai	5.00	94,880,426,000	97,624,447,300	102,605,669,665	107,835,953,148	113,327,750,806
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.00	318,345,408,041	325,895,770,282	335,732,643,391	345,864,622,692	356,300,561,373
2.2.3	Belanja Modal	11.73	282,608,793,163	293,723,651,029	304,113,502,224	368,921,298,677	439,390,735,293
3	**PEMBIAYAAN**	**-18.09**	**211,032,648,122**	**139,012,592,992.17**	**95,000,000,000.00**	**95,000,000,000.00**	**95,000,000,000.00**
3.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**-17.52**	**216,032,648,122**	**144,012,592,992.17**	**100,000,000,000**	**100,000,000,000**	**100,000,000,000**
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	-	**5,000,000,000**	**5,000,000,000**	**5,000,000,000**	**5,000,000,000**	**5,000,000,000**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Besar, 2017(diolah)

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022.

Perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah merupakan kapasitas keuangan yang bersifat indikatif, artinya tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terkini pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Dari hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diketahui pada tahun 2018 kapasitas riil keuangan diperkirakan berjumlah Rp. 1.875.072.976,022 dan diproyeksikan terus mengalami peningkatan sampai pada akhir periode RPJMD tahun 2022 berjumlah sebesar Rp. 2.260.802.164.119,-. Rincian mengenai proyeksi kapasitas riil keuangan Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah (Dalam Rupiah)
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pendapatan	1,664,040,327,700	1,828,653,000,000	1,931,839,524,725	2,041,743,336,224	2,158,867,572,081
2.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	216,032,648,122	144,012,592,992	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000
	Dikurangi:					
3.	Belanja Tidak Langsung	1,179,238,348,618	1,250,421,724,381	1,284,387,709,445	1,314,121,461,706	1,344,848,524,609
4.	Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		**695,834,627,204**	**717,243,868,611**	**742,451,815,280**	**822,621,874,517**	**909,019,047,472**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Besar, 2017(diolah)

Selanjutnya kapasitas riil kemampuan keuangan yang tersedia tersebut dipergunakan untuk membiayai Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III. Pengalokasian dana pada prioritas III akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan Prioritas II terlebih dahulu. Adapun rencana pengeluaran terhadap masing-masing prioritas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
2. Prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
3. Prioritas ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Untuk mengetahui secara lebih rinci mengenai perkembangan rencana penggunaaan kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupatan Aceh Besar tahun 2018 – 2022 berdasarkan masing-masing prioritas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah (Dalam Rupiah)
Kabupaten Aceh Besar 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun									
		2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	695,834,627,204	100	717,243,868,611	100	742,451,815,280	100	822,621,874,517	100	909,019,047,472	100
1	Prioritas I	278,333,850,882	40	286,897,547,444	40	296,980,726,112	40	329,048,749,807	40	363,607,618,989	40
2	Prioritas II	243,542,119,521	35	251,035,354,014	35	259,858,135,348	35	287,917,656,081	35	318,156,666,615	35
3	Prioritas III	60,885,529,880	25	179,310,967,153	25	185,612,953,820	25	205,655,468,629	25	227,254,761,868	25

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Besar, 2017(diolah)

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada hakikatnya pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga handal dan profesional dalam melayani masyarakat dan mengelola sumber perekonomian daerah. Begitupun dengan tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan Aceh yang ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pembangunan di berbagai sektor dan bidang pembangunan. Pembangunan daerah juga merupakan upaya pemberdayaan masyarakat di seluruh daerah sehingga memungkinkan masyarakat menikmati kualitas hidup yang layak, baik, maju, dan tenteram serta memperluas pilihan bagi masyarakat dalam meningkatkan harkat, martabat dan harga dirinya. Penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance*) juga menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan.

Data dari BPS Aceh, pada tahun 2016 memperlihatkan bahwa persentase kemiskinan Kabupaten Aceh Besar masih tinggi yaitu sebesar 15,55% yang berarti masih berada dibawah persentase Propinsi Aceh yaitu sebesar 16,43%, tetapi masih diatas persentase nasional yaitu 10,7%. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2016 sebanyak 62,72 ribu orang yang menduduki peringkat kelima yang terbanyak di Propinsi Aceh.

Persentase pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar yang pada tahun 2016 sebesar 4,01% yang masih berada diatas pertumbuhan ekonomi Propinsi Aceh yaitu 3,31%. Dengan masih rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar, perlu peningkatan sektor-sektor ekonomi yang berpengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2016 masih berada diatas rata-rata Propinsi Aceh yaitu sebesar 70,00 dan diatas rata-rata nasional yaitu 70,18. Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Besar yaitu angka harapan hidup 69,49 tahun, harapan lama sekolah 14,48 tahun, dan rata-rata lama sekolah 9,92 tahun dan pengeluaran perkapita sebesar 8788 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Besar perlu meningkatkan kualitas pendidikan (angka harapan lama selolah dan rata-rata lama sekolah masih kurang) dan perlu meningkatkan pendapatan masyarakat.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar utama, yaitu pemerintah, dunia usaha (sektor swasta), dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai lembaga yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Dunia usaha (sektor swasta) berperan menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, sementara masyarakat berperan menciptakan interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Agar peran ketiga pilar tersebut terlaksana dengan baik, ketiganya harus memahami kondisi kekinian daerah. Hal ini penting agar dapat digunakan sebagai landasan dalam penetapan arah dan kebijakan pembangunan yang tepat, efektif dan efisien.

Meskipun kontribusi sektor Pertanian dalam struktur ekonomi Kabupaten Aceh Besar menempati urutan pertama dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB Non Migas), namun sektor ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan petani. Ini diindikasikan oleh masih rendahnya nilai tukar petani (NTP) sebesar 96,26%. Di samping dikarenakan rendahnya produktivitas komoditi pertanian, dan banyaknya areal lahan terlantar, masalah lain yang dominan ditemui adalah terbatasnya kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian, dan masih belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pertanian serta masih lemahnya jaringan pasar untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Sebagai salah satu sektor primer dalam struktur perekonomian daerah, sumber daya kelautan dan perikanan belum dikelola secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur penunjang yang masih kurang, kapasitas sumber daya petani ikan / nelayan yang masih terbatas, dimana sebagian besar petani ikan / nelayan masih menggunakan peralatan tradisional. Selama ini petani ikan / nelayan lokal masih kalah bersaing dengan petani ikan / nelayan luar daerah Kabupaten Aceh Besar. Ke depan, diharapkan sektor ini juga harus diberi perhatian yang lebih mengingat potensi sektor kelautan dan perikanan akan dapat mendongkrak kinerja perekonomian daerah, sekaligus mampu mempercepat pembangunan daerah pesisir.

Permasalahan pada pemanfaatan lahan juga juga harus menjadi perhatian mengingat kecenderungan perubahan fungsi lahan yang mengancam produktivitas pangan dalam jangka panjang. Lahan produktif banyak yang dialihkan fungsinya menjadi infrastruktur umum, perumahan, perkantoran, dan lainnya. Untuk itu, perlu adanya upaya pencegahan melalui reorientasi kebijakan, sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Besar masih relatif tinggi yaitu 15,55% pada tahun 2016, yang melebihi angka rata-rata nasional sebesar 10,70%. Aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar hampir 70% bergerak disektor pertanian, sehingga dapat dipastikan bahwa penduduk miskin terbesar merupakan anggota masyarakat yang bekerja di sektor primer. Karenanya, kebijakan percepatan penurunan angka kemiskinan difokuskan pada pembangunan sektor pertanian, meliputi sarana dan prasarana penunjang, sumber daya petani, optimalisasi penyuluhan pertanian, intensifikasi dan ektensifikasi pertanian, serta peningkatan kualitas dan produktivitas sektor pertanian.

Mutu pendidikan di sejumlah satuan pendidikan masih tergolong rendah. Hal ini antara lain terindikasi oleh nilai Ujian Nasional siswa yang cenderung rendah, Perguruan Tinggi Negeri yang terbatas, prestasi siswa pada lomba tingkat provinsi maupun nasional belum optimal, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan masih ditandai oleh banyaknya siswa unggulan di Kabupaten Aceh Besar lebih memilih bersekolah di Banda Aceh. Di samping itu, masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya dan cenderung terpusat di daerah perkotaan sehingga membutuhkan pendistribusian yang tepat agar terjadi pemerataan jumlah guru baik di kota maupun di desa. Peran dan partisipasi para pemangku kepentingan *(stakeholders)* pendidikan di Kabupaten Aceh Besar, termasuk SKPD terkait, komite sekolah, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga non pemerintah dan lainnya juga belum maksimal dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Permasalahan juga terjadi pada pendidikan non formal berbasis agama yang dikenal dengan Dayah. Pendidikan dayah yang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat di Aceh yang menjalankan Syariat Islam belum memperlihatkan fokus pembangunan yang seimbang. Meskipun dayah mulai berkembang dari kategori dayah salafi menjadi dayah terpadu (mengkombinasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum), namun kualitas sarana dan

prasarana serta kualitas tenaga pengajar masih rendah. Hal ini mempengaruhi kualitas pendidikan dan kapasitas lulusan dayah untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan bersyari'ah.

Di bidang kesehatan, masalah rendahnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan isu yang masih menonjol. Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagian besar masih kurang terampil dan kurang ramah. Dari segi kuantitas, jumlah tenaga kesehatan sudah mencukupi, namun dari sisi kualitas masih belum memadai. Beberapa kualifikasi masih belum terpenuhi, seperti fisioterapis, rekam medis, teknik elektromedik, pranata laboratorium, perawat gigi dan asisten apoteker, dokter spesialis dan apoteker. Distribusi tenaga kesehatan belum merata secara proporsional. Di beberapa daerah yang sulit terjangkau dan tidak strategis masih kekurangan tenaga kesehatan, misalnya Puskesmas Kecamatan Lembah Seulawah, Mesjid Raya, Seulimeum, Pulo Aceh, dan Lhoong.

Sarana pelayanan kesehatan termasuk Pustu, Puskesmas dan peralatan medis relatif sudah mencukupi, namun Poskesdes masih belum tersedia disemua desa. Pemeliharaan gedung dan kalibrasi alat medis untuk mendapatkan hasil pemeriksaan dan penegakan diagnosa lebih akurat belum terjamin keberlangsungannya. Pelayanan rawat inap masih belum optimal dikarenakan masih terdapat beberapa Puskesmas yang belum memiliki ruang rawat inap dan peralatan pendukungnya. Dari segi pelayanan berbasis anak, sarana kesehatan yang ada juga relatif belum ramah anak, dan belum adanya Gerakan Masyarakat (GERMAS) terhadap pola hidup sehat.

Partisipasi dan perilaku masyarakat dalam mendukung pola hidup bersih dan sehat, belum sesuai yang diharapkan. Keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kecamatan Indrapuri juga relatif sulit dijangkau oleh warga di wilayah persisir, terutama Kecamatan Mesjid Raya, Lhoong dan Pulo Aceh. Jumlah tenaga medis serta sarana dan prasarana di RSUD juga perlu ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, sistem rujukan Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS) masyarakat masih menganut birokrasi yang panjang dan tidak efektif dan efisien. Kasus kematian ibu dan bayi masih dijumpai di Kabupaten Aceh Besar. Pada tahun 2016 terdapat 6 kasus kematian ibu dan 42 kasus kematian bayi dari 7.624 kelahiran hidup. Penyebabnya adalah perdarahan *post partum*, infeksi, eklampsi dan sebab lainnya, sedangkan kematian bayi disebabkan oleh BBLR, Asfiksia, kelainan kongenital dan penyebab lainnya. Selain itu, pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) belum mendapat perhatian yang memadai. Hal ini terindikasi dari kecenderungan peningkatan angka kehamilan diluar nikah, kenakalan remaja, dan penyalahgunaan narkoba.

Dalam upaya penanggulangan penyakit menular tercatat bahwa kasus demam berdarah pada tahun 2016 mencapai 128 kasus per 100.000 penduduk, sedangkan target secara nasional 20 kasus per 100.000 penduduk. Ini disebabkan oleh masih banyaknya jentik *Aides Agepty* dan penularan dari daerah lain sehingga masih harus digiatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk. Selanjutnya, temuan suspect TBC/BTA mencapai 238 kasus dan deteksi penyakit HIV/AIDS masih belum berjalan optimal, sementara peran Komisi Penanggulangan Aids tingkat kabupaten juga belum maksimal. Sampai tahun 2016, diketahui kasus HIV/AIDS di Kabupaten Aceh Besar tercatat sebanyak 10 kasus. Penyakit yang diakibat lingkungan tidak sehat seperti diare, kecacingan, infeksi saluran cerna dan lain-lain masih sering terjadi akibat belum berjalannya lima pilar Sanitasi Dasar Berbasis Masyarakat (SDBM), yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Cuci Tangga Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT), sampah rumah tangga dan limbah cair rumah tangga.

Kapasitas SDM aparatur pemerintahan masih harus ditingkatkan agar memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat lebih optimal. Kelembagaan pemerintahan daerah yang tidak didukung oleh SDM aparatur yang berkualitas dan berkompetensi akan menyulitkan tercapainya sasaran pembangunan, yaitu terwujudnya Aceh Besar yang maju, sejahtera dan bermartabat dalam syariat islam. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur diupayakan antara lain melalui :

a) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional berdasarkan lingkup tugas pokok dan fungsinya; dan
b) Meningkatkan disiplin aparatur melalui penerapan penyusunan rencana kerja harian dan valuasi kinerja aparatur.

Penegakan hukum harus semakin diarahkan pada tegaknya supremasi hukum agar lebih menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran serta menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme harus menjadi komitmen bersama. Budaya menghargai dan menghormati hukum dikalangan masyarakat penting ditingkatkan sehingga tercipta kesadaran dan ketaatan hukum. Integritas dan profesionalitas aparatur penegak hukum harus diperkuat agar tumbuh kepercayaan masyarakat dan mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang mandiri dan independen serta benar-benar mengayomi masyarakat tanpa diskriminasi.

Dalam hal politik, etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi HAM harus terus ditingkatkan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sisi lain, kemandirian dan fungsi partai politik dalam menyerap, menyampaikan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dengan mengembangkan sikap bijaksana dan menjunjung tinggi etika dan berdemokrasi harus diwujudkan. Sejalan dengan itu, media massa yang independen, kebebasan berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, terus direalisasikan secara bertanggung jawab dan memelihara keutuhan berbangsa dan bernegara.

Keberadaan perempuan dan anak harus terjamin dan terhindar dari segala bentuk penipuan, manipulasi, Penjualan Manusia (*Human Trafficking*) dan kekerasan, disertai dengan pemberian ruang khusus bagi perempuan dan anak untuk meningkatkan pemahamannya tentang politik dan hukum. Keadilan gender harus terimplementasi dalam pembangunan dalam bentuk perencanaan dan penganggaran.

Nilai-nilai islami belum sepenuhnya diadopsi dan dilaksanakan sesuai tuntunan syariat, baik karena faktor internal maupun eksternal. Secara internal, tingkat pemahaman masyarakat terhadap Syariat Islam masih relatif rendah, sementara pengaruh globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sebagai faktor eksternal kian tidak terbendung. Tantangan masyarakat Aceh Besar ke depan adalah bagaimana mempertahankan jati diri sebagai masyarakat yang islami. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sejatinya dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif dan tidak merusak jati diri. Karenanya perlu ditingkatkan pemantapan akidah dan pemahaman syariat guna memperkuat ketahanan budaya dan kecerdasan masyarakat, khususnya terhadap infiltrasi budaya asing.

Bencana alam sering terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam hutan secara besar-besaran tanpa diimbangi dengan kegiatan rehabilitasi atau pemulihan fungsi hutan secara proporsional. Aktivitas masyarakat maupun kegiatan pembangunan yang dilakukan acapkali menimbulkan dampak dalam bentuk penurunan kualitas lingkungan.

Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam ke depan harus dilakukan secara terkendali. Peningkatan nilai tambah produk sumber daya alam sepatutnya tetap memelihara kelestarian hutan dan ekosistemnya. Disamping itu, pemanfaatan sumber daya alam harus berorientasi pada sumber daya alam yang terbaharukan dan mengarah pada pemanfaatan jasa lingkungan seperti wisata lingkungan, perdagangan karbon, dan hutan non kayu.

Letak geografis Kabupaten Aceh Besar disebelah utara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan disebelah barat dengan Samudera Indonesia memberi peluang yang strategis untuk tumbuh dan berkembang. Ditetapkannya Sabang sebagai PKSN dalam tata ruang nasional, adanya UU Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, termasuk UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menetapkan Pelabuhan Sabang sebagai *Hubport* (pelabuhan ekspor/impor internasional dan pelabuhan transit), kian memperkukuh peluang tersebut. Kebijakan dan regulasi pemerintah ini dapat dijadikan peluang percepatan pembangunan ekonomi Aceh Besar sebagai bagian wilayah dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang melalui peningkatan hubungan pengembangan kemitraan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Strategi kerjasama daerah yang telah dilakukan sejak tahun 2008 adalah kerjasama Regional Basajan (Banda Aceh-Sabang-Jantho Aceh Besar) sesuai dengan kesepakatan bersama 3 Kepala Daerah (Banda Aceh, Sabang dan Jantho). Kerjasama ini dimaksudkan untuk terwujudnya suatu kekuatan ekonomi baru wilayah barat Sumatera tahun 2020, di bidang pariwisata, sumber daya manusia, dan integrasi infrastruktur ekonomi.

Meskipun jangkauan jaringan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan industri skala kecil dan menengah telah mencapai 85-90 %, tetapi ketersediaannya belum stabil karena masih tergantung pasokan dari Sumatera Utara. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan rencana pengembangan Kawasan Industri Aceh (KIA) di Ladong Kecamatan Mesjid Raya, yang nantinya akan beroperasi beberapa industri besar, maka kebutuhan energi listrik semakin penting untuk ditingkatkan ketersediaannya. Pemenuhan energi listrik jangka panjang telah dimulai dengan pengembangan sumber energi panas bumi Seulawah Agam yang potensinya diperkirakan mencapai 200 MW. Selain itu, ada juga potensi untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan pembangkit listrik tenaga surya yang dapat mendukung ketersediaan energi listrik di kawasan pedesaan dan terisolir.

Berbagai potensi mineral yang sangat beragam di Kabupaten Aceh Besar dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan memperhatikan dampak terhadap kelestarian alam dan lingkungan serta kemungkinan timbulnya bencana alam. Pemanfaatannya harus disertai dengan pengawasan, pengendalian dan pembinaan secara intensif dan terpadu.

Akses pelayanan air bersih yang memenuhi kualitas kepada masyarakat relatif masih rendah. Kondisi topografi dan luasnya wilayah Aceh Besar relatif menyulitkan dalam mengoptimalkan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Untuk 5 tahun mendatang harus dimanfaatkan seluruh potensi sumber air berikut penyempurnaan sistem pelayanan air minum perdesaan dalam rangka perluasan jangkauan dan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat.

Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar selama ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya rendahnya infrastruktur dasar dibidang Transportasi. Hingga saat ini jenis transportasi yang paling banyak digunakan adalah transportasi darat. Mobilitas orang dan barang sebagian besar diangkut melalui jaringan prasarana jalan. Dengan demikian,

kapasitas jalan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pergerakan ekonomi dan seringkali menyebabkan biaya yang tinggi. Luasnya wilayah dengan pelbagai potensi pertanian dan perkebunan belum sepenuhnya didukung oleh kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dan terkoneksi secara baik, sehingga menyebabkan masih ada beberapa kawasan masih sulit dijangkau, terutama yang menghubungkan kawasan sentra produksi dengan pusat pasar.

Sistem perekonomian yang berjalan saat ini juga belum membuka akses bagi permodalan di bank, atau akses pada peningkatan kapasitas pelaku usaha, termasuk pemberdayaan ekonomi kaum perempuan yang sebenarnya sangat berpeluang dikembangkan di Aceh Besar. Pendekatan khusus untuk pemberdayaan kelompok perempuan, misalnya yang mendukung *home industry* (industri rumah tangga), atau usaha kecil lain sangat penting diterapkan agar proses perbaikan kesejahteraan masyarakat lebih cepat diwujudkan.

Kabupaten Aceh Besar terletak pada lintasan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Euro Asia serta dipengaruhi oleh iklim tropis. Mengingat kabupaten ini digolongkan dalam wilayah potensi rawan bencana oleh BNPB (nilai indek rawan bencana sebesar 80, dengan kelas rawan tinggi), maka kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi sangat penting guna dalam rangka menghindari kerugian yang lebih besar.

Kerentanan yang tinggi terhadap bencana, seperti gempa bumi, tanah longsor dan banjir, serta tsunami, mengharuskan perhatian khusus terhadap keselamatan kaum perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Karenanya upaya pemenuhan sistem evakuasi yang dapat menjawab situasi khusus kelompok rentan, termasuk penyediaan lokasi pengungsian yang memadai bagi kebutuhan dasar perempuan dan anak, harus disediakan. Badan Penanggulangan Bencana sebagai salah satu perangkat daerah menjadi kekuatan yang harus dioptimalkan fungsinya, khususnya dalam penanggulangan risiko bencana serta penanganan kebencanaan. Tantangan yang dihadapi adalah beragamnya potensi dan jenis bencana serta luasnya wilayah jangkauan penanganan bencana, dan masih terbatasnya sumber daya manusia yang handal dan sarana serta prasarana pendukung penanggulangan bencana. Selain itu, akses jalan evakuasi bagi kemudahan proses evakuasi masyakarat belum sepenuhnya tersedia.

Belum terkendalinya dengan baik aktivitas masyarakat dalam usaha pertambangan, terutama bahan pertambangan galian C, menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang mengarah semakin buruknya kualitas air dan kerusakan lingkungan permukiman. Diperlukan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan keberlanjutan melalui pembatasan aktivitas eksploitasi yang berlebihan dan dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup dan merusak fungsi kawasan lindung dalam jangka panjang.

Secara geografis Kabupaten Aceh Besar merupakan wilayah yang memiliki pulau-pulau besar dan kecil, termasuk pulau terluar yang berbatasan dengan negara luar. Kecuali Pulo Aceh, beberapa pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah pulau-pulau terluar adalah Pulau Rusa dan Pulau Benggala. Pulau-pulau yang ada ini belum dikelola secara maksimal, padahal sebagian ada penghuninya dan memiliki potensi usaha pertanian. Pulau-pulau terluar ini di samping berdampak terhadap ancaman keamanan perbatasan negara juga masih terisolir dan belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu, pembangunan dikedua pulau terluar tersebut penting dilakukan tidak hanya guna membuka keterisoliran agar mendorong aktivitas ekonomi penduduk, tetapi penting untuk menjamin kemananan dan ketahanan dari infiltrasi asing.

Di tengah-tengah arus pelaksanaan otonomi daerah yang menekankan kemandirian daerah, semestinya pengelolaan potensi sumber daya alam yang memenuhi azas pembangunan berkelanjutan memberi dampak yang lebih besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber anggaran pembangunan. Masih terbatasnya sumber daya aparatur daerah maupun masyarakat menyebabkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) belum optimal, dan seringkali tidak terkendali. Kondisi ini berakibat terjadinya degradasi lingkungan. Belum terkendalinya pengelolaan izin pengusahaan SDA mengakibatkan penerimaan daerah (PAD) tidak optimal. Diperlukan berbagai upaya termasuk regulasi, pengendalian dan penertiban pengelolaan SDA sehingga bernilai ekonomi dan tetap memelihara kelestarian lingkungan. Hal ini penting untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam meningkatkan sumber penerimaan daerah untuk percepatan pembangunan dalam jangka panjang.

Semakin meningkatnya tuntutan untuk pemekaran wilayah, provinsi, kabupaten, kecamatan maupun wilayah gampong, bermuara pada keinginan untuk percepatan pembangunan wilayah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini seringkali menghadirkan konflik perbatasan lintas kabupaten, kecamatan atau wilayah perdesaan, sehingga mengganggu proses pembangunan dan timbulnya konflik kehidupan sosial dan ekonomi. Karenanya diperlukan peran pemerintah daerah yang lebih fokus dengan sistem dan memanisme yang tepat untuk penyelesaian masalah tapal batas tanpa menimbulkan konflik baru. Dengan demikian, tidak mengganggu keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Penataan kawasan permukiman belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip kesehatan lingkungan permukiman terkait dengan masih lemahnya perencanaan penataan kawasan permukiman dan belum adanya regulasi yang mengatur rencana rinci penataan kawasan permukiman yang mengacu kepada struktur ruang dalam RTRWK.

Dampaknya ditunjukkan oleh tingginya perubahan fungsi lahan yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Untuk mencegah berlanjutnya hal ini, perlu disiapkan regulasi yang mengatur penataan permukiman yang mengacu kepada RTRWK. Pada Tahun 2013, Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032 telah ditetapkan sehingga konsep pembangunan pada 25 (dua puluh lima) tahun mendatang telah memenuhi kaidah pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan di Kabupaten Aceh Besar selayaknya mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat di wilayah ini. Pemenuhan kebutuhan dijawab oleh pemerintah melalui berbagai program yang sesuai untuk menjawab persoalan yang dimaksud, termasuk persoalan-persoalan khusus yang dihadapi oleh perempuan dan anak. Pelibatan perempuan dan anak menjadi kebutuhan penting yang harus dipenuhi dalam semua proses/tahapan pembangunan. Hal ini sejalan dengan capaian tujuan SDG's yang telah dicapai oleh Indonesia. Resolusi PBB No. 1325 tentang keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian pasca konflik juga mensyarakatkan keterlibatan perempuan dalam segala upaya dan proses membangun perdamaian. Partisipasi anak juga tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan berkelanjutan. Ini menjadi prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Upaya menemukan dan mengenali persoalan khusus perempuan dan anak harusnya diidentifikasi langsung dari kelompok terkait. Kenyataannya, Keterlibatan perempuan dan anak hingga saat ini belum optimal dalam pembangunan darah. Dampaknya, kelompok perempuan dan anak yang tergolong kelompok rentan, seringkali termarginalkan dalam proses

pembangunan daerah. Ke depan, pembangunan di Kabupaten Aceh Besar harus berperspektif perempuan dan anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak, merupakan kasus yang serius untuk ditangani secara khusus. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, merupakan fenomena gunung es, dimana kasus yang terungkap hanya sebagian kecil dari kasus yang ada di masyarakat. Pendekatan penyelesaian, juga masih kurang memperhatikan proses tumbuh kembang anak dan sering tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perempuan korban. Penanganan dan pelayanan yang holistik melalui P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) belum berjalan maksimal, mengingat dukungan operasionalnya masih sangat terbatas. Kondisi ini berpengaruh terhadap aktivitas P2TP2A dalam melayani kasus-kasus terhadap perempuan dan anak yang terjadi di daerah ini.

Beberapa permasalahan pembangunan yang sudah dijabarkan diatas dapat dikategorikan ke dalam pelaksanaan syariat Islam, kualitas SDM, tata kelola pemerintahan, infrastruktur wilayah, pembangunan ekonomi masyarakat dan pembangunan wilayah pesisir, terisolir dan tertinggal.

4.1.1 Pelaksanaan Syariat Islam

Permasalahan di dalam pelaksanaan syariat Islam adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan nilai-nilai syariat islam belum optimal;
2. Pengetahuan masyarakat tentang syariat Islam relatif masih rendah;
3. Dukungan instansi/lembaga lain dalam pelaksanaan syariat Islam masih rendah (Belum ada e.g. Kolaborasi dengan Wilayatul Hisbah atau Dinas Pariwisata);
4. Pembinaan aqidah, syariah dan akhlaq bagi masyarakat masih lemah;
5. Belum memadainya sarana dan prasarana peribadatan;
6. Belum optimalnya standarisasi pendidikan dayah;

4.1.2 Kualitas Sumber Daya Manusia

Permasalahan di dalam Kualitas Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan daya saing pendidikan formal dan non formal masih rendah;
2. belum optimalnya akses layanan pendidikan;
3. belum optimalnya tata kelola lembaga pendidikan;
4. belum maksimalnya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur pendidikan;
5. kurangnya pembinaan olahraga;
6. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kegiatan kepemudaan;
7. Tingkat pelayanan kesehatan belum optimal;
8. Masih rendahnya derajat kesehatan Ibu dan Anak;
9. Perlindungan perempuan dan anak masih rendah;
10. Minimnya kualitas pelayanan kesehatan dari Puskesmas di Kabupaten Aceh Besar;
11. Masih rendahnya kesehatan lingkungan masyarakat dan rendahnya Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
12. belum maksimalnya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur kesehatan;
13. belum optimalnya ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya tenaga manusia kesehatan;
14. Masih rendahnya keikutsertaan ber KB bagi pasangan usia subur;
15. Masih kurangnya kualitas dan ketahanan keluarga menuju keluarga kecil bahagia sejahtera;

16. Masih kurangnya Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui pembinaan peranan wanita menuju keluarga sejahtera;
17. Perlunya perlindungan perempuan dan anak melalui fasilitasi dan pendampingan dalam upaya penurunan kekerasan dalam rumah tangga (kodrat) bagi perempuan;
18. Pelayanan sosial masih kurang dan rumah tidak layak huni masih banyak;
19. Belum berjalan secara optimal program pembinaan anak-anak cacat dan pemberdayaan anak-anak yatim;

4.1.3 Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan di dalam Tata Kelola Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Potensi pendapatan asli daerah belum tergali secara optimal;
2. Pengembangan sistem informasi daerah belum optimal;
3. Pembangunan teknologi informasi masih rendah;
4. belum optimalnya reformasi birokrasi pelayanan publik;
5. Penanggulangan dan pencegahan penyakit masyarakat masih belum optimal;
6. Lemahnya sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah;
7. Minat baca masih rendah;
8. belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran.

4.1.4 Infrastruktur Wilayah dan pengelolaan lingkungan

Permasalahan di dalam infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan sumber daya alam belum optimal;
2. Pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan masih belum optimal;
3. Penanggulangan bencana belum optimal;
4. Pengelolaan penyediaan air irigasi belum optimal;
5. Pelayanan air bersih bagi masyarakat masih rendah;
6. Pemanfaatan fungsi kawasan dalam tata ruang masih belum optimal;
7. Intensitas alih fungsi lahan masih tinggi dan kurang terkontrol;
8. Pengembangan dan perlindungan kawasan cagar budaya;
9. Partisipasi kerjasama regional daerah masih rendah;
10. Diversifikasi dan konservasi lingkungan dan energi masih belum optimal;
11. Sertifikasi lahan pemerintah dan masyarakat masih belum optimal;
12. belum optimalnya penyediaan sarana prasarana serta aksesibilitas antar wilayah;
13. belum maksimalnya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur;
14. belum optimalnya dukungan sarana prasarana permukiman layak huni;
15. Masih minimnya sarana dan prasarana lingkungan hidup dan persampahan;
16. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan masyarakat.

4.1.5 Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Permasalahan di dalam Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya produktivitas komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan;
2. Tingkat kemiskinan masih tinggi;
3. Tingkat pengangguran masih tinggi;
4. Pertumbuhan ekonomi masih rendah;

5. Pengelolaan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif masih rendah;
6. masih rendahnya iklim investasi pada dunia usaha;
7. lemahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
8. rendahnya kapasitas produksi pangan;
9. Lemahnya daya saing komoditas pertanian;
10. Penguatan investasi daerah belum optimal;

4.1.6 Pembangunan wilayah pesisir, terisolir, dan tertinggal

Permasalahan di dalam Pembangunan wilayah pesisir, terisolir dan tertinggal adalah sebagai berikut :

1. Wilayah pulau-pulau terluar masih belum berkembang;
2. Belum optimalnya pendapatan di sektor perikanan;
3. Sarana dan prasarana infrastruktur wilayah pesisir, terisolir dan terpencil yang belum memadai;
4. aksesibiltas wilayah yang masih rendah;
5. belum optimalnya pemberdayaan petani tambak garam;
6. Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata di wilayah pesisir.

4.2. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022

Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun mendatang Kabupaten Aceh Besar masih dihadapkan pada permasalahan dan tantangan yang tidak ringan, baik yang bersifat lokal maupun yang global. Isu strategis ini dipandang perlu agar masalah-masalah yang belum dapat diselesaikan pada periode pembangunan lima tahun sebelumnya dapat diselesaikan dan memiliki dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan pelaksanaan pembangunan berikutnya. Adapun isu strategis yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut :

1. Penguatan pelaksanaan nilai-nilai syariat Islam;
   Isu strategis penguatan pelaksanaan nilai-nilai syariat Islam difokuskan pada penurunan pelanggaran syariat Islam dan menjadikan AlQuran dan hadist sebgaai pedooman hidup. Memperkuat pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral Islami dan peningkatan ekonomi yang berbasis syariah seperti peningkatan zakat, infaq, shadaqah.
2. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan;
   Isu strategis peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan difokuskan pada peningkatan infrastruktur pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pengajar.
3. Peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan;
   Isu strategis peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan difokuskan kepada peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, baik di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas, dan Rumah Sakit. Fokus lainnya dalam isu strategis ini adlah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik dengan kunjungan tenaga kesehatan, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia disektor kesehatan dan tenaga kesehatan.
4. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga
   Fokus dari isu strategis peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga adalah dengan peningkatan kualitas pemuda itu sendiri dengan pendidikan non formal, dan juga pada pembinaan pemuda tersebut agar terhindar dari pengaruh narkoba dan zat aditif. Untuk keolahragaan, difokuskan pada pembinaan atlet-atlet berprestasi dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga

5. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
   Isu strategis ini focus kepada peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan, dan peningkatan perlindungan anak, serta memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat mandiri.
6. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola dan pelayanan publik;
   Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola dan pelayanan publik di fokuskan pada pencapaian WTP pertahun anggaran, dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan kuntabel, serta meningkatankan system pengawasan dan penilaian aparatur pemerintah. Selain itu juga difokuskan pada peningkatan pendapatan daerah dari berbagai sumber dan peningkatan pada pelayanan publik baik untuk pelayanan publik untuk perizinan, pembuatan KTP maupun pelayanan publik lainnya yang berbasis pada sistem informasi yang terintegrasi.
7. Pengembangan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah;
   Isu strategis ini fokus pada pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan sarana sanitasi dikawasan permukiman, pemeliharaan jaringan irigasi, penanganan kawasan kumuh dan pencegahan kawasan kumuh baru, serta membangun kawasan-kawasan yang menjadi sentra produksi pangan Kabupaten Aceh Besar.
8. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan mitigasi bencana;
   Isu strategis peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya dan mitigasi bencana diharapkan dapat mengendalikan kerusakan lingkungan akibat dari penambangan-penambangan yang dilakukan tanpa izin, dan juga untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana-bencana yang terjadi.
9. Optimalisasi pemanfaatan fungsi kawasan dalam tata ruang;
   Isu strategis optimalisasi pemanfaatan fungsi kawasan dalam tata ruang diharapkan dapat mengurangi terjadinya ketidaktaatan terhadap tata ruang dan mengurangi alih fungsi lahan, serta juga difokuskan pada perlindungan kawasan-kawasan lindung. Fokus isu strategis ini juga pada ketaatan dalam pendirian bangunan yang bertujuan pada pencegahan timbulnya kawasan-kawasan kumuh baru.
10. Pemenuhan kualitas perumahan dan kawasan permukiman;
    Isu strategis pemenuhan kualitas perumahan dan kawasan permukiman adalah untuk pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni dan pemenuhan sistem sanitasi dikawasan permukiman masyarakat serta pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
11. Pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan
    Isu strategis pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mana rata-rata masyarakat Aceh Besar berpenghasilan di sektor ini. Pengembangan sector pertanian, peternakan dan perikanan juga menjadi tujuan utama agar Kabupaten Aceh Besar tahan pangan dan dapat menjadi daerah swasembada pangan.
12. Pengembangan industri kecil dan menengah;
    Isu strategis pengembangan industri kecil dan menengah bertujuan untuk mengembangan sektor ekonomi kreatif supaya dapat menciptakan lapangan kerja baru serta dapat menghidupkan pasar-pasar rakyat dan menggenjot pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh Besar.
13. Pengembangan sektor Pariwisata
    Isu strategis pengembangan sektor pariwisata ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana wisata serta menjadikan

wisata di Aceh Besar adalah wisata yang Islami. Fokus isu strategis ini adalah dengan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata dan pemeliharaan fasilitas pariwisata yang sudah ada.

14. Mengoptimalkan ketenagakerjaan
    Isu strategis mengoptimalkan ketenagakerjaan ini bertujuan untuk dapat mencitakan tenaga kerja yang siap pakai, memiliki keahlian sehingga dapat menigkatkan angka partisipasi kerja dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
15. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur di wilayah pesisir, terpencil dan terisolir;
    Isu strategis peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah di wilayah pesisir, terpencil dan terisolir adalah untuk menjadikan daerah kepulauan dan daerah yang jauh dari perkotaan dapat terjangkau oleh semua sehingga pertumbuhan ekonomi dapat merata. Fokus isu strategis ini adalah peningkatan jaringan jalan dan jembatan, penyediaan saran perhubungan, penyediaan sarana komunikasi dan penyediaan sarana perikanan dan juga pembangunan kawasan-kawasan transmigrasi.
16. Pengembangan sektor pariwisata di wilayah pesisir
    Isu strategis ini bertujuan untuk peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dengan memajukan wisata di wilayah pesisir , dan juga masyarakat terisolir karena hampir kebanyakan pariwisata Aceh Besar terletak dikawasan pesisir dan kawasan perbukitan. Hal ini juga dapat mendorong supaya aksesibilitas ke wilayah tersebut dapat terjangkau dan dapat mengurangi kesenjangan wilayah pesisir, terisolir dengan kawasan yang dekat dengan perkotaan.

17. Peningkatan pendapatan masyarakat di daerah pesisir, terisolir dan tertinggal

Isu strategis ini bertujuan untuk peningkatan pendapatan masyarakat dengan pembangunan pembinaan dan peningkatan ekonomi kreatif, memberdayakan petani tambak dan garam, meningkatkan sarana dan prasarana perikanan.

Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017-2022 ini juga sejalan dengan program NAWACITA yang dengan visi dan misi Pemerintah Pusat periode 2015 - 2019 antara lain:

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, melalui politik luar negari bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
2) Membuat pemerintah tidak absen dengan pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan kelembagaan.
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kuallitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong *Land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah

kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019;

6) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspel pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai – nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia; dan
7) Memperteguhkan kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang – ruang dialog antar warga.

Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017-2022 ini juga disinkronkan dengan isu strategis Pemerintah Aceh tahun 2017-2022 yaitu :

1) Peningkatan sumber Penerimaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah
2) Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik
3) Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan
4) Penguatan perdamaian secara berkelanjutan
5) Pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan
6) Pengembangan pertanian dan perikanan
7) Pengembangan industri, dan koperasi dan UMKM
8) Pengembangan pariwisata
9) Ketenagakerjaan
10) Ketersediaan dan ketahanan energi
11) Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi
12) Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah
13) Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni
14) Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan;
15) Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga
16) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
17) Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
18) Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 disusun dengan satu filosofis yang kuat dan mengandung nilai-nilai yang saling berkait dan bersinerji satu lainnya. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pembangunan merupakan satu kesatuan yang implementasinya dilakukan secara terarah dan berkesinambungan. Filosofi pembangunan daerah Kabupaten Aceh Besar digali dari semboyan *"Putoh Ngon Meupakat Kuwat Ngon Meuseuraya"*. Semboyan ini mengandung pengertian bahwa segala sesuatu diputuskan berdasarkan hasil musyawarah dan pelaksanaannya dilaksanakan secara bersama-sama.

5.1 Visi

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 adalah:

"*Terwujudnya Aceh Besar Yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat Dalam Syariat Islam*"

Makna dari kata-kata dalam visi adalah sebagai berikut :

a. Maju, adalah pengembangan daerah secara signifikan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan lingkungan hidup secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
b. Sejahtera, adalah terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat yang layak dan seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat;
c. Bermartabat, adalah terwujudnya harkat kemanusiaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan amanah untuk menjaga kewajiban dan hak-hak asasi manusia; dan
d. Syariat Islam, adalah terimplementasinya hukum dan aturan berdasarkan syariat Islam secara kaffah dalam segala tindakan dan perilaku para penyelenggara pemerintahan, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Besar.

5.2 Misi

Visi di atas diwujudkan melalui implementasi misi-misi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Syariat Islam;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bertanggung Jawab;
4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur;
5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Mukim dan Gampong; dan
6. Percepatan Laju Pembangunan Masyarakat Pesisir, Terisolir dan Tertinggal.

Misi 1 "Pelaksanaan Syariat Islam", merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan Syariat Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparatur pemerintahan di Kabupaten Aceh Besar yang pelaksanaannya meliputi Aqidah; Syariah; dan Akhlak. Pelaksanaan Syariat Islam yang ingin dilakukan meliputi bidang Syariah yang terdiri dari Ibadah; Ahwal al – syakhshiyah (hukum keluarga); Muamalah (hukum perdata); Jinayat (hukum pidana);

Qadha' (peradilan); Tarbiyah (pendidikan); dan Pembelaan Islam. Sementara pelaksanaan Syariat Islam bidang Akhlak meliputi Syi'ar dan dakwah.

Misi 2 "Peningkatan Sumberdaya Manusia", merupakan upaya peningkatan sumberdaya manusia yang meliputi bidang pendidikan; bidang kesehatan; dan bidang pemberdayaan komunitas :

a) **Bidang Pendidikan**, dalam meningkatkan sektor pendidikan maka akan dilakukan fokus pembangunan sebagai berikut :
   1) Membangun sekolah unggul meliputi sekolah dasar dan menengah di 23 (dua puluh tiga) Kecamatan lingkup Kabupaten Aceh Besar;
   2) Penerapan *fullday school* pada setiap sekolah unggul di 23 (dua puluh tiga) Kecamatan lingkup Kabupaten Aceh Besar;
   3) Pemerataan sarana dan prasarana sekolah beserta guru pengajar di setiap Kecamatan lingkup Kabupaten Aceh Besar;
   4) Peningkatan kualitas guru;
   5) Memberikan beasiswa kepada pelajar, santri dan mahasiswa di Kabupaten Aceh Besar yang berprestasi, kurang mampu dan anak yatim;
   6) Menyetarakan antara pendidikan umum dan pendidikan agama atau dayah;
   7) Pengembangan prasarana olahraga, pemuda dan seni.

b) **Bidang Kesehatan**, tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap masyarakat Aceh Besar, dengan mempermudah pelayanan kesehatan masyarakat melalui :
   1) Membangun rumah sakit yang representatif di 3 (tiga) wilayah Kabupaten Aceh Besar yaitu rumah sakit setara type C yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis terbatas dan mampu menampung pelayanan rujukan dari puskesmas;
   2) Peningkatan status gizi masyarakat melalui pemberian makanan kepada balita dan anak-anak di daerah terpencil dan tertinggal;
   3) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan;
   4) Mengurangi angka kematian bayi dan ibu melahirkan;
   5) Gerakan Masyarakat (GERMAS) Hidup Sehat untuk meningkatkan angka harapan hidup;
   6) Membasmi penyakit menular;
   7) Perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan masyarakat;
   8) Pengembangan keluarga sehat, bahagia dan sejahtera.

c) **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas**, agar tercapainya pemberdayaan masyarakat maka perlu dilakukan berbagai program antara lain :
   1) Pemberdayaan kelembagaan perempuan;
   2) Pemberdayaan organisasi masyarakat dan organisasi pemuda serta organisasi profesi;
   3) Pembinaan olahraga;
   4) Pembinaan budaya dan adat istiadat aceh besar;
   5) Pembinaan PKK dan pramuka.

Misi 3 "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Government*), Bersih (*Clean Government*) Dan Bertanggung Jawab (*Responsible Government*)*",* merupakan upaya menciptakan sistem pemerintah yang efektif, efisien, profesional, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan masyarakat di semua tingkatan pemerintahan.

Misi 4 “Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur”, merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar di segala bidang pembangunan dengan melakukan berbagai terobosan antara lain :

a) Pembangunan jalan-jalan yang membuka akses terhadap sentral-sentral produksi masyarakat;
b) Pembangunan dan rehabilitasi jalan-jalan kabupaten serta jembatan;
c) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta Waduk/Embung;
d) Pembangunan dan pengolahan sumber air bersih beserta jaringannya secara merata;
e) Pelayanan dan pemenuhan ketersediaan air bersih bagi seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Besar;
f) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan;
g) Meningkatkan kapasitas Pelabuhan.

Misi 5 “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Mukim dan Gampong”, merupakan upaya pemerintah untuk membangun perekonomian rakyat pada sektor rill berbasis Gampong melalui kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang merupakan persyaratan utama untuk mendorong memajukan perekonomian rakyat.

Misi 6 “Percepatan Laju Pembangunan Masyarakat Pesisir, Terisolir dan Tertinggal”, merupakan upaya pemerintah memberdayakan masyarakat pesisir dan masyarakat di daerah tertinggal dengan meningkatkan produktivitas di sektor perikanan dan sektor perkebunan.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan juga menunjukkan hasil akhir yang akan dicapai (dihasilkan) dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berikut penjabaran tujuan dari misi-misi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022, yaitu :

Misi 1. Pelaksanaan Syariat Islam;

Tujuan dari misi ini adalah menegakkan dan memperkuat pelaksanaan syariat islam dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Misi 2. Peningkatan Sumberdaya Manusia;

Tujuan dari misi ini adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia berdaya saing;
2) Meningkatkan Kualitas dan pelayanan kesehatan;
3) Meningkatkan pengarusutamaan gender; dan
4) Meningkatkan kesejahteraan sosial.

Misi 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Government*), Bersih (*Clean Government*) dan Bertanggung Jawab (*Responsible Government*);

Tujuan dari misi ini adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang akuntabel.

Misi 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur;

Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dasar.

Misi 5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Mukim dan Gampong;

Tujuan dari misi ini adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat; dan
2) Menurunnya angka kemiskinan.

Misi 6. Percepatan Laju Pembangunan Masyarakat Pesisir, Terisolir dan Tertinggal;

Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir, terisolir, dan tertinggal.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tertentu, dan dalam bentuk kuantitatif serta dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan berjalan secara fokus, efektif, dan efisien.

Misi 1. Pelaksanaan Syariat Islam;

Sasaran dari misi ini antara lain:

1) Meningkatnya kualitas pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran dan Al-Hadist serta Ijma' dan Qiyas;
2) Terintegrasinya pendidikan agama Islam dalam pendidikan umum;
3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah;
4) Menguatnya tatanan ekonomi syari'ah; dan
5) Menguatnya penegakan syariat islam dalam masyarakat.

Misi 2. Peningkatan Sumberdaya Manusia;

Misi ini memiliki sasaran, antara lain :

1) Meningkatnya kualitas pendidikan;
2) Pemerataan standar pelayanan pendidikan;
3) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
4) Meningkatnya prestasi olahraga dan kepemudaan;
5) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
6) Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat;
7) Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan;
8) Meningkatnya kesejahteraan PMKS; dan
9) Meningkatnya kesejahteraan disabilitas;

Misi 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Government*), Bersih (*Clean Government*) dan Bertanggung Jawab (*Responsible Government*);

Adapun sasaran dari misi ini antara lain sebagai berikut:

1) Birokrasi yang bersih dan bertanggung jawab;
2) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas;
3) Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; dan
4) Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor.

Misi 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur;

Sasaran yang ingin dicapai dari misi ini antara lain sebagai berikut:

1) Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah;
2) Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat;
3) Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan;
4) Meningkatnya sasaran masyarakat terhadap mitigasi bencana; dan
5) Menguatnya tatanan cagar budaya dan adat istiadat Aceh yang islami.

Misi 5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Mukim dan Gampong;

Sasaran dari misi ini antara lain sebagai berikut :

1) Meningkatkan pembangunan sektor pertanian;
2) Mengembangkan sektor ekonomi mikro;
3) Meningkatkan kontribusi pariwisata;
4) Meningkatkan ketahanan pangan;
5) Meningkatkan kesejahteraan petani;
6) Menurunnya angka pengangguran;
7) Meningkatnya kesempatan kerja; dan
8) Meningkatnya nilai investasi;

Misi 6. Percepatan Laju Pembangunan Masyarakat Pesisir, Terisolir dan Tertinggal;

Sasaran dari misi ini adalah sebagai berikut :

1) Mengembangkan sektor perikanan di kawasan pesisir; dan
2) Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah

Tabel 5.1
Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Aceh Besar

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun Ke-					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Visi : Terwujudnya Aceh Besar Yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat Dalam Syariat Islam									
	Misi 1 : Pelaksanaan Syariat Islam									
1.1	Menegakkan dan memperkuat pelaksanaan syariat islam dalam tatanan kehidupan masyarakat	Persentase Penegakan dan pengamalan syariat islam	%	80	85	90	95	100	100	100
1.1.1	Meningkatnya kualitas pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran dan Al-Hadist serta Ijma' dan Qiyas	Angka Melek Al-Quran	%	85	88	90	93	96	99	99
		Jumlah Hafiz Al-Quran	Orang	16	96	56	100	80	115	115
1.1.2	Terintegrasinya pendidikan agama Islam dalam pendidikan umum	Cakupan Sekolah yang menerapkan kurikulum pendidikan islam	%	18	20	30	45	60	70	70
1.1.3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah	Persentase dayah yang memenuhi standarisasi dayah	%	25	30	35	37	41	45	99
1.1.4	Menguatnya tatanan ekonomi syari'ah	Penerimaan ZIS yang dikumpulkan	Rp. Juta	15,339	17,859	16.520	17.420	16.190	17,123	17,123
1.1.5	Menguatnya penegakan syariat islam dalam masyarakat	Jumlah regulasi yang mendukung penegakan syariat islam	Jumlah Regulasi	2	2	3	4	5	6	6
		Persentase penanganan pelanggaran syariat islam	%	91	94	96	98	100	100	100
	Misi 2 : Peningkatan Sumberdaya Manusia									
2.1	Meningkatkan kualitas SDM berdaya saing;	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72	72,31	72,53	72,67	72,86	72,98	72,98
2.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan;	Angka Partisipasi Sekolah	%	97,77	97,91	98,03	98,33	98,56	98,76	98,76
		Angka Melek Huruf	%	96,68	97,31	97,94	98,57	98,97	99,61	99,61
		Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,93	10,14	10,21	10,32	10,44	10,49	10,49
		Persentase Pendidikan yang ditamatkan								
		- Sekolah Dasar (SD)	%	22,67	22,89	22,97	23,47	23,88	24,11	24,11
		- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	%	23,96	23,99	24,18	24,42	24,55	24,72	24,72

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun Ke-					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.1.2	Pemerataan standar pelayanan pendidikan	Jumlah Sekolah yang memiliki standar pelayanan Minimum Dikdas dan Mutu Pendidikan	Unit	345	348	349	350	351	352	352
2.1.3	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik	%	81.37	84.22	86.75	89.35	92.03	94.79	97.64
2.1.4	Meningkatnya prestasi olahraga dan kepemudaan	Persentase atlit berprestasi pada kejuaraan olahraga tingkat regional maupun nasional	%	60	60	65	67	69	70	70
		Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	80	80	80	85	85	85	85
2.2	Meningkatkan Kualitas dan pelayanan kesehatan;	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,52	69,60	69,74	69,82	69,88	69,95	69,95
2.2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;	Angka Kematian Bayi	KH	42/1000	35/1000	29/1000	21/1000	17/1000	13/1000	13/1000
		Angka Kematian Ibu	KH	6/100.000	5/100.000	3/100.000	3/100.000	2/100.000	1/100.000	1/100.000
		Persentase Balita Gizi Buruk	%	1,02	0,91	0,76	0,45	0,25	0,11	0,11
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	%	100	100	100	100	100	100	100
		Rasio Akseptor KB	%	82	85	90	90	90	90	90
		Jumlah Desa yang menerapkan Program Indonesia sehat - pendekatan keluarga (PIS-PK)	Desa	-	250	300	400	500	604	604
2.2.2	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat;	Rasio Rumah Sakit Umum per satuan penduduk	/100.000 pddk	49,89	49,89	49,89	49,89	74,83	74,83	74,83
		Rasio Puskesmas, pusling, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	/1000 pddk	35,67	40,22	45,47	50,66	55,34	60,14	60,14
		Rasio dokter per satuan penduduk	/1000 pddk	26,69	29,93	34,92	39,91	44,91	49,89	49,89
		Rasio tenaga medis dan kesehatan per satuan penduduk	/1000 pddk	38,06	42,41	47,39	52,38	57,37	62,36	62,36
2.3	Meningkatkan pengarusutamaan gender;	Angka partisipasi perempuan dalam pembangunan	%	-	50	60	70	80	90	90

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun Ke-					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.3.1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.	Proporsi keterwakilan perempuan di Lembaga pemerintah	%	57,6	60	70	80	90	100	100
2.4	Meningkatkan kesejahteraan sosial;	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	60	65	70	70	80	85	85
2.4.1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS.	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE/kelompok dan perorangan sosial ekonomi sejenis lainnya	%	60	65	70	70	80	85	85
2.4.2	Meningkatnya kesejahteraan disabilitas.	Penyandang disabilitas yang menerima jaminan sosial	Orang/tahun	97	100	120	150	200	250	250
	Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government), Bersih (Clean Government) dan Bertanggung Jawab (Responsible Government)									
3.1	Mewujudkan reformasi birokrasi yang akuntabel.	Perolehan Opini/Predikat terhadap Audit Laporan Keuangan oleh BPK	WTP/tahun anggaran	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.1.1	Birokrasi yang bersih dan bertanggung jawab; dan	Tingkat kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	level	2	2	3	3	3	3	3
		Nilai LAKIP	nilai	47,86/CC	51,60/CC	55,00/CC	61,00/B	63,00/B	63,25/B	64,00/B
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	skor	2.755	2.879	2,900	2,910	2,920	2,930	2,940
		Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	8,12	8,18	8,36	8,43	8,51	8,55	8,55
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan/pelatihan	%	19.3	22.8	22.8	26.8	30.8	34.8	34.8
3.1.2	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	Persentase OPD yang telah menerapkan inovasi pelayanan publik	%	12.07	13.79	15.52	17.24	18.97	20.69	20.69
		Persentase Qanun yang diselesaikan	%	45.45	33.33	34.48	66.67	92	90	90
		Persentase kawasan yang menjangkau pelayanan publik (KTP/Perizinan)	%	26.09	26.09	26.09	26.09	30.43	30.43	30.43
		Persentase daerah yang memiliki perpustakaan	%	70	70	75	80	80	85	90
3.1.3	Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;	Proporsi penanganan penyakit masyarakat	%	70	80	85	90	92	95	95

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun Ke-					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.1.4	Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan	%	70	75	80	90	100	100	100
	Misi 4 : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur									
4.1	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dasar.	Pertumbuhan PDRB per Kapita	Rp. Juta	28,435	29,288	30,167	31,072	32,004	32,964	32,964
4.1.1	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah;	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	670,69 Km	800,55 Km	930,41 Km	1.060,28 Km	1.190,14 Km	1.279,44 Km	1.279,44 Km
		Rasio Jaringan Irigasi	Km	491 Km	567,8 Km	644,6 Km	721,4 Km	798,2 Km	875 Km	875 Km
		Persentase pertumbuhan sub sektor transportasi dan pergudangan	%	12.14	12.89	13.14	13.55	13.,82	14.01	14.01
4.1.2	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat;	Rasio rumah layak huni per rumah tangga miskin	Unit/RT	2.09	3.66	4.89	6.11	7.33	8.55	8.55
		Persentase Rumah Tangga dengan air minum	%	75,73	80,23	85,66	90,43	95,58	99,75	99,75
		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	%	68	85	100	100	100	100	100
		Persentase pengurangan area Kawasan Kumuh terhadap luas Kawasan permukiman penduduk perkotaan	%	60	40	30	20	10	0	0
		Persentase kawasan yang memiliki fasilitas telekomunikasi	%	73,91	78,26	82,61	86,95	91,30	95,65	95,65
4.1.3	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan;	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	%	-	75	80	82	85	87	87
		Persentase timbunan sampah yang tertangani	%	62.5	66.83	70.37	74.19	77.14	79.49	79.49
		Proporsi Ruang Terbangun dan RTH	%	0,49	0,49	0,49	1,36	1,36	1,36	1,36
		Persentase penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	100
4.1.4	Meningkatnya sasaran masyarakat terhadap mitigasi bencana.	Indeks ketahanan bencana	Indeks	0,33/rendah	0,35/rendah	0,55/sedang	0,65/sedang	0,75/sedang	0,80/tinggi	0,80/tinggi
4.1.5	Menguatnya tatanan cagar budaya dan adat istiadat Aceh yang islami	Proporsi pemugaran situs sejarah dalam kondisi baik	%	12.01	12,70	13.34	14.07	14,70	15.44	16.21

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun Ke-					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Misi 5 : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Mukim dan Gampong									
5.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat	Laju pertumbuhan ekonomi	%	4.00	4.25	4.50	4.72	4.85	5.01	5.01
5.1.1	Meningkatkan pembangunan sektor pertanian;	Pertumbuhan sub sektor pertanian, peternakan dan perikanan	%	5.45	5.51	5.65	5.70	5.82	5.89	5.89
5.1.2	Mengembangkan sektor ekonomi mikro;	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	%	4,18	4,50	4,92	5,36	5,78	5,95	5,95
5.1.3	Meningkatkan kontribusi pariwisata.	Pertumbuhan sub sektor pariwisata	%	9.29	9.32	9.46	9.52	9.64	9.77	9.77
5.2	Menurunnya angka kemiskinan.	Persentase angka kemiskinan	%	15.41	14.47	13.50	12.96	12.39	11.41	11.41
5.2.1	Meningkatkan ketahanan pangan;	Pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	Nilai	77.6	79.8	82.2	84.7	87.2	89.8	92.5
		Pola pangan harapan (PPH) Konsumsi	Nilai	76.8	79.4	81.5	83.6	85.8	88.0	90.3
5.2.2	Meningkatkan kesejahteraan petani;	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	96,26	98,00	101,00	103,00	105,00	107,00	107,00
5.2.3	Menurunnya angka pengangguran;	Persentase tingkat pengangguran terbuka	%	8,49	6.51	6.10	5.80	5.61	5.44	5.44
		Indeks Desa Membangun	Nilai	-	0.62	0.64	0.66	0.68	0.71	0.71
5.2.4	Meningkatnya kesempatan kerja; dan	Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja	%	59,17	60.26	63.43	65.64	68.57	70.12	70.12
5.2.5	Meningkatnya nilai investasi	Jumlah nilai investasi pada industri kecil pada sektor formal dan informal	Rp. Milyar	155	178	205	236	271	312	312
	Misi 6 : Percepatan Laju Pembangunan Masyarakat Pesisir, Terisolir dan Tertinggal									
6.1	Meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir, terisolir, dan tertinggal;	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan	%	2.52	2.98	3.55	3.82	3.91	4.02	4.02
6.1.1	Mengembangkan sektor perikanan di kawasan pesisir;	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	97,86	98.5	99,75	101,25	103,00	106,00	106,00
6.1.2	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah;	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik untuk wilayah pesisir, terisolir dan tertinggal	Km	96.96	99.30	101.50	103.80	106.10	108.30	108.30
		Rasio Jaringan Irigasi untuk wilayah pesisir, terisolir dan tertinggal	Km	491	567.8	644.6	721.4	798.2	875	875
		Persentase kawasan yang bebas dari terisolir	%	96.36	96.36	97.68	97.68	100	100	100

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai dengan Visi Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2022, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan serta pembangunan yang ideal dan konsisten dengan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai yang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2022

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	
Visi : Terwujudnya Aceh Besar Yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat Dalam Syariat Islam					
Misi 1 : Pelaksanaan Syariat Islam					
1.1	Menegakkan dan memperkuat pelaksanaan syariat islam dalam tatanan kehidupan masyarakat	1.1.1.	Meningkatnya kualitas pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran dan Al-Hadist serta Ijma' dan Qiyas	1.1.1.1.	Penguatan pengamalan pelaksanaan syariat islam
				1.1.1.2.	Penyelenggaraan pendidikan hafizh Alquran
		1.1.2.	Terintegrasinya pendidikan agama Islam dalam pendidikan umum	1.1.2.1	Integrasi kurikulum agama islam dalam kurikulum pendidikan nasional
		1.1.3.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah	1.1.3.1	Standarisasi kualitas pendidikan dayah
		1.1.4.	Menguatnya tatanan ekonomi syari'ah	1.1.4.1	Peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang ZIS
		1.1.5.	Menguatnya penegakan syariat islam dalam masyarakat	1.1.5.1	Pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah
Misi 2 : Peningkatan Sumberdaya Manusia					
2.1	Meningkatkan kualitas SDM berdaya saing;	2.1.1.	Meningkatnya kualitas pendidikan;	2.1.1.1.	Peningkatan akses pendidikan dasar
		2.1.2.	Pemerataan standar pelayanan pendidikan	2.1.2.1	Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pendidik
		2.1.3.	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	2.1.3.1.	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik
		2.1.4.	Meningkatnya prestasi olahraga dan kepemudaan	2.1.4.1.	Pembinaan keolahragaan dan kepemudaan

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	
2.2	Meningkatkan Kualitas dan pelayanan kesehatan;	2.2.1.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;	2.2.1.1	peningkatan kualitas kesehata masyarakat
				2.2.1.2	pemantapan pola hidup bersih dan sehat
		2.2.2.	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat;	2.2.2.1.	peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
2.3	Meningkatkan pengarusutamaan gender;	2.3.1.	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.	2.3.1.1	peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan
2.4	Meningkatkan kesejahteraan sosial;	2.4.1.	Meningkatnya kesejahteraan PMKS.	2.4.1.1	peningkatan kesejahteraan PMKS
		2.4.2	Meningkatnya kesejahteraan disabilitas.	2.4.2.1	peningkatan kesejahteraan para disabilitas
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government), Bersih (Clean Government) dan Bertanggung Jawab (Responsible Government)					
3.1	Mewujudkan reformasi birokrasi yang akuntabel.	3.1.1.	Birokrasi yang bersih dan bertanggung jawab;	3.1.1.1	peningkatan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah
		3.1.2.	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	3.1.2.1	peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat
		3.1.3.	Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;	3.1.3.1	Pemenuhan jaminan keamanan bagi masyarakat
		3.1.4.	Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor	3.1.4.1	penguatan SDM perencanaan
Misi 4 : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur					
4.1	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dasar.	4.1.1.	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah;	4.1.1.1	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang terintregasi
				4.1.1.2	Pengembangan aksesibiltas perhubungan laut dan darat
		4.1.2.	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat;	4.1.2.1	Pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	
				4.1.2.2	Pengurangan kawasan kumuh di pusat-pusat perkotaan dan pencegahan timbulnya kawan kumuh baru
				4.1.2.3	Peningkatan sarana dan prasarana serta jaringan telekomunikasi
		4.1.3.	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan;	4.1.3.1	Peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan dan kawasan lindung
				4.1.3.2	Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan
				4.1.3.3	Peningkatan tingkat kepatuhan terkait penataan ruang, penataan lingkungan dan bangunan
				4.1.3.4	Peningkatan kualitas dan normalisasi sungai dan pantai
				4.1.3.5	Penyelesaian konflik sengketa tanah
		4.1.4.	Meningkatnya sasaran masyarakat terhadap mitigasi bencana.	4.1.4.1	peningkatan upaya mitigasi bencana
		4.1.5.	Menguatnya tatanan cagar budaya dan adat istiadat Aceh yang islami	4.1.5.1	Pelestarian cagar budaya dan budaya lokal
Misi 5 : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Mukim dan Gampong					
5.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat	5.1.1.	Meningkatkan pembangunan sektor pertanian;	5.1.1.1	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan dan perikanan
		5.1.2.	Mengembangkan sektor ekonomi mikro;	5.1.1.2	peningkatan infrastruktur penunjang sektor pertanian, peternakan dan perikanan
		5.1.2.	Mengembangkan sektor ekonomi	5.1.2.1	Pengembangan dan peningkatan pasar

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	
			mikro;		rakyat untuk akses perdagangan
				5.1.2.2	Pengembangan dan pembinaan industri kecil dan menengah (IKM)
				5.1.2.3	Pemasaran produk unggulan industri kecil dan menengah (IKM)
				5.1.2.4	Pengembangan badan usaha milik gampong dan inovasi melalui teknologi tepat guna
		5.1.3.	Meningkatkan kontribusi pariwisata.	5.1.3.1	Pengembangan kawasan wisata Islami
				5.1.3.2	Peningkatan saran dan prasarana kawasan pariwisata
5.2	Menurunnya angka kemiskinan.	5.2.1.	Meningkatkan ketahanan pangan;	5.2.1.1	Peningkatan divertisifikasi pangan
		5.2.2.	Meningkatkan kesejahteraan petani;	5.2.2.1	Peningkatan indeks yang diterima sekaligus pengendalian indeks yang dibayar petani
				5.2.2.2	Optimalisasi swasembada pangan
		5.2.3.	Menurunnya angka pengangguran;	5.2.3.1	Pembinaan kreativitas dan peningkatan pengetahuan angkatan kerja
		5.2.4.	Meningkatnya kesempatan kerja; dan	5.2.4.1	Pembinaan kreativitas dan dukungan usaha IKM
		5.2.5.	Meningkatnya nilai investasi.	5.2.5.1	Peningkatan jumlah investasi
	`			5.2.5.2	Promosi Daerah
Misi 6 : Percepatan Laju Pembangunan Masyarakat Pesisir, Terisolir dan Tertinggal					
6.1	Meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir, terisolir, dan tertinggal;	6.1.1.	Mengembangkan sektor perikanan di kawasan pesisir;	6.1.1.1	Peningkatan indeks yang diterima sekaligus pengendalian indeks yang dibayar Nelayan

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	
				6.1.1.2	Optimalisasi potensi wisata di wilayah pesisir, terisolir dan tertinggal
				6.1.1.3	Pembangunan infrastruktur dasar pariwisata di wilayah pesisir, terisolir dan tertinggal
		6.1.2.	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah;	6.1.1.3	pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah pesisir, terisolir dan tertinggal

Tabel. 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2022

Tahun	Arah Kebijakan
2018	1. Peningkatan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan; 2. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat; 3. Pembangunan jaringan jalan dan jembatan untuk menghidupkan perekonomian masyarakat serta pembangunan permukiman sehat dan layak huni bagi masyarakat; 4. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian di berbagai komoditas unggulan; 5. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir, terisolir dan tertinggal; 6. Optimalisasi penggunaan lahan dan tata ruang wilayah; 7. Pengembangan seluruh kawasan wisata; dan 8. Penyebarluasan syi'ar islam ke seluruh wilayah Kabupaten Aceh Besar.
2019	1. Upaya penanggulangan kemiskinan; 2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis mukim dan gampong; 3. Pelaksanaan syariat islam; 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang akuntabel; 5. Menyusun perencanaan pembangunan terpadu di bidang ekonomi, infrastruktur dan sosial budaya; 6. Peningkatan sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan; dan 7. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kabupaten, daerah persisir, terisolir, terluar dan tertinggal.
2020 2020	1. Integrasi pendidikan agama islam terhadap kurikulum pendidikan umum; 2. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan beserta tenaga pengajar ke seluruh wilayah Kabupaten Aceh Besar; 3. Menghidupkan kesenian dan adat istiadat Aceh Besar; 4. Mengurangi angka kematian bayi dan ibu melahirkan; 5. Penanggulangan penyakit menular dengan melaksanakan pelayanan kesehatan yang optimal; 6. Pendataan dan identifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah; 7. Pembangunan dan peningkatan terhadap jaringan akses dan infratruktur daerah untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat; 8. Melaksanakan pengembangan ekonomi mikro melalui Koperasi, UKM dan lembaga keuangan mikro lainnya; 9. Pembinaan terhadap kemandirian gampong disertai dengan

Tahun	Arah Kebijakan
	pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat; dan 10. Mengidentifikasi serta memanfaatkan potensi ekonomi di wilayah persisir dan terluar lingkup Kabupaten Aceh Besar.
2021	1. Peningkatan pembangunan dayah dan peran serta ulama dalam mengawal penegakan syariat islam; 2. Peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan serta perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan masyarakat; 3. Pemberdayaan terhadap perempuan dan organisasi masyarakat serta pembinaan terhadap olahraga; 4. Pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur daerah untuk pertumbuhan perekonomian masyarakat; 5. Pelayanan air bersih bagi seluruh masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi; 6. Peningkatan dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan serta komoditas unggulan lainnya; dan 7. Peningkatan dan pembinaan terhadap industri kecil dan perdagangan serta optimalisasi pasar rakyat; 8. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat gampong dalam partisipasinya terhadap pembangunan daerah; 9. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur kawasan wisata serta daerah persisir dan terisolir; 10. Pelaksanaan alih fungsi lahan terlantar menjadi lahan produktif; dan 11. Peningkatan pelayanan publik yang lebih optimal.
2022	1. Peningkatan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam penegakan syariat islam; 2. Optimalisasi sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut; 3. Melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat perkotaan, pedesaan, dan wilayah terisolir; 4. Pembangunan dan rehabilitasi serta peningkatan kapasitas tenaga pengajar dan tenaga kesehatan pada sektor pendidikan dan kesehatan; 5. Peningkatan kualitas infrastruktur daerah untuk kebutuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat;
2022	6. Peningkatan terhadap pengawasan penggunaan lahan dan kawasan lindung sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan 7. Integrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis elektronik.

Tabel 6.3
Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2022
Berdasarkan Misi Pembangunan

MISI		PRIORITAS PEMBANGUNAN	
1	Pelaksanaan Syariat Islam	PP1	Pelaksanaan kehidupan bersyariah, pengendalian keamanan dan penegakan hukum
2	Peningkatan Sumberdaya Manusia	PP2	Pembangunan dan peningkatan pelayanan sektor pendidikan
		PP3	Pembangunan dan peningkatan pelayanan sektor kesehatan
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government), Bersih (Clean Government) dan Bertanggung Jawab (Responsible Government)	PP4	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
4	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	PP5	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur terintegrasi
		PP6	Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana
5	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Mukim dan Gampong	PP7	Pembangunan dan peningkatan sektor pertanian dan ketahanan pangan
		PP8	Penanggulangan kemiskinan
6	Percepatan Laju Pembangunan Masyarakat Pesisir, Terisolir dan Tertinggal	PP9	Pengelolaan sumber daya alam, pariwisata, investasi dan ekonomi kreatif

Tabel 6.4
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 - 2022

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Prioritas Pembangunan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)
				Misi 1 : Pelaksanaan Syariat Islam.					**61,543,797,350**		**65,657,177,085**		**70,181,894,794**		**77,200,084,273**		**84,478,992,700**		**359,061,946,201**		
				Tujuan 1.1 : Menegakkan dan memperkuat pelaksanaan syariat islam dalam tatanan kehidupan masyarakat	**Persentase Penegakan dan pengamalan syariat islam**	**%**	**80**	**85**	**61,543,797,350**	**90**	**65,657,177,085**	**95**	**70,181,894,794**	**100**	**77,200,084,273**	**100**	**84,478,992,700**	**100**	**359,061,946,201**		
				Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya kualitas pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran dan Al-Hadist serta Ijma' dan Qiyas	**Angka Melek Al-Quran**	**%**	**88**	**88**	**23,924,253,500**	**90**	**24,316,678,850**	**93**	**26,748,346,735**	**96**	**29,423,181,409**	**99**	**32,365,499,549**	**99**	**136,777,960,043**		
					Jumlah Hafiz Al-Quran	**Orang**															
20	33			Program Pembinaan Syariat Islam	Terlaksananya pembinaan syariat Islam	kegiatan	4	4	10,917,968,500	5	11,967,765,350	5	11,010,741,885	6	14,480,996,074	6	13,322,997,681	6	61,700,469,489	PP1	Dinas syariat islam
					Terlaksanana pembinaan kader ulama	kader	46	92	155,090,000	138	170,599,000	184	187,658,900	230	206,424,790	276	227,067,269	276	946,839,959	PP1	Sekretariat MPU
					Tercapainya pembinaan dan pengembangan Syariat Islam	Bulan	12	12	320,595,000	12	352,654,500	12	387,919,950	12	426,711,945	12	469,383,140	60	1,957,264,535	PP1	
					Terlaksananya pembinaan syariat Islam				1,780,000,000				2,153,800,000				2,606,098,000		6,539,898,000	PP1	23 Kecamatan
20	33			Program Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam (Pembinaan Aqidah, Ibadah, Akhlak dan Syiar Islam)	Terlaksananya penegakan dan pengamalan syariat islam	%	70	70	10,596,600,000	75	11,656,260,000	75	12,821,886,000	80	14,104,074,600	80	15,514,482,060	80	64,693,302,660	PP1	Dinas syariat islam
20	33			Program Keserasian Kebijakan Pelaksanaan Syariat Islam	Terciptanya regulasi islam	Qanun	1	1	154,000,000	2	169,400,000	3	186,340,000	3	204,974,000	3	225,471,400	3	940,185,400	PP1	Dinas syariat islam
				Sasaran 1.1.2 : Terintegrasinya pendidikan agama Islam dalam pendidikan umum	**Cakupan Sekolah yang menerapkan kurikulum pendidikan islam**	**%**	-	**20**	**15,433,013,850**	**30**	**18,976,315,235**	**45**	**20,873,946,759**	**60**	**22,961,341,434**	**70**	**25,257,475,578**	**70**	**103,502,092,856**		
20	36			Program peningkatan sumber daya dan peran ulama	Meningkatnya pemahaman aqidah masyarakat	kecamatan	11	23	409,410,000	23	450,351,000	23	495,386,100	23	544,924,710	23	599,417,181	23	2,499,488,991	PP1	MPU
01	02		18	Program Pendidikan Non Formal	Terwujudnya Proses Belajar Mengajar Pendidikan Non Formal	PKBM	23	23	560,316,350	23	616,347,985	23	677,982,784	23	745,781,062	23	820,359,168	23	3,420,787,348	PP1	Dinas Pendidikan Dayah
					Dayah yang memenuhi standar pendidikan dayah	%	74	80	14,463,287,500	85	17,909,616,250	90	19,700,577,875	95	21,670,635,663	100	23,837,699,229	100	97,581,816,516	PP1	
				Sasaran 1.1.3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah	**Persentase dayah yang memenuhi standarisasi dayah**	**%**			**21,210,000,000**		**21,290,000,000**		**21,378,000,000**		**23,515,800,000**		**25,426,280,000**		**112,820,080,000**		
20	33			Program Pembinaan Lembaga Pendidikan Agama	Terwujudnya Pembinaan LPI	unit	23	24	800,000,000	25	880,000,000	26	968,000,000	27	1,064,800,000	27	1,171,280,000	27	4,884,080,000	PP1	Dinas syariat islam
				Program Pendidikan Dayah					16,400,000,000		16,400,000,000		16,400,000,000		18,040,000,000		19,844,000,000		87,084,000,000	PP1	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah					260,000,000		260,000,000		260,000,000		286,000,000		286,000,000		1,352,000,000	PP1	
				Program Pemberdayaan Santri					3,200,000,000		3,200,000,000		3,200,000,000		3,520,000,000		3,520,000,000		16,640,000,000	PP1	
				Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan					550,000,000		550,000,000		550,000,000		605,000,000		605,000,000		2,860,000,000	PP1	
				Sasaran 1.1.4 : Menguatnya tatanan ekonomi syari'ah	**Penerimaan ZIS yang dikumpulkan**	**Rp.Juta**	**15.339**	**17.859**	**733,000,000**	**16.520**	**806,300,000**	**17.420**	**886,930,000**	**16.190**	**975,623,000**	**17.123**	**1,073,185,300**	**17.123**	**4,475,038,300**		
20	36			Program peningkatan dan pembinaan kemaslahatan umat	Terlaksananya Pembinaan kemaslahatan umat	Orang	766	766	523,000,000	850	575,300,000	905	632,830,000	960	696,113,000	960	765,724,300	960	3,192,967,300	PP1	Sekretariat MPU
					Meningkatnya pembinaan hukum syariah kepada umat	kec	23	23	210,000,000	23	231,000,000	23	254,100,000	23	279,510,000	23	307,461,000	23	1,282,071,000	PP1	MAA
				Sasaran 1.1.5 : Menguatnya penegakan syariat islam dalam masyarakat	**Jumlah regulasi yang mendukung penegakan syariat islam**				**243,530,000**		**267,883,000**		**294,671,300**		**324,138,430**		**356,552,273**		**1,486,775,003**		
					Persentase penanganan pelanggaran syariat islam	**%**	**91**	**94**		**96**		**98**		**100**		**100**		**100**				
02	36		45	Program Pengembangan Muamalah	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pelaksanaan Muamalah	bulan	12	12	243,530,000	12	267,883,000	12	294,671,300	12	324,138,430	12	356,552,273	60	1,486,775,003	PP1	MAA
				Misi 2 : Peningkatan Sumberdaya Manusia					**228,907,212,300**		**223,579,026,790**		**217,599,951,249**		**235,959,946,374**		**261,600,324,211**		**1,167,646,460,924**		

(1)			(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)
			Tujuan 2.1 : Meningkatkan kualitas SDM berdaya saing.	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	**72**	**72.31**	**110,858,930,900**	**72.53**	**96,525,917,250**	**72.67**	**76,878,067,425**	**72.86**	**84,285,874,168**	**72.98**	**92,808,844,784**	**72.98**	**461,357,634,527**		
			Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya kualitas pendidikan.	**Angka Partisipasi Sekolah**	**%**	**97.77**	**97.91**	**3,074,713,000**	**98.03**	**3,358,896,300**	**98.33**	**3,671,497,930**	**98.56**	**4,038,647,723**	**98.76**	**4,416,895,695**	**98.76**	**18,560,650,648**		
01	01	15	Program pendidikan anak usia dini	Meningkatnya angka partisipasi kasar TK	%	34	36	1,477,675,000	40	1,625,442,500	43	1,787,986,750	53	1,966,785,425	58	2,163,463,968		9,021,353,643	PP2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	01	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Terlaksananya Pendidikan Politik	kec.	23	23	1,175,208,000	23	1,292,728,800	23	1,422,001,680	23	1,564,201,848	23	1,720,622,033	23	7,174,762,361	PP2	Badan Kesbangpol
1	20	47	Program Peningkatan pencapaian Standar Mutu Pendidikan	Meningkatnya mutu pendidikan	Tahun	1	1	188,950,000	1	207,845,000	1	228,629,500	1	251,492,450	1	276,641,695	5	1,153,558,645	PP2	Sekretariat MPD
				tersedianya pelayan UKS di kabupaten dan kecamatan				232,880,000		232,880,000		232,880,000		256,168,000		256,168,000		1,210,976,000		
			Sasaran 2.1.2 : Pemerataan standar pelayanan pendidikan;	**Jumlah Sekolah yang memiliki standar pelayanan Minimum Dikdas dan Mutu Pendidikan**	**Unit**	**345**	**348**	**52,386,256,900**	**349**	**57,579,961,350**	**350**	**60,560,036,685**	**351**	**66,916,040,354**	**352**	**74,007,644,389**	**352**	**311,449,939,677**		
01	01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terpenuhinya Standar Pelayanaan Minimum Dikdas dan Percepatan Peningkatan Mutu	sekolah	345	348	51,637,048,500	349	56,800,753,350	350	59,280,828,685	351	65,508,911,553.50	352	72,459,802,709	353	305,687,344,797	PP2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya Sistem Manajemen Pendidikan yang Profesional	lembaga	645	690	749,208,400	697.12	779,208,000	704.3424	1,279,208,000	711.669248	1,407,128,800	719	1,547,841,680	727	5,762,594,880	PP2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Sasaran 2.1.3 : Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;	**Persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik**	**%**			**477,588,000**		**525,346,800**		**3,377,881,480**		**3,435,669,628**		**3,499,236,591**		**11,315,722,499**		
01	01	20	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya kapasitas dan Kompetensi guru dan pengelola pendidikan	guru	7036	7125	332,013,000	6925	365,214,300	6725	401,735,730	6525	441,909,303	6325	486,100,233	6125	2,026,972,566	PP2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan					0.00		0.00		2,800,000,000		2,800,000,000		2,800,000,000		8,400,000,000		
		43	Program Peningkatan Peran dan Fungsi Majelis Pendidikan Daerah	Meningkatnya peran majelis pendidikan daerah	Tahun	1	1	145,575,000	1	160,132,500	1	176,145,750	1	193,760,325	1	213,136,358	5	888,749,933	PP2	Sekretariat MPD
			Sasaran 2.1.4 : Meningkatnya prestasi olahraga dan kepemudaan;	**Persentase atlit berprestasi pada kejuaraan olahraga tingkat regional maupun nasional**	**%**			**54,920,373,000**		**35,061,712,800**		**9,268,651,330**		**9,895,516,463**		**10,885,068,109**		**120,031,321,702**		
				Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	**%**															
18	01	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Peningkatan pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga	bulan	12	12	1,970,250,000	12	2,167,275,000	12	2,384,002,500	12	2,622,402,750	12	2,884,643,025	12	12,028,573,275	PP2	Disparpora
18	21		Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	bulan	12	12	51,809,725,000	12	31,690,000,000	12	5,689,767,250	12	5,958,743,975	12	6,554,618,373	12	101,702,854,598	PP2	Disparpora
18	1	19	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Adanya kebijakan dalam pengelolaan manajemen olah raga	dokumen		1	20,000,000	2	22,000,000	2	24,200,000	2	26,620,000	2	29,282,000	2	122,102,000	PP2	Disparpora
18	01	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya peran serta organisasi pemuda	organisasi	3	4	535,876,000	4	539,463,600	4	463,409,960	4	509,750,956	4	560,726,052	4	2,609,226,568	PP2	Disparpora
18	01	17	Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Meningkatnya Upaya Wirausaha dan kecakapan hidup pemuda	bulan	12	12	246,522,000	12	271,174,200	12	298,291,620	12	328,120,782	12	360,932,860	60	1,505,041,462	PP2	Disparpora
18	01	15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Meningkatkan pengembangan keserasian kebijakan pemuda	%		60	300,000,000	65	330,000,000	72	363,000,000	76	399,300,000	80	439,230,000	80	1,831,530,000	PP2	Disparpora
18	1	18	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Meningkatnya kesadaran pemuda terhadap bahaya narkoba	bulan	12	12	38,000,000	12	41,800,000	12	45,980,000	12	50,578,000	12	55,635,800	60	231,993,800	PP2	Disparpora
			Tujuan 2.2 : Meningkatkan Kualitas dan pelayanan kesehatan.	**Angka Usia Harapan Hidup**	**Tahun**	**69,52**	**69,60**	**103,171,751,400**	**69,74**	**110,688,926,540**	**69,82**	**122,321,282,524**	**69,88**	**131,433,410,776**	**69,95**	**146,526,751,854**	**69,95**	**614,142,123,094**		
			Sasaran 2.2.1 : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.	**Angka Kematian Bayi**	**KH**	**42/1000**	**35/1000**	**90,707,456,400**	**29/1000**	**97,678,202,040**	**21/1000**	**107,886,022,244**	**17/1000**	**115,554,624,468**	**13/1000**	**129,110,086,915**	**13/1000**	**540,936,392,068**		
				Persentase Balita Gizi Buruk	**%**	**1,02**	**0,91**		**0,76**		**0,45**		**0,25**		**0,11**		**0,11**			
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
				Rasio Akseptor KB	**%**	**82**	**85**		**90**		**90**		**90**		**90**		**90**			

(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)
					Jumlah Desa yang menerapkan Program Indonesia sehat - pendekatan keluarga (PIS-PK)	**Desa**	**-**	**250**		**300**		**400**		**500**		**604**		**604**			
02	01		17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya kemampuan petugas dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	Kec.	23	23	100,000,000	23	110,000,000	23	121,000,000	23	133,100,000	23	146,410,000	23	610,510,000	PP3	DINAS KESEHATAN
02	01		19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Meningkatnya jumlah rumah tangga melaksanakan germas, PIS-PK	%	100	100	848,759,000	100	933,634,900	100	1,026,998,390	100	1,129,698,229	100	1,242,668,052	100	5,181,758,571	PP3	DINAS KESEHATAN
02	01		20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	%	44	100	1,520,800,000	100	1,672,880,000	100	1,840,168,000	100	2,024,184,800	100	2,226,603,280	100	9,284,636,080	PP3	DINAS KESEHATAN
02	01		23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Terlaksananya evaluasi pengembangan standar pelayanan kesehatan	%	100	100	465,000,000	100	511,500,000	100	562,650,000	100	618,915,000	100	680,806,500	100	2,838,871,500	PP3	DINAS KESEHATAN
02	01		15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan	%	70	100	2,035,000,000	100	2,238,500,000	100	2,462,350,000	100	2,708,585,000	100	2,979,443,500	100	12,423,878,500	PP3	DINAS KESEHATAN
02	01		18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Cakupan pelayanan TOGA di Sarkes	%	-	50	70,000,000	70	77,000,000	100	84,700,000	1	93,170,000	100	102,487,000	100	427,357,000	PP3	DINAS KESEHATAN
02	01		16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan Kadar level I yang harus diberikan Sarkes kab/kota	%	50		48,180,829,000	100	52,998,911,900	100	58,298,803,090	100	64,128,683,399	100	70,541,551,739	100%	294,148,779,128	PP3	DINAS KESEHATAN
									13,000,000,000		13,000,000,000		13,000,000,000		13,000,000,000		14,300,000,000		66,300,000,000		
02	01		30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	%	70	50	152,150,000	60	167,365,000	70	184,101,500	70	202,511,650	70	222,762,815	70	928,890,965	PP3	DINAS KESEHATAN
					Cakupan Pembinaan Usila pada Kelompok Usila	%	-	25		30		50		100		100		100		PP3	DINAS KESEHATAN
02	01		31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Meningkatnya monitoring jumlah industri rumah tangga	%	50	50	68,300,000	70	75,130,000	85	82,643,000	90	90,907,300	90	99,998,030	90	416,978,330	PP3	DINAS KESEHATAN
01	02	01	25	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	Tersedianya pusat pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan	unit	11	13	14,000,000,000	14	14,100,000,000	15	16,940,000,000	16	17,034,000,000	17	19,737,400,000	17	81,811,400,000	PP3	Dinas Kesehatan
01	02	01	26	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah sakit	tersedia sarana dan prasarana yang menunjang pelaanan kesehatan	unit	4	5	5,000,000,000	5	5,500,000,000	5	6,050,000,000	5	6,655,000,000	5	7,320,500,000	5	30,525,500,000	PP3	Dinas Kesehatan
02	01		21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan pengawasan rmh sehat		0.32	0.65	350,000,000	0.7	385,000,000	0.8	423,500,000	0.8	465,850,000	80%	512,435,000	0.8	2,136,785,000	PP3	DINAS KESEHATAN
02	01		24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Terlayaninya pengobatan untuk penduduk miskin	%	100	-	0.00	100	600,000,000	100	660,000,000	100	726,000,000	100	798,600,000	100	2,784,600,000	PP3	DINAS KESEHATAN
02	01		32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	873,756,400	100	961,132,040	100	1,057,245,244	100	1,162,969,768	100	1,279,266,745	100	5,334,370,198	PP3	DINAS KESEHATAN
02	01		29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	meningkatnya kesehatan dan kualitas tenaga kesehatan	%	75	100	1,541,412,000	100	1,595,553,200	100	2,065,108,520	100	2,051,619,372	100%	3,256,781,309	100	10,510,474,401	PP3	DINAS KESEHATAN
02	01		22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Terlaksananya penanggulangan penyakit menular dengan angka cakupan penemuan dan penanganan penyakit : a. AFP rate per 100.000 pddk < 15 thn	%	20	30	2,501,450,000	30	2,751,595,000	30	3,026,754,500	30	3,329,429,950	30	3,662,372,945	100	15,271,602,395	PP3	DINAS KESEHATAN
				Sasaran 2.2.2 : Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	**Rasio Rumah Sakit Umum per satuan penduduk**	**/100.000 pddk**	**49,89**	**49,89**	**12,464,295,000**	**49,89**	**13,010,724,500**	**49,89**	**14,435,260,280**	**74,83**	**15,878,786,308**	**74,83**	**17,416,664,939**	**74,83**	**73,205,731,027**		
					Rasio Puskesmas, pusling, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	**/1000 pddk**	**35,67**	**40,22**		**45,47**		**50,66**		**55,34**		**60,14**		**60,14**			
					Rasio dokter per satuan penduduk	**/1000 pddk**	**26,69**	**29,93**		**34,92**		**39,91**		**44,91**		**49,89**		**49,89**			
					Rasio tenaga medis dan kesehatan per satuan penduduk	**/1000 pddk**	**38,06**	**42,41**		**47,39**		**52,38**		**57,37**		**62,36**		**62,36**			
02	02		26	program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	tersedia sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kesehatan	unit	4	5	5,000,000,000	5	5,500,000,000	6	6,050,000,000	6	6,655,000,000	6	7,320,500,000	6	30,525,500,000	PP3	RSUD
02	02		27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Mata	Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Sarana Rumah sakit	unit	5	6	338,799,000	6	372,678,900	6	409,946,790	6	450,941,469	6	496,035,616	6	2,068,401,775	PP3	RSUD

(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)
				Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Sarana Rumah sakit	unit	5	6	338,799,000	5	372,678,900	5	409,946,790	5	450,941,469	5	496,035,616	5	2,068,401,775	RSUD	
02	02		28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan				5,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		5,500,000,000		6,000,000,000	1	26,500,000,000	PP3	RSUD
					meningkatnya kesehatan dan kualitas tenaga kesehatan	%	100	100	1,786,697,000	100	1,765,366,700	100	2,565,366,700	100	2,821,903,370	100	3,104,093,707		12,043,427,477		
				Tujuan 2.3 : Meningkatkan pengarusutamaan gender.	**Angka partisipasi perempuan dalam pembangunan**	**%**	**-**	**50**	**6,791,975,000**	**60**	**7,471,172,500**	**70**	**8,618,289,750**	**80**	**9,480,118,725**	**90**	**10,428,130,598**	**90**	**42,789,686,573**		
				Sasaran 2.3.1 : Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	**Proporsi keterwakilan perempuan di Lembaga pemerintah**	**%**	**57,6**	**60**	**6,791,975,000**	**70**	**7,471,172,500**	**80**	**8,618,289,750**	**90**	**9,480,118,725**	**100**	**10,428,130,598**	**100**	**42,789,686,573**		
12	15			Program Keluarga Berencana	Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam program KB	51.012 PE-KB, 65% , 23 Kec/ 604 desa , 65 % X PUS	51.012 PE-KB, 65% , 23 Kec/ 604 desa , 65 % X PUS	51.012 PE-KB, 65% , 23 Kec/ 604 desa , 65 % X PUS	1,287,690,000	51.012 PE-KB, 65% , 23 Kec/ 604 desa , 65 % X PUS	1,416,459,000	51.012 PE-KB, 65% , 23 Kec/ 604 desa , 65 % X PUS	1,558,104,900	51.012 PE-KB, 65% , 23 Kec/ 604 desa , 65 % X PUS	1,713,915,390	51.012 PE-KB, 65% , 23 Kec/ 604 desa , 65 % X PUS	1,885,306,929	51.012 PE-KB, 65% , 23 Kec/ 604 desa , 65 % X PUS	7,861,476,219	PP3	DPPKB PP dan PA
12	16			Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkaytnya Advokasi dan innformasi tentang kespro bagi remaja dalam rangka peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap remaja	PIK remaja	36	36	94,680,000	36	104,148,000	36	114,562,800	36	126,019,080	36	138,620,988	36	578,030,868	PP3	DPPKB PP dan PA
12	17			Program Pelayanan Kontrasepsi	Meningkatnya Pelayanan KB bagi peserta PUS dan WUS	23 Kec/604 desa, 23 Kec/604 desa , 23 Kec/604 desa	23 Kec/604 desa, 23 Kec/604 desa , 23 Kec/604 desa	23 Kec/604 desa, 23 Kec/604 desa , 23 Kec/604 desa	400,000,000	23 Kec/604 desa,	440,000,000	23 Kec/604 desa,	484,000,000	23 Kec/604 desa,	532,400,000	23 Kec/604 desa,	585,640,000	23 Kec/604 desa,	2,442,040,000	PP3	DPPKB PP dan PA
12	21			Program Peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV / AID	Meningkatnya kesadaran generasi muda bebas dari pengaruh narkoba dan PMS	paket	5	6	520,000,000	6	572,000,000	6	629,200,000	6	692,120,000	6	761,332,000	6	3,174,652,000	PP3	DPPKB PP dan PA
12	23			Program penyiapan Tenaga pendamping kelompok bina keluarga Balita	Meninngkatnya keterampilan kader dalam pengelolaan	kec	23	23	0.00	-	0.00	-	400,000,000	23	440,000,000	23	484,000,000	23	1,324,000,000	PP3	DPPKB PP dan PA
1	11	2.08.1	23	Program Penyediaan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga	Meninngkatnya keterampilan kader dalam pengelolaan	kec.	23	23	345,000,000	23	379,500,000	23	417,450,000	23	459,195,000	23	505,114,500	23	2,106,259,500		DPPKB PP dan PA
12	19			Program promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Meningkatnya informasi kesehatan ibu dan anak melalui kegiatan promosi di masyarakat	kec	23	23	541,000,000	23	595,100,000	23	654,610,000	23	720,071,000	23	792,078,100	23	3,302,859,100	PP3	DPPKB PP dan PA
12	19			Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Meningkatnya pemahaman pentingnya BKB di masyarakat	kec	23	23	362,000,000	23	398,200,000	23	438,020,000	23	481,822,000	23	530,004,200	23	2,210,046,200	PP3	DPPKB PP dan PA
12	18			Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	Meningkatnya kepedulian kelompok dan institusi masyarakat dalam program KB	kec	23	23	299,335,000	23	329,268,500	23	362,195,350	23	398,414,885	23	438,256,374	23	1,827,470,109	PP3	DPPKB PP dan PA
12	24			Program Pengembangan model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Tersusunnya model dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan operasional BKB , Posyandu dan PAUD secara internal	buah	1	1	150,000,000	1	165,000,000	1	181,500,000	1	199,650,000	1	219,615,000	1	915,765,000	PP3	DPPKB PP dan PA
11	01		15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak baik bidang kesehatan , pendidikan dan ekonomi serta sosial budaya	kecamatan	0	23	200,000,000	23	220,000,000	23	242,000,000	23	266,200,000	23	292,820,000	23	1,221,020,000	PP3	DPPKB PP dan PA
11			16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Pemb. Responsif Gender	SKPD	5	10	676,385,000	11	744,023,500	15	818,425,850	15	900,268,435	38	990,295,279	38	4,129,398,064	PP3	DPPKB PP dan PA
1	11	2.08.1	19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender	Peningkatan Pengarustamaan Gender dan anak	lembaga	1	2	676,385,000	165 org, 1 lbg	744,023,500	165 org, 1 lbg	818,425,850	165 org, 1 lbg	900,268,435	165 org, 1 lbg	990,295,279		4,129,398,064		DPPKB PP dan PA
11	18			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan bertambah jumlah peran dan posisi perempuan dalam jabatan politik dan publik	orang / desa	330 / 18	330 / 18	279,500,000	330 / 18	307,450,000	330 / 18	338,195,000	330 / 18	372,014,500	330 / 18	409,215,950	330 / 18	1,706,375,450	PP3	DPPKB PP dan PA

(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)
12	20			Program Pengembangan pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Meningkatnya pelayanan informasi dan komunikasi KRR pada semua kelompok PIK rremaja	remaja	36 PIK remaja , 36 PIK remaja	36 PIK remaja , 36 PIK remaja	320,000,000	330 orang , 18 desa , 1 buah	352,000,000	330 orang , 18 desa , 1 buah	387,200,000	330 orang , 18 desa , 1 buah	425,920,000	330 orang , 18 desa , 1 buah	468,512,000	330 orang , 18 desa , 1 buah	1,953,632,000	PP3	DPPKB PP dan PA
11	17			Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak baik bidang kesehatan , pendidikan dan ekonomi serta sosial budaya	kec	23	23	640,000,000	23	704,000,000	23	774,400,000	23	851,840,000	23	937,024,000	23	3,907,264,000	PP3	DPPKB PP dan PA
				Tujuan 2.4 : Meningkatkan kesejahteraan sosial	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial**	**%**	**60**	**65**	**8,084,555,000**	**70**	**8,893,010,500**	**70**	**9,782,311,550**	**80**	**10,760,542,705**	**85**	**11,836,596,976**	**85**	**49,357,016,731**		
				Sasaran 2.4.1 : Meningkatnya kesejahteraan PMKS	**Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE/kelompok dan perorangan sosial ekonomi sejenis lainnya**	**%**	**60**	**65**	**5,284,555,000**	**70**	**5,813,010,500**	**70**	**6,394,311,550**	**80**	**7,033,742,705**	**85**	**7,737,116,976**	**85**	**32,262,736,731**		
1	13		21	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Tercapainya Pelayanan JKA yang Memadai	%	100	100	200,000,000	100	220,000,000	100	242,000,000	100	266,200,000	100	292,820,000	100	1,221,020,000	PP8	Dinas Sosial
					Terberdayanya kelembagaan secara optimal	Bulan	6	6	2,197,545,000	6	2,417,299,500	6	2,659,029,450	6	2,924,932,395	6	3,217,425,635	30	13,416,231,980		Dinas Sosial
1	13		16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya pemulihan kondisi dan fungsi sosial masyarakat	%	100	100	1,200,000,000	100	1,320,000,000	100	1,452,000,000	100	1,597,200,000	100	1,756,920,000	100	7,326,120,000	PP8	Dinas Sosial
1	13		15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Terlaksananya program pemberdayaan terhadap PMKS dan fungsi sosial masyarakat	%	100	100	700,000,000	100	770,000,000	100	847,000,000	100	931,700,000	100	1,024,870,000	100	4,273,570,000	PP8	Dinas Sosial
1	13		20	Program Pembinaan Eks.penyandang penyakit sosial (Eks.Napi,eks..PSK, eks.Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Meningkatnya pembinaan Para penyandang Penyakit sosial (Eks.Napi,Eks.PSK,eks.Narkoba dan penyakit sosial lainnya	%	100	100	100,000,000	100	110,000,000	100	121,000,000	100	133,100,000	100	146,410,000	100	610,510,000	PP3	Dinas Sosial
1	20			Program Pengembangan dan Peningkatan SDM Sosial Masyarakat	Terbantunya Biaya Pendidikan Masyarakat	bulan	12	12	287,010,000	12	315,711,000	12	347,282,100	12	382,010,310	12	420,211,341	60	1,752,224,751	PP8	Setdakab (Bag. Kesra)
1	13		17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Terlaksananya akses sosial terhadap penanganan anak terlantar	%	100	100	600,000,000	100	660,000,000	100	726,000,000	100	798,600,000	100	878,460,000	100	3,663,060,000	PP8	Dinas Sosial
				Sasaran 2.4.2 : Meningkatnya kesejahteraan disabilitas.	**Penyandang disabilitas yang menerima jaminan sosial**	**Orang/tahun**	**97**	**100**	**2,800,000,000**	**120**	**3,080,000,000**	**150**	**3,388,000,000**	**200**	**3,726,800,000**	**250**	**4,099,480,000**	**250**	**17,094,280,000**		
1	13		19	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Meningkatnya pembinaan panti asuhan /panti jompo di Kab.Aceh Besar	%	100	100	2,100,000,000	100	2,310,000,000	100	2,541,000,000	100	2,795,100,000	100	3,074,610,000	100	12,820,710,000	PP3	Dinas Sosial
1	13		18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Terlaksananya Pembinaan bagi penyandang cacat dan Eks.Trauma secara permanen	%	100	100	700,000,000	100	770,000,000	100	847,000,000	100	931,700,000	100	1,024,870,000	100	4,273,570,000	PP3	Dinas Sosial
				Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government), Bersih (Clean Government) dan Bertanggung Jawab (Responsible Government).					**203,923,875,742**		**207,247,845,582**		**226,780,552,850**		**247,006,927,221**		**268,660,454,923**		**1,153,619,656,319**		
				Tujuan 3.1 : Mewujudkan reformasi birokrasi yang akuntabel.	**Perolehan Opini/Predikat terhadap Audit Laporan Keuangan oleh BPK**	**WTP/tahun anggaran**	**WTP**	**WTP**	**203,923,875,742**	**WTP**	**207,247,845,582**	**WTP**	**226,780,552,850**	**WTP**	**247,006,927,221**	**WTP**	**268,660,454,923**	**WTP**	**1,153,619,656,319**		
				Sasaran 3.1.1 : Birokrasi yang bersih dan bertanggung jawab.	**Tingkat kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)**	**level**	**2**	**2**	**191,195,277,442**	**3**	**193,401,318,772**	**3**	**211,634,304,679**	**3**	**230,403,054,233**	**3**	**250,518,619,088**	**3**	**1,077,152,574,215**		
					Nilai LAKIP	**nilai**	**CC**	**CC**		**CC**		**B**		**B**		**B**		**B**			
					Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	**skor**	**2.879**	**2.900**		**2.910**		**2.920**		**2.930**		**2.940**		**2.940**			
					Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	**%**	**8,12**	**8,18**		**8,36**		**8,43**		**8,51**		**8,55**		**8,55**			
					Persentase ASN yang mengikuti pendidikan/pelatihan	**%**															
			01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	SKPD	57	57	87,911,315,861	57	86,228,208,629	57	93,247,956,112	57	102,487,070,808	57	110,302,617,171	57	480,177,168,580	PP4	34 SKPD & 23 Kecamatan
			02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	SKPD	57	57	37,209,264,502	57	38,973,045,612	57	42,569,236,333	57	46,826,159,967	57	51,177,550,739	57	216,755,257,154	PP4	34 SKPD & 23 Kecamatan
			03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas Aparatur	SKPD	57	57	3,985,998,000	57	4,355,204,800	57	4,777,892,280	57	5,255,681,508	57	5,767,133,359	57	24,141,909,947	PP4	34 SKPD & 23 Kecamatan
			05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	SKPD	57	57	4,528,245,000	57	4,912,124,500	57	5,435,741,950	57	5,952,316,145	57	6,452,793,260	57	27,281,220,855	PP4	34 SKPD & 23 Kecamatan

(1)			(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)
		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan	SKPD	57	57	1,208,946,500	57	1,362,534,900	57	1,489,482,140	57	1,638,430,354	57	1,792,036,514	57	7,491,430,408	PP4	34 SKPD & 23 Kecamatan
				Tersedianya Lakip dan Penetapan Kinerja	SKPD	57	57		57		57		57		57		57	-		34 SKPD & 23 Kecamatan
2	03	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya pelayanan Dinas kepala daerah	Kec.	23	23	952,103,350	23	1,047,313,685	23	1,152,045,054	23	1,267,249,559	23	1,393,974,515	23	5,812,686,162	PP4	Setdakab
02	03	23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya kemampuan SDM dalam Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Masyarakat serta pemanfaatan	orang	10	10	330,000,000	15	363,000,000	15	399,300,000	15	439,230,000	15	483,153,000	80	2,014,683,000	PP4	Setdakab
				Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan melalui website Hukum Kabupaten Aceh Besar	Dok.	72	72	93,285,850	80	102,614,435	90	112,875,879	100	124,163,466	110	136,579,813	120	569,519,443		
			Program Peningkatan Penerimaan Daerah	Tercapainya peningkatan penerimaan daerah	Bulan	12	12	407,825,000	12	448,607,500	12	493,468,250	12	542,815,075	12	597,096,583	12	2,489,812,408	PP4	BPKD
			Program Evaluasi dan Pengendalian	Terlaksananya Evaluasi dan Pengendalian Keuangan Daerah	SKPD	59	59	70,000,000	59	77,000,000	59	84,700,000	59	93,170,000	59	102,487,000	59	427,357,000	PP4	BPKD
			Program Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah	Terlaksananya pemantauan dan kajian terhadap informasi harga Kebutuhan Pangan Kabupaten Aceh Besar	Kec.	23	23	300,000,000	23	330,000,000	23	363,000,000	23	399,300,000	23	439,230,000	23	1,831,530,000	PP4	Setdakab
			Program Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kemampuan SDM dan keterampilan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	orang	13	10	270,050,000	10	297,055,000	10	326,760,500	10	359,436,550	10	395,380,205	63	1,648,682,255	PP4	Setdakab
1	20		Program pendidikan kedinasan	Terbinanya Sumberdaya aparatur	SKPD	-	57	1,300,000,000	57	1,430,000,000	57	1,573,000,000	57	1,730,300,000	57	1,903,330,000	57	7,936,630,000	PP4	BKPSDM
16	03	15	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Terwujudnya Pameran Investasi	Tahun	1	1	550,000,000	1	605,000,000	1	665,500,000	1	732,050,000	1	805,255,000	5	3,357,805,000	PP4	Sekdakab & DPMPTSP
				Terlaksanannya pengembangan dan potensi unggulan yang ada di wilayah kabupaten Aceh Besar.	Unit Usaha	1	2	261,100,000	2	287,210,000	2	315,931,000	2	347,524,100	2	382,276,510	11	1,594,041,610	PP4	
			Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat					0.00		0.00		190,000,000		190,000,000		190,000,000		570,000,000	PP4	
06	01	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data/informasi Pembangunan	tahun	1	1	755,250,000	1	830,775,000	1	913,852,500	1	1,005,237,750	1	1,105,761,525	5 Tahun	4,610,876,775	PP4	Bappeda
				Persentase Terlaksananya pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaku usaha di Kabupaten Aceh Besar	%	50	60	150,000,000	60	165,000,000	60	181,500,000	80	199,650,000	100	219,615,000	100	915,765,000	PP4	
			Program Peningkatan kegiatan pemantauan,pembinaan,pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Persentase Terlaksananya pemantauan dan pelaporan terhadap data potensi daerah	%	40	50	350,000,000	50	385,000,000	50	423,500,000	80	465,850,000	100	512,435,000	100	2,136,785,000	PP4	Sekdakab
06	01	16	Program Kerjasama Pembangunan	Terjalinnya kerjasama dengan lembaga/badan/ NGO dalam mendukung perencanaan pembangunan	tahun	1	1	138,175,000	1	151,992,500	1	167,191,750	1	183,910,925	1	202,302,018	5 Tahun	843,572,193	PP4	Bappeda
				Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber dana.	Kec.	23	23	524,810,000	23	577,291,000	23	635,020,100	23	698,522,110	23	768,374,321	23	3,204,017,531		
20	03	17	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah.	Persentase Terlaksananya kegiatan pengendalian pengembalian dana PER	%	40	30	44,450,000	50	48,895,000	50	53,784,500	80	59,162,950	100	65,079,245	100	271,371,695	PP4	Sekdakab
				Tercapainya peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Bulan	12	12	3,905,899,000	12	4,296,488,900	12	4,726,137,790	12	5,198,751,569	12	5,718,626,726	12	23,845,903,985		
20	03	40	Program sumber daya energi distribusi kebutuhan pokok	Persentase Terlaksananya pelayanan distribusi raskin sesuai sasaran penerima manfaat.	%	50	60	346,875,000	60	381,562,500	60	419,718,750	80	461,690,625	100	507,859,688	100	2,117,706,563	PP4	Sekdakab

(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)
02	03		18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	bertambahnya informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka membangun daerah				2,032,245,000		2,032,245,000		2,832,245,000		915,469,500		915,469,500		8,727,674,000	PP4	Sekdakab
					Persentase Media Yang Menyebarkan Informasi Pemerintah Kota	%	40	30	1,615,100,000	30	1,776,610,000	30	1,954,271,000	80	2,149,698,100	100	2,364,667,910	100	9,860,347,010		
				Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase Naskah Pidato KDH yang harus disusun	%	35	50	646,805,000	50	711,485,500	50	782,634,050	80	860,897,455	100	946,987,201	100	3,948,809,206	PP4	Sekdakab
					Persentase Kejelasan dan kepastian hukum tapal batas gampong dalam Kabupaten Aceh Besar	%	16.7	16.7	6,479,728,778	20	6,500,000,000	40	7,150,000,000	45	7,865,000,000	50	8,651,500,000	50	36,646,228,778		
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaa Kebijakan KDH	Terlaksananya pengawasan dan tindak lanjut pengawasan	Laporan	500	500	5,240,000,000	500	4,664,000,000	500	5,130,400,000	500	5,643,440,000	500	6,207,784,000	500	26,885,624,000	PP4	Sekdakab
					Menurunnya Kasus yang terjerat hukum	Kasus	4	4	334,178,700	2	367,596,570	2	404,356,227	0	444,791,850	0	489,271,035	0	2,040,194,381		
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan.	Terlaksananya penyusunan LKPJ,LPPD, siapkan LPPD dan ILPPD Kabupaten Aceh Besar	%	60	65	214,243,701	70	235,668,071	80	259,234,878	90	285,158,366	100	313,674,203	100	1,307,979,219	PP4	
20	07		21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang profesional	orang	20	20	33,940,100	20	37,334,110	20	41,067,521	20	45,174,273	20	49,691,700	20	207,207,705	PP4	Inspektorat
					Meningkatnya Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang profesional	Orang	17	20	33,940,100	20	37,334,110	23	41,067,521	23	45,174,273	26	49,691,700	26	207,207,705		
02	03		26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang dihasilkan	Dok.	367	367	1,616,222,000	400	1,777,844,200	400	1,955,628,620	350	2,151,191,482	350	2,366,310,630	350	9,867,196,932	PP4	Sekdakab
				Program Peningkatan Implementasi Hukum Bagi Aparatur dan Publik	Meningkatnya Pemahaman Aparat Pemerintahan dan Publik terhadap Produk Hukum Daerah	%	50	50	540,000,000	65	594,000,000	70	653,400,000	75	718,740,000	80	790,614,000	80	3,296,754,000	PP4	Sekdakab
02	03		19	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tertibnya administrasi keuangan desa	%	60	70	40,000,000	80	44,000,000	90	48,400,000	100	53,240,000	100	58,564,000	100	244,204,000	PP4	DPMG
20	34		30	Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur	Terciptanya analisis beban kerja dilingkungan pemda Kab. Aceh Besar	SKPD	37	37	79,380,000	37	87,318,000	37	96,049,800	37	105,654,780	37	116,220,258	37	484,622,838	PP4	BKPSDM
					Tersedianya Tenaga Barang dan Jasa	%	80	80	1,426,240,000	80	1,568,864,000	80	1,725,750,400	100	1,898,325,440	100	2,088,157,984	100	8,707,337,824		
03	21		15	Pemberian Fasilitas Sarana dan Prasarana dan Dalam Rangka Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah bagi Mesjid dan Meunasah	bulan	12	12	535,600,000	12	589,160,000	12	648,076,000	12	712,883,600	12	784,171,960	60	3,269,891,560	PP4	Setdakab
20	04		15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terbahasnya Rancangan Qanun yang diajukan oleh SKPD dan terserapnya aspirasi masyarakat melalui DPRK	%	50%	60%	20,683,185,000	70%	21,000,000,000	80%	23,100,000,000	90%	25,410,000,000	100%	27,951,000,000	100%	118,144,185,000	PP4	Sekretariat DPRK
1	10		15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki KTP - EL dan Akta Kelahiran	kec	23	23	2,824,101,000	23	2,372,482,750	23	2,609,731,025	23	2,807,704,128	23	3,157,774,540	23	13,771,793,443	PP4	Disdukcapil
06	01		17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;	Adanya Pengelolaan ketertiban wilayah pulau terluar	%	100	100	135,180,000	100	148,698,000	100	163,567,800	100	179,924,580	100	197,917,038	100	825,287,418	PP4	Bappeda
06	01		18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terselenggaranya koordinasi penataan ruang daerah Kab. Aceh Besar	%	100	100	570,415,000	100	627,456,500	100	690,202,150	100	759,222,365	100	835,144,602	100	3,482,440,617	PP4	Bappeda
	06		20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		tahun	1	1	260,080,000	1	286,088,000	1	314,696,800	1 Tahun	346,166,480	1 Tahun	380,783,128	5 Tahun	1,587,814,408	PP4	Bappeda
20	07		22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tersusunnya program kerja pengawasan tahunan	SKPD	57	57	261,100,000	57	287,210,000	57	315,931,000	57	347,524,100	57	382,276,510	57	1,594,041,610	PP4	Inspektorat
				Sasaran 3.1.2 : Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	**Persentase OPD yang telah menerapkan inovasi pelayanan publik**	**%**	**12.07**	**13.79**	**3,074,300,600**	**15.52**	**3,381,730,660**	**17.24**	**3,789,903,726**	**18.97**	**4,161,894,099**	**20.69**	**4,571,083,508**	**20.69**	**18,978,912,593**		
					Persentase Qanun yang diselesaikan	**%**															

(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)
				Persentase kawasan yang menjangkau pelayanan publik (KTP/Perizinan)	**%**	**26.09**	**26.09**		**26.09**		**26.09**		**30.43**		**30.43**		**30.43**			
				Persentase daerah yang memiliki perpustakaan	**%**															
1	20			Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan	Tercapainya percepatan pelayanan kepada masyarakat	Tahun	1	1	451,655,600	1	496,821,160	1	546,503,276	1	601,153,604	1	661,268,964	5	2,757,402,604	PP4	23 Kecamatan
1	20			Program Pembinaan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan	Tercapainya pelaksanaan pemerintahan gampong yang optimal	Tahun	1	1	593,630,000	1	652,993,000	1	718,292,300	1	790,121,530	1	869,133,683	5	3,624,170,513	PP4	23 Kecamatan
4.	12.	01.	23.	Program Optimalisasi Penamfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya Media Informasi	Bulan	12	12	190,000,000	12	209,000,000	12	229,900,000	12	252,890,000	12	278,179,000	60	1,159,969,000	PP4	Dinas Penanaman Modal & PTSP
4.	12.	01.	32.	Program Peningkatan Pelayanan dan Perizinan Usaha	Meningkatnya Pelayanan dan Perizinan usaha	Bulan	12	12	50,000,000	12	55,000,000	12	60,500,000	12	66,550,000	12	73,205,000	60	305,255,000	PP4	Dinas Penanaman Modal & PTSP
4.	12.	01.	38.	Program Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu	Meningkatnya Pelayanan dan Perizinan Usaha	Kecamatan	23	23	115,000,000	23	126,500,000	23	139,150,000	23	153,065,000	23	168,371,500	23	702,086,500	PP4	Dinas Penanaman Modal & PTSP
2.	12.	0.	16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi	Tahun	1	1	550,000,000	1	605,000,000	1	665,500,000	1	732,050,000	1	805,255,000	5	3,357,805,000	PP9	Dinas Penanaman Modal & PTSP
06	1		15	Program Peningkatan pelaksanaan, sosialisasi pengawasan dan pembinaan Qanun dan peraturan Bupati	Terlaksananya pemantauan,pembinaan,pengawasan terhadap investor	kec	23	23	455,950,000	23	501,545,000	23	551,699,500	23	606,869,450	23	667,556,395	23	2,783,620,345	PP4	Satpol PP dan WH
2	01		19	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Peningkatan minat baca dan terwujudnya perpustakaan gampong yang berkualitas	bulan	12	12	258,065,000		283,871,500		312,258,650		343,484,515		377,832,967	12	1,575,512,632	PP5	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
				Program Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi informasi	Mendata dan menata arsip menurut klasifikasinya				100,000,000		110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		610,510,000		Dinas Perpustakaan & Kearsipan
				Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaran kearsipan	Mendata dan menata arsip menurut klasifikasinya				100,000,000		110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		610,510,000		Dinas Perpustakaan & Kearsipan
				Program Perbaikan Sistem Administrasi					0.00		0.00		70,000,000		70,000,000		70,000,000		210,000,000		
1	24	01		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Mendata dan menata arsip menurut klasifikasinya	bulan	12	12	210,000,000	12	231,000,000	12	254,100,000	12	279,510,000	12	307,461,000	12	1,282,071,000	PP4	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
				Sasaran 3.1.3 : Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	**Proporsi penanganan penyakit masyarakat**	**%**	**70**	**80**	**6,746,406,000**	**85**	**7,371,046,600**	**90**	**8,058,151,260**	**92**	**8,813,966,386**	**95**	**9,695,363,025**	**95**	**40,684,933,271**		
02	09		15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar	orang	350	350	358,746,000	350	394,620,600	350	434,082,660	350	477,490,926	350	525,240,019	350	2,190,180,205	PP4	Kesbangpol
					Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar	bulan	12	12	1,312,487,500	12	1,443,736,250	12	1,588,109,875	12	1,746,920,863	12	1,921,612,949	60	8,012,867,436		
02	09		16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terlaksananya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	bulan	12	12	2,503,336,000	12	2,753,669,600	12	3,029,036,560	12	3,331,940,216	12	3,665,134,238	60	15,283,116,614	PP4	Kesbangpol
					Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	%	50	80	500,000,000	82	550,000,000	85	605,000,000	90	665,500,000	92	732,050,000	95	3,052,550,000		
1	19	4.02.09	16	Program peningkatan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terlaksananya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	%	50	100	102,270,000	100	112,497,000	100	123,746,700	100	136,121,370	100	149,733,507	100	624,368,577	PP4	Kesbangpol
02	09		19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	%	`	100	85,985,000	100	94,583,500	100	104,041,850	100	114,446,035	100	125,890,639	100	524,947,024	PP4	Kesbangpol
1	09		20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Terlaksananya Pencegahan terhadap Penyakit Masyarakat	bulan	12	12	405,225,000	12	445,747,500	12	490,322,250	12	539,354,475	12	593,289,923	12	2,473,939,148	PP4	Kesbangpol
19	01		17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	bulan	12	12	448,376,500	12	493,214,150	12	542,535,565	12	596,789,122	12	656,468,034	60	2,737,383,370	PP4	Kesbangpol

(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)
19	01		18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Pengembangan Wawasan Kebangsaan	bulan	12	12	529,980,000	12	582,978,000	12	641,275,800	12	705,403,380	12	775,943,718	60	3,235,580,898	PP4	Kesbangpol
1	20		23	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Pemilu dengan lancar	kec	23	23	500,000,000	23	500,000,000	23	500,000,000	23	500,000,000	23	550,000,000	23	2,550,000,000	PP4	Satpol PP dan WH
				Sasaran 3.1.4. : Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor	**Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan**	**%**	**70**	**75**	**2,907,891,700**	**80**	**3,093,749,550**	**90**	**3,298,193,185**	**100**	**3,628,012,504**	**100**	**3,875,389,302**	**100**	**16,803,236,240**		
	06		21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya pembangunan daerah		1	1	509,988,500	1 Tahun	560,987,350	1 Tahun	617,086,085	1 Tahun	678,794,694	1 Tahun	746,674,163	5 Tahun	3,113,530,791	PP4	Bappeda
	06		22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Tingkat Sosial Ekonomi Masyarakat	dokumen	3	3	411,430,000	3	452,573,000	3	497,830,300	3	547,613,330	3	602,374,663	3	2,511,821,293	PP4	Bappeda
					peningkatan perencanaan pembangunan ekonomi				559,346,700		559,346,700		559,346,700		615,281,370		615,281,370		2,908,602,840		
				Program penataan daerah otonomi baru	tertibnya administrasi gampong/desa dan kecamatan dalam wilayah				489,966,500		489,966,500		489,966,500		538,963,150		538,963,150		2,547,825,800	PP4	
	06		23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Perencanaan Pembangunan yang sustainable di bidang sosial dan budaya serta keistimewaan Aceh	dokumen	1	5	706,935,000	5	777,628,500	6	855,391,350	6	940,930,485	6	1,035,023,534	6	4,315,908,869	PP4	Bappeda
	06		24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Kebutuhan air minum dan penataan lingkungan permukiman dan program PPSP dan AMPL	dokumen	-	1	130,225,000	1	143,247,500	1	157,572,250	1	173,329,475	1	190,662,423	2	795,036,648	PP4	Bappeda
	06		25	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Tersedianya dokumen perencanaan penanggulangan kebencanaan	dokumen	0	1	100,000,000	1	110,000,000	1	121,000,000	2	133,100,000	2	146,410,000	2	610,510,000	PP6	Bappeda
				Misi 4: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur					**135,228,514,012**		**152,093,729,374**		**154,173,191,629**		**185,594,065,965**		**205,896,339,884**		**832,985,840,864**		
				Tujuan 4.1 : Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dasar.	**Pertumbuhan PDRB per Kapita**	**Rp. Juta**	**28,435**	**29,288**	**135,228,514,012**	**30,167**	**152,093,729,374**	**31,072**	**154,173,191,629**	**32,004**	**185,594,065,965**	**32,964**	**205,896,339,884**	**32,964**	**832,985,840,864**		
				Sasaran 4.1.1 : Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah	**Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik**	**Km**	**670,69 Km**	**800,55 Km**	**79,196,769,912**	**930,41 Km**	**92,521,108,424**	**1.060,28 Km**	**85,062,358,684**	**1.190,14 Km**	**101,120,149,725**	**1.279,44 Km**	**110,195,287,131**	**1.279,44 Km**	**468,095,673,876**		
					Rasio Jaringan Irigasi	**Km**	**491 Km**	**567,8 Km**		**644,6 Km**		**721,4 Km**		**798,2 Km**		**875 Km**		**875 Km**			
					Persentase pertumbuhan sub sektor transportasi dan pergudangan	**%**	**12.14**	**12.89**		**13.14**		**13.55**		**13.,82**		**14.01**		**14.01**			
1	03	01	15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	infrastruktur transportasi yang berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.	km	670.69	670.69	13,608,450,000	800.55	15,000,000,000	930.414	12,550,000,000	1060.28	13,205,000,000	1190.14	13,525,500,000	1190.14	67,888,950,000	PP5	DINAS PUPR
1	03	01	18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	infrastruktur transportasi yang berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.	km	670.69	670.69	22,668,450,000	800.55	28,000,000,000	930.414	24,200,000,000	1060.28	26,620,000,000	1190.14	29,282,000,000	1190.14	130,770,450,000	PP5	DINAS PUPR
1	03	01	22	PROGRAM SISTEM INFORMASI/DATABASE JALAN DAN JEMBATAN	Tersedianya database jalan jembatan	km	1279	1279	300,000,000	1279	330,000,000	1279	363,000,000	1279	399,300,000	1279	439,230,000	1279	1,831,530,000	PP5	DINAS PUPR
1	03	01	23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan jasa alat-alat berat	unit	1 worksh	1 workshop	550,000,000	1 workshop	550,000,000	1 workshop	805,000,000	1 workshop	885,500,000	1 workshop	974,050,000	1 workshop	3,764,550,000	PP5	DINAS PUPR
1	03	01	24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis, semi teknis untuk ketahanan pangan	km	491	567.8	13,000,000,000	644.6	15,000,000,000	721.4	14,500,000,000	798.2	15,000,000,000	875	16,600,000,000	875	74,100,000,000	PP5	DINAS PUPR
1	03	01	30	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	Terlaksananya pembangunan infrastruktur dikawasan pedesaan dan sentra produksi	km	1.250,66 jalan dan 491 jaringan irigasi	1.250,66 jalan dan 491 jaringan irigasi	14,889,694,912	1.250,66 jalan dan 491 jaringan irigasi	17,381,820,924	1.250,66 jalan dan 491 jaringan irigasi	15,839,142,434	1.250,66 jalan dan 491 jaringan irigasi	19,955,611,850	1.250,66 jalan dan 491 jaringan irigasi	22,014,295,468	1.250,66 jalan dan 491 jaringan irigasi	90,080,565,589	PP5	DINAS PUPR
1	03	01	16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	pemukiman yang bebas banjir dan lingkungan bersih	m	13110	20000	6,888,500,000	25000	8,500,000,000	30000	7,850,000,000	40000	7,655,000,000	50000	8,420,500,000	50000	39,314,000,000	PP5	DINAS PUPR
3	06	01	17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	Terlaksananya penerangan bagi masyarakat	Desa	603	603	500,000,000	604	500,000,000	604	500,000,000	604	500,000,000	604	500,000,000	604	2,500,000,000	PP5	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Pemasangan Penerangan	Unit	100 titik	150 titik	1,283,513,000	200 titik	1,411,864,300	250 titik	1,553,050,730	300 titik	1,708,355,803	350 titik	1,879,191,383	400 titik	7,835,975,216		
2	09	01	17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Meningkatnya pelayanan jasa angkutan dan menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta tertibnya lalu lintas jalan	Unit	1	1	3,555,054,000	1	3,660,559,400	1	4,326,615,340	1	4,559,276,874	1	4,865,204,561	1	20,966,710,175	PP5	DINAS PERHUBUNGAN
2	09	01	19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta tertibnya lalu lintas jalan	Unit	1	1	400,000,000	1	451,085,000	1	476,193,500	1	1,513,812,850	1	1,665,194,135	1	4,506,285,485	PP5	DINAS PERHUBUNGAN

(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)
2	09	01	20	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	Meningkatnya pelayanan jasa angkutan	Unit	1	1	136,743,000	1	150,417,300	1	165,459,030	1	182,004,933	1	200,205,426	1	834,829,689	PP5	DINAS PERHUBUNGAN
2	09	01	21	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN PERHUBUNGAN	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan trasnportasi darat, laut dan udara	Unit	1	1	500,000,000	2	657,360,000	2	733,096,000	2	2,126,405,600	2	2,339,046,160	1	6,355,907,760	PP5	DINAS PERHUBUNGAN
2	09	01	15	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan guna mengoptimalkan pelayanan publik dan kenyamanaan berkendara	Unit	5 Dermaga	5 Dermaga	283,365,000	5 Dermaga	311,701,500	5 Dermaga	342,871,650	5 Dermaga	377,158,815	5 Dermaga	414,874,697	5 Dermaga	1,729,971,662	PP5	DINAS PERHUBUNGAN
2	09	01	18	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan guna mengoptimalkan pelayanan publik dan pelayanan orang, barang dan jasa	Unit	5 Dermaga	5 Dermaga	483,000,000	5 Dermaga	431,300,000	5 Dermaga	434,430,000	5 Dermaga	5,966,873,000	5 Dermaga	6,563,560,300	5 Dermaga	13,879,163,300	PP5	DINAS PERHUBUNGAN
2	09	01	16	PROGRAM REHABILITAS DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	Terwujudnya jasa pelayanan Uji Kenderaan Bermotor dan terwujudnya sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik	Titik	3 Lokasi	3 Lokasi	150,000,000	3 Lokasi	185,000,000	3 Lokasi	423,500,000	3 Lokasi	465,850,000	3 Lokasi	512,435,000	3 Lokasi	1,736,785,000	PP5	DINAS PERHUBUNGAN
				Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat.	**Rasio rumah layak huni per rumah tangga miskin**	**Unit/RT**	**2,09 Unit/RT**	**3,66 Unit/RT**	**28,502,814,600**	**4,89 Unit/RT**	**30,120,501,000**	**6,11 Unit/RT**	**33,560,501,000**	**7,33 Unit/RT**	**39,286,551,100**	**8,55 Unit/RT**	**42,754,951,100**	**8,55 Unit/RT**	**174,225,318,800**		
					Persentase Rumah Tangga dengan air minum	**%**	**75,73**	**80,23**		**85,66**		**90,43**		**95,58**		**99,75**		**99,75**			
					Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	**%**	**68**	**85**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
					Persentase pengurangan area Kawasan Kumuh terhadap luas Kawasan permukiman penduduk perkotaan	**%**	**60**	**40**		**30**		**20**		**10**		**0**		**0**			
					Persentase kawasan yang memiliki fasilitas telekomunikasi	**%**	**73,91**	**78,26**		**82,61**		**86,95**		**91,30**		**95,65**		**95,65**			
2	10	1	15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	bertambahnya informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka membangun daerah				302,814,600		328,146,000		428,146,000		530,960,600		630,960,600		2,221,027,800	PP5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	10	1	17	program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	bertambahnya informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka membangun daerah				200,000,000		292,355,000		392,355,000		871,590,500		871,590,500		2,627,891,000	PP5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	04	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	terwujudnya perumahan yang layak huni, bersih dan sehat	Unit	171	200	9,000,000,000	300	9,100,000,000	400	10,300,000,000	450	13,200,000,000	500	14,100,000,000	500	55,700,000,000	PP5	DINAS PUPR
				Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan layanan air minum	%	74	80	5,000,000,000	100	5,000,000,000	100	5,500,000,000	100	6,050,000,000	100	6,655,000,000	100	28,205,000,000	PP5	
					Jumlah SPAM yang dibangun	SPAM	15	15	7,000,000,000	20	7,700,000,000	30	8,470,000,000	35	9,317,000,000	40	10,248,700,000	40	42,735,700,000		
					Meningkatnya penyehatan lingkungan di kawasan permukiman masyarakat (cakupan sanitasi)	%	68	85	2,000,000,000	100	2,200,000,000	100	2,420,000,000	100	2,662,000,000	100	2,928,200,000	100	12,210,200,000		
					instalasi pengolahan air limbah yang terbangun	IPAL	14	16	5,000,000,000	18	5,500,000,000	20	6,050,000,000	22	6,655,000,000	24	7,320,500,000	24	30,525,500,000		
				Sasaran 4.1.3 : Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan.	**Persentase ketaatan terhadap tata ruang**	**%**			**18,104,830,000**		**19,585,610,500**		**25,237,171,550**		**34,483,888,705**		**41,172,277,576**		**138,583,778,331**		
					Persentase timbunan sampah yang tertangani	**%**															
					Proporsi Ruang Terbangun dan RTH	**%**	**0,49**	**0,49**		**0,49**		**1,36**		**1,36**		**1,36**		**1,36**			
					Persentase penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan																

(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)
1	05	01	15	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	terwujudnya perencanaan pembangunan sesuai dengan peruntukan ruang	Regulasi	3	3	500,000,000	3	1,100,000,000	4	2,210,000,000	5	4,331,000,000	6	4,764,100,000	6	12,905,100,000	PP5	DINAS PUPR
1	05	01	16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Terlaksananya pembangunan sesuai dengan arahan penataan ruang	Regulasi	1	1	500,000,000	1	550,000,000	1	605,000,000	1	665,500,000	1	732,050,000	1	3,052,550,000	PP5	DINAS PUPR
1	05	01	17	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFATAAN RUANG	Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan penataan ruang wilayah	Regulasi	1	1	500,000,000	1	550,000,000	1	605,000,000	1	665,500,000	1	732,050,000	1	3,052,550,000	PP5	DINAS PUPR
1	03	01	29	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	Terlaksananya pembangunan di wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh	Kecamatan	23	23	7,000,000,000	23	7,100,000,000	23	8,300,000,000	23	10,500,000,000	23	13,700,000,000	23	46,600,000,000	PP5	DINAS PUPR
2	05	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya pengelolaan persampahan		Gerobak sampah 50 unit, Motor sampah 25 unit. Mobil bak sampah 2 unit, Dump	Gerobak sampah 50 unit, Motor sampah 25 unit. Mobil bak sampah 2 unit, Dump	3,000,000,000	Gerobak sampah 50 unit, Motor sampah 25 unit. Mobil bak sampah 2 unit, Dump truck/tipper truck	2,500,000,000	Gerobak sampah 50 unit, Motor sampah 25 unit. Mobil bak sampah 2 unit, Dump	2,750,000,000	Gerobak sampah 50 unit, Motor sampah 25 unit. Mobil bak sampah 2 unit, Dump	3,025,000,000	Gerobak sampah 50 unit, Motor sampah 25 unit. Mobil bak sampah 2 unit,	3,327,500,000	Gerobak sampah 50 unit, Motor sampah 25 unit. Mobil bak sampah 2 unit,	14,602,500,000	PP6	DLH
1	03	01	26	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sungai	Sungai	5	5	3,000,000,000	5	3,200,000,000	5	4,570,000,000	5	6,500,000,000	5	7,500,000,000	5	24,770,000,000	PP5	DINAS PUPR
1	03	01	28	PROGRAM PENGENDALI BANJIR	berkurangnya daerah banjir genangan	Sungai	5	5	2,000,000,000	5	2,200,000,000	5	3,500,000,000	5	5,900,000,000	5	7,300,000,000	5	20,900,000,000	PP5	DINAS PUPR
2	05	01	16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengurangan perusakan lingkungan hidup	dokumen	1	1	250,000,000	1	275,000,000	1	302,500,000	1	332,750,000	1	366,025,000	1	1,526,275,000	PP6	DLH
2	05	01	19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Terwujudnya akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	dokumen	1	1	250,000,000	1	215,297,500	1	236,827,250	1	260,509,975	1	286,560,973	1	1,249,195,698	PP6	DLH
2	05	01	18	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Terlaksananya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	dokumen	1	1	250,000,000	1	275,000,000	1	302,500,000	1	332,750,000	1	366,025,000	1	1,526,275,000	PP6	DLH
2	05	01	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	terwujudnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	dokumen	1	1	0.00	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	400,000,000	PP6	DLH
2	05	01	20	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	Terlaksananya pengendalian polusi	dokumen	1	1	0.00	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	600,000,000	PP6	DLH
2	05	01	24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	tersedianya ruang terbuka hijau	HA	36.44	36.44	462,300,000	36.44	488,530,000	100	680,383,000	100	748,421,300	100	823,263,430	100	3,202,897,730	PP6	DLH
2	05	01	21	PROGRAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DAN JASA LINGKUNGAN DI KAWASAN-KAWASAN KONSERVASI LAUT DAN HUTAN	tersedianya lokasi ekowisata dan konservasi laut dan hutan	Lokasi	0	0	0.00	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	1,000,000,000	PP6	DLH
2	04	01	15	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH	Menghimpun Data sertifikat tanah terdaftar baik untuk instansi pemerintah maupun masyarakat terutama yg kurang mampu	Dokumen	1	1	0.00	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	800,000,000	PP6	DINAS PERTANAHAN
4	02	01	50	PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Dokumen	1	1	152,300,000	1	167,530,000	1	184,283,000	1	202,711,300	1	222,982,430	5	929,806,730	PP6	DINAS PERTANAHAN
2	04	01	17	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	Adanya fungsi fasilitasi untuk konflik dan sengketa pertanahan	Dokumen	1	1	121,550,000	1	133,705,000	1	147,075,500	1	161,783,050	1	177,961,355	5	742,074,905	PP6	DINAS PERTANAHAN
2	04	01	18	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Adanya suatu sistem informasi pertanahan yang memiliki data yang akurat	Dokumen	1	1	118,680,000	1	130,548,000	1	143,602,800	1	157,963,080	1	173,759,388	5	724,553,268	PP6	DINAS PERTANAHAN
				Sasaran 4.1.4 : Meningkatnya sasaran masyarakat terhadap mitigasi bencana.	**Indeks ketahanan bencana**	**Indeks**	**0,33/rendah**	**0,35/rendah**	**6,301,000,000**	**0,55/sedang**	**6,431,100,000**	**0,65/sedang**	**6,534,210,000**	**0,75/sedang**	**6,546,631,000**	**0,80/tinggi**	**7,201,294,100**	**0,80/tinggi**	**33,014,235,100**		
4	02	08	41	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban resiko bencana alam	Meningkatnya penyebaran informasi kebencanaan dan meminimalisirkan dampak bencana serta meningkatnya ketahanan masyarakat	Unit	Pos Damkar 8 pos damkar	Pos Damkar 2 pos damkar	2,356,000,000	Pos Damkar 2 pos damkar	2,391,600,000	Pos Damkar 2 pos damkar	2,550,760,000	Pos Damkar 2 pos damkar	2,535,836,000	Pos Damkar 2 pos damkar	2,789,419,600	Pos Damkar 2 pos damkar	12,623,615,600	PP6	BPBD
4	02	08	49	Program kedaruratan dan logistik kebencanaan	Terlaksananya kegiatan tanggap darurat bencana dan pendistribusian logistik	Unit	Mobil Damkar 12 ,	Mobil Damkar 3, Mobi Tangki Air 3 ,	1,165,000,000	Mobil Damkar 3 , Mobi Tangki Air 3 ,	1,181,500,000	Mobil Damkar 3 , Mobi Tangki Air 3 ,	1,119,650,000	Mobil Damkar 3 , Mobi Tangki Air 3 ,	1,150,615,000	Mobil Damkar 3 , Mobi Tangki Air 3 ,	1,265,676,500	Mobil Damkar 3 , Mobi Tangki Air 3 ,	5,882,441,500	PP6	BPBD

(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)
4	02	08	48	Program pemulihan dampak bencana	Terlaksananya pemulihan akibat dampak bencana	Paket	11 Reahabilitasi infrastruktur yg rusak akibat bencana dan Mitigasi struktural 3	10 Reahabilitasi infrastruktur yg rusak akibat bencana akibat bencana dan Mitigasi	2,780,000,000	10 Reahabilitasi infrastruktur yg rusak akibat bencana akibat bencana dan Mitigasi struktural 7	2,858,000,000	10 Reahabilitasi infrastruktur yg rusak akibat bencana akibat bencana dan Mitigasi struktural 7	2,863,800,000	10 Reahabilitasi infrastruktur yg rusak akibat bencana akibat bencana dan Mitigasi struktural 7	2,860,180,000	10 Reahabilitasi infrastruktur yg rusak akibat bencana akibat bencana dan	3,146,198,000	10 Reahabilitasi infrastruktur yg rusak akibat bencana akibat bencana dan Mitigasi	14,508,178,000	PP6	BPBD
				Sasaran 4.1.5 : Menguatnya tatanan cagar budaya dan adat istiadat Aceh yang islami	**Proporsi pemugaran situs sejarah dalam kondisi baik**	**%**			**3,123,099,500**		**3,435,409,450**		**3,778,950,395**		**4,156,845,435**		**4,572,529,978**		**19,066,834,757**		
01	01		17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnyan kualitas dan kuantitas fasilitasi pengembangan pengelolaan keragaman budaya daerah berbasis media desain dan IPTEK	Bln	12	12	1,509,084,500	12	1,659,992,950	12	1,825,992,245	12	2,008,591,470	12	2,209,450,616	60	9,213,111,781	PP5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01		16	Program pengelolaan kekayaan budaya	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kekayaan budaya daerah berbasis media desain	Bln	12	12	1,214,015,000	12	1,335,416,500	12	1,468,958,150	12	1,615,853,965	12	1,777,439,362	60	7,411,682,977	PP5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			15	Program pengembangan nilai budaya	Meningkatnya partisipasi dan produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	kegiatan	-	1	30,000,000	2	33,000,000	2	36,300,000	2	39,930,000	2	43,923,000	2	183,153,000	PP5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01		18	Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya		kegiatan	-	1	50,000,000	1	55,000,000	2	60,500,000	2	66,550,000	2	73,205,000	2	305,255,000	PP5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02	36		46	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Majelis Adat Aceh	Adanya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan adat istiadat	kec	23	23	320,000,000	23	352,000,000	23	387,200,000	23	425,920,000	23	468,512,000	23	1,953,632,000	PP4	MAA
				Misi 5 : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Mukim dan Gampong					**64,510,502,800**		**66,532,142,280**		**71,390,356,508**		**74,273,895,610**		**85,510,285,171**		**362,217,182,369**		
				Tujuan 5.1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat	**Laju pertumbuhan ekonomi**	**%**	**4.00**	**4.25**	**41,561,932,000**	**4.50**	**41,288,714,400**	**4.72**	**43,622,585,840**	**4.85**	**44,088,517,404**	**5.01**	**50,406,369,144**	**5.01**	**220,968,118,788**		
				Sasaran 5.1.1 : Meningkatkan pembangunan sektor pertanian	**Pertumbuhan sub sektor pertanian, peternakan dan perikanan**	**%**	**5.45**	**5.51**	**16,926,849,000**	**5.65**	**19,712,068,400**	**5.70**	**19,668,275,240**	**5.82**	**18,315,102,764**	**5.89**	**22,411,613,040**	**5.89**	**97,033,908,444**		
				Program Peningkatan Hasil dan Mutu Pertanian/Perkebunan	Jumlah Produksi Padi dan Palawija :				13,000,000,000		15,100,000,000		15,050,000,000		13,400,000,000		17,100,000,000		73,650,000,000	PP7	DINAS PERTANIAN
					- Jumlah Produksi Padi	Ton	258.97	258,975.15		258,976.15		258,977.15		258,978.15		258,979.15		258,979.15			
					- Jumlah Produksi Jagung	Ton	4,164.70	4,165.54		4,166.54		4,167.54		4,168.54		4,169.54		4,169.54			
					- Jumlah Produksi Kedelai	Ton	834	834.7		835.4		835.8		836.6		837.2		837.2			
					- Jumlah Produksi Ubi Kayu	Ton	6.42	6,416.32		6,416.64		6,417.24		6,417.48		6,417.96		6,417.96			
					Jumlah Luas Lahan dan Prasarana Pertanian :																
					- Luas Lahan Sawah	Ha	31.988	31.988		31.988		31.988		31.988		31.988		31.988			
					- Luas Lahan Kering	Ha	89.175	89.175		89.175		89.175		89.175		89.175		89.175			
					- Jalan Usaha Tani	Meter	13.2004	13.2004		13.2004		13.2004		13.2004		13.2004		13.2004			
					- Jumlah Embung	Unit	12	12		12		12		12		12		12			
					- Jumlah Dam Parit	Unit	2	2		2		2		2		2		2			
					- Jumlah Jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)	Meter	4.854	4.854		4.854		4.854		4.854		4.854		4.854			
					- Jumlah jaringan irigasi tersier	Unit	5	5		5		5		5		5		5			
					- Jumlah saluran pembuang air sawah	Unit	1	1		1		1		1		1		1			
					- Gedung Workshop mekanisasi	Unit	2	2		2		2		2		2		2			
					Jumlah Produksi Hasil Perkebunan :														-		
					- Jumlah produksi Kelapa	Ton	5,908	5911		5911		5912		5913		5914		5914			
					- Jumlah Produksi Kopi	Ton	639	640		650		660		665		670		670			
					- Jumlah Produksi Pinang	Ton	1558	1558		1558		1565		1570		1575		1575			
					- Jumlah Produksi Kemiri	Ton	1395	1395		1395		1410		1415		1420		1420			
					- Jumlah Produksi Kakao	Ton	320	330		340		350		360		370		370			
3	01	10	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Tersedianya Sarana Pertanian :				1,705,200,000		1,875,720,000		2,063,292,000		2,269,621,200		2,496,583,320		10,410,416,520	PP7	Dinas Pertanian
					- Jumlah Combine Hervester	unit	11 unit	11 unit		11 unit		11 unit		11 unit		11 unit		11 unit			
					- Jumlah traktor	unit	33 unit	33 unit		33 unit		33 unit		33 unit		33 unit		33 unit			
				Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian :				500,000,000		842,534,500		526,787,950		469,466,745		476,413,420		2,815,202,615	PP7	DINAS PERTANIAN
					- Jumlah Pompa air	Unit	19	19		20		22		25		27		30			
					- Power Tresher	Unit	1	1		3		4		5		7		8			
					- Eltivator	Unit	4	4		5		6		7		8		9			
					- Hand sprayer	Unit	34	34		35		36		37		38		39			
		01.	21.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Populasi Hewan Ternak :				376,949,000		414,643,900		456,108,290		501,719,119		551,891,031		2,301,311,340	PP7	DINAS PERTANIAN

(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)
					- Jumlah Produksi Ternak Sapi	Ekor	99,639	99,639		99,639		99,639		99,639		99,639		99,639			
					- Jumlah produksi Ternak Kerbau	Ekor	30,133	30,133		30,133		30,133		30,133		30,133		30,133			
					- Jumlah Produksi Ternak Kambing	Ekor	113,279	113,279		113,279		113,279		113,279		113,279		113,279			
					- Jumlah Produksi Ternak Ayam	Ekor	1,378,163	1,378,163		1,378,163		1,378,163		1,378,163		1,378,163		1,378,163			
					- Jumlah Produksi Ternak Itik	Ekor	207,158	207,158		207,158		207,158		207,158		207,158		207,158			
				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase Penggunaan Teknologi Peternakan	%	50	53	500,000,000	55	550,000,000	60	605,000,000	65	665,500,000	70	732,050,000	70	3,052,550,000	PP7	DINAS PERTANIAN
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Jumlah Penurunan Angka Kematian Ternak	%	80	80	500,000,000	100	550,000,000	100	550,000,000	100	550,000,000	100	550,000,000	100	2,700,000,000	PP7	DINAS PERTANIAN
				Program Pengembangan sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah pelatihan dan pertemuan pelaku perikanan :				344,700,000		379,170,000		417,087,000		458,795,700		504,675,270		2,104,427,970	PP7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					- Jumlah Pelatihan dan Pertemuan pelaku perikanan	Keg.	3	3		4		4		4		4		4			
				Sasaran 5.1.2 : Mengembangkan sektor ekonomi mikro	**Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah**	**%**	**4,18**	**4,50**	**21,841,473,000**	**4,92**	**18,722,586,000**	**5,36**	**20,814,844,600**	**5,78**	**22,209,614,030**	**5,95**	**23,994,575,433**	**5,95**	**107,583,093,063**		
				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Peningkatan Lembaga Koperasi :														-	PP7	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN UKM
					Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD)	Unit	33 Unit	33 Unit	440,990,000	33 Unit	485,089,000	33 Unit	533,597,900	33 Unit	586,957,690	33 Unit	645,653,459	33 Unit	2,692,288,049		
					Jumlah Koperasi Non KUD	Unit	610 Unit	610 Unit		610 Unit		610 Unit		610 Unit		610 Unit		610 Unit			
				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah industri kecil dan menengah (IKM) :				247,525,000		272,277,500		299,505,250		329,455,775		362,401,353		1,511,164,878	PP7	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN UKM
					Jumlah Unit IKM Formal :																
					- IKM Pangan	Unit	39	39		39		39		39		39		39			
					- IKM sandang	Unit	2	2		2		2		2		2		2			
					- IKM Kimia dan Bahan banggunan	Unit	16	16		16		16		16		16		16			
					- IKM Logam dan Elektronika	Unit	7	7		7		7		7		7		7			
					- IKM Kerajinan	Unit	4	4		4		4		4		4		4			
					Jumlah Unit IKM Non Formal :																
					- IKM Pangan	Unit	1352	1352		1352		1352		1352		1352		1352			
					- IKM sandang	Unit	155	155		155		155		155		155		155			
					- IKM Kimia dan Bahan banggunan	Unit	388	388		388		388		388		388		388			
					- IKM Logam dan Elektronika	Unit	229	229		229		229		229		229		229			
					- IKM Kerajinan	Unit	205	205		205		205		205		205		205			
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Jumlah pasar yang dikembangkan dan ditingkatkan	unit	50 unit	52 unit	17,930,343,000	54 unit	15,030,343,000	56 unit	16,533,377,300	58 unit	17,500,000,000	60 unit	19,100,000,000.00	60 unit	86,094,063,300	PP7	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN UKM
					Jumlah Pasar Rakyat	Unit	50	52		54		56		58		60		60	-		
				Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah					500,000,000		200,000,000		700,000,000		770,000,000		847,000,000		3,017,000,000	PP7	
				Program peningkatan kemampuan teknologi industri					2,600,000,000		2,600,000,000		2,600,000,000		2,860,000,000		2,860,000,000		13,520,000,000	PP7	
				Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah tera ulang terhadap UTTP kemetrologian	%	-	100	122,615,000	100	134,876,500	100	148,364,150	100	163,200,565	100	179,520,622	100	748,576,837	PP7	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN UKM
				Sasaran 5.1.3 : Meningkatkan kontribusi pariwisata.	**Pertumbuhan sub sektor pariwisata**	**%**	**9.29**	**9.32**	**2,793,610,000**	**9.46**	**2,854,060,000**	**9.52**	**3,139,466,000**	**9.64**	**3,563,800,610**	**9.77**	**4,000,180,671**	**9.77**	**16,351,117,281**		
04	17		15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pengembangan SDM dan Profesionalisme bidang wisata	bulan	12	12	369,100,000	12	406,010,000	12	446,611,000	12	491,272,100	12	540,399,310	60	2,253,392,410	PP7	Disparpora
					Pemilihan Duta Wisata	Orang	2	2		2		2		2		2		2	-		Disparpora
04	17		16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata	bulan	12	12	235,400,000	12	258,940,000	12	284,834,000	12	423,705,410	12	546,075,951	60	1,748,955,361	PP7	Disparpora
02	17		01	Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan lisensi teknologi	bulan	12	12	2,189,110,000	12	2,189,110,000	12	2,408,021,000	12 Bln	2,648,823,100	12 Bln	2,913,705,410	48 Bln	12,348,769,510	PP7	Disparpora
				Tujuan 5.2 : Menurunnya angka kemiskinan	**Persentase angka kemiskinan**	**%**	**15.41**	**14.47**	**22,948,570,800**	**13.50**	**25,243,427,880**	**12.96**	**27,767,770,668**	**12.39**	**30,185,378,206**	**11.41**	**35,103,916,026**	**11.41**	**141,249,063,580**		

(1)			(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)
			Sasaran 5.2.1 : Meningkatkan ketahanan pangan	**Pola pangan harapan (PPH) ketersediaan**	**Nilai**			**2,961,059,000**		**3,257,164,900**		**3,582,881,390**		**3,582,000,000**		**3,940,200,000**		**17,323,305,290**		
				Pola pangan harapan (PPH) Konsumsi	**Nilai**															
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan energi				2,961,059,000		3,257,164,900		3,582,881,390		3,582,000,000		3,940,200,000		17,323,305,290	PP7	DINAS PANGAN
				- Jumlah lumbung pangan Masyarakat	Unit	1	5		5		5		5		5		5			
				- Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat	Kelompok	0	5		5		5		5		5		5			
				- Jumlah Stock cadangan pangan	Ton	85	100		100		100		100		100		100			
				- Jumlah lembaga usaha pangan masyarakat	Unit	0	2		2		2		2		2		2			
				- Jumlah toko tani indonesia	Unit	1	5		5		5		5		5		5			
			Sasaran 5.2.2 : Meningkatkan kesejahteraan petani;	**Nilai Tukar Petani (NTP)**	**%**	**96,26**	**98,00**	**2,268,650,000**	**101,00**	**2,495,515,000**	**103,00**	**2,745,066,500**	**105,00**	**3,019,573,150**	**107,00**	**3,321,530,465**	**107,00**	**13,850,335,115**		
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan hasil dan mutu komoditi pertanian :				2,268,650,000		2,495,515,000		2,745,066,500		3,019,573,150		3,321,530,465		13,850,335,115	PP7	DINAS PERTANIAN
				Meningkatnya jumlah kelompok tani komoditas utama (Jumlah Kelompok	kelompok	21 Klp	21 Klp		25 Klp		25 Klp		30 Klp		30 Klp		30 Klp	-		Dinas Pertanian
				- Jumlah Balai Pertemuan Petani	Unit	1	1		3		3		4		4		5			
				Meningkatnya jumlah kelompok tani komoditas utama (Jumlah Kelompok Gula Aren)	kelompok	21 Klp	21 Klp		25 Klp		25 Klp		30 Klp		30 Klp		30 Klp	-		
				- Jumlah Kelompok Petani Gula Aren	Kelompok	21 Klp	21 Klp		25 Klp		25 Klp		30 Klp		30 Klp		30 Klp			
			Sasaran 5.2.3 : Menurunnya angka pengangguran;	Persentase tingkat pengangguran terbuka	%	8,49	6.51	**15,894,929,300**	6.10	**17,484,422,230**	5.80	**19,232,864,453**	5.61	**21,156,150,898**	5.44	**25,171,765,988**	5.44	**98,940,132,869**		
				Indeks Desa Mandiri	Nilai															
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Telatihnya tenaga kerja terampil	Orang	326	326	674,810,000	326	742,291,000	326	816,520,100	326	898,172,110	326	987,989,321	1630	4,119,782,531	PP8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pengembnagan Kewirausaan dan Keunggulan UMKM	Kec.	23		254,575,000	23	280,032,500	23	308,035,750	23	338,839,325	23	372,723,258	23	1,554,205,833	PP8	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN UKM
22	01	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Terlaksananya kegiatan kelembagaan dan organisasi masyarakat serta tingkat perkembangan gampong	%	70	75	869,034,300	80	955,937,730	85	1,051,531,503	88	1,156,684,653	90	1,272,353,119	93	5,305,541,305	PP8	DPMG
22	01	17	Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya Partisipasi masayarakat dalam pembangunan gampong	%	75	78	9,450,000,000	82	10,395,000,000	87	11,434,500,000	90	12,577,950,000	92	15,735,745,000	96	59,593,195,000	PP8	DPMG
22	01	19	Program Peningkatan Peran Perempuan di perdesaan	Tercapainya Peran Perempuan perdesaan	%	65	70	1,716,510,000	73	1,888,161,000	80	2,076,977,100	83	2,284,674,810	88	2,513,142,291	90	10,479,465,201	PP8	DPMG
			Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	persentase penurunan angka pengangguran terbuka	lembaga	10	10	100,000,000	10	110,000,000	10	121,000,000	10	133,100,000	10	146,410,000	70	610,510,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Program peningkatan ketrampilan Tenaga kerja	persentase penurunan angka pengangguran terbuka	unit	30	30	1,000,000,000	30	1,100,000,000	30	1,210,000,000	30	1,331,000,000	30	1,464,100,000	180	6,105,100,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
22	01	18	Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah desa	%	76	80	1,830,000,000	83	2,013,000,000	87	2,214,300,000	92	2,435,730,000	95	2,679,303,000	97	11,172,333,000	PP8	DPMG
			Sasaran 5.2.4 : Meningkatnya kesempatan kerja	**Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja**	**%**	**59,17**	**60.26**	**174,357,500**	**63.43**	**191,793,250**	**65.64**	**210,972,575**	**68.57**	**232,069,833**	**70.12**	**255,276,816**	**70.12**	**1,064,469,973**		
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase jumlah pengangguran terbuka	%	6,59	6,59	174,357,500	6,20	191,793,250	6,00	210,972,575	5,80	232,069,833	5,61	255,276,816	5,61	1,064,469,973	PP8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Sasaran 5.2.5 : Meningkatnya nilai investasi.	**Jumlah nilai investasi pada industri kecil pada sektor formal dan informal**	**Rp.Milyar**	**155**	**178**	**1,649,575,000**	**205**	**1,814,532,500**	**236**	**1,995,985,750**	**271**	**2,195,584,325**	**312**	**2,415,142,758**	**312**	**10,070,820,333**		
			Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Formal Pangan	Rp	5,48 Milyar Rupiah	6 Milyar Rupiah	54,575,000	6,10 Milyar Rupiah	60,032,500	6,10 Milyar Rupiah	66,035,750	6,20 Milyar Rupiah	72,639,325	6,20 Milyar Rupiah	79,903,258	6,20 Milyar Rupiah	333,185,833	PP8	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN UKM
				Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Formal Logam dan Elektronika	Rp	2,12 Milyar Rupiah	2,12 Milyar Rupiah		2,12 Milyar Rupiah		2,12 Milyar Rupiah		2,12 Milyar Rupiah		2,12 Milyar Rupiah		2,12 Milyar Rupiah			
				Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Formal Sandang	Rp	400 Juta Rupiah	400 Juta Rupiah		400 Juta Rupiah		500 Juta Rupiah		500 Juta Rupiah		600 Juta Rupiah		600 Juta Rupiah			
				Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Pangan Non Formal	Rp	29,32 Milyar Rupiah	30 Milyar Rupiah		30,05 Milyar Rupiah		30,10 Milyar Rupiah		30,10 Milyar Rupiah		30,15 Milyar Rupiah		30,15 Milyar Rupiah			
				Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Sandang Non Formal	Rp	1,34 Milyar Rupiah	1,34 Milyar Rupiah		1,34 Milyar Rupiah		1,34 Milyar Rupiah		1,34 Milyar Rupiah		1,34 Milyar Rupiah		1,34 Milyar Rupiah			
22	01	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	terfasilitasi pembinaan BUMG, UMKM, TTG.	%	100	100	1,595,000,000	100	1,754,500,000	100	1,929,950,000	100	2,122,945,000	100	2,335,239,500	100	9,737,634,500	PP8	DPMG

(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)
				Misi 6 : Percepatan Laju Pembangunan Masyarakat Pesisir, Terisolir dan Tertinggal					**1,720,725,000**		**2,133,947,500**		**2,325,868,250**		**2,586,955,075**		**2,872,650,583**		**11,640,146,408**		
				Tujuan 6.1 : Meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir, terisolir, dan tertinggal	**Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan**	**%**	**2.52**	**2.98**	**1,720,725,000**	**3.55**	**2,133,947,500**	**3.82**	**2,325,868,250**	**3.91**	**2,586,955,075**	**4.02**	**2,872,650,583**	**4.02**	**11,640,146,408**		
				Sasaran 6.1.1 : Mengembangkan sektor perikanan di kawasan pesisir.	**Nilai Tukar Nelayan (NTN)**	**%**	**97,86**	**98.5**	**647,350,000**	**99,75**	**712,085,000**	**101,25**	**783,293,500**	**103,00**	**861,622,850**	**106,00**	**947,785,135**	**106,00**	**3,952,136,485**		
				Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Luas lahan budidaya perikanan :				200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		1,221,020,000	PP9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					- Jumlah Areal Budidaya Kolam	Ha	96,50	97		98		98		99		99		99			
					- Jumlah Areal Budidaya Tambak	Ha	681,20	682		683		684		685		686		686			
				Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap :				447,350,000		492,085,000		541,293,500		595,422,850		654,965,135		2,731,116,485	PP9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Kapal Penangkap Ikan (Perahu Tanpa motor)	Unit	29	29		32		180		190		200		200			
					Jumlah Kapal Penangkap Ikan (Perahu Motor Tempel)	Unit	159	159		170		820		840		870		870			
					Jumlah Kapal Penangkap Ikan (Kapal Motor)	Unit	765	765		790		790		790		790		790			
					- Jumlah PPI	Unit	2	2		2		2		2		2		2			
					- Jumlah TPI	Unit	6	6		6		6		6		6		6			
					- Jumlah Dermaga	Unit	10	10		10		10		10		10		10			
				Sasaran 6.1.2 : Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah	**Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik untuk wilayah pesisir, terisolir dan tertinggal**	**Km**	**96.96**	**99.30**	**1,073,375,000**	**101.50**	**1,421,862,500**	**103.80**	**1,542,574,750**	**106.10**	**1,725,332,225**	**108.30**	**1,924,865,448**	**108.30**	**7,688,009,923**		
					Rasio Jaringan Irigasi untuk wilayah pesisir, terisolir dan tertinggal	**Km**															
					Persentase kawasan yang bebas dari terisolir	**%**															
				Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Meningkatnya ekonomi masyarakat pesisir :				551,900,000		551,900,000		607,090,000		667,799,000		734,578,900		3,113,267,900	PP9	
					Jumlah Produksi Ikan Laut	Ton	16.645 Ton	18.000 Ton		20.000 Ton		22.000 Ton		25.000 Ton		27.000 Ton		27.000 Ton			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Kelompok Petani Garam	Kelompok	22 Klp	22 Klp		25 Klp		25 Klp		30 Klp		30 Klp		30 Klp			
					Jumlah Balai Nelayan	Unit	13	13		13		14		14		15		15			
2	05	01	23	PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT	luas pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Kecamatan	0	0	0.00	1	250,000,000	1	250,000,000	2	300,000,000	2	350,000,000	2	1,150,000,000	PP6	DLH
2.	08	01	15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Peningkatan fasilitas infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan warga di unit permukiman transmigrasi	%	-	20	471,475,000	40	518,622,500	60	570,484,750	80	627,533,225	100	690,286,548	100	2,878,402,023	PP9	Disnakertrans
			16	Program Transmigrasi Lokal	peningkatan SDM transmigrasi	KK	230	50	50,000,000	50	101,340,000	50	115,000,000	50	130,000,000	30	150,000,000	230	546,340,000	Disnakertrans	
				TOTAL					**695,834,627,204**		**717,243,868,611**		**742,451,815,280**		**822,621,874,517**		**909,019,047,472**		**3,887,171,233,085**		

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan visi dan 5 (lima) misi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 dirumuskan kebijakan umum dan program-program pembangunan daerah yang didasarkan pada hasil analisis isu-isu strategis sesuai dengan kondisi kekinian yang terjadi di daerah. Program-program pembangunan yang akan diimplementasikan dibagi menurut masing-masing urusan, yakni urusan wajib dan urusan pilihan.

Secara lebih jelas, kebijakan umum dan program-program pembangunan Kabupaten Aceh Besar untuk 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2017 – 2022

No.	Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	**KAPASITAS RIIL KEUANGAN**	**695,834,627,204**	**717,243,868,611**	**742,451,815,280**	**822,621,874,517**	**909,019,047,472**
1.1	**BELANJA**	**1,875,072,975,822**	**1,967,665,592,992**	**2,026,839,524,725**	**2,136,743,336,224**	**2,253,867,572,081**
1.1.1	**Belanja Tidak Langsung**	**1,179,238,348,618**	**1,250,421,724,381**	**1,284,387,709,445**	**1,314,121,461,706**	**1,344,848,524,609**
1.1.1.1	Belanja Pegawai	635,578,212,188	665,017,509,621	684,968,034,910	705,517,075,957	726,682,588,236
1.1.1.2	Belanja Hibah	25,576,124,923	23,361,500,000	24,529,575,000	25,756,053,750	27,043,856,438
1.1.1.3	Belanja Bantuan Sosial	15,650,000,000	15,907,400,000	17,498,140,000	19,247,954,000	21,172,749,400
1.1.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	6,634,874,000	7,924,231,000	8,716,654,100	9,588,319,510	10,547,151,461
1.1.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	478,720,997,560	523,211,083,760	533,675,305,435	539,012,058,490	544,402,179,074
1.1.1.6	Belanja Tidak Terduga	17,078,139,947	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000
1.1.2	**Belanja Langsung**	**695,834,627,204**	**717,243,868,611**	**742,451,815,280**	**822,621,874,517**	**909,019,047,472**
1.1.2.1	Belanja Pegawai	94,880,426,000	97,624,447,300	102,605,669,665	107,835,953,148	113,327,750,806
1.1.2.2	Belanja Modal	282,608,793,163	293,723,651,029	304,113,502,224	368,921,298,677	439,390,735,293
1.1.2.3	Belanja Barang dan Jasa	318,345,408,041	325,895,770,282	335,732,643,391	345,864,622,692	356,300,561,373

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 - 2022

Kode				Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1				**Urusan Wajib**															
1	**01**			**Urusan Pendidikan**															
1	**01**	**1.01.01**		**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**				**56,914,980,250**		**62,561,557,035**		**68,839,791,939**		**75,743,771,132**		**83,438,148,246**		**347,498,248,601**	
1	1	1.01.01	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	7	7	1,809,542,000	7	1,990,496,200	7	2,189,545,820	7	2,408,500,402	7	2,649,350,442	7	11,047,434,864	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	1.01.01	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor (tujuan/impact/outcome)	7	7	143,677,000	7	158,044,700	7	173,849,170	7	191,234,087	7	210,357,496	7	877,162,453	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	1.01.01	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	7	7	140,600,000	7	154,660,000	7	170,126,000	7	187,138,600	7	205,852,460	7	858,377,060	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	1.01.01	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		7	52,400,000	8	57,640,000	9	63,404,000	10	69,744,400	11	76,718,840	11	319,907,240	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	1.01.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD	7	7	12,500,000	7	13,750,000	7	15,125,000	7	16,637,500	7	18,301,250	7	76,313,750	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	1.01.01	15	Program pendidikan anak usia dini	Meningkatnya angka partisipasi kasar TK	34	36	1,477,675,000	40	1,625,442,500	43	1,787,986,750	53	1,966,785,425	58	2,163,463,968		9,021,353,643	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	1.01.01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terpenuhinya Standar Pelayanaan Minimum Dikdas dan Percepatan Peningkatan Mutu	345	348	51,637,048,500	349	56,800,753,350	350	59,280,828,685	351	65,508,911,553.50	352	72,459,802,709	353	305,687,344,797	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	1.01.01	18	Program Pendidikan Non Formal	Terwujudnya Proses Belajar Mengajar Pendidikan Non Formal	23	23	560,316,350	23	616,347,985	23	677,982,784	23	745,781,062	23	820,359,168	23	3,420,787,348	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	1.01.01	20	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya kapasitas dan Kompetensi guru dan pengelola pendidikan	7036	7125	332,013,000	6925	365,214,300	6725	401,735,730	6525	441,909,303	6325	486,100,233	6125	2,026,972,566	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan				0.00		0.00		2,800,000,000		2,800,000,000		2,800,000,000		8,400,000,000	
1	01	1.01.01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya Sistem Manajemen Pendidikan yang Profesional	645	690	749,208,400	697.12	779,208,000	704.3424	1,279,208,000	711.669248	1,407,128,800	719	1,547,841,680	727	5,762,594,880	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**4.02.34**		**Dinas Pendidikan Dayah**				**35,892,432,500**		**39,440,675,750**		**41,343,743,325**		**45,478,117,658**		**49,584,829,423**		**211,739,798,656**	
1	01	4.02.34	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12	12	486,552,000	12	535,207,200	12	588,727,920	12	647,600,712	12	712,360,783	60	2,970,448,615	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	4.02.34	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	12	12	472,468,000	12	519,714,800	12	571,686,280	12	628,854,908	12	691,740,399	60	2,884,464,387	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	4.02.34	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	12	12	14,700,000	12	16,170,000	12	17,787,000	12	19,565,700	12	21,522,270	60	89,744,970	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	4.02.34	06	Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan Kinerja Dan Keuangan	Lancarnya Kegiatan Kantor	12	12	45,425,000	12	49,967,500	12	54,964,250	12	60,460,675	12	66,506,743	60	277,324,168	Dinas Pendidikan Dayah
				Urusan Pendidikan															
				Program Pendidikan Dayah				16,400,000,000		16,400,000,000		16,400,000,000		18,040,000,000		19,844,000,000		87,084,000,000	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah				260,000,000		260,000,000		260,000,000		286,000,000		286,000,000		1,352,000,000	
				Program Pemberdayaan Santri				3,200,000,000		3,200,000,000		3,200,000,000		3,520,000,000		3,520,000,000		16,640,000,000	
				Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan				550,000,000		550,000,000		550,000,000		605,000,000		605,000,000		2,860,000,000	
1	01	4.02.34	18	Program Pendidikan Non Formal	Dayah yang memenuhi standar pendidikan dayah	74	80	14,463,287,500	85	17,909,616,250	90	19,700,577,875	95	21,670,635,663	100	23,837,699,229	100	97,581,816,516	Dinas Pendidikan Dayah
1	**02**			**Urusan Kesehatan**						-		-		-		-		-	
1	**02**	**01**		**Dinas Kesehatan**				**89,114,492,400**		**96,725,941,640**		**107,638,535,804**		**116,582,389,384**		**130,190,628,323**		**540,251,987,551**	
1	02	01	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12	12	5,012,822,000	12	5,514,104,200	12	6,065,514,620	12	6,672,066,082	12	7,339,272,690		30,603,779,592	Dinas Kesehatan
1	02	01	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	12	12	879,415,000	12	967,356,500	12	1,064,092,150	12	1,170,501,365	12	1,287,551,502		5,368,916,517	Dinas Kesehatan
1	02	01	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	12	12	108,300,000	12	119,130,000	12	131,043,000	12	144,147,300	12	158,562,030		661,182,330	Dinas Kesehatan

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	02	01	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	1	32,500,000	1	35,750,000	1	39,325,000	1	43,257,500	1	47,583,250		198,415,750	Dinas Kesehatan
1	02	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD	2	2	35,200,000	2	38,720,000	2	42,592,000	2	46,851,200	2	51,536,320	2	214,899,520	Dinas Kesehatan
1	02	01	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan	70	100	2,035,000,000	100	2,238,500,000	100	2,462,350,000	100	2,708,585,000	100	2,979,443,500	100	12,423,878,500	Dinas Kesehatan
1	02	01	18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Cakupan pelayanan TOGA di Sarkes	-	50	70,000,000	70	77,000,000	100	84,700,000	1	93,170,000	100	102,487,000	100	427,357,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	70	50	152,150,000	60	167,365,000	70	184,101,500	70	202,511,650	70	222,762,815	70	928,890,965	Dinas Kesehatan
					Cakupan Pembinaan Usila pada Kelompok Usila	-	25		30		50		100		100		100		
			16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan Kadar level I yang harus diberikan Sarkes kab/kota	50		48,180,829,000	100	52,998,911,900	100	58,298,803,090	100	64,128,683,399	100	70,541,551,739	100%	294,148,779,128	Dinas Kesehatan
1	02	01	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya kemampuan petugas dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	23	23	100,000,000	23	110,000,000	23	121,000,000	23	133,100,000	23	146,410,000	23	610,510,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Meningkatnya monitoring jumlah industri rumah tangga	50	50	68,300,000	70	75,130,000	85	82,643,000	90	90,907,300	90	99,998,030	90	416,978,330	Dinas Kesehatan
1	2	01	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Meningkatnya jumlah rumah tangga melaksanakan germas, PIS-PK	100	100	848,759,000	100	933,634,900	100	1,026,998,390	100	1,129,698,229	100	1,242,668,052	100	5,181,758,571	Dinas Kesehatan
1	02	01	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	44	100	1,520,800,000	100	1,672,880,000	100	1,840,168,000	100	2,024,184,800	100	2,226,603,280	100	9,284,636,080	Dinas Kesehatan
1	02	01	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan pengawasan rmh sehat	0.32	0.65	350,000,000	0.7	385,000,000	0.8	423,500,000	0.8	465,850,000	80%	512,435,000	0.8	2,136,785,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Terlaksananya penanggulangan penyakit menular dengan angka cakupan penemuan dan penanganan penyakit : a. AFP rate per 100.000 pddk < 15 thn	20	30	2,501,450,000	30	2,751,595,000	30	3,026,754,500	30	3,329,429,950	30	3,662,372,945	100	15,271,602,395	Dinas Kesehatan
1	02	01	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Terlaksananya evaluasi pengembangan standar pelayanan kesehatan	100	100	465,000,000	100	511,500,000	100	562,650,000	100	618,915,000	100	680,806,500	100	2,838,871,500	Dinas Kesehatan
1	02	01	24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Terlayaninya pengobatan untuk penduduk miskin	100	-	-	100	600,000,000	100	660,000,000	100	726,000,000	100	798,600,000	100	2,784,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	25	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	Tersedianya pusat pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan	11	13	14,000,000,000	14	14,100,000,000	15	16,940,000,000	16	17,034,000,000	17	19,737,400,000	17	81,811,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	26	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah sakit	tersedia sarana dan prasarana yang menunjang pelaanan kesehatan	4	5	5,000,000,000	5	5,500,000,000	5	6,050,000,000	5	6,655,000,000	5	7,320,500,000	5	30,525,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Mata	Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Sarana Rumah sakit	5	6	338,799,000	6	372,678,900	6	409,946,790	6	450,941,469	6	496,035,616	6	2,068,401,775	Dinas Kesehatan
1	02	01	29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	meningkatnya kesehatan dan kualitas tenaga kesehatan	75	100	1,541,412,000	100	1,595,553,200	100	2,065,108,520	100	2,051,619,372	100%	3,256,781,309	100	10,510,474,401	Dinas Kesehatan
1	02	01	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	873,756,400	100	961,132,040	100	1,057,245,244	100	1,162,969,768	100	1,279,266,745	100	5,334,370,198	Dinas Kesehatan
				Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan			5,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		5,500,000,000		6,000,000,000		26,500,000,000	
1	**02**	**1.02.02**		**Rumah Sakit Umum Daerah**				**23,742,033,000**		**24,316,232,100**		**26,771,118,640**		**28,148,230,504**		**30,963,053,554**		**133,940,667,798**	
1	02	1.02.02	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12	12	3,001,822,000	12	3,002,000,000	12	4,002,000,000	12	4,402,200,000	12	4,842,420,000	60	19,250,442,000	RSUD

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	02	1.02.02	02	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	tersedia sarana dan prasarana yang menunjang pelaanan kesehatan	12	12	479,415,000	12	527,356,500	12	580,092,150	12	638,101,365	12	701,911,502	60	2,926,876,517	RSUD
1	02	1.02.02	05	program preningkatan kapasitas sumber daya aparatur	tersedia tenaga kesehatanang bermutu sesuai dengan kopetensi	1	1	108,300,000	1	119,130,000	1	131,043,000	1	144,147,300	1	158,562,030	5	661,182,330	RSUD
1	02	1.02.02	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD	2	2	27,000,000	2	29,700,000	2	32,670,000	2	35,937,000	2	39,530,700	10	164,837,700	RSUD
1	02	1.02.02	26	program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	tersedia sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kesehatan	4	5	5,000,000,000	5	5,500,000,000	6	6,050,000,000	6	6,655,000,000	6	7,320,500,000	6	30,525,500,000	RSUD
1	02	1.02.02	27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Sarana Rumah sakit	5	6	338,799,000	5	372,678,900	5	409,946,790	5	450,941,469	5	496,035,616	5	2,068,401,775	RSUD
1	02	1.02.02	28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	meningkatnya kesehatan dan kualitas tenaga kesehatan	100	100	1,786,697,000	100	1,765,366,700	100	2,565,366,700	100	2,821,903,370	100	3,104,093,707	1	12,043,427,477	RSUD
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat				13,000,000,000		13,000,000,000		13,000,000,000		13,000,000,000		14,300,000,000		66,300,000,000	
1	**03**			**Pekerjaan Umum**															
1	**03**	**01**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				**120,304,154,912**		**135,903,835,924**		**136,269,358,934**		**158,557,850,000**		**176,462,757,433**		**727,497,957,204**	
1	**03**	**01**	**01**	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Lancarnya pelayanan administrasi	12	12	1,820,510,000	12	1,825,610,000	12	2,008,171,000	12	2,208,988,100	12	2,429,886,910	60	10,293,166,010	DINAS PUPR
1	**03**	**01**	**02**	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	tersedianya sarana dan prasarana pegawai	12	12	4,763,550,000	12	4,839,905,000	12	5,323,895,500	12	5,856,285,050	12	6,441,913,555	60	27,225,549,105	DINAS PUPR
1	**03**	**01**	**03**	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	peningkatan kedisplinan pegawai	12	12	200,000,000	12	220,000,000	12	242,000,000	12	266,200,000	12	292,820,000	60	1,221,020,000	DINAS PUPR
1	**03**	**01**	**05**	PROGRAM PENINGKTAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	peningkatan sumber daya aparatur	12	12	100,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	60	260,000,000	DINAS PUPR
1	**03**	**01**	**06**	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	tersedianya laporan	12	12	15,000,000	12	16,500,000	12	18,150,000	12	19,965,000	12	21,961,500	60	91,576,500	DINAS PUPR
1	**03**	**01**	**15**	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	infrastruktur transportasi yang berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.	670.69	670.69	13,608,450,000	800.55	15,000,000,000	930.414	12,550,000,000	1060.28	13,205,000,000	1190.14	13,525,500,000	1190.14	67,888,950,000	DINAS PUPR
1	**03**	**01**	**18**	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	infrastruktur transportasi yang berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.	670.69	670.69	22,668,450,000	800.55	28,000,000,000	930.414	24,200,000,000	1060.28	26,620,000,000	1190.14	29,282,000,000	1190.14	130,770,450,000	DINAS PUPR
1	**03**	**01**	**22**	PROGRAM SISTEM INFORMASI/DATABASE JALAN DAN JEMBATAN	Tersedianya database jalan jembatan	1279	1279	300,000,000	1279	330,000,000	1279	363,000,000	1279	399,300,000	1279	439,230,000	1279	1,831,530,000	DINAS PUPR
1	**03**	**01**	**23**	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan jasa alat-alat berat	1 worksh	1 workshop	550,000,000	1 workshop	550,000,000	1 workshop	805,000,000	1 workshop	885,500,000	1 workshop	974,050,000	1 workshop	3,764,550,000	DINAS PUPR
1	**03**	**01**	**24**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis, semi teknis untuk ketahanan pangan	491	567.8	13,000,000,000	644.6	15,000,000,000	721.4	14,500,000,000	798.2	15,000,000,000	875	16,600,000,000	875	74,100,000,000	DINAS PUPR
1	**03**	**01**	**30**	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	Terlaksananya pembangunan infrastruktur dikawasan pedesaan dan sentra produksi	1.250,66 jalan dan 491 jaringan irigasi	1.250,66 jalan dan 491 jaringan irigasi	14,889,694,912	1.250,66 jalan dan 491 jaringan irigasi	17,381,820,924	1.250,66 jalan dan 491 jaringan irigasi	15,839,142,434	1.250,66 jalan dan 491 jaringan irigasi	19,955,611,850	1.250,66 jalan dan 491 jaringan irigasi	22,014,295,468	1.250,66 jalan dan 491 jaringan irigasi	90,080,565,589	DINAS PUPR
1	**03**	**01**	**16**	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	pemukiman yang bebas banjir dan lingkungan bersih	13110	20000	6,888,500,000	25000	8,500,000,000	30000	7,850,000,000	40000	7,655,000,000	50000	8,420,500,000	50000	39,314,000,000	DINAS PUPR
				Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan layanan air minum	74	80	5,000,000,000	100	5,000,000,000	100	5,500,000,000	100	6,050,000,000	100	6,655,000,000	100	28,205,000,000	DINAS PUPR

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Jumlah SPAM yang dibangun	15	15	7,000,000,000	20	7,700,000,000	30	8,470,000,000	35	9,317,000,000	40	10,248,700,000	40	42,735,700,000	DINAS PUPR
					Meningkatnya penyehatan lingkungan di kawasan permukiman masyarakat (cakupan sanitasi)	68	85	2,000,000,000	100	2,200,000,000	100	2,420,000,000	100	2,662,000,000	100	2,928,200,000	100	12,210,200,000	DINAS PUPR
					instalasi pengolahan air limbah yang terbangun	14	16	5,000,000,000	18	5,500,000,000	20	6,050,000,000	22	6,655,000,000	24	7,320,500,000	24	30,525,500,000	DINAS PUPR
1	**03**	01	**29**	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	Terlaksananya pembangunan di wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh	23	23	7,000,000,000	23	7,100,000,000	23	8,300,000,000	23	10,500,000,000	23	13,700,000,000	23	46,600,000,000	DINAS PUPR
1	**03**	01	**26**	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sungai	5	5	3,000,000,000	5	3,200,000,000	5	4,570,000,000	5	6,500,000,000	5	7,500,000,000	5	24,770,000,000	DINAS PUPR
1	**03**	01	**28**	PROGRAM PENGENDALI BANJIR	berkurangnya daerah banjir genangan	5	5	2,000,000,000	5	2,200,000,000	5	3,500,000,000	5	5,900,000,000	5	7,300,000,000	5	20,900,000,000	DINAS PUPR
1	**04**	01	**15**	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	terwujudnya perumahan yang layak huni, bersih dan sehat	171	200	9,000,000,000	300	9,100,000,000	400	10,300,000,000	450	13,200,000,000	500	14,100,000,000	500	55,700,000,000	DINAS PUPR
1	05	01	15	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	terwujudnya perencanaan pembangunan sesuai dengan peruntukan ruang	3	3	500,000,000	3	1,100,000,000	4	2,210,000,000	5	4,331,000,000	6	4,764,100,000	6	12,905,100,000	DINAS PUPR
1	05	01	16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Terlaksananya pembangunan sesuai dengan arahan penataan ruang	1	1	500,000,000	1	550,000,000	1	605,000,000	1	665,500,000	1	732,050,000	1	3,052,550,000	DINAS PUPR
1	05	01	17	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFATAAN RUANG	Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan penataan ruang wilayah	1	1	500,000,000	1	550,000,000	1	605,000,000	1	665,500,000	1	732,050,000	1	3,052,550,000	DINAS PUPR
1	**06**			**Urusan Perencanaan Pembangunan**															
1	**06**	**01**		**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**				**4,935,083,800**		**5,428,592,180**		**5,971,451,398**		**6,568,596,538**		**7,225,456,192**		**30,129,180,107**	
1	06	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi	12	12	1,021,570,300	12	1,123,727,330	12	1,236,100,063	12	1,359,710,069	12	1,495,681,076	60	6,236,788,839	Bappeda
1	06	01	02	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	tersedianya sarana dan prasarana pegawai	12	12	42,400,000	12	46,640,000	12	51,304,000	12	56,434,400	12	62,077,840	60	258,856,240	Bappeda
1	06	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	peningkatan kedisplinan pegawai	12	12	42,000,000	12	46,200,000	12	50,820,000	12	55,902,000	12	61,492,200	60	256,414,200	Bappeda
1	06	01	05	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	peningkatan sumber daya aparatur	12	12	106,900,000	12	117,590,000	12	129,349,000	12	142,283,900	12	156,512,290	60	652,635,190	Bappeda
1	06	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD		2	4,535,000	2	4,988,500	2	5,487,350	2	6,036,085	2	6,639,694	60	27,686,629	Bappeda
1	06	01	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data/informasi Pembangunan	1	1	755,250,000	1	830,775,000	1	913,852,500	1	1,005,237,750	1	1,105,761,525	5 Tahun	4,610,876,775	Bappeda
1	06	01	16	Program Kerjasama Pembangunan	Terjalinnya kerjasama dengan lembaga/badan/ NGO dalam mendukung perencanaan pembangunan	1	1	138,175,000	1	151,992,500	1	167,191,750	1	183,910,925	1	202,302,018	5 Tahun	843,572,193	Bappeda
1	06	01	17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;	Adanya Pengelolaan ketertiban wilayah pulau terluar	100	100	135,180,000	100	148,698,000	100	163,567,800	100	179,924,580	100	197,917,038	100	825,287,418	Bappeda
1	06	01	18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terselenggaranya koordinasi penataan ruang daerah Kab. Aceh Besar	100	100	570,415,000	100	627,456,500	100	690,202,150	100	759,222,365	100	835,144,602	100	3,482,440,617	Bappeda
1	06	01	20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		1	1	260,080,000	1	286,088,000	1	314,696,800	1 Tahun	346,166,480	1 Tahun	380,783,128	5 Tahun	1,587,814,408	Bappeda
1	06	01	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya pembangunan daerah	1	1	509,988,500	1 Tahun	560,987,350	1 Tahun	617,086,085	1 Tahun	678,794,694	1 Tahun	746,674,163	5 Tahun	3,113,530,791	Bappeda
1	06	01	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Tingkat Sosial Ekonomi Masyarakat	3	3	411,430,000	3	452,573,000	3	497,830,300	3	547,613,330	3	602,374,663	3	2,511,821,293	Bappeda
1	06	01	23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Perencanaan Pembangunan yang sustainable di bidang sosial dan budaya serta keistimewaan Aceh	1	5	706,935,000	5	777,628,500	6	855,391,350	6	940,930,485	6	1,035,023,534	6	4,315,908,869	Bappeda

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	06	01	24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Kebutuhan air minum dan penataan lingkungan permukiman dan program PPSP dan AMPL	-	1	130,225,000	1	143,247,500	1	157,572,250	1	173,329,475	1	190,662,423	2	795,036,648	Bappeda
1	06	01	25	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Tersedianya dokumen perencanaan penanggulangan kebencanaan	0	1	100,000,000	1	110,000,000	1	121,000,000	2	133,100,000	2	146,410,000	2	610,510,000	Bappeda
2	**07**			**URUSAN PERHUBUNGAN**															
2	**07**	**01**		**DINAS PERHUBUNGAN**				**7,526,992,000**		**8,081,076,200**		**9,355,183,820**		**17,885,702,202**		**19,520,272,422**		**62,369,226,644**	
2	**07**	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Lancarnya pelayanan administrasi	12	12	1,621,051,000	12	1,783,156,100	12	1,961,471,710	12	2,157,618,881	12	2,373,380,769	60	9,896,678,460	DINAS PERHUBUNGAN
2	**07**	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	tersedianya sarana dan prasarana pegawai	12	12	276,724,000	12	304,396,400	12	334,836,040	12	368,319,644	12	405,151,608	60	1,689,427,692	DINAS PERHUBUNGAN
2	**07**	01	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	peningkatan kedisplinan pegawai	12	12	30,105,000	12	33,115,500	12	36,427,050	12	40,069,755	12	44,076,731	60	183,794,036	DINAS PERHUBUNGAN
2	**07**	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	peningkatan sumber daya aparatur	12	12	24,600,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	60	184,600,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**07**	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	tersedianya laporan	12	12	66,350,000	12	72,985,000	12	80,283,500	12	88,311,850	12	97,143,035	60	405,073,385	DINAS PERHUBUNGAN
2	**07**	01	15	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan guna mengoptimalkan pelayanan publik dan kenyamanaan berkendara	5 Dermaga	5 Dermaga	283,365,000	5 Dermaga	311,701,500	5 Dermaga	342,871,650	5 Dermaga	377,158,815	5 Dermaga	414,874,697	5 Dermaga	1,729,971,662	DINAS PERHUBUNGAN
2	**07**	01	17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Meningkatnya pelayanan jasa angkutan dan menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta tertibnya lalu lintas jalan	1	1	3,555,054,000	1	3,660,559,400	1	4,326,615,340	1	4,559,276,874	1	4,865,204,561	1	20,966,710,175	DINAS PERHUBUNGAN
2	**07**	01	19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta tertibnya lalu lintas jalan	1	1	400,000,000	1	451,085,000	1	476,193,500	1	1,513,812,850	1	1,665,194,135	1	4,506,285,485	DINAS PERHUBUNGAN
2	**07**	01	18	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan guna mengoptimalkan pelayanan publik dan pelayanan orang, barang dan jasa	5 Dermaga	5 Dermaga	483,000,000	5 Dermaga	431,300,000	5 Dermaga	434,430,000	5 Dermaga	5,966,873,000	5 Dermaga	6,563,560,300	5 Dermaga	13,879,163,300	DINAS PERHUBUNGAN
2	**07**	01	20	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	Meningkatnya pelayanan jasa angkutan	1	1	136,743,000	1	150,417,300	1	165,459,030	1	182,004,933	1	200,205,426	1	834,829,689	DINAS PERHUBUNGAN
2	**07**	01	21	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN PERHUBUNGAN	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan trasnportasi darat, laut dan udara	1	1	500,000,000	2	657,360,000	2	733,096,000	2	2,126,405,600	2	2,339,046,160	1	6,355,907,760	DINAS PERHUBUNGAN
2	**07**	01	16	PROGRAM REHABILITAS DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	Terwujudnya jasa pelayanan Uji Kenderaan Bermotor dan terwujudnya sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik	3 Lokasi	3 Lokasi	150,000,000	3 Lokasi	185,000,000	3 Lokasi	423,500,000	3 Lokasi	465,850,000	3 Lokasi	512,435,000	3 Lokasi	1,736,785,000	DINAS PERHUBUNGAN
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**3,439,978,100**		**3,525,464,500**		**4,525,464,500**		**3,278,010,950**		**3,478,010,950**		**18,246,929,000**	
				Urusan Wajib bukan pelayanan dasar															
				Program pelayanan administrasi perkantoran	Lancarnya Pengelolaan administrasi perkantoran			688,692,500		656,492,500		656,492,500		722,141,750		822,141,750		3,545,961,000	
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan pelaksanaan tugas			113,000,000		113,000,000		113,000,000		124,300,000		124,300,000		587,600,000	
				Program Peningkatan disiplin aparatur	kedisiplinan Aparatur Sipil Negara			29,500,000		29,500,000		29,500,000		32,450,000		32,450,000		153,400,000	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	tersedianya sdm yang terampil sesuai bidang tugasnya			42,000,000		42,000,000		42,000,000		46,200,000		46,200,000		218,400,000	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tersedianya dokumen pelaporan tugas-tugas lembaga pemerintahan			31,726,000		31,726,000		31,726,000		34,898,600		34,898,600		164,975,200	
				Urusan Komunikasi dan Informatikan															

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	bertambahnya informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka membangun daerah			302,814,600		328,146,000		428,146,000		530,960,600		630,960,600		2,221,027,800	
				program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	bertambahnya informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka membangun daerah			200,000,000		292,355,000		392,355,000		871,590,500		871,590,500		2,627,891,000	
				program kerjasama informasi dan media massa	bertambahnya informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka membangun daerah			2,032,245,000		2,032,245,000		2,832,245,000		915,469,500		915,469,500		8,727,674,000	
2	**08**			**URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**															
2	**08**	**01**		**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**				**8,004,710,000**		**8,513,802,500**		**9,429,182,750**		**10,343,101,025**		**11,343,411,128**		**47,634,207,403**	
2	08	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Lancarnya pelayanan administrasi	12	12	1,092,000,000	12	1,201,200,000	12	1,321,320,000	12	1,453,452,000	12	1,598,797,200	12	6,666,769,200	DLH
2	08	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	tersedianya sarana dan prasarana pegawai	12	12	2,637,260,000	12	2,737,260,000	12	3,010,986,000	12	3,312,084,600	12	3,643,293,060	12	15,340,883,660	DLH
2	08	01	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	peningkatan kedisplinan pegawai	12	12	24,000,000	12	26,400,000	12	29,040,000	12	31,944,000	12	35,138,400	12	146,522,400	DLH
2	08	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	peningkatan sumber daya aparatur	12	12	34,500,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	194,500,000	DLH
2	08	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	tersedianya laporan	12	12	4,650,000	12	5,115,000	12	5,626,500	12	6,189,150	12	6,808,065	12	28,388,715	DLH
2	08	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Gerobak sampah 50 unit, Motor sampah 25 unit. Mobil bak sampah 2 unit, Dump	Gerobak sampah 50 unit, Motor sampah 25 unit. Mobil bak sampah 2 unit, Dump truck/tipper truck 19 unit, Arm roll	3,000,000,000	Gerobak sampah 50 unit, Motor sampah 25 unit. Mobil bak sampah 2 unit, Dump truck/tipper truck	2,500,000,000	Gerobak sampah 50 unit, Motor sampah 25 unit. Mobil bak sampah 2 unit, Dump truck/tipper truck 19 unit, Arm roll	2,750,000,000	Gerobak sampah 50 unit, Motor sampah 25 unit. Mobil bak sampah 2 unit, Dump truck/tipper truck 19 unit, Arm roll	3,025,000,000	Gerobak sampah 50 unit, Motor sampah 25 unit. Mobil bak sampah 2 unit, Dump truck/tipper truck 19 unit, Arm roll truck 6 unit	3,327,500,000	Gerobak sampah 50 unit, Motor sampah 25 unit. Mobil bak sampah 2 unit, Dump truck/tipper	14,602,500,000	DLH
2	08	01	16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengurangan perusakan lingkungan hidup	1	1	250,000,000	1	275,000,000	1	302,500,000	1	332,750,000	1	366,025,000	1	1,526,275,000	**DLH**
	08			PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	terwujudnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	1	1	0.00	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	400,000,000	DLH
2	08	01	18	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Terlaksananya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	1	1	250,000,000	1	275,000,000	1	302,500,000	1	332,750,000	1	366,025,000	1	1,526,275,000	DLH
2	08	01	19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Terwujudnya akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	1	1	250,000,000	1	215,297,500	1	236,827,250	1	260,509,975	1	286,560,973	1	1,249,195,698	DLH
2	08	01	20	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	Terlaksananya pengendalian polusi	1	1	0.00	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	600,000,000	DLH
2	08	01	21	PROGRAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DAN JASA LINGKUNGAN DI KAWASAN-KAWASAN KONSERVASI LAUT DAN HUTAN	tersedianya lokasi ekowisata dan konservasi laut dan hutan	0	0	0.00	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	1,000,000,000	DLH
2	08	01	23	PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT	luas pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	0	0	0.00	1	250,000,000	1	250,000,000	2	300,000,000	2	350,000,000	2	1,150,000,000	DLH
2	08	01	24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	tersedianya ruang terbuka hijau	36.44	36.44	462,300,000	36.44	488,530,000	100	680,383,000	100	748,421,300	100	823,263,430	100	3,202,897,730	DLH
2	09			**URUSAN PERTANAHAN**															
2	09			**DINAS PERTANAHAN**				**1,711,382,400**		**2,122,520,640**		**2,314,772,704**		**2,526,249,974**		**2,758,874,972**		**11,433,800,690**	
2	09	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya sarana komunikasi, sumberdaya air dan listrik selama 12 bulan	12	12	612,837,400	12	674,121,140	12	741,533,254	12	815,686,579	12	897,255,237	60	3,741,433,611	DINAS PERTANAHAN
2	09	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana pegawai	12	12	680,375,000	12	748,412,500	12	823,253,750	12	905,579,125	12	996,137,038	60	4,153,757,413	DINAS PERTANAHAN
2	09	01	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya capaian kinerja bagi aparatur	12	12	12,400,000	12	13,640,000	12	15,004,000	12	16,504,400	12	18,154,840	60	75,703,240	DINAS PERTANAHAN

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	09	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	peningkatan sumber daya aparatur	12	12	-	12	40,000,000	12	44,000,000	12	48,400,000	12	53,240,000	60	185,640,000	DINAS PERTANAHAN
2	09	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terselesaikannya pelaporan keuangan	12	12	13,240,000	12	14,564,000	12	16,020,400	12	17,622,440	12	19,384,684	60	80,831,524	DINAS PERTANAHAN
2	09	01	15	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH	Menghimpun Data sertifikat tanah terdaftar baik untuk instansi pemerintah maupun masyarakat terutama yg kurang mampu	1	1	0.00	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	800,000,000	DINAS PERTANAHAN
2	09	01	16	PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1	1	152,300,000	1	167,530,000	1	184,283,000	1	202,711,300	1	222,982,430	5	929,806,730	DINAS PERTANAHAN
2	09	01	17	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	Adanya fungsi fasilitasi untuk konflik dan sengketa pertanahan	1	1	121,550,000	1	133,705,000	1	147,075,500	1	161,783,050	1	177,961,355	5	742,074,905	DINAS PERTANAHAN
2	09	01	18	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Adanya suatu sistem informasi pertanahan yang memiliki data yang akurat	1	1	118,680,000	1	130,548,000	1	143,602,800	1	157,963,080	1	173,759,388	5	724,553,268	DINAS PERTANAHAN
1	**10**			**Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**						-		-		-		-		-	
1	**10**	**2.06.01**		**Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				**4,005,657,700**		**3,672,195,120**		**4,039,414,632**		**4,380,356,096**		**4,887,691,704**		**20,985,315,252**	
1	10	2.06.01	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya kegiatan operasional kantor	12	12	704,576,700.00	12	775,034,370	12	852,537,807	12	937,791,588	12	1,031,570,746	12 Bln	4,301,511,211	Disdukcapil
1	10	2.06.01	02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Lancarnya pelaksanaan kegiatan operasional aparatur pemerintahan	12	12	344,300,000	12	378,730,000	12	416,603,000	12	458,263,300	12	504,089,630	12 Bln	2,101,985,930	Disdukcapil
1	10	2.06.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	71	71	51,100,000	71	56,210,000	71	61,831,000	71	68,014,100	7100%	74,815,510	71 orang	311,970,610	Disdukcapil
1	10	2.06.01	05	Progam Peningkatan Kapasitas Aparatur	Meningkatnya wawasan pegawai	-	4	32,500,000	4	35,750,000	4	39,325,000	4	43,257,500	4	47,583,250	4	198,415,750	Disdukcapil
1	10	2.06.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan keuangna, RKA SKPD dan DPA AKPD	2	2	49,080,000	2	53,988,000	2	59,386,800	2	65,325,480	2%	71,858,028	10	299,638,308	Disdukcapil
1	10	2.06.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki KTP - EL dan Akta Kelahiran	23	23	2,824,101,000	23	2,372,482,750	23	2,609,731,025	23	2,807,704,128	23	3,157,774,540	23	13,771,793,443	Disdukcapil
1	**11**			**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**															
1	**11**	**2.08.01**		**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				**9,291,024,475**		**10,220,126,923**		**11,642,139,615**		**12,806,353,576**		**14,086,988,934**		**58,046,633,522**	
				Pemberdayaan perempuan															**DPPKB PP dan PA**
1	11	2.08.01	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya kegiatan operasional kantor	12	12	1,226,109,475	12	1,348,720,423	12	1,483,592,465	12	1,631,951,711	12	1,795,146,882	60	7,485,520,956	**DPPKB PP dan PA**
1	11	2.08.01	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Lancarnya pelaksanaan kegiatan operasional aparatur pemerintahan	12	12	598,800,000	12	658,680,000	12	724,548,000	12	797,002,800	12	876,703,080	60	3,655,733,880	**DPPKB PP dan PA**
1	11	2.08.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	12	12	404,200,000	12	444,620,000	12	489,082,000	12	537,990,200	12	591,789,220	60	2,467,681,420	**DPPKB PP dan PA**
1	11	2.08.01	05	Progam Peningkatan Kapasitas Aparatur	Meningkatnya wawasan pegawai	-	3	23,000,000	3	25,300,000	3	27,830,000	3	30,613,000	3	33,674,300	3	140,417,300	DPPKB PP dan PA
1	11	2.08.01	15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak baik bidang kesehatan , pendidikan dan ekonomi serta sosial budaya	0	23	200,000,000	23	220,000,000	23	242,000,000	23	266,200,000	23	292,820,000	23	1,221,020,000	DPPKB PP dan PA
1	11	2.08.01	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Pemb. Responsif Gender	5	10	676,385,000	11	744,023,500	15	818,425,850	15	900,268,435	38	990,295,279	38	4,129,398,064	DPPKB PP dan PA
1	11	2.08.01	17	Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak baik bidang kesehatan , pendidikan dan ekonomi serta sosial budaya	23	23	640,000,000	23	704,000,000	23	774,400,000	23	851,840,000	23	937,024,000	23	3,907,264,000	DPPKB PP dan PA

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	11	2.08.01	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan bertambah jumlah peran dan posisi perempuan dalam jabatan politik dan publik	330 / 18	330 / 18	279,500,000	330 / 18	307,450,000	330 / 18	338,195,000	330 / 18	372,014,500	330 / 18	409,215,950	330 / 18	1,706,375,450	DPPKB PP dan PA
1	11	2.08.01	19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender	Peningkatan Pengarustamaan Gender dan anak	1	2	676,385,000	165 org, 1 lbg	744,023,500	165 org, 1 lbg	818,425,850	165 org, 1 lbg	900,268,435	165 org, 1 lbg	990,295,279		4,129,398,064	DPPKB PP dan PA
				Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera															
1	11	2.08.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tersedianya laporan	51.012 PE-KB, 65% , 23 Kec/ 604 desa , 65 % X PUS	56113 PE-KB, 23 Kec/ 604 desa , 67 %	246,940,000	61214 PE-KB,23 Kec /604 desa , 69 %	271,634,000	66135 PE-KB, 71% 23 Kec / 604 desa , 71 %	298,797,400	71236 PE-KB, 23 Kec / 604 desa , 73 %	328,677,140	76337 PE-KB,75 %, 23 Kec / 604 desa , 75 %	361,544,854	76337 PE-KB,75 %, 23 Kec / 604 desa , 75 %	1,507,593,394	DPPKB PP dan PA
1	11	2.08.01	15	Program Keluarga Berencana	Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam program KB	51.012 PE-KB, 65% , 23 Kec/ 604 desa , 65 % X PUS	51.012 PE-KB, 65% , 23 Kec/ 604 desa , 65 % X PUS	1,287,690,000	51.012 PE-KB, 65% , 23 Kec/ 604 desa , 65 % X PUS	1,416,459,000	51.012 PE-KB, 65% , 23 Kec/ 604 desa , 65 % X PUS	1,558,104,900	51.012 PE-KB, 65% , 23 Kec/ 604 desa , 65 % X PUS	1,713,915,390	51.012 PE-KB, 65% , 23 Kec/ 604 desa , 65 % X PUS	1,885,306,929	51.012 PE-KB, 65% , 23 Kec/ 604 desa , 65 % X PUS	7,861,476,219	DPPKB PP dan PA
1	11	2.08.01	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkaytnya Advokasi dan innformasi tentang kespro bagi remaja dalam rangka peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap remaja	36	36	94,680,000	36	104,148,000	36	114,562,800	36	126,019,080	36	138,620,988	36	578,030,868	DPPKB PP dan PA
1	11	2.08.01	17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Meningkatnya Pelayanan KB bagi peserta PUS dan WUS	23 Kec/604 desa, 23 Kec/604 desa , 23 Kec/604 desa	23 Kec/604 desa, 23 Kec/604 desa , 23 Kec/604 desa	400,000,000	23 Kec/604 desa,	440,000,000	23 Kec/604 desa,	484,000,000	23 Kec/604 desa,	532,400,000	23 Kec/604 desa,	585,640,000	23 Kec/604 desa,	2,442,040,000	DPPKB PP dan PA
1	11	2.08.01	18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	Meningkatnya kepedulian kelompok dan institusi masyarakat dalam program KB	23	23	299,335,000	23	329,268,500	23	362,195,350	23	398,414,885	23	438,256,374	23	1,827,470,109	DPPKB PP dan PA
1	11	2.08.01	19	Program promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Meningkatnya informasi kesehatan ibu dan anak melalui kegiatan promosi di masyarakat	23	23	541,000,000	23	595,100,000	23	654,610,000	23	720,071,000	23	792,078,100	23	3,302,859,100	DPPKB PP dan PA
1	11	2.08.01	20	Program Pengembangan pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Meningkatnya pelayanan informasi dan komunikasi KRR pada semua kelompok PIK rremaja	36 PIK remaja , 36 PIK remaja	36 PIK remaja , 36 PIK remaja	320,000,000	330 orang , 18 desa , 1 buah	352,000,000	330 orang , 18 desa , 1 buah	387,200,000	330 orang , 18 desa , 1 buah	425,920,000	330 orang , 18 desa , 1 buah	468,512,000	330 orang , 18 desa , 1 buah	1,953,632,000	DPPKB PP dan PA
1	11	2.08.01	21	Program Peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV / AID	Meningkatnya kesadaran generasi muda bebas dari pengaruh narkoba dan PMS	5	6	520,000,000	6	572,000,000	6	629,200,000	6	692,120,000	6	761,332,000	6	3,174,652,000	DPPKB PP dan PA
1	11	2.08.01	22	Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Meningkatnya pemahaman pentingnya BKB di masyarakat	23	23	362,000,000	23	398,200,000	23	438,020,000	23	481,822,000	23	530,004,200	23	2,210,046,200	DPPKB PP dan PA
1	11	2.08.01	23	Program Penyediaan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga	Meninngkatnya keterampilan kader dalam pengelolaan	23	23	345,000,000	23	379,500,000	23	417,450,000	23	459,195,000	23	505,114,500	23	2,106,259,500	DPPKB PP dan PA
	11	2.08.01		Program penyiapan Tenaga pendamping kelompok bina keluarga Balita	Meninngkatnya keterampilan kader dalam pengelolaan	23	23	0.00	-	0.00	-	400,000,000	23	440,000,000	23	484,000,000	23	1,324,000,000	DPPKB PP dan PA
1	11	2.08.01	24	Program Pengembangan model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Tersusunnya model dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan operasional BKB , Posyandu dan PAUD secara internal	1	1	150,000,000	1	165,000,000	1	181,500,000	1	199,650,000	1	219,615,000	1	915,765,000	DPPKB PP dan PA
1	**13**			**Urusan Sosial**						-		-		-		-		-	
1	**13**	**01**		**Dinas Sosial**				**5,977,200,000**		**6,574,920,000**		**7,232,412,000**		**7,955,653,200**		**8,751,218,520**		**36,491,403,720**	
1	13	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12	12	162,000,000	12	178,200,000	12	196,020,000	12	215,622,000	12	237,184,200	60	989,026,200	Dinas Sosial
1	13	01	'02	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	tersedianya sarana dan prasarana pegawai	12	12	81,500,000	12	89,650,000	12	98,615,000	12	108,476,500	12	119,324,150	60	497,565,650	Dinas Sosial
1	13	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	peningkatan kedisplinan pegawai	12	12	19,200,000	12	21,120,000	12	23,232,000	12	25,555,200	12	28,110,720	60	117,217,920	Dinas Sosial
1	13	01	05	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	peningkatan sumber daya aparatur	1	1	35,000,000	1	38,500,000	1	42,350,000	1	46,585,000	1	51,243,500	5	213,678,500	Dinas Sosial
1	13	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tersedianya laporan	2	2	79,500,000	2	87,450,000	2	96,195,000	2	105,814,500	2	116,395,950	10	485,355,450	Dinas Sosial

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	13	01	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Terlaksananya program pemberdayaan terhadap PMKS dan fungsi sosial masyarakat	100	100	700,000,000	100	770,000,000	100	847,000,000	100	931,700,000	100	1,024,870,000	100	4,273,570,000	Dinas Sosial
1	13	01	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya pemulihan kondisi dan fungsi sosial masyarakat	100	100	1,200,000,000	100	1,320,000,000	100	1,452,000,000	100	1,597,200,000	100	1,756,920,000	100	7,326,120,000	Dinas Sosial
1	13	01	17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Terlaksananya akses sosial terhadap penanganan anak terlantar	100	100	600,000,000	100	660,000,000	100	726,000,000	100	798,600,000	100	878,460,000	100	3,663,060,000	Dinas Sosial
1	13	01	18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Terlaksananya Pembinaan bagi penyandang cacat dan Eks.Trauma secara permanen	100	100	700,000,000	100	770,000,000	100	847,000,000	100	931,700,000	100	1,024,870,000	100	4,273,570,000	Dinas Sosial
1	13	01	19	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Meningkatnya pembinaan panti asuhan /panti jompo di Kab.Aceh Besar	100	100	2,100,000,000	100	2,310,000,000	100	2,541,000,000	100	2,795,100,000	100	3,074,610,000	100	12,820,710,000	Dinas Sosial
1	13	01	20	Program Pembinaan Eks.penyandang penyakit sosial (Eks.Napi,eks..PSK, eks.Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Meningkatnya pembinaan Para penyandang Penyakit sosial (Eks.Napi,Eks.PSK,eks.Narkoba dan penyakit sosial lainnya	100	100	100,000,000	100	110,000,000	100	121,000,000	100	133,100,000	100	146,410,000	100	610,510,000	Dinas Sosial
1	13	01	21	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Tercapainya Pelayanan JKA yang Memadai	100	100	200,000,000	100	220,000,000	100	242,000,000	100	266,200,000	100	292,820,000	100	1,221,020,000	Dinas Sosial
1	**14**			**Ketenagakerjaan**															
1	**14**	**01**		**Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi**				**3,895,355,500**		**4,284,891,050**		**4,713,380,155**		**5,184,718,171**		**5,703,189,988**		**23,781,534,863**	
2.	01.	01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	787,088,000	12	865,796,800	12	952,376,480	12	1,047,614,128	12	1,152,375,541	60	4,805,250,949	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	01.	01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Tugas Aparatur	12	12	1,136,000,000	12	1,249,600,000	12	1,374,560,000	12	1,512,016,000	12	1,663,217,600	60	6,935,393,600	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	01.	01.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai	12	12	23,100,000	12	25,410,000	12	27,951,000	12	30,746,100	12	33,820,710	60	141,027,810	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	01.	01.	15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Telatihnya tenaga kerja terampil	326	326	674,810,000	326	742,291,000	326	816,520,100	326	898,172,110	326	987,989,321	1630	4,119,782,531	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	01.	01.	16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase jumlah pengangguran terbuka	6,59	6,59	174,357,500	6,20	191,793,250	6,00	210,972,575	5,80	232,069,833	5,61	255,276,816	5,61	1,064,469,973	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	persentase penurunan angka pengangguran terbuka	10	10	100,000,000	10	110,000,000	10	121,000,000	10	133,100,000	10	146,410,000	70	610,510,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Program peningkatan ketrampilan Tenaga kerja	persentase penurunan angka pengangguran terbuka	30	30	1,000,000,000	30	1,100,000,000	30	1,210,000,000	30	1,331,000,000	30	1,464,100,000	180	6,105,100,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1	**15**			**Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**															
1	**15**	**01**		**Dinas Koperasi, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah**				**6,118,053,000**		**6,119,858,300**		**6,951,844,130**		**7,647,028,543**		**8,125,731,397**		**34,962,515,370**	
2.	15	01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor	12	12	798,088,000	12	877,896,800	12	965,686,480	12	1,062,255,128	12	1,168,480,641	60	4,872,407,049	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN UKM
2.	15	01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	12	12	1,126,000,000	12	1,238,600,000	12	1,362,460,000	12	1,498,706,000	12	1,648,576,600	60	6,874,342,600	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN UKM
2.	15	01.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	12	12	64,150,000	12	70,565,000	12	77,621,500	12	85,383,650	12	93,922,015	60	391,642,165	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN UKM
2.	15	01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	12	12	23,750,000	12	26,125,000	12	28,737,500	12	31,611,250	12	34,772,375	60	144,996,125	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN UKM
2.	15	01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya sistem Pelaporan Kinerja Akhir Tahun	12	12	8,400,000	12	9,240,000	12	10,164,000	12	11,180,400	12	12,298,440	60	51,282,840	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN UKM
2.	15	01.	15.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Formal Pangan	5,48 Milyar Rupiah	6 Milyar Rupiah	54,575,000	6,10 Milyar Rupiah	60,032,500	6,10 Milyar Rupiah	66,035,750	6,20 Milyar Rupiah	72,639,325	6,20 Milyar Rupiah	79,903,258	6,20 Milyar Rupiah	333,185,833	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN UKM

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.	15	01.	16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pengembnagan Kewirausaan dan Keunggulan UMKM	23		254,575,000	23	280,032,500	23	308,035,750	23	338,839,325	23	372,723,258	23	1,554,205,833	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN UKM
				Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah				500,000,000		200,000,000		700,000,000		770,000,000		847,000,000		3,017,000,000	
2.	15	01.	18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Peningkatan Lembaga Koperasi :													-	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN UKM
					Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD)	33 Unit	33 Unit	440,990,000	33 Unit	485,089,000	33 Unit	533,597,900	33 Unit	586,957,690	33 Unit	645,653,459	33 Unit	2,692,288,049	
					Jumlah Koperasi Non KUD	610 Unit	610 Unit		610 Unit		610 Unit		610 Unit		610 Unit		610 Unit	-	
2.	15	01.	16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah industri kecil dan menengah (IKM) :			247,525,000		272,277,500		299,505,250		329,455,775		362,401,353		1,511,164,878	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN UKM
				Program peningkatan kemampuan teknologi industri				2,600,000,000		2,600,000,000		2,600,000,000		2,860,000,000		2,860,000,000		13,520,000,000	
1	**16**			**Urusan Penanaman Modal**															
1	**16**	**01**		**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**				**3,044,229,000**		**3,348,651,900**		**3,873,517,090**		**4,241,868,799**		**4,647,055,679**		**19,155,322,468**	
2.	16	01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pengelolaan Administrasi Perkantoran	12	12	913,677,000	12	1,005,044,700	12	1,105,549,170	12	1,216,104,087	12	1,337,714,496	60	5,578,089,453	Dinas Penanaman Modal & PTSP
2.	16	01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Prasarana Aparatur	12	12	553,752,000	12	609,127,200	12	670,039,920	12	737,043,912	12	810,748,303	60	3,380,711,335	Dinas Penanaman Modal & PTSP
2.	16	01.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tertibnya Disiplin Aparatur Sipil Negara	12	12	24,000,000	12	26,400,000	12	29,040,000	12	31,944,000	12	35,138,400	60	146,522,400	Dinas Penanaman Modal & PTSP
2.	16	01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Sistem Pelayanan Terpadu	12	12	90,000,000	12	99,000,000	12	108,900,000	12	119,790,000	12	131,769,000	60	549,459,000	Dinas Penanaman Modal & PTSP
2.	16	01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem laporan capaian kinerja SKPD	12	12	7,800,000	12	8,580,000	12	9,438,000	12	10,381,800	12	11,419,980	60	47,619,780	Dinas Penanaman Modal & PTSP
4.	12.	01.	23.	Program Optimalisasi Penamfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya Media Informasi	12	12	190,000,000	12	209,000,000	12	229,900,000	12	252,890,000	12	278,179,000	60	1,159,969,000	Dinas Penanaman Modal & PTSP
4.	12.	01.	32.	Program Peningkatan Pelayanan dan Perizinan Usaha	Meningkatnya Pelayanan dan Perizinan usaha	12	12	50,000,000	12	55,000,000	12	60,500,000	12	66,550,000	12	73,205,000	60	305,255,000	Dinas Penanaman Modal & PTSP
4.	12.	01.	38.	Program Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu		23	23	115,000,000	23	126,500,000	23	139,150,000	23	153,065,000	23	168,371,500	23	702,086,500	Dinas Penanaman Modal & PTSP
2.	12.	0.	15.	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Terwujudnya Pameran Investasi	1	1	550,000,000	1	605,000,000	1	665,500,000	1	732,050,000	1	805,255,000	5	3,357,805,000	Dinas Penanaman Modal & PTSP
				Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat				0.00		0.00		190,000,000		190,000,000		190,000,000		570,000,000	Dinas Penanaman Modal & PTSP
2.	12.	0.	16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi	1	1	550,000,000	1	605,000,000	1	665,500,000	1	732,050,000	1	805,255,000	5	3,357,805,000	Dinas Penanaman Modal & PTSP
1	**17**			**Urusan Kebudayaan**															
1	**17**	**1.01.01**		**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**				**2,803,099,500**		**3,083,409,450**		**3,391,750,395**		**3,730,925,435**		**4,104,017,978**		**17,113,202,757**	
1	17	1.01.01	15	Program pengembangan nilai budaya	Meningkatnya partisipasi dan produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	-	1	30,000,000	2	33,000,000	2	36,300,000	2	39,930,000	2	43,923,000	2	183,153,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	17	1.01.01	16	Program pengelolaan kekayaan budaya	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kekayaan budaya daerah berbasis media desain	12	12	1,214,015,000	12	1,335,416,500	12	1,468,958,150	12	1,615,853,965	12	1,777,439,362	60	7,411,682,977	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	17	1.01.01	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnyan kualitas dan kuantitas fasilitasi pengembangan pengelolaan keragaman budaya daerah berbasis media desain dan IPTEK	12	12	1,509,084,500	12	1,659,992,950	12	1,825,992,245	12	2,008,591,470	12	2,209,450,616	60	9,213,111,781	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	17	1.01.01	18	Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya		-	1	50,000,000	1	55,000,000	2	60,500,000	2	66,550,000	2	73,205,000	2	305,255,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**18**			**Kepemudaan dan Olahraga**														-	

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	**18**	**3.02.01**		**Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**				**56,538,617,750**		**36,841,782,025**		**11,226,727,478**		**12,049,400,225**		**13,254,340,248**		**129,910,867,726**	
1	18	3.02.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi	12	12	1,009,899,750	12	1,110,889,725	12	1,221,978,698	12	1,344,176,567	12	1,478,594,224	60	6,165,538,964	Disparpora
1	18	3.02.01	02	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	tersedianya sarana dan prasarana pegawai	12	12	553,345,000	12	608,679,500	12	669,547,450	12	736,502,195	12	810,152,415	60	3,378,226,560	Disparpora
1	18	3.02.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	peningkatan kedisplinan pegawai	12	12	35,000,000	12	38,500,000	12	42,350,000	12	46,585,000	12	51,243,500	60	213,678,500	Disparpora
1	18	3.02.01	05	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	peningkatan sumber daya aparatur	12	12	15,000,000	12	16,500,000	12	18,150,000	12	19,965,000	12	21,961,500	60	91,576,500	Disparpora
1	18	3.02.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tersedianya laporan	2	2	5,000,000	2	5,500,000	2	6,050,000	2	6,655,000	2	7,320,500	10	30,525,500	Disparpora
1	18	3.02.01	15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Meningkatkan pengembangan keserasian kebijakan pemuda		60	300,000,000	65	330,000,000	72	363,000,000	76	399,300,000	80	439,230,000	80	1,831,530,000	Disparpora
1	18	3.02.01	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya peran serta organisasi pemuda	3	4	535,876,000	4	539,463,600	4	463,409,960	4	509,750,956	4	560,726,052	4	2,609,226,568	Disparpora
1	18	3.02.01	18	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Meningkatnya kesadaran pemuda terhadap bahaya narkoba	12	12	38,000,000	12	41,800,000	12	45,980,000	12	50,578,000	12	55,635,800	60	231,993,800	Disparpora
1	18	3.02.01	17	Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Meningkatnya Upaya Wirausaha dan kecakapan hidup pemuda	12	12	246,522,000	12	271,174,200	12	298,291,620	12	328,120,782	12	360,932,860	60	1,505,041,462	Disparpora
1	18	3.02.01	19	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Adanya kebijakan dalam pengelolaan manajemen olah raga		1	20,000,000	2	22,000,000	2	24,200,000	2	26,620,000	2	29,282,000	2	122,102,000	Disparpora
1	18	3.02.01	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Peningkatan pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga	12	12	1,970,250,000	12	2,167,275,000	12	2,384,002,500	12	2,622,402,750	12	2,884,643,025	12	12,028,573,275	Disparpora
1	18	3.02.01	21	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	12	12	51,809,725,000	12	31,690,000,000	12	5,689,767,250	12	5,958,743,975	12	6,554,618,373	12	101,702,854,598	Disparpora
1	**19**			**Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri**															
1	**19**	**4.02.09**		**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**				**4,805,765,500**		**5,286,342,050**		**5,814,976,255**		**6,396,473,881**		**7,036,121,269**		**29,339,678,954**	
1	19	4.02.09	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12	12	927,000,000	12	1,019,700,000	12	1,121,670,000	12	1,233,837,000	12	1,357,220,700	60	5,659,427,700	Kesbangpol
1	19	4.02.09	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor (tujuan/impact/outcome)	12	12	740,925,000	12	815,017,500	12	896,519,250	12	986,171,175	12	1,084,788,293	60	4,523,421,218	Kesbangpol
1	19	4.02.09	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	12	12	15,400,000	12	16,940,000	12	18,634,000	12	20,497,400	12	22,547,140	60	94,018,540	Kesbangpol
1	19	4.02.09	05	Program peningkatan sumber daya aparatur	Meningkatnya sumber daya aparatur	12	12	7,500,000	12	8,250,000	12	9,075,000	12	9,982,500	12	10,980,750	60	45,788,250	Kesbangpol
1	19	4.02.09	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD	2	2	9,150,000	2	10,065,000	2	11,071,500	2	12,178,650	2	13,396,515	10	55,861,665	Kesbangpol
1	19	4.02.09	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar	350	350	358,746,000	350	394,620,600	350	434,082,660	350	477,490,926	350	525,240,019	350	2,190,180,205	Kesbangpol
1	19	4.02.09	16	Program peningkatan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terlaksananya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	50	100	102,270,000	100	112,497,000	100	123,746,700	100	136,121,370	100	149,733,507	100	624,368,577	Kesbangpol
1	19	4.02.09	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	12	12	448,376,500	12	493,214,150	12	542,535,565	12	596,789,122	12	656,468,034	60	2,737,383,370	Kesbangpol
1	19	4.02.09	18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Pengembangan Wawasan Kebangsaan	12	12	529,980,000	12	582,978,000	12	641,275,800	12	705,403,380	12	775,943,718	60	3,235,580,898	Kesbangpol
1	19	4.02.09	19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	`	100	85,985,000	100	94,583,500	100	104,041,850	100	114,446,035	100	125,890,639	100	524,947,024	Kesbangpol
1	19	4.02.09	20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Terlaksananya Pencegahan terhadap Penyakit Masyarakat	12	12	405,225,000	12	445,747,500	12	490,322,250	12	539,354,475	12	593,289,923	12	2,473,939,148	Kesbangpol
1	19	4.02.09	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Terlaksananya Pendidikan Politik	23	23	1,175,208,000	23	1,292,728,800	23	1,422,001,680	23	1,564,201,848	23	1,720,622,033	23	7,174,762,361	Kesbangpol

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	**20**			**Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**															
1	**20**			**Inspektorat**				**6,287,375,100**		**5,816,112,610**		**6,397,723,871**		**7,037,496,258**		**7,741,245,884**		**33,279,953,723**	
1	20		01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12	12	385,000,000	12	423,500,000	12	465,850,000	12	512,435,000	12	563,678,500	12	2,350,463,500	Inspektorat
1	20		02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	1	1	180,735,000	1	198,808,500	1	218,689,350	1	240,558,285	1	264,614,114	1	1,103,405,249	Inspektorat
1	20		03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Terlaksananya pengadaan dinas aparatur	42	42	8,400,000	45	9,240,000	45	10,164,000	45	11,180,400	45	12,298,440	45	51,282,840	Inspektorat
1	20		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan	21	21	165,000,000	23	181,500,000	25	199,650,000	27	219,615,000	29	241,576,500	32	1,007,341,500	Inspektorat
1	20		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya pelaporan keuangan smesteran	2	2	13,200,000	2	14,520,000	2	15,972,000	2	17,569,200	2	19,326,120	10	80,587,320	Inspektorat
1	20		20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaa Kebijakan KDH	Terlaksananya pengawasan dan tindak lanjut pengawasan	500	500	5,240,000,000	500	4,664,000,000	500	5,130,400,000	500	5,643,440,000	500	6,207,784,000	500	26,885,624,000	Inspektorat
1	20		21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang profesional	20	20	33,940,100	20	37,334,110	20	41,067,521	20	45,174,273	20	49,691,700	20	207,207,705	Inspektorat
1	20		22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tersusunnya program kerja pengawasan tahunan	57	57	261,100,000	57	287,210,000	57	315,931,000	57	347,524,100	57	382,276,510	57	1,594,041,610	Inspektorat
1	**20**	**3**		**Sekretariat Daerah**				**37,894,377,479**		**39,208,297,771**		**43,000,908,228**		**47,300,999,051**		**51,890,057,704**		**219,294,640,233**	
1	20	03	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12	12	8,040,623,800	12	8,100,000,000	12	8,910,000,000	12	9,801,000,000	12	10,781,100,000	60	45,632,723,800	Setdakab (Bag.Umum)
1	20		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas kedinasan	12	12	9,749,103,000	12	9,749,103,000	12	10,724,013,300	12	11,796,414,630	12	12,976,056,093	60	54,994,690,023	Setdakab (Bag.Umum)
1	20		23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya kemampuan SDM dalam Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Masyarakat serta pemanfaatan	10	10	330,000,000	15	363,000,000	15	399,300,000	15	439,230,000	15	483,153,000	80	2,014,683,000	Setdakab (Bag. Adm. Pembangunan, Perekonomian dan Penanaman Modal)
1	20			Program Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah	Terlaksananya pemantauan dan kajian terhadap informasi harga Kebutuhan Pangan Kabupaten Aceh Besar	23	23	300,000,000	23	330,000,000	23	363,000,000	23	399,300,000	23	439,230,000	23	1,831,530,000	Setdakab (Bag. Adm. Pembangunan, Perekonomian dan Penanaman Modal)
1	20			Program Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kemampuan SDM dan keterampilan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	13	10	270,050,000	10	297,055,000	10	326,760,500	10	359,436,550	10	395,380,205	63	1,648,682,255	Setdakab (Bag. Adm. Pembangunan, Perekonomian dan Penanaman Modal)
1	20		15	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.	Terlaksanannya pengembangan dan potensi unggulan yang ada di wilayah kabupaten Aceh Besar.	1	2	261,100,000	2	287,210,000	2	315,931,000	2	347,524,100	2	382,276,510	11	1,594,041,610	Setdakab (Bag. Adm. Pembangunan, Perekonomian dan Penanaman Modal)
1	20		15	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Terlaksananya pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaku usaha di Kabupaten Aceh Besar	50	60	150,000,000	60	165,000,000	60	181,500,000	80	199,650,000	100	219,615,000	100	915,765,000	Setdakab (Bag. Adm. Pembangunan, Perekonomian dan Penanaman Modal)
1	20			Program Peningkatan kegiatan pemantauan,pembinaan,pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Persentase Terlaksananya pemantauan dan pelaporan terhadap data potensi daerah	40	50	350,000,000	50	385,000,000	50	423,500,000	80	465,850,000	100	512,435,000	100	2,136,785,000	Setdakab (Bag. Adm. Pembangunan, Perekonomian dan Penanaman Modal)
1	20		16	Program kerjasama pembangunan	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber dana.	23	23	524,810,000	23	577,291,000	23	635,020,100	23	698,522,110	23	768,374,321	23	3,204,017,531	Setdakab (Bag. Adm. Pembangunan, Perekonomian dan Penanaman Modal)

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	20			Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah.	Persentase Terlaksananya kegiatan pengendalian pengembalian dana PER	40	30	44,450,000	50	48,895,000	50	53,784,500	80	59,162,950	100	65,079,245	100	271,371,695	Setdakab (Bag. Adm. Pembangunan, Perekonomian dan Penanaman Modal)
1	20			Program sumber daya energi distribusi kebutuhan pokok	Persentase Terlaksananya pelayanan distribusi raskin sesuai sasaran penerima manfaat.	50	60	346,875,000	60	381,562,500	60	419,718,750	80	461,690,625	100	507,859,688	100	2,117,706,563	Setdakab (Bag. Adm. Pembangunan, Perekonomian dan Penanaman Modal)
1	20		16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya pelayanan Dinas kepala daerah	23	23	952,103,350	23	1,047,313,685	23	1,152,045,054	23	1,267,249,559	23	1,393,974,515	23	5,812,686,162	Setdakab (Bag.Humas)
1	20			Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Media Yang Menyebarkan Informasi Pemerintah Kota	40	30	1,615,100,000	30	1,776,610,000	30	1,954,271,000	80	2,149,698,100	100	2,364,667,910	100	9,860,347,010	Setdakab (Bag.Humas)
1	20			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase Naskah Pidato KDH yang harus disusun	35	50	646,805,000	50	711,485,500	50	782,634,050	80	860,897,455	100	946,987,201	100	3,948,809,206	Setdakab (Bag.Humas)
1	20			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Menurunnya Kasus yang terjerat hukum	4	4	334,178,700	2	367,596,570	2	404,356,227	0	444,791,850	0	489,271,035	0	2,040,194,381	Setdakab (Bag. Hukum)
1	20			Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatnya Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang profesional	17	20	33,940,100	20	37,334,110	23	41,067,521	23	45,174,273	26	49,691,700	26	207,207,705	Setdakab (Bag. Hukum)
1	20			Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan melalui website Hukum Kabupaten Aceh Besar	72	72	93,285,850	80	102,614,435	90	112,875,879	100	124,163,466	110	136,579,813	120	569,519,443	Setdakab (Bag. Hukum)
1	20			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang dihasilkan	367	367	1,616,222,000	400	1,777,844,200	400	1,955,628,620	350	2,151,191,482	350	2,366,310,630	350	9,867,196,932	Setdakab (Bag. Hukum)
1	20			Program Peningkatan Implementasi Hukum Bagi Aparatur dan Publik	Meningkatnya Pemahaman Aparat Pemerintahan dan Publik terhadap Produk Hukum Daerah	50	50	540,000,000	65	594,000,000	70	653,400,000	75	718,740,000	80	790,614,000	80	3,296,754,000	Setdakab (Bag. Hukum)
1	20			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase Kejelasan dan kepastian hukum tapal batas gampong dalam Kabupaten Aceh Besar	16.7	16.7	6,479,728,778	20	6,500,000,000	40	7,150,000,000	45	7,865,000,000	50	8,651,500,000	50	36,646,228,778	Setdakab (Bag. Tata Pemerintahan)
1	20			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan.	Terlaksananya penyusunan LKPJ,LPPD, siapkan LPPD dan ILPPD Kabupaten Aceh Besar	60	65	214,243,701	70	235,668,071	80	259,234,878	90	285,158,366	100	313,674,203	100	1,307,979,219	Setdakab (Bag. Tata Pemerintahan)
1	20		19	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tertibnya administrasi keuangan desa	60	70	40,000,000	80	44,000,000	90	48,400,000	100	53,240,000	100	58,564,000	100	244,204,000	Setdakab (Bag. Tata Pemerintahan)
1	20		03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	12	12	116,150,000	12	127,765,000	12	140,541,500	12	154,595,650	12	170,055,215	60	709,107,365	Setdakab (Bag. Organisasi)
1	20		04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan	12	12	318,500,000	12	350,350,000	12	385,385,000	12	423,923,500	12	466,315,850	60	1,944,474,350	Setdakab (Bag. Organisasi)
1	20		06	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Pelaporan Akhir Tahun Setdakab	4	4	145,380,000	4	159,918,000	4	175,909,800	4	193,500,780	4	212,850,858	20	887,559,438	Setdakab (Bag. Organisasi)
1	20		17	Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur	Terciptanya analisis beban kerja dilingkungan pemda Kab. Aceh Besar	37	37	79,380,000	37	87,318,000	37	96,049,800	37	105,654,780	37	116,220,258	37	484,622,838	Setdakab (Bag. Organisasi)
1	20		21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terberdayanya kelembagaan secara optimal	6	6	2,197,545,000	6	2,417,299,500	6	2,659,029,450	6	2,924,932,395	6	3,217,425,635	30	13,416,231,980	Setdakab (Bag. Kesra)
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	peningkatan perencanaan pembangunan ekonomi			559,346,700		559,346,700		559,346,700		615,281,370		615,281,370		2,908,602,840	Setdakab (Bag. Kesra)
				Program penataan daerah otonomi baru	tertibnya administrasi gampong/desa dan kecamatan dalam wilayah kabupaten aceh besar			489,966,500		489,966,500		489,966,500		538,963,150		538,963,150		2,547,825,800	Setdakab (Bag. Kesra)
				Program peningkatan pencapaian standar mutu pendidikan	tersedianya pelayan UKS di kabupaten dan kecamatan			232,880,000		232,880,000		232,880,000		256,168,000		256,168,000		1,210,976,000	Setdakab (Bag. Kesra)

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	20			Program Pengembangan dan Peningkatan SDM Sosial Masyarakat	Terbantunya Biaya Pendidikan Masyarakat	12	12	287,010,000	12	315,711,000	12	347,282,100	12	382,010,310	12	420,211,341	60	1,752,224,751	Setdakab (Bag. Kesra)
1	20			Pemberian Fasilitas Sarana dan Prasarana dan Dalam Rangka Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah bagi Mesjid dan Meunasah	12	12	535,600,000	12	589,160,000	12	648,076,000	12	712,883,600	12	784,171,960	60	3,269,891,560	Setdakab (Bag. Kesra)
1	**20**	**4.02.04**		**Sekretariat DPRK**				**29,028,087,940**		**29,518,799,000**		**32,580,678,900**		**35,827,746,790**		**39,399,521,469**		**166,354,834,099**	
1	20	4.02.04	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah	12	12	5,660,580,940	12	5,700,000,000	12	6,270,000,000	12	6,897,000,000	12	7,586,700,000	60	32,114,280,940	Sekretariat DPRK
1	20	4.02.04	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terbangunnya sarana dan prasarana kantor DPRk, terpenuhinya kenyamanan bekerja anggt DPRK serta peningkatan pelayanan kepada anggota DPRK	12	12	2,197,632,000	12	2,300,000,000	12	2,530,000,000	12	2,783,000,000	12	3,061,300,000	60	12,871,932,000	Sekretariat DPRK
1	20	4.02.04	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	12	12	469,600,000	12	500,000,000	12	550,000,000	12	605,000,000	12	665,500,000	60	2,790,100,000	Sekretariat DPRK
				Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur				0.00		0.00		110,000,000		110,000,000		110,000,000		330,000,000	Sekretariat DPRK
1	20	4.02.04	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Lakip dan Penetapan Kinerja	2	2	17,090,000	2	18,799,000	2	20,678,900	2	22,746,790	2	25,021,469	60	104,336,159	Sekretariat DPRK
1	20	4.02.04		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terbahasnya Rancangan Qanun yang diajukan oleh SKPD dan terserapnya aspirasi masyarakat melalui DPRK	50%	60%	20,683,185,000	70%	21,000,000,000	80%	23,100,000,000	90%	25,410,000,000	100%	27,951,000,000	100%	118,144,185,000	Sekretariat DPRK
1	**20**	**05**		**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**				**28,975,610,701**		**29,413,983,101**		**29,896,192,741**		**32,885,812,015**		**33,469,285,680**		**154,640,884,238**	
				Program pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran			21,473,510,301		21,473,510,301		21,473,510,301		23,620,861,331		23,620,861,331		111,662,253,565	
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	peningkatan sarana dan prasarana aparatur			2,471,796,400		2,471,796,400		2,471,796,400		2,718,976,040		2,718,976,040		12,853,341,280	
				Program Peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin dan motivasi kerja aparatur			80,630,000		80,630,000		80,630,000		88,693,000		88,693,000		419,276,000	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			552,200,000		552,200,000		552,200,000		607,420,000		607,420,000		2,871,440,000	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya sistem pelaporan kinerja keuangan			13,750,000		13,750,000		13,750,000		15,125,000		15,125,000		71,500,000	
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	12	12	3,905,899,000	12	4,296,488,900	12	4,726,137,790	12	5,198,751,569	12	5,718,626,726	12	23,845,903,985	BPKD
				Program Peningkatan Penerimaan Daerah	Tercapainya peningkatan penerimaan daerah	12	12	407,825,000	12	448,607,500	12	493,468,250	12	542,815,075	12	597,096,583	12	2,489,812,408	BPKD
				Program Evaluasi dan Pengendalian	Terlaksananya Evaluasi dan Pengendalian Keuangan Daerah	59	59	70,000,000	59	77,000,000	59	84,700,000	59	93,170,000	59	102,487,000	59	427,357,000	BPKD
1	**20**	**1.06.01**		**Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah**				**12,979,677,000**		**8,059,259,250**		**8,815,185,175**		**9,646,703,693**		**10,611,374,062**		**50,112,199,179**	
1	20	1.06.01	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12	12	6,171,259,500	12	620,000,000	12	682,000,000	12	750,200,000	12	825,220,000	60	9,048,679,500	SATPOL PP & WH
1	20	1.06.01	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor (tujuan/impact/outcome)	12	12	754,894,000	12	830,383,400	12	913,421,740	12	1,004,763,914	12	1,105,240,305	60	4,608,703,359	SATPOL PP & WH
1	20	1.06.01	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	12	12	768,900,000	12	845,790,000	12	930,369,000	12	1,023,405,900	12	1,125,746,490	60	4,694,211,390	SATPOL PP & WH
1	20	1.06.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD	12	12	5,850,000	12	6,435,000	12	7,078,500	12	7,786,350	12	8,564,985	60	35,714,835	SATPOL PP & WH
1	20	1.06.01	05	Program peningkatan sumber daya aparatur	Meningkatnya SDM Aparatur	12	12	7,000,000	12	7,700,000	12	8,470,000	12	9,317,000	12	10,248,700	60	42,735,700	SATPOL PP & WH
1	20	1.06.01	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar	12	12	1,312,487,500	12	1,443,736,250	12	1,588,109,875	12	1,746,920,863	12	1,921,612,949	60	8,012,867,436	SATPOL PP & WH
1	20	1.06.01	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terlaksananya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	12	12	2,503,336,000	12	2,753,669,600	12	3,029,036,560	12	3,331,940,216	12	3,665,134,238	60	15,283,116,614	SATPOL PP & WH

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	20	1.06.01	19	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	50	80	500,000,000	82	550,000,000	85	605,000,000	90	665,500,000	92	732,050,000	95	3,052,550,000	SATPOL PP & WH
1	20	1.06.01	23	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Pemilu dengan lancar	23	23	500,000,000	23	500,000,000	23	500,000,000	23	500,000,000	23	550,000,000	23	2,550,000,000	SATPOL PP & WH
1	20	1.06.01	16	Program Peningkatan pelaksanaan, sosialisasi pengawasan dan pembinaan Qanun dan peraturan Bupati	Terlaksananya pemantauan,pembinaan,pengawasan terhadap investor	23	23	455,950,000	23	501,545,000	23	551,699,500	23	606,869,450	23	667,556,395	23	2,783,620,345	SATPOL PP & WH
1	**20**	**4.02.07**		**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**				**7,488,722,800**		**8,233,095,080**		**9,051,904,588**		**9,957,095,047**		**10,947,854,551**		**45,678,672,066**	
1	20	4.02.07	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya kegiatan operasional kantor	12	12	1,169,624,800	12	1,286,587,280	12	1,415,246,008	12	1,556,770,609	12	1,712,447,670	60	7,140,676,366	BKPSDM
1	20	4.02.07	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Proses Mobilitas Pelaksanaan Tugas Kantor Lebih Baik	12	12	842,800,000	12	927,080,000	12	1,019,788,000	12	1,121,766,800	12	1,233,943,480	60	5,145,378,280	BKPSDM
1	20	4.02.07	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur	1	1	161,163,000	2	177,279,300	2	195,007,230	2	214,507,953	2	235,958,748	9	983,916,231	BKPSDM
1	20	4.02.07	04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terpenuhinya Tenaga Dalam Penyusunan Lakip dan Rencana Kerja	12	12	2,543,895,000	12	2,798,284,500	12	3,078,112,950	12	3,385,924,245	12	3,724,516,670	60	15,530,733,365	BKPSDM
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan PNS dalam Penyusunan renstra SKPD			45,000,000		45,000,000		45,000,000		49,500,000		49,500,000		234,000,000	
1	20	4.02.07	30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tersedianya Tenaga Barang dan Jasa	80	80	1,426,240,000	80	1,568,864,000	80	1,725,750,400	100	1,898,325,440	100	2,088,157,984	100	8,707,337,824	BKPSDM
1	20	4.02.07		Program pendidikan kedinasan	Terbinanya Sumberdaya aparatur	-	57	1,300,000,000	57	1,430,000,000	57	1,573,000,000	57	1,730,300,000	57	1,903,330,000	57	7,936,630,000	BKPSDM
1	**20**	**12**		**Kecamatan**				**15,298,891,355**		**14,870,780,491**		**18,511,658,540**		**17,993,644,394**		**22,399,106,833**		**89,074,081,611**	
1	20	12	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya kegiatan operasional kantor	1	1	9,982,383,755	1	10,980,622,131	1	12,078,684,344	1	13,286,552,778	1	14,615,208,056	5	60,943,451,063	23 Kecamatan
1	20	12	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lancarnya pelaksanaan kegiatan operasional aparatur pemerintahan	1	1	1,930,022,000	1	2,123,024,200	1	2,335,326,620	1	2,568,859,282	1	2,825,745,210	5	11,782,977,312	23 Kecamatan
1	20	12	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	1	1	561,200,000	1	617,320,000	1	679,052,000	1	746,957,200	1	821,652,920	5	3,426,182,120	23 Kecamatan
1	20	12		Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan	Tercapainya percepatan pelayanan kepada masyarakat	1	1	451,655,600	1	496,821,160	1	546,503,276	1	601,153,604	1	661,268,964	5	2,757,402,604	23 Kecamatan
				Program Pembinaan Syariat Islam	Terlaksananya penegakan dan pengamalan syariat islam			1,780,000,000				2,153,800,000				2,606,098,000		6,539,898,000	23 Kecamatan
1	20	12		Program Pembinaan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan	Tercapainya pelaksanaan pemerintahan gampong yang optimal	1	1	593,630,000	1	652,993,000	1	718,292,300	1	790,121,530	1	869,133,683	5	3,624,170,513	23 Kecamatan
1	**20**			**Urusan Syariat Islam**															
1	**20**	**4.02.33**		**Dinas Syariat Islam**				**23,255,121,500**		**25,538,633,650**		**25,938,697,015**		**30,901,746,717**		**31,385,823,388**		**137,020,022,270**	
1	20	4.02.33	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12	12	577,683,000	12	635,451,300	12	698,996,430	12	768,896,073	1 Thn	845,785,680	60	3,526,812,483	Dinas Syariat Islam
1	20	4.02.33	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	12	12	145,150,000	12	159,665,000	12	175,631,500	12	193,194,650	12 Bln	212,514,115	60	886,155,265	Dinas Syariat Islam
1	20	4.02.33	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedia pakaian dinas bagi PNS	39	39	17,500,000	39	19,250,000	39	21,175,000	39	23,292,500	39 Orang	25,621,750	195	106,839,250	Dinas Syariat Islam
1	20	4.02.33	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Tersedianya Tenaga Pegawai yang memahami Perundang-Undangan	4	4	37,500,000	4	41,250,000	4	45,375,000	4	49,912,500	4 Keg	54,903,750	20	228,941,250	Dinas Syariat Islam
1	20	4.02.33	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Administrasi Keuangan	2	2	8,720,000	2	9,592,000	2	10,551,200	2	11,606,320	2 Dokumen Laporan	12,766,952	10	53,236,472	Dinas Syariat Islam
1	20	4.02.33		Program Pembinaan Syariat Islam	Terlaksananya pembinaan syariat Islam	4	4	10,917,968,500	5	11,967,765,350	5	11,010,741,885	6	14,480,996,074	6	13,322,997,681	6	61,700,469,489	**Dinas syariat islam**
1	20	4.02.33		Program Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam (Pembinaan Aqidah, Ibadah, Akhlak dan Syiar Islam)	Terlaksananya pembinaan Syariat Islam secara maksimal	70	70	10,596,600,000	75	11,656,260,000	75	12,821,886,000	80	14,104,074,600	80	15,514,482,060	80	64,693,302,660	**Dinas syariat islam**
1	20	4.02.33		Program Pembinaan Lembaga Pendidikan Agama	Terwujudnya Pembinaan LPI	23	24	800,000,000	25	880,000,000	26	968,000,000	27	1,064,800,000	27	1,171,280,000	27	4,884,080,000	Dinas Syariat Islam
1	20	4.02.33		Program Keserasian Kebijakan Pelaksanaan Syariat Islam	Terciptanya regulasi islam	1	1	154,000,000	2	169,400,000	3	186,340,000	3	204,974,000	3	225,471,400	3	940,185,400	Dinas syariat islam
4	**20**	**4.02.35**		**Majelis Permusyawaratan Ulama**				**2,672,214,200**		**2,939,435,620**		**3,233,379,182**		**3,556,717,100**		**3,912,388,810**		**16,314,134,912**	
4	20	4.02.35	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	12	12	1,387,873,400	12	1,526,660,740	12	1,679,326,814	12	1,847,259,495	12	2,031,985,445	60	8,473,105,894	Sekretariat MPU

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	20	4.02.35	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'Lancarnya pelaksanaan kegiatan operasional aparatur pemerintahan	12	12	76,540,800	12	84,194,880	12	92,614,368	12	101,875,805	12	112,063,385	60	467,289,238	Sekretariat MPU
4	20	4.02.35	3	Program Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	12	12	70,300,000	12	77,330,000	12	85,063,000	12	93,569,300	12	102,926,230	60	429,188,530	Sekretariat MPU
4	20	4.02.35	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur	12	12	35,000,000	12	38,500,000	12	42,350,000	12	46,585,000	12	51,243,500	60	213,678,500	Sekretariat MPU
4	20	4.02.35	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Administrasi Keuangan	12	12	15,000,000	12	16,500,000	12	18,150,000	12	19,965,000	12	21,961,500	60	91,576,500	Sekretariat MPU
4	20	4.02.35	31	Program pembinaan syariat islam	Terlaksanana pembinaan kader ulama	46	92	155,090,000	138	170,599,000	184	187,658,900	230	206,424,790	276	227,067,269	276	946,839,959	Sekretariat MPU
4	20	4.02.35	46	Program peningkatan sumber daya dan peran ulama	Meningkatnya pemahaman aqidah masyarakat	11	23	409,410,000	23	450,351,000	23	495,386,100	23	544,924,710	23	599,417,181	23	2,499,488,991	Sekretariat MPU
4	20	4.02.35		Program peningkatan dan pembinaan kemaslahatan umat	Terlaksananya Pembinaan kemaslahatan umat	766	766	523,000,000	850	575,300,000	905	632,830,000	960	696,113,000	960	765,724,300	960	3,192,967,300	Sekretariat MPU
1	**20**	**4.02.36**		**Majelis Adat Aceh**				**1,574,317,250**		**1,731,748,975**		**1,904,923,873**		**2,095,416,260**		**2,304,957,886**		**9,611,364,243**	
1	20	4.02.36	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1	1	724,318,250	1	796,750,075	1	876,425,083	1	964,067,591	1	1,060,474,350	1	4,422,035,348	Sekretariat MAA
1	20	4.02.36	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	1	1	61,969,000	1	68,165,900	1	74,982,490	1	82,480,739	1	90,728,813	1	378,326,942	Sekretariat MAA
1	20	4.02.36	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	1	1	7,000,000	1	7,700,000	1	8,470,000	1	9,317,000	1	10,248,700	1	42,735,700	Sekretariat MAA
1	20	4.02.36	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya sumber daya aparatur	-	2	7,500,000	2	8,250,000	2	9,075,000	2	9,982,500	2	10,980,750	2	45,788,250	Sekretariat MAA
1	20	4.02.36	45	Program Pengembangan Muamalah	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pelaksanaan Muamalah	12	12	243,530,000	12	267,883,000	12	294,671,300	12	324,138,430	12	356,552,273	60	1,486,775,003	Sekretariat MAA
1	20	4.02.36	46	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Majelis Adat Aceh	Adanya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan adat istiadat	23	23	320,000,000	23	352,000,000	23	387,200,000	23	425,920,000	23	468,512,000	23	1,953,632,000	Sekretariat MAA
1	20	4.02.36		Program peningkatan dan pembinaan kemaslahatan umat	Meningkatnya pembinaan hukum syariah kepada umat	23	23	210,000,000	23	231,000,000	23	254,100,000	23	279,510,000	23	307,461,000	23	1,282,071,000	Sekretariat MAA
1	**20**	**4.02.37**		**Majelis Pendidikan Daerah**				**1,025,135,000**		**1,127,648,500**		**1,240,413,350**		**1,364,454,685**		**1,500,900,154**		**6,258,551,689**	
1	20	4.02.37	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1	1	587,180,000	1	645,898,000	1	710,487,800	1	781,536,580	1	859,690,238	5	3,584,792,618	Sekretariat MPD
1	20	4.02.37	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	1	1	90,730,000	1	99,803,000	1	109,783,300	1	120,761,630	1	132,837,793	5	553,915,723	Sekretariat MPD
1	20	4.02.37	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	1	1	5,200,000	1	5,720,000	1	6,292,000	1	6,921,200	1	7,613,320	5	31,746,520	Sekretariat MPD
1	20	4.02.37	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya sumber daya yang handal	1	1	7,500,000	1	8,250,000	1	9,075,000	1	9,982,500	1	10,980,750	5	45,788,250	Sekretariat MPD
1	20	4.02.37	43	Program Peningkatan Peran dan Fungsi Majelis Pendidikan Daerah	Meningkatnya peran majelis pendidikan daerah	1	1	145,575,000	1	160,132,500	1	176,145,750	1	193,760,325	1	213,136,358	5	888,749,933	Sekretariat MPD
1	20	4.02.37	47	Program Peningkatan pencapaian Standar Mutu Pendidikan	Meningkatnya mutu pendidikan	1	1	188,950,000	1	207,845,000	1	228,629,500	1	251,492,450	1	276,641,695	5	1,153,558,645	Sekretariat MPD
1	**20**	**39**		**Sekretariat Baitul Mal**				**1,688,204,500**		**1,720,264,000**		**1,755,529,450**		**1,931,082,395**		**1,973,753,590**		**9,068,833,935**	
				Program Pembinaan Syariat Islam	Tercapainya pembinaan dan pengembangan Syariat Islam	12	12	320,595,000	12	352,654,500	12	387,919,950	12	426,711,945	12	469,383,140	60	1,957,264,535	Baitul Mal
		urusan penunjang pemerintahan																-	
				Program pelayanan administrasi perkantoran	Tercapainya pelayanan perkantoran			898,731,000		898,731,000		898,731,000		988,604,100		988,604,100		4,673,401,200	
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tercapainya pelayanan perkantoran			426,342,000		426,342,000		426,342,000		468,976,200		468,976,200		2,216,978,400	
				Program Peningkatan disiplin aparatur	meningkatnya disiplin aparatur			18,200,000		18,200,000		18,200,000		20,020,000		20,020,000		94,640,000	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			21,750,000		21,750,000		21,750,000		23,925,000		23,925,000		113,100,000	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	meningkatnya pelayanan perkantoran			2,586,500		2,586,500		2,586,500		2,845,150		2,845,150		13,449,800	
4	**20**	**08**		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**				**7,833,014,000**		**8,165,975,400**		**8,438,572,940**		**8,637,430,234**		**9,497,173,257**		**42,572,165,831**	
4	20	08	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	12	12	940,500,000	12	1,034,550,000	12	1,138,005,000	12	1,251,805,500	12	1,376,986,050	60	5,741,846,550	BPBD
4	20	08	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah	12	12	540,514,000	12	594,565,400	12	654,021,940	12	719,424,134	12	791,366,547	60	3,299,892,021	BPBD
4	20	08	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya peningkatan disiplin aparatur	12	12	21,600,000	12	23,760,000	12	26,136,000	12	28,749,600	12	31,624,560	60	131,870,160	BPBD
4	20	08	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	terlaksananya peningkatan kompetensi SDM aparatur	12	12	29,400,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	60	189,400,000	BPBD

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	20	08	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	tersedianya laporan	12	-	0.00	12	42,000,000	12	46,200,000	12	50,820,000	12	55,902,000	48	194,922,000	BPBD
4	20	08	41	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban resiko bencana alam	Meningkatnya penyebaran informasi kebencanaan dan meminimalisirkan dampak bencana serta meningkatnya ketahanan masyarakat	Pos Damkar 8 pos damkar	Pos Damkar 2 pos damkar	2,356,000,000	Pos Damkar 2 pos damkar	2,391,600,000	Pos Damkar 2 pos damkar	2,550,760,000	Pos Damkar 2 pos damkar	2,535,836,000	Pos Damkar 2 pos damkar	2,789,419,600	Pos Damkar 2 pos damkar	12,623,615,600	BPBD
4	20	08	49	Program kedaruratan dan logistik kebencanaan	Terlaksananya kegiatan tanggap darurat bencana dan pendistribusian logistik	Mobil Damkar 12 ,	Mobil Damkar 3, Mobi Tangki Air 3 ,	1,165,000,000	Mobil Damkar 3 , Mobi Tangki Air 3 ,	1,181,500,000	Mobil Damkar 3 , Mobi Tangki Air 3 ,	1,119,650,000	Mobil Damkar 3 , Mobi Tangki Air 3 ,	1,150,615,000	Mobil Damkar 3 , Mobi Tangki Air 3 ,	1,265,676,500	Mobil Damkar 3 , Mobi Tangki Air 3 ,	5,882,441,500	BPBD
4	20	08	48	Program pemulihan dampak bencana	Terlaksananya pemulihan akibat dampak bencana	11 Reahabilitasi infrastruktur yg rusak akibat bencana dan Mitigasi struktural 3	10 Reahabilitasi infrastruktur yg rusak akibat bencana akibat bencana dan Mitigasi struktural 7	2,780,000,000	10 Reahabilitasi infrastruktur yg rusak akibat bencana akibat bencana dan Mitigasi struktural 7	2,858,000,000	10 Reahabilitasi infrastruktur yg rusak akibat bencana akibat bencana dan Mitigasi struktural 7	2,863,800,000	10 Reahabilitasi infrastruktur yg rusak akibat bencana akibat bencana dan Mitigasi struktural 7	2,860,180,000	10 Reahabilitasi infrastruktur yg rusak akibat bencana akibat bencana dan Mitigasi struktural 7	3,146,198,000	10 Reahabilitasi infrastruktur yg rusak akibat bencana akibat bencana dan Mitigasi struktural 7	14,508,178,000	BPBD
1	**21**			**Ketahanan Pangan**															
1	**21**	**1.22.01**		**Dinas Pangan**				**4,656,480,802**		**5,122,128,882**		**5,634,341,770**		**5,838,606,418**		**6,422,467,060**		**27,674,024,933**	
2.	21	01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	1,190,626,650	12	1,309,689,315	12	1,440,658,247	12	1,584,724,071	12	1,743,196,478	60	7,268,894,761	Dinas Pangan
2.	21	01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12	12	359,495,152	12	395,444,667	12	434,989,134	12	478,488,047	12	526,336,852	60	2,194,753,852	Dinas Pangan
2.	21	01.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	12	12	60,000,000	12	66,000,000	12	72,600,000	12	79,860,000	12	87,846,000	60	366,306,000	Dinas Pangan
2.	21	01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	12	12	85,300,000	12	93,830,000	12	103,213,000	12	113,534,300	12	124,887,730	60	520,765,030	Dinas Pangan
2.	21	01.	15.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan energi			2,961,059,000		3,257,164,900		3,582,881,390		3,582,000,000		3,940,200,000		17,323,305,290	Dinas Pangan
1	**22**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**															
1	**22**	**1.22.01**		**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong**				**17,008,720,950**		**18,709,593,045**		**20,580,552,350**		**22,638,607,584**		**26,802,468,343**		**105,739,942,272**	
1	22	1.22.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12	12	1,327,795,000	12	1,460,574,500	12	1,606,631,950	12	1,767,295,145	12	1,944,024,660	60	8,106,321,255	DPMG
1	22	1.22.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	12	12	147,681,650	12	162,449,815	12	178,694,797	12	196,564,276	12	216,220,704	60	901,611,241	DPMG
1	22	1.22.01	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedia pakaian dinas bagi PNS	12	12	25,200,000	12	27,720,000	12	30,492,000	12	33,541,200	12	36,895,320	60	153,848,520	DPMG
1	22	1.22.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Tersedianya Tenaga Pegawai yang memahami Perundang-Undangan	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	1	21,961,500	1	91,576,500	DPMG
1	22	1.22.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Administrasi Keuangan	-	2	32,500,000	2	35,750,000	2	39,325,000	2	43,257,500	2	47,583,250	10	198,415,750	DPMG
1	22	1.22.01		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Terlaksananya kegiatan kelembagaan dan organisasi masyarakat serta tingkat perkembangan gampong	70	75	869,034,300	80	955,937,730	85	1,051,531,503	88	1,156,684,653	90	1,272,353,119	93	5,305,541,305	DPMG
1	22	1.22.01		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	terfasilitasi pembinaan BUMG, UMKM, TTG.	100	100	1,595,000,000	100	1,754,500,000	100	1,929,950,000	100	2,122,945,000	100	2,335,239,500	100	9,737,634,500	DPMG
1	22	1.22.01		Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya Partisipasi masayarakat dalam pembangunan gampong	75	78	9,450,000,000	82	10,395,000,000	87	11,434,500,000	90	12,577,950,000	92	15,735,745,000	96	59,593,195,000	DPMG
1	22	1.22.01		Program Peningkatan Peran Perempuan di perdesaan	Tercapainya Peran Perempuan perdesaan	65	70	1,716,510,000	73	1,888,161,000	80	2,076,977,100	83	2,284,674,810	88	2,513,142,291	90	10,479,465,201	DPMG
1	22	1.22.01		Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah desa	76	80	1,830,000,000	83	2,013,000,000	87	2,214,300,000	92	2,435,730,000	95	2,679,303,000	97	11,172,333,000	DPMG
1	**24**			**Urusan Kearsipan**															
1	**24**	**01**		**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**				**1,654,565,000**		**1,820,021,500**		**2,072,023,650**		**2,272,226,015**		**2,492,448,617**		**10,311,284,782**	
1	24	01	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12	12	505,000,000	12	555,500,000	12	611,050,000	12	672,155,000	12	739,370,500	12	3,083,075,500	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
1	24	01	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	12	12	308,000,000	12	338,800,000	12	372,680,000	12	409,948,000	12	450,942,800	12	1,880,370,800	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
1	24	01	03	Peningkatan Disiplin aparatur	Meningkatnya kualitas disiplin aparatur	12	12	23,500,000	12	25,850,000	12	28,435,000	12	31,278,500	12	34,406,350	12	143,469,850	Dinas Perpustakaan dan kearsipan

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	24	01		Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan		12	12	150,000,000	12	165,000,000	12	181,500,000	12	199,650,000	12	219,615,000	12	915,765,000	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
1	24	01		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Mendata dan menata arsip menurut klasifikasinya	12	12	210,000,000	12	231,000,000	12	254,100,000	12	279,510,000	12	307,461,000	12	1,282,071,000	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
				Program Perbaikan Sistem Administrasi				0.00		0.00		70,000,000		70,000,000		70,000,000		210,000,000	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
				Program Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi informasi	Mendata dan menata arsip menurut klasifikasinya			100,000,000		110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		610,510,000	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
				Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Mendata dan menata arsip menurut klasifikasinya			100,000,000		110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		610,510,000	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
1	24	01		Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	peningkatan minat baca dan terwujudnya perpustakaan gampong yang berkualitas			258,065,000		283,871,500		312,258,650		343,484,515		377,832,967	12	1,575,512,632	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
2				**Urusan Pilihan**															
2	**01**			**Pertanian**															
2	**01**	**3.02.01**		**Dinas Pertanian**				**22,596,098,840**		**25,806,854,800**		**26,372,540,280**		**25,689,794,308**		**30,523,773,739**		**130,989,061,967**	
3.	01	01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik	12	12	2,413,875,840	12	2,513,875,000	12	2,765,262,500	12	3,041,788,750	12	3,345,967,625	60	14,080,769,715	Dinas Pertanian
3.	01	01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Peralatan Kantor	12	12	967,300,000	12	1,064,030,000	12	1,170,433,000	12	1,287,476,300	12	1,416,223,930	60	5,905,463,230	Dinas Pertanian
3.	01	01.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas	12	12	291,000,000	12	320,100,000	12	352,110,000	12	387,321,000	12	426,053,100	60	1,776,584,100	Dinas Pertanian
3.	01	01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Adanya Peningkatan SDM Aparatur	12	12	60,050,000	12	66,055,000	12	72,660,500	12	79,926,550	12	87,919,205	60	366,611,255	Dinas Pertanian
3.	01	01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya LAKIP Dinas	12	12	13,074,000	12	14,381,400	12	15,819,540	12	17,401,494	12	19,141,643	60	79,818,077	Dinas Pertanian
3.	01	01.	15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan hasil dan mutu komoditi pertanian :			2,268,650,000		2,495,515,000		2,745,066,500		3,019,573,150		3,321,530,465		13,850,335,115	Dinas Pertanian
					Meningkatnya jumlah kelompok tani komoditas utama (Jumlah Kelompok Gula Aren)	21 Klp	21 Klp		25 Klp		25 Klp		30 Klp		30 Klp		30 Klp	-	Dinas Pertanian
3.	01	01.	16.	Program Peningkatan Hasil dan Mutu Pertanian/Perkebunan	Jumlah Produksi Padi dan Palawija :			13,000,000,000		15,100,000,000		15,050,000,000		13,400,000,000		17,100,000,000		73,650,000,000	Dinas Pertanian
					Jumlah Produksi Hasil Perkebunan :					-		-		-		-		-	Dinas Pertanian
3.	01	01.	18.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Tersedianya Sarana Pertanian :			1,705,200,000		1,875,720,000		2,063,292,000		2,269,621,200		2,496,583,320		10,410,416,520	Dinas Pertanian
3.	01	01.	19.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian :			500,000,000		842,534,500		526,787,950		469,466,745		476,413,420		2,815,202,615	Dinas Pertanian
3.	01	01.	20.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Jumlah Penurunan Angka Kematian Ternak	80	80	500,000,000	100	550,000,000	100	550,000,000	100	550,000,000	100	550,000,000	100	2,700,000,000	Dinas Pertanian
3.	01	01.	21.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Populasi Hewan Ternak :			376,949,000		414,643,900		456,108,290		501,719,119		551,891,031		2,301,311,340	Dinas Pertanian
3.	01	01.	23.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase Penggunaan Teknologi Peternakan	50	53	500,000,000	55	550,000,000	60	605,000,000	65	665,500,000	70	732,050,000	70	3,052,550,000	Dinas Pertanian
2	**03**			**Energi dan Sumberdaya Mineral**															
2	**03**	**3.02.01**		**Dinas Perhubungan**				**1,783,513,000**		**1,911,864,300**		**2,053,050,730**		**2,208,355,803**		**2,379,191,383**		**10,335,975,216**	
3	03	01	17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	Terlaksananya penerangan bagi masyarakat	603	603	500,000,000	604	500,000,000	604	500,000,000	604	500,000,000	604	500,000,000	604	2,500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Pemasangan Penerangan	100 titik	150 titik	1,283,513,000	200 titik	1,411,864,300	250 titik	1,553,050,730	300 titik	1,708,355,803	350 titik	1,879,191,383	400 titik	7,835,975,216	DINAS PERHUBUNGAN
2	**04**			**Urusan Pariwisata**															
2	**04**	**3.02.01**		**Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**				**2,793,610,000**		**2,854,060,000**		**3,139,466,000**		**3,563,800,610**		**4,000,180,671**		**16,351,117,281**	
2	04	3.02.01	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pengembangan SDM dan Profesionalisme bidang wisata	12	12	369,100,000	12	406,010,000	12	446,611,000	12	491,272,100	12	540,399,310	60	2,253,392,410	Disparpora
2	04	3.02.01	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata	12	12	235,400,000	12	258,940,000	12	284,834,000	12	423,705,410	12	546,075,951	60	1,748,955,361	Disparpora
2	04	3.02.01	17	Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan lisensi teknologi	12	12	2,189,110,000	12	2,189,110,000	12	2,408,021,000	12 Bln	2,648,823,100	12 Bln	2,913,705,410	48 Bln	12,348,769,510	Disparpora
2	**05**			**Kelautan dan Perikanan**															
2	**05**	**3.02.01**		**Dinas Kelautan dan Perikanan**				**2,701,215,000**		**2,838,255,350**		**3,122,080,885**		**3,348,608,059**		**3,683,468,864**		**15,693,628,158**	

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.	01.	01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	778,911,500	12	778,911,500	12	856,802,650	12	856,802,000	12	942,482,200	60	4,213,909,850	DKP
3.	01.	01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Prasarana Aparatur	12	12	335,653,500	12	369,218,850	12	406,140,735	12	446,754,809	12	491,430,289	60	2,049,198,183	DKP
3.	01.	01.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tertipnya Disiplin Aparatur Sipil Negara	12	12	42,700,000	12	46,970,000	12	51,667,000	12	56,833,700	12	62,517,070	60	260,687,770	DKP
3.	01.	01.	15.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Meningkatnya ekonomi masyarakat pesisir :			551,900,000		551,900,000		607,090,000		667,799,000		734,578,900		3,113,267,900	DKP
3.	01.	01.	20.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Luas lahan budidaya perikanan :			200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		1,221,020,000	DKP
3.	01.	01.	21.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap :			447,350,000		492,085,000		541,293,500		595,422,850		654,965,135		2,731,116,485	DKP
3.	01.	01.	22.	Program Pengembangan sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah pelatihan dan pertemuan pelaku perikanan :			344,700,000		379,170,000		417,087,000		458,795,700		504,675,270		2,104,427,970	DKP
2	**06**			**Perdagangan**															
2	**06**	**3.02.01**		**Dinas Koperasi, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah**				**18,052,958,000**		**15,165,219,500**		**16,681,741,450**		**17,663,200,565**		**19,279,520,622**		**86,842,640,137**	
2.	06	01.	15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah tera ulang terhadap UTTP kemetrologian	-	100	122,615,000	100	134,876,500	100	148,364,150	100	163,200,565	100	179,520,622	100	748,576,837	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN UKM
2.	06	01.	18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Jumlah pasar yang dikembangkan dan ditingkatkan	50 unit	52 unit	17,930,343,000	54 unit	15,030,343,000	56 unit	16,533,377,300	58 unit	17,500,000,000	60 unit	19,100,000,000.00	60 unit	86,094,063,300	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN UKM
2	**08**			**Ketransmigrasian**															
2	**08**	**3.02.01**		**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**				**521,475,000**		**619,962,500**		**685,484,750**		**757,533,225**		**840,286,548**		**3,424,742,023**	
2.	08	01.	15.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Peningkatan fasilitas infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan warga di unit permukiman transmigrasi	-	20	471,475,000	40	518,622,500	60	570,484,750	80	627,533,225	100	690,286,548	100	2,878,402,023	Disnakertrans
			16	Program Transmigrasi Lokal	peningkatan SDM transmigrasi	230	50	50,000,000	50	101,340,000	50	115,000,000	50	130,000,000	30	150,000,000	230	546,340,000	Disnakertrans
				TOTAL				**695,834,627,204**		**717,243,868,611**		**742,451,815,280**		**822,621,874,517**		**909,019,047,472**		**3,887,171,233,085**	

BAB VIII

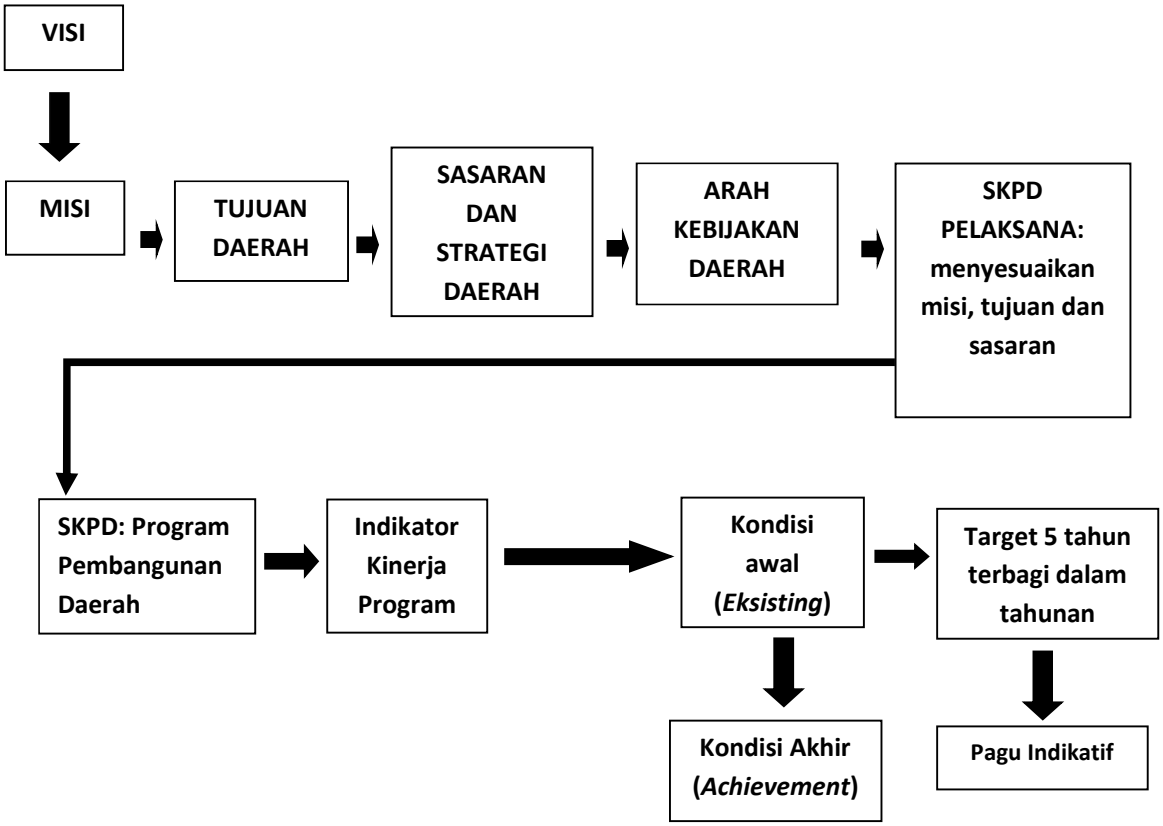
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi, baik ukuran kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja yang dicapai dalam RPJMD setiap tahunnya akan diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Indikator kinerja lebih menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan pemerintahan yang ditunjukkan dengan capaian parameter dari indikator-indikator kinerja tersebut.

8.2. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah mengacu pada sasaran daerah yang ingin dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah dari masing-masing program yang dirancang oleh SKPD Kabupaten Aceh Besar untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2017 – 2022 disajikan dalam bentuk Matrik Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2022 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Dalam rencana program dan kegiatan yang disusun mempunyai keterkaitan pola pikir dari visi dan misi daerah serta indikator daerah.



GAMBAR 8.1

ALUR PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Otonomi Daerah mempunyai tujuan yang dirangkum ke dalam tiga aspek utama, yaitu Kesejahteraan Masyarakat (KM), Daya Saing Daerah (DSD), dan Pelayanan Umum. Ketiga aspek tersebut dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dipakai sebagai dasar untuk menentukan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Target capaian untuk Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2022 disajikan pada Tabel 8.1 berikut.

Tabel 8.1

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/NDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
I	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
A	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
	1.1 Pertumbuhan Ekonomi	%	4	4.25	4.5	4.72	4.85	5.01	5.01
	1.2 Pertumbuhan PDRB per Kapita	Rp. Juta	28.435	29.288	30.167	31.072	32.004	32.964	32.964
	1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72	72,31	72,53	72,67	72,86	72,98	72,98
	1.4 Angka kemiskinan	%	15.55	15.00	13.55	12.50	11.00	9.00	9.00
	1.5 Penerimaan ZIS yang dikumpulkan	Rp. Juta	15.339	17.859	16.520	17.420	16.190	17.123	17.123
	1.6 Angka kriminalitas	Kasus	218	170	125	95	65	40	40
	1.7 Persentase Qanun yang diselesaikan	%	45.45	33.33	34.48	66.67	92	90	90
	1.8 Indeks ketahanan bencana	Indeks	0,33/rendah	0,35/rendah	0,55/sedang	0,65/sedang	0,75/sedang	0,80/tinggi	0,80/tinggi
B	Kesejahteraan Sosial								
1.	Pendidikan								
	1.1 Angka melek huruf	%	96.68	97.31	97.94	98.57	98.97	99.61	99.61
	1.1.1 Laki-laki	%	98.12	98.72	99.11	99.69	99.81	99.99	99.99
	1.1.2 Perempuan	%	95.17	95.89	96.77	97.45	98.13	99.21	99.21
	1.2 Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,93	10,14	10,21	10,32	10,44	10,49	10,49
	1.3 Angka partisipasi Sekolah	%	97,77	97,91	98,03	98,33	98,56	98,76	98,76
	1.4 Angka pendidikan yang ditamatkan								
	1.4.1 Tidak/belum tamat SD	%	14.19	13.75	13.19	12.51	11.88	10.92	10.92
	1.4.2 SD Sederajat	%	22,67	22,89	22,97	23,47	23,88	24,11	24,11
	1.4.3 SLTP Sederajat	%	23,96	23,99	24,18	24,42	24,55	24,72	24,72
	1.5 Angka partisipasi murni								
	1.5.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97.62	97.87	98.15	98.78	99.20	99.68	99.68
	1.5.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	79.44	80.56	82.12	83.87	85.21	86.05	86.05
	1.6 Syariat Islam								
	1.6.1 Penegakan dan pengamalan syariat islam	%	80	85	90	95	100	100	100
	1.6.2 Angka Melek Al-Quran	%	85	88	90	93	96	99	99
	1.6.3 Jumlah Santri/Santriwati Dayah Modern/Terpadu	Orang	3,231	3,591	3,951	4,311	4,671	5,031	5,031
	1.6.4 Jumlah Dayah Modern/Terpadu	Unit	18	20	22	24	26	28	28
	1.6.5 Pusat kesehatan dan klinik dayah	Unit	18	20	22	24	26	28	28
	1.6.6 Pusat Infromasi dan konseling dayah	Unit	18	20	22	24	26	28	28
	1.6.7 Persentase dayah yang memenuhi standarisasi dayah	%	25	30	35	37	41	45	45
	1.6.8 Cakupan Sekolah yang menerapkan kurikulum pendidikan islam	%	18	20	30	45	60	70	70
	1.6.9 Jumlah Hafiz Al-Quran	Orang	16	96	56	100	80	115	447
	1.6.10 Jumlah regulasi yang mendukung penegakan syariat islam	Qanun	2	2	3	4	5	6	6
	1.6.11 Penanganan pelanggaran syariat islam	%	91	94	96	98	100	100	100
2.	Kesehatan								
	2.1 Angka Usia harapan hidup	Tahun	69,52	69,60	69,74	69,82	69,88	69,95	69,95
	2.2 Angka kelangsungan hidup bayi	%	94.57	96.34	97.55	98.25	98.9	99.62	99.62
	2.3 Angka kematian bayi	KH	42/1000	35/1000	29/1000	21/1000	17/1000	13/1000	13/1000
	2.4 Angka kematian ibu	KH	6/100.000	5/100.000	3/100.000	3/100.000	2/100.000	1/100.000	1/100.000
	2.5 Persentase balita gizi buruk	%	1,02	0,91	0,76	0,45	0,25	0,11	0,11
	2.6 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/NDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
	2.7 Jumlah Desa yang menerapkan Program Indonesia sehat - pendekatan keluarga (PIS-PK)	Desa	-	250	300	400	500	604	604
3	Ketenagakerjaan								
	3.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	59.09	61.26	63.43	65.64	68.57	70.12	70.12
	3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,49	6.51	6.10	5.80	5.61	5.44	5.44
	3.3 Jumlah penduduk yang bekerja	Orang	164,762	186,436	191,586	196,620	201,648	206,745	206,745
C	Seni Budaya dan Olahraga								
1	Kebudayaan								
	1.1 Jumlah grup kesenian	Grup	189	189	193	193	203	203	203
	1.2 Jumlah gedung seni	Unit	1	1	1	2	2	2	2
2	Pemuda dan Olahraga								
	2.1 Jumlah klub olahraga	Unit	10	10	15	15	20	20	20
	2.2 Jumlah gedung olahraga	Unit	2	3	3	3	3	3	3
	2.3 Jumlah Atlet Binaan	Unit	193	193	195	195	197	200	200
	2.4 Atlet berprestasi pada kejuaraan olahraga tingkat regional maupun nasional	%	60	60	65	67	69	70	70
II	PELAYANAN UMUM								
A	Pelayanan Urusan Wajib								
1.	Pendidikan								
	1.1. Pendidikan dasar								
	1.1.1 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	Rasio	144	151	159	167	175	184	184
	1.1.2 Rasio guru terhadap murid	Rasio	16	18	19	19	20	21	21
	1.1.3 Jumlah Sekolah yang memiliki standar pelayanan Minimum Dikdas dan Mutu Pendidikan	Unit	345	348	349	350	351	352	352
	1.2 Pendidikan menengah								
	1.2.1 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	Rasio	212.12	222.73	233.86	245.56	257.83	270.73	284.26
	1.2.2 Rasio guru terhadap murid	Rasio	12.66	13.93	15.32	16.85	18.54	20.39	22.43
	1.3 Fasilitas Pendidikan								
	1.3.1 Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) kondisi bangunan baik	Unit	165	167	170	172	175	177	177
	1.3.2 Sekolah Luar Biasa kondisi bangunan baik	Unit	3	3	4	4	5	5	5
	1.3.3 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Unit	210	212	215	219	222	224	224
	1.3.4 Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Unit	71	74	76	78	81	84	84
	1.4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):								
	1.4.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Unit							
	1.4.2 Taman Kanak-kanak (TK)	Unit	223	245	515	567	624	686	686
	1.4.3 Kelompok Belajar	Unit	101	111	122	134	147	162	162
	1.5 Angka Putus Sekolah								
	1.5.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0.01	0	0	0	0	0	0
	1.6 Angka Kelulusan								
	1.6.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100
	1.6.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99.99	100	100	100	100	100	100
	1.6.3 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik	%	81.37	84.22	86.75	89.35	92.03	94.79	97.64
2.	Kesehatan								
	2.1 Rasio posyandu per satuan balita	/100 balita	78,70	80,34	82,45	84,67	86.23	87.78	87.78
	2.2 Rasio Puskesmas, pusling, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	/1.000 pddk	35,67	40,22	45,47	50,66	55,34	60,14	60,14
	2.3 Rasio Rumah Sakit Umum per satuan penduduk	/100.000 pddk	49.89	49.89	49.89	49.89	74.83	74.83	74.83
	2.4 Rasio dokter per satuan penduduk	/1.000 pddk	26.69	29.93	34.92	39.91	44.91	49.89	49.89
	2.5 Rasio tenaga medis dan kesehatan per satuan penduduk	/1.000 pddk	38,06	42,41	47,39	52,38	57,37	62,36	62,36

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/NDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
	2.6 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	%	75.41	78.34	81.41	85.88	88.56	90.14	90.14
	2.7 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	72.41	80	85	90	95	100	100
	2.8 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100
	2.9 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	100	100	100	100	100	100
	2.10 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100
	2.11 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	100
	2.12 Cakupan kunjungan bayi	%	58.91	69.47	77.96	86.58	93.84	99.95	99.95
3	Pekerjaan Umum								
	3.1 Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	670.69	800.55	930.41	1,060.28	1,190.14	1,279.44	1,279.44
	3.2 Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik untuk wilayah pesisir, terisolir dan tertinggal	Km	96.96	99.30	101.50	103.80	106.10	108.30	108,3 Km
	3.3 Rasio Jaringan Irigasi	Km	491 Km	567,8 Km	644,6 Km	721,4 Km	798,2 Km	875 Km	875 Km
	3.4 Persentase kawasan yang bebas dari terisolir	%	96.36	96.36	97.68	97.68	100	100	100
	3.5 Persentase rumah tangga bersanitasi	%	68	85	100	100	100	100	100
	3.6 Rasio rumah layak huni terhadap rumah tangga miskin	Rasio	2.09	3.66	4.89	6.11	7.33	8.55	8.55
	3.7 Jumlah rumah layak huni	Unit	171	200	300	400	450	500	500
	3.8 Panjang drainase/saluran pembuangan air permukiman (minimal 1,5 m)	m	13,110	20,000	25,000	30,000	35,000	40,000	40,000
4	Perumahan								
	4.1 Rumah tangga pengguna air bersih	%	69.11	76.47	85.54	93.45	97.12	99.45	99.45
	4.2 Rumah tangga pengguna listrik	%	99.83	99.95	100	100	100	100	100
	4.3 Rumah tangga ber-Sanitasi	%	68	85	100	100	100	100	100
	4.4 Luas Kawasan pemukiman kumuh	Ha	190.50	2.39	8.78	18.90	25.82	31.07	86.96
	4.5 Pengurangan area Kawasan Kumuh terhadap luas Kawasan permukiman penduduk perkotaan	%	-	2.09	8.97	16.54	22.6	27.23	27.23
	4.6 Rumah layak huni	Unit	171	200	300	400	450	500	500
5	Penataan Ruang								
	5.1 Proporsi Ruang Terbangun dan RTH	%	0.49	0.49	0.49	1.36	1.36	1.36	1.36
	5.2 Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha	36.44	36.44	36.44	100	100	100	100
6	Perencanaan Pembangunan								
	6.1 Konsistensi antar dokumen perencanaan	%	70	75	80	90	100	100	100
	6.2 Dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
	6.3 Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1
	6.4 Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Dokumen	-	1	1	1	1	1	5
	6.5 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	95.88	97.45	99.91	100	100	100	100
7	Perhubungan								
	7.1 Pertumbuhan sub sektor transportasi dan pergudangan	%	12.14	12.89	13.14	13.55	13.,82	14.01	14.01
	7.2 Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang/tahun	385,406	423,946	466,340	512,974	564,271	620,698	620,698
	7.3 Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	3,740	3,740	3,742	3,745	3,745	3,745	3,745
	7.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	10	11	11	11	12	12	12
	7.5 Jumlah Pelabuhan /Dermaga	Unit	11	11	11	11	11	11	11
	7.6 Jumlah Angkutan darat	Unit	6,680	6,700	6,730	6,755	6,770	6,800	6,800
	7.7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	60	55	55	50	45	45	45
	7.8 Pemasangan Rambu-rambu	%	20	25	35	40	50	65	65
8	Lingkungan Hidup								
	8.1 Timbunan sampah yang tertangani	%	62.5	66.83	70.37	74.19	77.14	79.49	79.49
	8.2 Rumah Tangga dengan air minum	%	75,73	80,23	85,66	90,43	95,58	99,75	99,75
	8.3 Cakupan luas pemukiman yang tertata	%	0	10	30	55	65	80	100
	8.4 Pencemaran status mutu air	%	25	25	45	50	70	75	75
	8.5 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	%	20	20	25	35	40	50	60
	8.6 Rasio tempat pembuangan sampah (TPA) per satuan penduduk	Rasio	25	25	25	50	50	50	50
	8.7 Penegakan hukum lingkungan	%	0	0	20	30	45	60	60

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/NDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
	8.8 Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	%	25	45	60	65	75	80	100
9	Pertanahan								
	9.1 Persentase luas lahan Pemkab bersertifikat	%	-	100	100	100	100	100	100
	9.2 Penyelesaian kasus lahan Pemkab	%	-	20	50	60	80	90	90
	9.3 Cakupan penyelesaian status tanah masyarakat	Desa/Gampong	-	150	260	370	490	604	604
10	Kependudukan dan Catatan Sipil								
	10.1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	60.53	63.56	66.72	68.28	69.84	71.4	71.4
	10.2 Rasio bayi berakte kelahiran	%	78.96	80.02	85.00	90.20	95.70	98.00	98.00
	10.3 Rasio pasangan berakte nikah	%	60	62	63	64	65	66	66
	10.4 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	%	99.74	99.87	99.94	99.97	99.98	100	100
	10.5 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	100	100	100	100	100	100	100
	10.6 Cakupan kawasan yang menjangkau pelayanan publik (KTP/Perizinan)	%	26.09	26.09	26.09	26.09	30.43	30.43	30.43
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	11.1 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	57.6	60	70	80	90	100	100
	11.2 Partisipasi perempuan dalam pembangunan	%	-	50	60	70	80	90	90
	11.3 Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	2.8	4	10	20	30	40	40
	11.3 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	80	80	90	90	90	90	90
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
	12.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga	Orang	4	4	3	3	3	3	3
	12.2 Rasio akseptor KB	%	82	85	90	90	90	90	90
	12.3 Cakupan peserta KB aktif	Orang	34,596	38,056	41,861	46,047	50,652	55,717	55,717
	12.4 Proporsi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	40.17	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
13	Sosial								
	13.1 Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial								
	13.1.1 PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	60	65	70	70	80	85	85
	13.1.2 PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE/kelompok dan perorangan sosial ekonomi sejenis lainnya	%	60	65	70	70	80	85	85
	13.2 Penyediaan sarana dan prasana bidang sosial								
	13.2.1 Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	70	880	85	85	90	95	95
	13.2.2 Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	40	45	45	50	60	70	70
	13.3 Penanggulangan korban bencana								
	13.3.1 Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	85	85	85	90	90	90	90
	13.3.2 Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	%	80	80	80	80	85	85	85
	13.4 Penyandang disabilitas yang menerima jaminan sosial	orang/tahun	97	100	120	150	200	250	250
14	Ketenagakerjaan								
	14.1 Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	59,17	60.26	63.43	65.64	68.57	70.12	70.12
	14.2 Tingkat pengangguran terbuka	%	6.59	5.78	4.37	3.19	2.56	1.21	1.21
	14.3 Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan	Orang	57	77	104	140	189	256	256
	14.4 Peningkatan Tenaga Kerja yang berkerja di sektor Pertanian	Orang	36,087	39,696	43,665	48,032	52,835	58,118	63,930
15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
	15.1 Populasi Koperasi	Unit	643	643	643	643	643	643	643
	15.1.1 Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD)	Unit	33	33	33	33	33	33	33
	15.1.2 Jumlah Koperasi Non KUD	Unit	610	610	610	610	610	610	610
	15.2 Jumlah Penyebaran BPR/LKM	Unit	13	13	13	13	13	13	13

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/NDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
	15.3 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil industri	Unit	2,397	2,397	2,397	2,397	2,397	2,397	2,397
	15.3.1 Jumlah Unit IKM Formal :								
	- IKM Pangan	Unit	39	39	39	39	39	39	39
	- IKM sandang	Unit	2	2	2	2	2	2	2
	- IKM Kimia dan Bahan banggunan	Unit	16	16	16	16	16	16	16
	- IKM Logam dan Elektronika	Unit	7	7	7	7	7	7	7
	- IKM Kerajinan	Unit	4	4	4	4	4	4	4
	15.3.2 Jumlah Unit IKM Non Formal :								
	- IKM Pangan	Unit	1352	1352	1352	1352	1352	1352	1352
	- IKM sandang	Unit	155	155	155	155	155	155	155
	- IKM Kimia dan Bahan banggunan	Unit	388	388	388	388	388	388	388
	- IKM Logam dan Elektronika	Unit	229	229	229	229	229	229	229
	- IKM Kerajinan	Unit	205	205	205	205	205	205	205
16	Penanaman Modal								
	16.1 Jumlah nilai investasi pada industri kecil pada sektor formal dan informal	Rp. Milyar	155	178	205	236	271	312	312
17	Kebudayaan								
	17.1 Proporsi Penyelenggaraan festival seni dan budaya	%	77	80.85	84.89	89.14	93.59	98.27	100.24
	17.2 Proporsi Sarana dan Prasarana penyelenggaraan seni dan budaya	%	68	71.4	74.97	78.72	82.65	86.79	88.52
	17.3 Proporsi pemugaran situs sejarah dalam kondisi baik	%	12.01	12,70	13.34	14.07	14,70	15.44	16.21
	17.4 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	50	60	65	70	75	80	80
	17.5 Cakupan pengembangan budaya dan adat istiadat Aceh	%	80	83	88	93	96	100	100
18	Kepemudaan dan Olahraga								
	18.1 Angka Partisipasi Organisasi Masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100
	18.2 Cakupan organisasi kepemudaan yang aktif	%	80	80	80	85	85	85	85
	18.3 Cakupan Lapangan olahraga dalam kondisi baik	%	65	65	70	70	75	75	75
	18.4 Capaian pembinaan olahraga	%	80	80	85	90	95	100	100
19	Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri								
	19.1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	orang/tahun	2,700	2,750	2,800	2,870	2,900	3,000	3,000
	19.2 Kegiatan pembinaan politik daerah	parpol	11	11	15	15	15	15	15
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
	20.1 Nilai LAKIP	nilai	47,86/CC	51,60/CC	55,00/CC	61,00/B	63,00/B	63,25/B	64,00/B
	20.2 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	skor	2.755	2.879	2,900	2,910	2,920	2,930	2,940
	20.3 Cakupan PAD terhadap pendapatan daerah	%	8,12	8,18	8,36	8,43	8,51	8,55	8,55
	20.4 Proporsi ASN yang mengikuti pendidikan/pelatihan	%	19.3	22.8	22.8	26.8	30.8	34.8	34.8
	20.5 Proporsi OPD yang telah menerapkan inovasi pelayanan publik	%	12.07	13.79	15.52	17.24	18.97	20.69	20.69
	20.6 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	nilai	3	8	10	12	14	16	16
	20.7 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	orang	74	74	74	74	74	74	74
	20.8 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	nilai	1	1	1	1	1	1	1
	20.9 Proporsi penanganan penyakit masyarakat	%	70	80	85	90	92	95	95
	20.10 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah	Paket	1	1	1	1	1	1	1
	20.11 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	90	90	95	95	98	100	100
	20.12 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	orang	25	30	35	40	45	50	50
	20.13 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15 - 20	15	15	15	15	15	15
	20.14 Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	40	45	55	65	70	80	80
	20.15 Sistem Informasi Manajemen Pemda	Paket	1	1	1	1	1	1	1
21	Ketahanan Pangan								
	21.1 Pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	Nilai	77.6	79.8	82.2	84.7	87.2	89.8	92.5
	21.2 Pola pangan harapan (PPH) Konsumsi	Nilai	76.8	79.4	81.5	83.6	85.8	88.0	90.3

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/NDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
	21.4 Daerah Rawan Pangan	Desa	32	25	20	15	10	0	0
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	22.1 Indeks Desa Membangun	Nilai	-	0.62	0.64	0.66	0.68	0.71	0.71
	22.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	5	6	6	7	7	8	8
	22.3 Jumlah LSM	Lembaga	13	13	13	13	13	13	13
	22.4 Cakupan Pembinaan dan penertiban administrasi desa/gampong	%	80	83	87	90	92	95	95
	22.5 PKK aktif	Unit	604	604	604	604	604	604	604
	22.6 Posyandu aktif	Unit	655	658	661	664	667	670	670
	22.8 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	90	91	92	93	94	95	95
23	Statistik								
	23.1 Buku "Kabupaten dalam angka"	Dokumen	1	1	1	1	1	1	5
	23.2 Buku "PDRB Kabupaten"	Dokumen	1	1	1	1	1	1	5
24	Kearsipan								
	24.1 Persentase daerah yang memiliki perpustakaan	%	70	70	75	80	80	85	90
	24.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang/tahun	60	60	60	60	60	60	60
	24.3 Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam bentuk informatika	bingkai/tahun	40	40	40	45	45	45	45
	24.4 Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	unit/tahun	-	10	10	10	10	10	50
25	Komunikasi dan Informatika								
	25.1 Persentase kawasan yang memiliki fasilitas telekomunikasi	%	73,91	78,26	82,61	86,95	91,30	95,65	95,65
	25.2 Jumlah jaringan komunikasi	Unit/stasion	280	290	300	310	320	320	320
	25.3 Jumlah surat kabar nasional/lokal	Media	5	8	10	12	12	12	12
	25.4 Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Media	27	29	31	33	33	33	33
	25.5 Pameran/expo	Total/Tahun	1	1	1	2	2	2	9
26	Perpustakaan								
	26.1 Jumlah perpustakaan	Unit	230	230	240	250	255	255	255
	26.2 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang/tahun	7200	7800	8000	8200	8400	9000	48600
	26.3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	42,000	42,000	43,000	45,000	47,000	50,000	50,000
	26.4 Pengembangan minat dan budaya baca	sekolah/tahun	50	55	60	70	70	80	385
	26.5 Perpustakaan keliling	sekolah/tahun	20	22	24	26	28	30	150
	26.6 Pameran buku keliling	Gampong/tahun	14	17	20	23	26	30	130
27	Pembinaan dan Pengawasan								
	27.1 Perolehan Opini/Predikat terhadap Audit Laporan Keuangan oleh BPK	WTP/tahun anggaran	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	27.2 Tingkat kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	level	2	2	3	3	3	3	3
	27.3 Pengawasan Internal Secara Berkala	Obrik	250	300	360	360	360	360	360
	27.4 Penanganan Kasus pengaduan Masyarakat	kali	7	10	15	15	15	15	77
	27.5 Review Lapangan Keuangan Pemerintah Daerah	Kali	1	1	1	1	1	1	6
	27.6 Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	kali	6	6	6	6	6	6	36
	27.11 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa	Org/Thn	25	30	30	30	30	30	175
	27.12 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Org/Thn	5	10	10	10	10	10	55
	27.13 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Kali	2	2	2	2	2	2	2
28	Kebencanaan								
	28.1 Proporsi Bantuan Masa panik untuk masyararakat pasca musibah bencana	%	70	75	80	85	85	90	90
	28.2 Jumlah Sosiialisasi PRB	Keg./Tahun	4	10	10	10	10	10	10
	28.3 Jumlah sarana & prasana evakuasi	Unit	4	4	4	4	4	4	5
	28.4 Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	Unit	8	3	3	2	2	2	20
	28.5 Pemetaan Daerah Rawan Bencana	Kecamatan	20	20	20	20	20	23	23
B	Layanan Urusan Pilihan								
1	Pertanian								
	1.1 Produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya pertahun	Ton	11,673.67	270,391.71	270,394.73	270,397.73	270,400.77	270,403.85	270,403.85
	1.1.1 Padi	Ton	258.97	258,975.15	258,976.15	258,977.15	258,978.15	258,979.15	258,979.15
	1.1.2 Jagung	Ton	4,164.70	4,165.54	4,166.54	4,167.54	4,168.54	4,169.54	4,169.54

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/NDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
	1.1.3 Kedele	Ton	834.00	834.70	835.40	835.80	836.60	837.20	837.20
	1.1.4 Ubi kayu	Ton	6,416.00	6,416.32	6,416.64	6,417.24	6,417.48	6,417.96	6,417.96
	1.2 Produksi Hasil Perkebunan per Tahun	Ton	9,820.00	9,834.00	9,854.00	9,897.00	9,923.00	9,949.00	9,949.00
	1.3 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	23.95	24.01	24.25	24.50	24.75	25.01	25.01
	1.4 Kontribusi sub sektor pertanian pangan terhadap PDRB	%	20.18	20.51	20.98	21.15	21.45	21.81	21.81
	1.5 Perluasan areal luas baku lahan sawah	Ha	31,829.00	32,147.29	32,468.76	32,793.45	33,121.39	33,452.60	33,452.60
	1.6 Produksi Daging per tahun	Kg	8,409,316.00	8,605,603.87	8,819,266.48	9,056,906.48	9,328,365.88	9,648,343.70	9,648,343.70
	- Sapi	Kg	1,762,166.00	1,815,030.98	1,869,481.91	1,925,566.37	1,983,333.36	2,042,833.36	2,042,833.36
	- Kerbau	Kg	773,792.00	797,005.76	820,915.93	845,543.41	870,909.71	897,037.00	897,037.00
	- Kambing	Kg	521,040.00	536,671.20	552,771.34	569,354.48	586,435.11	604,028.16	604,028.16
	- Domba	Kg	51,761.00	77,641.50	116,462.25	174,693.38	262,040.06	393,060.09	393,060.09
	- Ayam Buras	Kg	156,825.00	164,666.25	172,899.56	181,544.54	190,621.77	200,152.86	200,152.86
	- Ayam Ras Petelur	kg	970,943.00	1,000,071.29	1,030,073.43	1,060,975.63	1,092,804.90	1,125,589.05	1,125,589.05
	- Ayam Ras Pedaging	kg	2,276,375.00	2,299,138.75	2,322,130.14	2,345,351.44	2,368,804.95	2,392,493.00	2,392,493.00
	- Itik	Kg	1,896,414.00	1,915,378.14	1,934,531.92	1,953,877.24	1,973,416.01	1,993,150.17	1,993,150.17
	1.7 Produksi hasil peternakan per tahun								
	- Ayam Buras	kg	193,716.00	199,527.48	205,513.30	211,678.70	218,029.06	224,569.94	224,569.94
	- Ayam Ras Petelur	kg	938,533.00	966,688.99	995,689.66	1,025,560.35	1,056,327.16	1,088,016.97	1,088,016.97
	- Itik	kg	1,475,311.00	1,490,064.11	1,504,964.75	1,520,014.40	1,535,214.54	1,550,566.69	1,550,566.69
	- Kulit Sapi	Lembar	24,712	44,482	45,816	47,191	48,606	50,064	50,064.43
	- Kulit Kerbau	Lembar	10,295	18,531	19,087	19,660	20,249	20,857	20,856.80
	- Kulit Kambing	Lembar	42,644	44,776	46,119	47,503	48,928	50,396	50,396.01
	- Kulit Domba	Lembar	14,804	26,647	27,447	28,270	29,118	29,992	29,991.66
	1.8 Populasi ternak per tahun	ekor	23,706,412	24,891,733	26,136,319	27,443,135	28,815,292	30,256,057	30,256,056.55
	- Sapi	ekor	108,088	113,492	119,167	125,125	131,382	137,951	137,951
	- Kerbau	ekor	36,756	38,594	40,523	42,550	44,677	46,911	46,911
	- Kuda	ekor	11	12	12	13	13	14	14
	- Kambing	ekor	83,338	87,505	91,880	96,474	101,298	106,363	106,363
	- Domba	ekor	8,784	9,223	9,684	10,169	10,677	11,211	11,211
	- Ayam Ras	ekor	11,802,380	12,392,499	13,012,124	13,662,730	14,345,867	15,063,160	15,063,160
	- Ayam Buras	ekor	8,713,120	9,148,776	9,606,215	10,086,526	10,590,852	11,120,394	11,120,394
	- Itik	ekor	2,953,935	3,101,632	3,256,713	3,419,549	3,590,526	3,770,053	3,770,053
2	Pariwisata								
	4.1 Pertumbuhan sub sektor pariwisata	%	9.29	9.32	9.46	9.52	9.64	9.77	9.77
	4.2 Kunjungan wisata	Orang	606,181	700,000	750,000	800,000	850,000	900,000	4,000,000
	4.3 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
3	Kelautan dan Perikanan								
	5.1 Pertumbuhan sub sektor perikanan	%	2.52	2.98	3.55	3.82	3.91	4.02	4.02
	5.2 Produksi perikanan budidaya	Ton	768,96	807.41	847.78	890.17	934.68	981.41	981.41
	5.3 Produksi Perikanan Laut	Ton	16,645	17,477	18,351	19,269	20,232	21,244	21.244
	5.4 Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	%	3.61	3.63	3.66	3.69	3.69	3.69	3.69
4	Perdagangan								
	6.1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	17.47	17.54	17.62	17.81	17.95	17.99	17.99
5	Perindustrian								
	7.1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	2.38	2.43	2.47	2.50	2.55	2.59	2.59
	7.2 Pertumbuhan industri kecil dan menengah	%	4.18	4.50	4.92	5.36	5.78	5.95	5.95
III	DAYA SAING DAERAH								
A	Kemampuan Ekonomi Daerah								

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/NDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
	1.1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp.	750,000	975,000	1,267,500	1,647,750	2,142,075	2,784,698	2,784,698
	1.2 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Rp.	323,480	420,524	546,681	710,686	923,891	1,201,059	1,201,059
	1.3 Produktivitas total daerah	Rp. Juta	10,960,104.30	11,288,907	11,627,575	11,976,402	12,335,694	12,705,765	12,705,765
	1.4 Pertumbuhan ekonomi masyarakat persisir	%	3.89	3.98	4.21	4.53	4.77	4.92	4.92
2	Pertanian								
	2.1 Pertumbuhan sub sektor pertanian, peternakan dan perikanan	%	5.45	5.51	5.65	5.70	5.82	5.89	5.89
	2.2 Nilai Tukar Petani (NTP)	%	96,26	98,00	101,00	103,00	105,00	107,00	107,00
	2.3 Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	97,86	98.5	99,75	101,25	103,00	106,00	106,00
B	Fasilitas Wilayah/Infrastuktur								
1	Perhubungan								
	1.1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/unit	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.19	0.19
	1.2 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	orang/tahun	968,038	1,016,440	1,067,262	1,120,625	1,176,656	1,235,489	1,235,489
2	Penataan Ruang								
	2.1 Ketaatan terhadap RTRW	%	5	5	10	10	15	15	15
	2.2 Luas wilayah produktif	%	64.24	64.24	64.24	64.24	64.24	64.24	64.24
	2.3 Luas wilayah industri	%	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	2.4 Luas wilayah kebanjiran	%	3.94	3.94	3.94	3.94	3.94	3.94	3.94
	2.5 Luas wilayah perkotaan	%	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54
3	Lingkungan Hidup								
	4.1 Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	orang	26,888	27,000	28,000	29,000	29,750	30,540	30,540
4	Komunikas dan Informatika								
	5.1 Ketersediaan daya listrik	VA	62.638.925	62.638.925	62.638.925	62.638.925	62.638.925	62.638.925	62.638.925
	5.4 Jumlah jaringan komunikasi	Unit/stasion	280	290	300	310	320	320	320
	5.5 Jumlah surat kabar nasional/lokal	Media	1	2	3	4	5	6	7
	5.6 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	%	10	25	30	55	65	70	70
	5.7 Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Media	27	29	31	33	33	33	33

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2022 menekankan pentingnya penguatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang hasilnya langsung berdampak nyata dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Melalui penyelenggaraan pemerintahan yang amanah berazaskan nilai-nilai agama diharapkan akan terwujud masyarakat Aceh Besar yang maju, sejahtera dan bermartabat dalam bingkai syariat islam.

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, harapan dimaksud diimplementasikan dalam Rencana Kerja Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar sesuai Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Aceh Besar 2017 – 2022 yang telah dijabarkan ke dalam sejumlah strategi dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

Beberapa kebijakan yang bersifat sangat spesifik dan rekening program/kegiatan tidak tersedia dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka program/kegiatan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Besar. Kebijakan spesifik dimaksud menitikberatkan pada program/kegiatan yang mendukung kearifan lokal berupa keistimewaan Aceh dan penyelenggaraan syariat islam dalam seluruh strata kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk penerapan nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Aceh Besar 2017 – 2022 ini akan dijadikan pedoman dan landasan umum bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) OPD guna menjabarkan secara operasional misi-misi yang telah ada ke dalam program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

RPJMD ini telah disempurnakan melalui Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD), sebagai forum tertinggi dari proses dan tahapan penyusunan RPJMD.

Akhirnya, kami selaku Bupati Aceh Besar mewakili masyarakat Kabupaten Aceh Besar menggantungkan harapan yang sangat tinggi terhadap dukungan dan komitmen semua pihak agar cita-cita mewujudkan masyarakat Aceh Besar yang maju, sejahtera dan bermartabat dalam syariat islam dapat menjadi kenyataan.

BUPATI ACEH BESAR

Dto.

Ir. MAWARDI ALI